



P U T U S A N

NOMOR : 5 /PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ir. DUDY JOCOM, M.Si;
Tempat lahir : Banggai Sulawesi Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 26 April 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestas;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Dalam Negeri.
Tempat tinggal : - Jalan Merbabu G/16 Komplek Kodau V RT.001
RW.002 Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Jati Asih, Bekasi Jawa Barat .
- Perum Mediterania Jalan Dr. Ratna Blok CB No.8 Jati Bening Bekasi.
Pendidikan : S-2.

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018.
3. Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk perpanjangan penahanan sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018.
4. Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk perpanjangan penahanan tahap kedua sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 ;

Hal 1 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 ;
7. Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk perpanjangan penahanan sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 ;
8. Perpanjangan Ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan 29 Oktober 2018 ;
9. Perpanjangan Ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan 28 Nopember 2018 ;
10. Penahanan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 19 Nopember 2018 s/d tanggal 18 Desember 2018;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 19 Desember 2018 s/d tanggal 16 Pebruari 2019;

Terdakwa didampingi oleh tim Penasihat Hukum yang terdiri dari :

1. Irwanto Efendi, S.H., M.H.,
2. Anius Dohona, S.H.,
3. Ach Teguh Wahyudin, S.H.,

Para Advocates & Legal Consultant Anius Dohona.SH. dan Rekan beralamat dan berkedudukan Hukum di Jalan Borobudur Timur X No.ID Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Nopember 2018 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 53/PID.SUS/TPK/2018/ PN Jkt.Pst tanggal 14 Nopember 2018 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **Ir. DUDY JOCOM, M.si.** bersama-sama dengan BUDI RACHMAT KURNIAWAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Desember 2010 sampai

Hal 2 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia Jalan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum** telah turut serta melakukan pengaturan dalam pelaksanaan pelelangan, penerimaan pekerjaan dan pembayaran atas proyek pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bukittinggi Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia Tahun Anggaran (TA) 2011 dengan cara mengarahkan pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam pelelangan pengadaan barang dan jasa sebelum diputuskan pemenang lelang, tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menambahkan persyaratan yang diskriminatif untuk menggagalkan peserta lelang tertentu, melakukan pengaturan PT Utama Karya (Persero) sebagai pemenang lelang proyek pembangunan Gedung Kampus IPDN Bukittinggi Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat pada Kemendagri RI TA 2011, melakukan pembayaran seluruhnya kepada pelaksana pekerjaan walaupun pekerjaan belum selesai, meminta *komitmen fee* (*arranger fee*) untuk diberikan kepada pihak-pihak terkait pelelangan tersebut diantaranya untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp4.200.000.000,00 (*empat miliar dua ratus juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, memperkaya orang lain yaitu HENDRA sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*), BUDI RACHMAT KURNIAWAN sebesar Rp571.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah*), MOHAMMAD RIZAL sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), BAMBANG MUSTAQIM sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan SRI KANDIYATI sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut serta memperkaya korporasi yaitu PT Utama Karya (Persero) seluruhnya sebesar Rp22.085.730.069,10 (*dua puluh dua miliar delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam puluh sembilan rupiah dan sepuluh sen*) yang berasal dari pengalihan pekerjaan utama (mensubkontrakan) kepada pihak ketiga sebesar

Hal 3 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.810.220.824,10 (*tiga belas miliar delapan ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah dan sepuluh sen*) dan berasal dari pencairan subkontrak fiktif sebesar Rp8.275.509.245,00 (*delapan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*), CV Prima Karya sebesar Rp3.343.553.992,00 (*tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*), CV Restu Kreasi Mandiri sebesar Rp265.711.121,00 (*dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus dua puluh satu rupiah*) dan PT Yulian Berkah Abadi sebesar Rp79.403.246,00 (*tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah*) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp34.804.241.221,96 (*tiga puluh empat miliar delapan ratus empat juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah dan sembilan puluh enam*) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan Dan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Pada Kemendagri Republik Indonesia TA 2011 Nomor : 11/LHP/XXI/02/2018 Tanggal 6 Februari 2018, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa Ir. DUDY JOCOM, M.si. diangkat sebagai Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset (AKPA) pada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 811.212.2-707 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010, yang juga diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Sekjen Kemendagri TA 2011 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 900-1097 tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 dan diangkat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Sekjen Kemendagri TA 2011 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 900-1127 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010.
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009 ditetapkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 Tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan dimana Kemendagri diharuskan membentuk Kampus IPDN di daerah untuk melaksanakan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan. Untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Agustus 2009 mengeluarkan Peraturan

Hal 4 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tanggal 8 September 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk membentuk kampus IPDN di daerah yang berlokasi di Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tanggal 8 September 2009 yang mengamanatkan pembentukan kampus IPDN di daerah Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara tersebut. Kemendagri melaksanakan kegiatan proyek pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN secara bertahap pada TA 2010, 2011 dan 2012 yang meliputi pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN di 4 (*empat*) regional yaitu di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.
- Bahwa untuk proyek pembangunan kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat pada TA 2010 dimenangkan dan dilaksanakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan nilai pekerjaan sebesar Rp22.558.550.000,00 (*dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) yang meliputi pekerjaan persiapan, struktur Gedung Asrama Putri Tk II, struktur Asrama Putra Tk. IIA, IIB, III, instalasi Mekanikal (3 blok) dan infrastruktur.
- Selanjutnya untuk TA 2011, Kemendagri mengadakan kembali proyek lanjutan pembangunan gedung kampus IPDN TA 2011 dengan pagu anggaran sebesar Rp519.482.000.000,00 (*lima ratus sembilan belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah*) sebagaimana Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2011 No. 2863/010-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 yang didalamnya terdapat pagu anggaran untuk pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat TA 2011 sebesar Rp127.893.700.000,00 (*seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*) sebagaimana Rencana Kerja Anggaran (RKA K/L) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011.
- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan proyek pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat TA 2011, DIAH ANGGRAENI selaku Sekjen Kemendagri membentuk Panitia Pengadaan Barang Jasa terkait pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi di Kemendagri TA 2011/ sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 027-129 tahun 2011 tanggal 22 Februari 2011 dengan susunan MOHAMMAD NOVAL selaku Ketua, SRI

Hal 5 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDIYATI selaku Sekretaris serta URKANUS SIHOMBING, PURWANTO, DONY AMBADI, ITRIAH AFSOLIN dan TRI ADJI BAWONO masing-masing sebagai anggota.

- Bahwa selain Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, DIAH ANGGRAENI membentuk juga Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa satuan kerja Sekjen Kemendagri terkait pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi TA 2011 sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 027-130 tahun 2011 pada tanggal 22 Februari 2011 dengan susunan SUGENG GUNAWAN selaku Ketua, EKO SANTOSO selaku Sekretaris dan MAHENDRA BASUKI, KASDAN dan ADE SAEPUL ABIDIN masing-masing sebagai anggota.
- Kemudian pada tanggal 2 Maret 2011, DIAH ANGGRAENI menunjuk MOHAMMAD RIZAL sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Bidang Keuangan pada Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri TA 2011 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900-147 Tahun 2011.
- Masih pada bulan Maret 2011 sebelum dilakukan pengumuman lelang, bertempat di ruangan staff teknik Lantai II Divisi Gedung PT Utama Karya (Persero) dilakukan pertemuan diantara bagian Pemasaran Divisi Gedung PT Utama Karya (Persero). Pada saat itu BAMBANG MUSTAQIM selaku Senior Manager (SM) Pemasaran Divisi Gedung PT Utama Karya (Persero) menyampaikan kepada ANTON dan WIDI SADMOKO bahwasanya Terdakwa dan BAMBANG MUSTAQIM telah berkomunikasi untuk mengatur pemenangan proyek pembangunan kampus IPDN di Kemendagri TA 2011 dimana PT Utama Karya (Persero) mendapatkan proyek pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat TA 2011. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 huruf e dan huruf g Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Selanjutnya Terdakwa selaku PPK membuat Nota Dinas Nomor 028/712/PAKPA/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang memerintahkan MOHAMMAD NOVAL selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Setjen Bidang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi untuk melakukan proses pelelangan pekerjaan pembangunan konstruksi fisik tanpa menunggu adanya pemenang lelang konsultan perencana dan konsultan Manajemen Konstruksi (MK), dengan nilai pagu diantaranya untuk proyek pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat TA 2011 sebesar Rp127.893.700.000,00 (*seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*) dengan persyaratan kualifikasi memiliki

Hal 6 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat sistem manajemen mutu (ISO:9001), sertifikat sistem manajemen lingkungan (ISO:14001), sertifikat sistem K3 (OHSAS:18001) dan sertifikat sistem Manajemen K3 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, nota dinas tersebut tanpa melampirkan Bill of Quantity (BoQ), Gambar, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta syarat tambahan yang diskriminatif untuk memenangkan PT Utama Karya (Persero) yaitu memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU) *Grade 7*.

- Atas perintah dari Terdakwa tersebut, MOHAMMAD NOVAL mengumumkan pelelangan umum Prakualifikasi atas proyek pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat TA 2011 sebagaimana surat nomor 98/Peng/P3/KK/KDN/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 di surat kabar Harian Tempo dan surat nomor 77/Peng/P3/KK/KDN/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 di portal pengumuman ruang panitia pengadaan dengan jadwal untuk pendaftaran serta pengambilan dokumen Prakualifikasi tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 9 Juni 2011, sedangkan pemasukan dokumen Prakualifikasi tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan tanggal 14 Juni 2011. Pengumuman pelelangan tersebut menggunakan Pagu Anggaran sebesar Rp127.893.700.000,00 (*seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*) tanpa adanya HPS serta menambahkan persyaratan kualifikasi memiliki SBU *Grade 7*.

PerbuatanTerdakwa yang tidak menyusun HPS dan menambahkan persyaratan yang diskriminatif bertentangan dengan Pasal 6 huruf c, Pasal 11 Ayat (1) huruf a butir 2), Pasal 56 Ayat (10), Lampiran III A.3.a.2) a) dan Lampiran III.B.3.a.3).d) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah.

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2011, perusahaan yang mendaftar dan telah mengembalikan dokumen prakualifikasi sebanyak 6 (*enam*) perusahaan yaitu PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero). Kemudian panitia pengadaan melakukan evaluasi prakualifikasi administrasi perusahaan dan menyatakan 5 (*lima*) perusahaan dinyatakan lulus dan ditetapkan masuk dalam daftar pendek untuk dapat mengikuti pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat TA 2011 yaitu PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero) sebagaimana Penetapan Hasil Prakualifikasi nomor 121/Pen-PQ/KK/KDN/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011.

Hal 7 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih pada bulan Juni 2011 setelah penetapan hasil prakualifikasi tersebut. Untuk menindaklanjuti kesepakatan antara Terdakwa selaku PPK dengan BAMBANG MUSTAQIM selaku SM Pemasaran Divisi Gedung PT Utama Karya (Persero), bertempat di hotel Ambhara Jakarta dilakukan pertemuan antara BAMBANG MUSTAQIM, ARI ARYADI dari PT Utama Karya (Persero) dengan ARI PRIJO WIDAGDO dari PT Adhi Karya (Persero) dan DANNY NOEGROHO dari PT Waskita Karya (Persero), kemudian disepakati bahwa yang akan mengerjakan proyek pembangunan kampus IPDN Bukit Tinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat TA 2011 adalah PT Utama Karya (Persero) sehingga dokumen penawaran untuk peserta lelang lainnya dibuatkan oleh PT Utama Karya (Persero). Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 huruf e dan huruf g Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 setelah ditetapkannya hasil prakualifikasi, Panitia Pengadaan mengundang perusahaan yang lulus untuk pelelangan umum dan mengikuti penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) dengan jadwal tanggal 25 Juli 2011 sebagaimana surat nomor 154/Und/Pra/KK/KDN/VI/2011. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2011 bertempat di Kemendagri dilaksanakan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) mengenai administrasi dan teknis pekerjaan yang dihadiri diantaranya SRI KANDIYATI selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa, IMAN selaku perwakilan dari PT Wijaya Karya (Persero), NURDIN selaku perwakilan dari PT Pembangunan Perumahan (Persero), selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2011 dilakukan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) lapangan di lokasi proyek pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat TA 2011 yang dihadiri diantaranya TRI ADJI BAWONO selaku perwakilan panitia pengadaan barang/jasa, KHOIRUN NASIRIN selaku perwakilan PT Utama Karya (Persero), EKA N selaku perwakilan PT Waskita Karya (Persero).
- Bahwa setelah dilakukan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) tersebut, pada tanggal 2 Agustus 2011 dilakukan pemasukan dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis) oleh 4 (*empat*) perusahaan yaitu PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) kemudian panitia pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran Tahap I dengan melakukan evaluasi administrasi dan teknis.
- Selanjutnya atas sepengetahuan Terdakwa, Panitia Pengadaan memanipulasi sistem Penilaian Evaluasi Administrasi dan teknis untuk memenangkan PT

Hal 8 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutama Karya (Persero) diantaranya dengan cara tidak melakukan penilaian atas dua tenaga inti PT Wijaya Karya (Persero) sehingga panitia pengadaan pada tanggal 11 Agustus 2011 melalui surat nomor 181/Peng/P3/KK/KDN/VIII/2011 mengumumkan peringkat teknis yaitu PT Hutama Karya (Persero) sebagai peringkat I, PT Wijaya Karya (Persero) sebagai peringkat II, PT Waskita Karya (Persero) sebagai peringkat III sedangkan PT Pembangunan Perumahan (Persero) tidak lulus.

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 huruf c, e dan huruf g, Lampiran II.B.2.m.2).b) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah.

- Bahwa setelah dilakukan pengumuman kelulusan dokumen penawaran Tahap I kemudian pada tanggal 11 Agustus 2011 Panitia Pengadaan mengundang perusahaan yang lulus yaitu PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) untuk memasukkan dokumen penawaran Tahap II (Harga) dengan Jadwal tanggal 12 Agustus 2011 sebagaimana surat nomor 175/Und/KK/KDN/VIII/2011.
- Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2011 sebagaimana berita acara hasil evaluasi penawaran harga nomor : 177/BA/EV/KK/KDN/VIII/2011 dilakukan evaluasi penawaran harga dengan hasil yaitu :
- PT Hutama Karya (Persero) dengan harga penawaran Rp125.686.000.000,00 (*seratus dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta rupiah*) sebagai peringkat I;
- PT Waskita Karya (Persero) dengan harga penawaran Rp126.531.000.000,00 (*seratus dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh satu juta rupiah*) sebagai peringkat II;
- PT Wijaya Karya (Persero) dengan harga penawaran Rp126.956.000.000,00 (*seratus dua puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah*) sebagai peringkat III;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2018 sebagaimana Berita Acara Hasil Lelang nomor 180/BA/EV/KK/KDN/VIII/2011, Panitia Pengadaan mengusulkan calon Pemenang yaitu PT Hutama Karya (Persero) dengan harga penawaran Rp125.686.000.000,00 (*seratus dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta rupiah*) kepada GAMAWAN FAUZI selaku Menteri Dalam Negeri yang juga selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Atas usulan tersebut, GAMAWAN FAUZI selaku Menteri Dalam Negeri yang juga selaku PA mengeluarkan surat nomor 011/3438/SJ tanggal 13 September 2011 perihal persetujuan penetapan pemenang pelelangan pekerjaan pembangunan

Hal 9 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat kepada PT Utama Karya (Persero). Selanjutnya oleh MOHAMMAD NOVAL selaku Ketua Panitia Pengadaan melalui surat nomor : 229/Peng/P3/KK/KDN/IX/2011 tanggal 13 September 2011 diumumkan pemenang lelang atas pengadaan jasa kontruksi proyek pembangunan gedung kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam TA 2011 yaitu PT Utama Karya (Persero) dengan harga penawaran sebesar Rp125.686.000.000,00 (*seratus dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta rupiah*).

- Pada tanggal 23 September 2011 setelah ditetapkannya PT Utama Karya (Persero) sebagai pemenang, Terdakwa selaku PPK dan BUDI RACHMAT KURNIAWAN selaku General Manager (GM) Divisi Gedung PT Utama Karya (Persero) menandatangani kontrak nomor : 011/1075/PAKPA/IX/2011 tanggal 23 September 2011 atas pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat TA 2011 sebesar Rp.125.686.000.000,00 (*seratus dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta rupiah*) yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/1078/PAKPA/IX/2011 tanggal 23 September 2011 untuk paket pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat TA 2011 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 98 (*sembilan puluh delapan*) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak tersebut, Terdakwa melakukan pertemuan dengan BUDI RAHMAT KURNIAWAN di ruangan Terdakwa yang bertempat di Kantor Kemendagri, pada pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan MULYAWAN kepada BUDI RAHMAT KURNIAWAN sambil meminta agar terkait Komitmen Fee proyek pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat TA 2011 diserahkan kepada MULYAWAN yang kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh BUDI RACHMAT KURNIAWAN.
- Selanjutnya atas sepengetahuan Terdakwa, MULYAWAN melakukan pertemuan dengan BUDI RACHMAT KURNIAWAN di Kantor Divisi Gedung PT Utama Karya (Persero) dan menyampaikan permintaan *komitmen fee* dari Terdakwa kepada BUDI RACHMAT KURNIAWAN. Atas permintaan tersebut BUDI RACHMAT KURNIAWAN memanggil SUTRISNO selaku staff keuangan dan memperkenalkannya kepada MULYAWAN serta meminta agar untuk selanjutnya

Hal 10 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYAWAN berhubungan langsung dengan SUTRISNO terkait permintaan *komitmen fee* tersebut.

- Bahwa memenuhi permintaan Terdakwa, selanjutnya SUTRISNO menyerahkan uang kepada MULYAWAN di Kantor MULYAWAN yang bertempat di Jalan Tebet Timur Dalam III No. 31 Jakarta Selatan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), yang merupakan *komitmen fee* untuk Terdakwa atas pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat TA 2011.

Perbuatan Terdakwa yang menerima sejumlah uang dari Pelaksana Pekerjaan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf g dan huruf h Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam TA 2011 tersebut, PT Utama Karya (Persero) telah mensubkontrakan seluruh pekerjaan utamanya, antara lain meliputi pekerjaan mekanikal elektrik, struktur dan arsitektur kepada pihak lain yang seluruhnya bernilai sebesar Rp35.018.147.455,50 (*tiga puluh lima miliar delapan belan juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah dan lima puluh sen*) tanpa persetujuan tertulis dari Terdakwa selaku PPK sebagaimana dituangkan dalam klausul kontrak nomor : 011/1075/PAKPA/IX/2011 tanggal 23 September 2011.

- Bahwa selain telah mensubkontrakan seluruh pekerjaan utamanya, PT Utama Karya (Persero) juga telah melakukan subkontrak fiktif terhadap pekerjaan yang seolah-olah dikerjakan oleh CV Prima Karya, CV Restu Kreasi Mandiri dan PT Yulian Berkah Abadi yang seluruhnya bernilai sebesar Rp8.275.509.245,00 (*delapan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*). Uang hasil subkontrak fiktif tersebut dimasukkan ke dalam post *Arranger Fee* (AF) yang kemudian dipergunakan oleh PT Utama Karya (Persero) untuk membayar *komitmen fee* kepada pihak luar diantaranya pihak Kemendagri.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melanggar Pasal 11 kontrak nomor : 011/1075/PAKPA/IX/2011 tanggal 23 September 2011.

- Bahwa dalam proses serah terima pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat TA 2011, Terdakwa memerintahkan panitia penerima hasil pengadaan barang dan jasa untuk tidak melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan pembangunan gedung

Hal 11 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat TA 2011, bahkan panitia penerima hasil pengadaan barang dan jasa tidak pernah membuat dokumen acara/laporan hasil pengadaan barang dan jasa. Setelah itu atas sepengetahuan Terdakwa, MOHAMMAD RIZAL selaku Pejabat Penanda Tangan SPM melakukan pembayaran kepada PT Utama Karya (Persero) diantaranya melalui :

- SPM nomor : 05305/PAKPA/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dan SP2D nomor : 845627T/133/110 tanggal 20 Oktober 2011 atas dasar SPP dari PT Utama Karya (Persero) nomor : HK.DG/Tt.1616/DI V.C/275 tanggal 29 September 2011 untuk pembayaran *uang muka* setelah PPN dan PPh, yang diterima PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp22.166.440.000,00 (*dua puluh dua miliar seratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*);
- SPM nomor : 06434/PAKPA/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 dan SP2D nomor : 884138T/133/110 tanggal 14 Desember 2011 atas dasar SPP dari PT Utama Karya (Persero) nomor : HK.DG/R.4100/DI V.C/325 tanggal 18 Nopember 2011 untuk pembayaran *MC I* setelah PPN dan PPh, yang diterima PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp17.733.152.000,00 (*tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu rupiah*);
- SPM nomor : 06841/PAKPA/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan SP2D nomor : 160439X/133/110 tanggal 22 Desember 2011 atas dasar SPP dari PT Utama Karya (Persero) nomor : HK.DG/R.2217/DI V.C/340 tanggal 30 Nopember 2011 untuk pembayaran *MC II* setelah PPN dan PPh, yang diterima PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp26.599.728.000,00 (*dua puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah*);
- SPM nomor : 06843/PAKPA/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan SP2D nomor : 163654X/133/110 tanggal 27 Desember 2011 atas dasar SPP dari PT Utama Karya (Persero) nomor : HK.DG/R.2219/DI V.C/2219 tanggal 09 Desember 2011 untuk pembayaran *MC III* setelah PPN dan PPh, yang diterima PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp26.599.728.000,00 (*dua puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah*);
- SPM nomor : 06844/PAKPA/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan SP2D nomor : 164934/133/110 tanggal 29 Desember 2011 atas dasar SPP dari PT Utama Karya (Persero) nomor : HK.DG/R.2230/DI V.C/343 tanggal 14 Desember 2011 untuk pembayaran *MC IV* setelah PPN dan PPh, yang diterima

Hal 12 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp17.733.152.000,00 (*tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu rupiah*);

- Bahwa terhadap penerimaan hasil pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi tersebut, pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT Utama Karya (Persero) baru mencapai sekitar 32% (*tiga puluh dua persen*) namun dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST I) Pekerjaan Pelaksana nomor : 027/2023/BAST/PAKPA/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan BUDI RACHMAT KURNIAWAN selaku GM Divisi Gedung PT Utama Karya (Persero) yang merupakan Kontraktor Pelaksana dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor : 027/1820.3/BASTPHP/PAKPA/ XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang dibuat oleh SUGENG GUNAWAN untuk pencairan *Monthly Certificate (MC) IV seolah-olah* telah selesai 100% (*seratus persen*) sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 011/1075/PAKPA/IX/2011 tanggal 23 September 2011 kemudian dilakukan pembayaran keseluruhan 100% (*seratus persen*) dan diterima riil oleh PT Utama Karya (Persero) seluruhnya sejumlah Rp110.832.200.000,00 (*seratus sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*) sehingga Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4), Pasal 95 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengaturan dalam pelaksanaan pelelangan, penerimaan pekerjaan dan pembayaran atas proyek pembangunan Gedung Kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat pada Kemendagri Republik Indonesia TA 2011 dengan cara mengarahkan pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam pelelangan pengadaan barang dan jasa sebelum diputuskan pemenang lelang, tidak menyusun HPS, menambahkan persyaratan yang diskriminatif untuk menggagalkan peserta lelang tertentu, melakukan pengaturan PT Utama Karya (Persero) sebagai pemenang lelang proyek pembangunan Gedung Kampus IPDN Bukit tinggi, melakukan pembayaran seluruhnya kepada pelaksana pekerjaan walaupun pekerjaan belum selesai, meminta *komitmen fee (arranger fee)* untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk diberikan kepada pihak-pihak terkait pelelangan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 5, Pasal 6 huruf c, e, g, h, Pasal 11 Ayat (1) huruf a butir 2), Pasal 56 Ayat (10), Pasal 87 ayat (3), Pasal 89

Hal 13 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4), Pasal 95 ayat (4), Lampiran II.B.2.m.2).b), Lampiran III A.3.a.2) a), Lampiran III.B.3.a.3).d) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah, mengakibatkan *telah memperkaya* Terdakwa sebesar Rp.4.200.000.000,00 (*empat miliar dua ratus juta rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, *memperkaya orang lain* yaitu :

- HENDRA sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).
- BUDI RACHMAT KURNIAWAN sebesar Rp571.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah*).
- MOHAMMAD RIZAL sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- BAMBANG MUSTAQIM sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- SRI KANDIYATI sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Memperkaya korporasi yaitu :

- PT Utama Karya (Persero) seluruhnya sebesar Rp22.085.730.069,10 (*dua puluh dua miliar delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam puluh sembilan rupiah dan sepuluh sen*) yang berasal dari pengalihan pekerjaan utama (*mensubkontrakan*) kepada pihak ketiga sebesar Rp.13.810.220.824,10 (*tiga belas miliar delapan ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah dan sepuluh sen*) dan berasal dari pencairan subkontrak fiktif sebesar Rp8.275.509.245,00 (*delapan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*).
- CV Prima Karya sebesar Rp.3.343.553.992,00 (*tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- CV Restu Kreasi Mandiri sebesar Rp.265.711.121,00 (*dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus dua puluh satu rupiah*).
- PT Yulian Berkah Abadi sebesar Rp79.403.246,00 (*tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan BUDI RACHMAT KURNIAWAN tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan perhitungan :

a. Selisih nilai kontrak dengan nilai Pengalihan Pekerjaan:

- Penerimaan PT Utama Karya atas
item pekerjaan yang dialihkan Rp.87.962.242.263,00

Hal 14 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Nilai Pekerjaan subkontraktor	Rp68.499.538.702,00
<i>Kerugian Keuangan Negara I</i>	Rp13.810.220.824,10
b. Sub kontraktor Fiktif	Rp 8.275.509.245,00
c. Kekurangan volume terpasang :	
➤ Pekerjaan Mekanikal dan Elektrical	Rp1.443.992.680,00
➤ Pekerjaan Struktur	Rp 919.113.191,03
➤ Pekerjaan Arsitektur	Rp 728.160.862,89
<i>Kerugian Keuangan Negara II</i>	Rp12.718.511.152,86
<i>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a+b+c)</i>	Rp34.804.241.221,96

Sehingga kerugian Keuangan Negara tersebut seluruhnya berjumlah Rp.34.804.241.221,96 (*tiga puluh empat miliar delapan ratus empat juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah dan sembilan puluh enam*) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan Dan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Pada Kemendagri Republik Indonesia TA 2011 Nomor : 11/LHP/XXII/02/2018 Tanggal 6 Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Ir. DUDY JOCOM, M.si.** bersama-sama dengan BUDI RACHMAT KURNIAWAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagisekitar bulan Desember 2010 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia Jalan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 15 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan Terdakwa sebesar Rp.4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, menguntungkan orang lain yaitu HENDRA sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), BUDI RACHMAT KURNIAWAN sebesar Rp.571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah), MOHAMMAD RIZAL sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), BAMBANG MUSTAQIM sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan SRI KANDIYATI sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut serta menguntungkan suatu korporasi yaitu PT Utama Karya (Persero) seluruhnya sebesar Rp.22.085.730.069,10 (dua puluh dua miliar delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam puluh sembilan rupiah dan sepuluh sen) yang berasal dari pengalihan pekerjaan utama (mensubkontrakan) kepada pihak ketiga sebesar Rp13.810.220.824,10 (tiga belas miliar delapan ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah dan sepuluh sen) dan berasal dari pencairan subkontrak fiktif sebesar Rp.8.275.509.245,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), CV Prima Karya sebesar Rp.3.343.553.992,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), CV Restu Kreasi Mandiri sebesar Rp265.711.121,00 (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus dua puluh satu rupiah) dan PT Yulian Berkah Abadi sebesar Rp79.403.246,00 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset (AKPA) pada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri yang juga diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Sekjen Kemendagri TA 2011 dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Sekjen Kemendagri TA 2011 telah turut serta melakukan pengaturan dalam pelaksanaan pelelangan, penerimaan pekerjaan dan pembayaran atas proyek pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bukittinggi Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia Tahun Anggaran (TA) 2011 dengan cara mengarahkan pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam pelelangan pengadaan barang dan jasa sebelum

Hal 16 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan pemenang lelang, tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menambahkan persyaratan yang diskriminatif untuk menggagalkan peserta lelang tertentu, melakukan pengaturan PT Utama Karya (Persero) sebagai pemenang lelang proyek pembangunan Gedung Kampus IPDN Bukittinggi Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat pada Kemendagri RI TA 2011, melakukan pembayaran seluruhnya kepada pelaksana pekerjaan walaupun pekerjaan belum selesai, meminta *komitmen fee (arranger fee)* untuk diberikan kepada pihak-pihak terkait pelelangan tersebut diantaranya untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp34.804.241.221,96 (tiga puluh empat miliar delapan ratus empat juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah dan sembilan puluh enam) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan Dan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Pada Kemendagri Republik Indonesia TA 2011 Nomor : 11/LHP/XXI/02/2018 Tanggal 6 Februari 2018, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa Ir. DUDY JOCOM, M.si. diangkat sebagai Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset (AKPA) pada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 811.212.2-707 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010, yang juga diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Sekjen Kemendagri TA 2011 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 900-1097 tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 dan diangkat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Sekjen Kemendagri TA 2011 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 900-1127 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010.
- Terdakwa menjabat sebagai Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset (AKPA) pada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri yang juga diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Sekjen Kemendagri TA 2011 mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya :

Hal 17 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak.
- Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- Menandatangani Kontrak.
- Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA.
- Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA dengan Berita Acara Penyerahan.
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan.
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009 ditetapkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 Tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan dimana Kemendagri diharuskan membentuk Kampus IPDN di daerah untuk melaksanakan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan. Untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Agustus 2009 mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tanggal 8 September 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk membentuk kampus IPDN di 4 (*empat*) regional yaitu di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dengan melaksanakan kegiatan proyek pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN secara bertahap pada TA 2010, 2011 dan 2012.
- Bahwa untuk proyek pembangunan kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat pada TA 2010 dimenangkan dan dilaksanakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan nilai pekerjaan sebesar Rp22.558.550.000,00 (*dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) kemudian pada TA 2011 Kemendagri mengadakan kembali proyek lanjutan pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat TA 2011 dengan pagu anggaran sebesar Rp127.893.700.000,00 (*seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*) sebagaimana Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2011 No. 2863/010-

Hal 18 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA K/L) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011.

- Selanjutnya DIAH ANGGRAENI selaku Sekjen Kemendagri membentuk Panitia Pengadaan Barang /Jasa terkait pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi di Kemendagri TA 2011 sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 027-129 tahun 2011 tanggal 22 Februari 2011 dengan susunan MOHAMMAD NOVAL selaku Ketua, SRI KANDIYATI selaku Sekretaris serta URKANUS SIHOMBING, PURWANTO, DONY AMBADI, ITRIAH AFSOLIN dan TRI ADJI BAWONO masing-masing sebagai anggota dan membentuk juga Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa satuan kerja Sekjen Kemendagri terkait pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi TA 2011 sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 027-130 tahun 2011 pada tanggal 22 Februari 2011 dengan susunan SUGENG GUNAWAN selaku Ketua, EKO SANTOSO selaku Sekretaris dan MAHENDRA BASUKI, KASDAN dan ADE SAEPU ABIDIN masing-masing sebagai anggota.
- Pada tanggal 2 Maret 2011, DIAH ANGGRAENI menunjuk MOHAMMAD RIZAL sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Bidang Keuangan pada Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri TA 2011 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900-147 Tahun 2011.
- Masih pada bulan Maret 2011 sebelum dilakukan pengumuman lelang, bertempat di ruangan staff teknik Lantai II Divisi Gedung PT Utama Karya (Persero) dilakukan pertemuan diantara bagian Pemasaran Divisi Gedung PT Utama Karya (Persero). Pada saat itu BAMBANG MUSTAQIM selaku Senior Manager (SM) Pemasaran Divisi Gedung PT Utama Karya (Persero) menyampaikan kepada ANTON dan WIDI SADMOKO bahwasanya Terdakwa selaku PPK menyalahgunakan kewenangannya telah berkomunikasi dengan BAMBANG MUSTAQIM untuk mengatur kemenangan proyek pembangunan kampus IPDN di Kemendagri TA 2011 dimana PT Utama Karya (Persero) mendapatkan proyek pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat TA 2011. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 huruf e dan huruf g Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku PPK menyalahgunakan kewenangannya dengan membuat Nota Dinas Nomor 028/712/PAKPA/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang memerintahkan MOHAMMAD NOVAL selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Setjen Bidang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Hal 19 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jasa Konsultasi untuk melakukan proses pelelangan pekerjaan pembangunan konstruksi fisik tanpa menunggu adanya pemenang lelang konsultan perencana dan konsultan Manajemen Konstruksi (MK), dengan nilai pagu diantaranya untuk proyek pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat TA 2011 sebesar Rp127.893.700.000,00 (*seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*) dengan persyaratan kualifikasi memiliki sertifikat sistem manajemen mutu (ISO:9001), sertifikat sistem manajemen lingkungan (ISO:14001), sertifikat sistem K3 (OHSAS:18001) dan sertifikat sistem Manajemen K3 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, nota dinas tersebut tanpa melampirkan Bill of Quantity (BoQ), Gambar, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta syarat tambahan yang diskriminatif untuk memenangkan PT Utama Karya (Persero) yaitu memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU) *Grade 7*.

- Atas perintah dari Terdakwa tersebut, MOHAMMAD NOVAL mengumumkan pelelangan umum Prakualifikasi atas proyek pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat TA 2011 sebagaimana surat nomor 98/Peng/P3/KK/KDN/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 di surat kabar Harian Tempo dan surat nomor 77/Peng/P3/KK/KDN/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 di portal pengumuman ruang panitia pengadaan dengan jadwal untuk pendaftaran serta pengambilan dokumen Prakualifikasi tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 9 Juni 2011, sedangkan pemasukan dokumen Prakualifikasi tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan tanggal 14 Juni 2011. Pengumuman pelelangan tersebut hanya menggunakan Pagu Anggaran sebesar Rp127.893.700.000,00 (*seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*) tanpa adanya HPS serta menambahkan persyaratan kualifikasi memiliki SBU *Grade 7*.

Perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dengan tidak menyusun HPS dan menambahkan persyaratan yang diskriminatif bertentangan dengan Pasal 6 huruf c, Pasal 11 Ayat (1) huruf a butir 2), Pasal 56 Ayat (10), Lampiran III A.3.a.2) a) dan Lampiran III.B.3.a.3).d) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah.

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2011, perusahaan yang mendaftar dan telah mengembalikan dokumen prakualifikasi sebanyak 6 (*enam*) perusahaan yaitu PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero). Kemudian panitia pengadaan melakukan

Hal 20 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi prakualifikasi administrasi perusahaan dan menyatakan 5 (lima) perusahaan dinyatakan lulus dan ditetapkan masuk dalam daftar pendek untuk dapat mengikuti pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat TA 2011 yaitu PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero) sebagaimana Penetapan Hasil Prakualifikasi nomor 121/Pen-PQ/KK/KDN/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011.

- Bahwa masih pada bulan Juni 2011 setelah penetapan hasil prakualifikasi tersebut. Untuk menindaklanjuti kesepakatan antara Terdakwa dengan BAMBANG MUSTAQIM selaku SM Pemasaran Divisi Gedung PT Utama Karya (Persero), bertempat di hotel Ambhara Jakarta dilakukan pertemuan antara BAMBANG MUSTAQIM, ARI ARYADI dari PT Utama Karya (Persero) dengan ARI PRIJO WIDAGDO dari PT Adhi Karya (Persero) dan DANNY NOEGROHO dari PT Waskita Karya (Persero), kemudian disepakati bahwa yang akan mengerjakan proyek pembangunan kampus IPDN Bukit Tinggi di Kabupaten Agama Provinsi Sumatera Barat TA 2011 adalah PT Utama Karya (Persero) sehingga dokumen penawaran untuk peserta lelang lainnya dibuatkan oleh PT Utama Karya (Persero). Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 huruf e dan huruf g Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 setelah ditetapkannya hasil prakualifikasi, Panitia Pengadaan mengundang perusahaan yang lulus untuk pelelangan umum dan mengikuti penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) dengan jadwal tanggal 25 Juli 2011 sebagaimana surat nomor 154/Und/Pra/KK/KDN/VI/2011. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2011 bertempat di Kemendagri dilaksanakan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) mengenai administrasi dan teknis pekerjaan yang dihadiri diantaranya SRI KANDIYATI selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa, IMAN selaku perwakilan dari PT Wijaya Karya (Persero), NURDIN selaku perwakilan dari PT Pembangunan Perumahan (Persero), selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2011 dilakukan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) lapangan di lokasi proyek pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat TA 2011 yang dihadiri diantaranya TRI ADJI BAWONO selaku perwakilan panitia pengadaan barang/jasa, KHOIRUN NASIRIN selaku perwakilan PT Utama Karya (Persero), EKA N selaku perwakilan PT Waskita Karya (Persero).

Hal 21 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) tersebut, pada tanggal 2 Agustus 2011 dilakukan pemasukan dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis) oleh 4 (*empat*) perusahaan yaitu PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) kemudian panitia pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran Tahap I dengan melakukan evaluasi administrasi dan teknis.
- Selanjutnya Terdakwa selaku PPK memerintahkan Panitia Pengadaan memanipulasi sistem Penilaian Evaluasi Administrasi dan teknis untuk memenangkan PT Utama Karya (Persero) diantaranya dengan cara tidak melakukan penilaian atas dua tenaga inti PT Wijaya Karya (Persero) sehingga panitia pengadaan pada tanggal 11 Agustus 2011 melalui surat nomor 181/Peng/P3/KK/KDN/VIII/2011 mengumumkan peringkat teknis yaitu PT Utama Karya (Persero) sebagai peringkat I, PT Wijaya Karya (Persero) sebagai peringkat II, PT Waskita Karya (Persero) sebagai peringkat III sedangkan PT Pembangunan Perumahan (Persero) tidak lulus.

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 huruf c, e dan huruf g, Lampiran II.B.2.m.2).b) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah.

- Bahwa setelah dilakukan pengumuman kelulusan dokumen penawaran Tahap I kemudian pada tanggal 11 Agustus 2011 Panitia Pengadaan mengundang perusahaan yang lulus yaitu PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) untuk memasukkan dokumen penawaran Tahap II (Harga) dengan Jadwal tanggal 12 Agustus 2011 sebagaimana surat nomor 175/Und/KK/KDN/VIII/2011.
- Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2011 sebagaimana berita acara hasil evaluasi penawaran harga nomor : 177/BA/EV/KK/KDN/VIII/2011 dilakukan evaluasi penawaran harga dengan hasil yaitu :
 - PT Utama Karya (Persero) dengan harga penawaran Rp.125.686.000.000,00 (*seratus dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta rupiah*) sebagai peringkat I;
 - PT Waskita Karya (Persero) dengan harga penawaran Rp.126.531.000.000,00 (*seratus dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh satu juta rupiah*) sebagai peringkat II;
 - PT Wijaya Karya (Persero) dengan harga penawaran Rp.126.956.000.000,00 (*seratus dua puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah*) sebagai peringkat III;

Hal 22 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya GAMAWAN FAUZI selaku Menteri Dalam Negeri yang juga selaku PA mengeluarkan surat nomor 011/3438/SJ tanggal 13 September 2011 perihal persetujuan penetapan pemenang pelelangan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat kepada PT Utama Karya (Persero). Selanjutnya oleh MOHAMMAD NOVAL selaku Ketua Panitia Pengadaan melalui surat Nomor : 229/Peng/P3/KK/KDN/IX/2011 tanggal 13 September 2011 diumumkan pemenang lelang atas pengadaan jasa kontruksi proyek pembangunan gedung kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam TA 2011 yaitu PT Utama Karya (Persero) dengan harga penawaran sebesar Rp125.686.000.000,00 (*seratus dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta rupiah*).
- Pada tanggal 23 September 2011 setelah ditetapkannya PT Utama Karya (Persero) sebagai pemenang, Terdakwa selaku PPK dan BUDI RACHMAT KURNIAWAN selaku General Manager (GM) Divisi Gedung PT Utama Karya (Persero) menandatangani kontrak nomor : 011/1075/PAKPA/IX/2011 tanggal 23 September 2011 atas pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat TA 2011 sebesar Rp125.686.000.000,00 (*seratus dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta rupiah*) yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/1078/PAKPA/IX/2011 tanggal 23 September 2011 untuk paket pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat TA 2011 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 98 (*sembilan puluh delapan*) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak tersebut, Terdakwa selaku PPK menyalahgunakan kewenangannya dengan meminta *komitmen fee* kepada BUDI RACHMAT KURNIAWAN selaku GM Divisi Gedung PT Utama Karya (Persero). Permintaan tersebut disampaikan Terdakwa saat melakukan pertemuan dengan BUDI RAHMAT KURNIAWAN di ruangan Terdakwa yang bertempat di Kantor Kemendagri, pada pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan MUYAWAN kepada BUDI RAHMAT KURNIAWAN sambil meminta agar terkait Komitmen Fee proyek pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat TA 2011 diserahkan kepada MUYAWAN yang kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh BUDI RACHMAT KURNIAWAN.
- Selanjutnya atas sepengetahuan Terdakwa, MUYAWAN melakukan pertemuan dengan BUDI RACHMAT KURNIAWAN di Kantor Divisi Gedung PT Utama

Hal 23 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya (Persero) dan menyampaikan permintaan *komitmen fee* dari Terdakwa kepada BUDI RACHMAT KURNIAWAN. Atas permintaan tersebut BUDI RACHMAT KURNIAWAN memanggil SUTRISNO selaku staff keuangan dan memperkenalkannya kepada MULYAWAN serta meminta agar untuk selanjutnya MULYAWAN berhubungan langsung dengan SUTRISNO terkait permintaan *komitmen fee* tersebut.

- Bahwa memenuhi permintaan Terdakwa, selanjutnya SUTRISNO menyerahkan uang kepada MULYAWAN di Kantor MULYAWAN yang bertempat di Jalan Tebet Timur Dalam III No. 31 Jakarta Selatan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), yang merupakan *komitmen fee* untuk Terdakwa atas pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat TA 2011.

Perbuatan Terdakwa selaku PPK yang menyalahgunakan kewenangan dengan menerima sejumlah uang dari Pelaksana Pekerjaan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf g dan huruf h Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam TA 2011 tersebut, PT Utama Karya (Persero) telah mensubkontrakan seluruh pekerjaan utamanya, antara lain meliputi pekerjaan mekanikal elektrik, struktur dan arsitektur kepada pihak lain yang seluruhnya bernilai sebesar Rp35.018.147.455,50 (*tiga puluh lima miliar delapan belan juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah dan lima puluh sen*) tanpa persetujuan tertulis dari Terdakwa selaku PPK sebagaimana dituangkan dalam klausul kontrak nomor : 011/1075/PAKPA/IX/2011 tanggal 23 September 2011.

- Bahwa selain telah mensubkontrakan seluruh pekerjaan utamanya, PT Utama Karya (Persero) juga telah melakukan subkontrak fiktif terhadap pekerjaan yang seolah-olah dikerjakan oleh CV Prima Karya, CV Restu Kreasi Mandiri dan PT Yulian Berkah Abadi yang seluruhnya bernilai sebesar Rp8.275.509.245,00 (*delapan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*). Uang hasil subkontrak fiktif tersebut dimasukkan ke dalam post *Arranger Fee* (AF) yang kemudian dipergunakan oleh PT Utama Karya (Persero) untuk membayar *komitmen fee* kepada pihak luar diantaranya pihak Kemendagri.

- Bahwa dalam proses serah terima pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat TA 2011, Terdakwa selaku PPK menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan panitia

Hal 24 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima hasil pengadaan barang dan jasa untuk tidak melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat TA 2011, bahkan panitia penerima hasil pengadaan barang dan jasa tidak pernah membuat dokumen acara/laporan hasil pengadaan barang dan jasa. Kemudian Terdakwa selaku PPK menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan MOHAMMAD RIZAL selaku Pejabat Penanda Tangan SPM melakukan pembayaran kepada PT Utama Karya (Persero) diantaranya melalui:

- SPM nomor : 05305/PAKPA/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dan SP2D nomor : 845627T/133/110 tanggal 20 Oktober 2011 atas dasar SPP dari PT Utama Karya (Persero) nomor : HK.DG/Tt.1616/DI V.C/275 tanggal 29 September 2011 untuk pembayaran **uang muka** setelah PPN dan PPh, yang diterima PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp22.166.440.000,00 (*dua puluh dua miliar seratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*);
- SPM nomor : 06434/PAKPA/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 dan SP2D nomor : 884138T/133/110 tanggal 14 Desember 2011 atas dasar SPP dari PT Utama Karya (Persero) nomor : HK.DG/R.4100/DI V.C/325 tanggal 18 Nopember 2011 untuk pembayaran **MC I** setelah PPN dan PPh, yang diterima PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp17.733.152.000,00 (*tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu rupiah*);
- SPM nomor : 06841/PAKPA/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan SP2D nomor : 160439X/133/110 tanggal 22 Desember 2011 atas dasar SPP dari PT Utama Karya (Persero) nomor : HK.DG/R.2217/DI V.C/340 tanggal 30 Nopember 2011 untuk pembayaran **MC II** setelah PPN dan PPh, yang diterima PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp26.599.728.000,00 (*dua puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah*);
- SPM nomor : 06843/PAKPA/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan SP2D nomor : 163654X/133/110 tanggal 27 Desember 2011 atas dasar SPP dari PT Utama Karya (Persero) nomor : HK.DG/R.2219/DI V.C/2219 tanggal 09 Desember 2011 untuk pembayaran **MC III** setelah PPN dan PPh, yang diterima PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp26.599.728.000,00 (*dua puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah*);
- SPM nomor : 06844/PAKPA/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan SP2D nomor : 164934/133/110 tanggal 29 Desember 2011 atas dasar SPP dari PT Utama Karya (Persero) nomor : HK.DG/R.2230/DI V.C/343 tanggal 14

Hal 25 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 untuk pembayaran *MC IV* setelah PPN dan PPh, yang diterima PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp17.733.152.000,00 (*tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu rupiah*);

- Bahwa terhadap penerimaan hasil pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi tersebut, pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT Utama Karya (Persero) baru mencapai sekitar 32% (*tiga puluh dua persen*) namun dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST I) Pekerjaan Pelaksana nomor : 027/2023/BAST/PAKPA/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan BUDI RACHMAT KURNIAWAN selaku GM Divisi Gedung PT Utama Karya (Persero) yang merupakan Kontraktor Pelaksana dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor : 027/1820.3/BASTPHP/PAKPA/ XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang dibuat oleh SUGENG GUNAWAN untuk pencairan *Monthly Certificate (MC) IV seolah-olah* telah selesai 100% (*seratus persen*) sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 011/1075/PAKPA/IX/2011 tanggal 23 September 2011 kemudian dilakukan pembayaran keseluruhan 100% (*seratus persen*) dan diterima riil oleh PT Utama Karya (Persero) seluruhnya sejumlah Rp110.832.200.000,00 (*seratus sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*) sehingga Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4), Pasal 95 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK yang menyalahgunakan kewenangannya dengan cara mengarahkan pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam pelelangan pengadaan barang dan jasa sebelum diputuskan pemenang lelang, tidak menyusun HPS, menambahkan persyaratan yang diskriminatif untuk menggagalkan peserta lelang tertentu, melakukan pengaturan PT Utama Karya (Persero) sebagai pemenang lelang proyek pembangunan Gedung Kampus IPDN Bukittinggi, melakukan pembayaran seluruhnya kepada pelaksana pekerjaan walaupun pekerjaan belum selesai, meminta *komitmen fee (arranger fee)* untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk diberikan kepada pihak-pihak terkait pelelangan tersebut dalam proyek pembangunan Gedung Kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat pada Kemendagri Republik Indonesia TA 2011 bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 5, Pasal 6 huruf c, e, g, h, Pasal 11 Ayat (1) huruf a butir 2), Pasal 56 Ayat

Hal 26 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(10), Pasal 89 ayat (4), Pasal 95 ayat (4), Lampiran II.B.2.m.2).b), Lampiran III A.3.a.2) a), Lampiran III.B.3.a.3).d) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah, mengakibatkan *menguntungkan* Terdakwa sebesar Rp4.200.000.000,00 (*empat miliar dua ratus juta rupiah*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, *menguntungkan orang lain* yaitu :

- HENDRA sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).
- BUDI RACHMAT KURNIAWAN sebesar Rp571.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah*).
- MOHAMMAD RIZAL sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- BAMBANG MUSTAQIM sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- SRI KANDIYATI sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

memperkaya korporasi yaitu:

- PT Utama Karya (Persero) seluruhnya sebesar Rp22.085.730.069,10 (*dua puluh dua miliar delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam puluh sembilan rupiah dan sepuluh sen*) yang berasal dari pengalihan pekerjaan utama (mensubkontrakan) kepada pihak ketiga sebesar Rp13.810.220.824,10 (*tiga belas miliar delapan ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah dan sepuluh sen*) dan berasal dari pencairan subkontrak fiktif sebesar Rp8.275.509.245,00 (*delapan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*).
- CV Prima Karya sebesar Rp3.343.553.992,00 (*tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- CV Restu Kreasi Mandiri sebesar Rp265.711.121,00 (*dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus dua puluh satu rupiah*).
- PT Yulian Berkah Abadi sebesar Rp79.403.246,00 (*tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan BUDI RACHMAT KURNIAWAN tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan perhitungan :

a. Selisih nilai kontrak dengan nilai Pengalihan Pekerjaan:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| ➤ Penerimaan PT Utama Karya atas | |
| item pekerjaan yang dialihkan | Rp87.962.242.263,00 |
| ➤ Nilai Pekerjaan subkontraktor | Rp68.499.538.702,00 |

Hal 27 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<i>Kerugian Keuangan Negara I</i>	Rp13.810.220.824,10
b. Subkontraktor Fiktif	Rp 8.275.509.245,00
c. Kekurangan volume terpasang :	
➤ Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Rp1.443.992.680,00
➤ Pekerjaan Struktur	Rp 919.113.191,03
➤ Pekerjaan Arsitektur	Rp 728.160.862,89
<i>Kerugian Keuangan Negara II</i>	Rp12.718.511.152,86
<i>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a+b+c)</i>	Rp34.804.241.221,96

Sehingga kerugian Keuangan Negara tersebut seluruhnya berjumlah Rp34.804.241.221,96 (*tiga puluh empat miliar delapan ratus empat juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah dan sembilan puluh enam*) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan Dan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Pada Kemendagri Republik Indonesia TA 2011 Nomor : 11/LHP/XXI/02/2018 Tanggal 6 Februari 2018 atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan~~nya~~ menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. DUDY JOCOM, M.si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua ;

Hal 28 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. DUDY JOCOM, M.si berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00; (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa Ir. DUDY JOCOM, M.si untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut, apabila harta tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel dokumen dalam odner plastik warna biru berisikan :
 - a. 1 (satu) lembar copy Daftar isi,
 - b. 1 (satu) lembar copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai penjamin,
 - c. 5 (lima) lembar keputusan menteri dalam negeri nomor : 900-1097 tahun 2010 beserta lampirannya,
 - d. 5 (lima) lembar copy keputusan menteri dalam negeri nomor: 900-1127 tahun 2010 beserta lampirannya,
 - e. 22 (dua puluh dua) lembar copy peraturan menteri dalam negeri nomor:3 tahun 2011beserta lampirannya,
 - f. 2 (dua) lembar copy harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan kegiatan kampus IPDN Baso Sumatera Barat tahun anggaran 2011,
 - g. 2 (dua) lembar copy Bill of Quantity (BQ) pekerjaan kegiatan kampus IPDN Baso Sumatera Barat tahun anggaran 2011,
 - h. 2 (dua) lembar copy dokumen draft Surat Perjanjian,
 - i. 27 (dua puluh tujuh) lemabr dokumen draft syarat-syarat umum kontrak,
 - j. 3 (tiga) lembar copy dokumen draft syarat-syarat khusus kontrak,
 - k. 1 (satu) lembar copy Bank Garansi BRI nomor: 032917110288,

Hal 29 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 2 (dua) lembar copy Bank Garansi BRI nomor : 032917110284,
 - m. 1 (satu) lembar copy Bank Garansi BRI nomor : 032917110288,
 - n. 4 (empat) lembar copy dokumen pekerjaan tambah kurang pembangunan kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam tahun anggaran 2011,
 - o. 11 (sebelas) lembar copy dokumen perjanjian kontrak kerja nomor : 011/420/PAKPA/VII/2011 tanggal 6 juli 2011 pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung kampus IPDN Provisni Sumatera Barat di Kabupaten Agam tahun anggaran 2011,
 - p. 16 (enam belas) lembar copy dokumen perjanjian kontrak kerja nomor : 011/22/PAKPA/VI/2011 tanggal 6 juni 2011 pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung kampus IPDN Provisni Sumatera Barat di Kabupaten Agam tahun anggaran 2011,
 - q. 33 (tiga puluh tiga) lembar copy dokumen perjanjian kontrak kerja nomor : 011/1075/PAKPA/IX/2011 tanggal 23 September 2011 pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung kampus IPDN Provisni Sumatera Barat di Kabupaten Agam tahun anggaran 2011
2. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pelelangan Nomor : 96/PU/KK/KDN/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. 1 (satu) bundel Dokumen Lelang pembangunan gedung kampus IPDN di Bukit Tinggi Sumatera Barat pada Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011;
4. 1 (satu) Bundel dokumen copy, Kronologis Pembangunan Gedung IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT TAHUN 2011;
5. 1 (satu) odner warna oranye yang bertuliskan "DOKUMEN PROYEK IPDN SUMBAR TAHUN 2011";
6. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-1097 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut

Hal 30 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Negara Tahun Anggaran 2011 di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

7. 5 (lima) lembar copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
8. 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
9. 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
10. 2 (dua) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 811.212.2-707 Tahun 2010 tanggal 17-9-2010 (SK pengangkatan Ir. DUDY JOCOM pada jabatan Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Sekretariat Jenderal Kemendagri), beserta 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 811.212.2/2023/SJ tanggal 17 September 2010, ditandatangani oleh KISWANTO, SH;
11. 2 (dua) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900-147 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1126 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 ditandatangani DIAH ANGGRAENI a.n. Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal, beserta 3 (tiga) lembar copy lampirannya;
12. 4 (empat) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 027-129 Tahun 2011 Tanggal 22 Februari 2011 Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011;
13. 3 (tiga) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 027-130 Tahun 2011 Tentang Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Pengadaan barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Februari 2011;
14. 3 (tiga) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 811.212.3-708 Tahun 2010 Tanggal 17-9-2010 (SK

Hal 31 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urkanus Sihombing menjadi Kepala Bidang Analisis Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Kajian Kebijakan Strategik Setjen Kemendagri);

15. 3 (tiga) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 811.212.3-682 tahun 2009 tanggal 24 September 2009, ditujukan kepada Drs. Burhanuddin, jabatan baru : Kepala Bidang Inventarisasi Kekayaan Milik Negara pada Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Asset Sekretariat Jenderal;
16. 3 (tiga) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 811.212.3.708 tahun 2010 tanggal 17 September 2010, ditujukan kepada Drs. Burhanuddin, jabatan baru : Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Badan Litbang Kemendagri;
17. 5 (lima) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 811.212.2-530 Tahun 2012 Tanggal 7 Agustus 2012 (SK Restuardy Daud sebagai Kepala Pusat Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi Sekretariat Jenderal);
18. 3 (tiga) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 811.212.3-708 Tahun 2010 Tanggal 17 September 2010 (SK Restuardy Daud sebagai Kepala Bagian Perencanaan Program pada Biro Perencanaan Setjen Kemendagri);
19. 1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-738 tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010;
20. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor : 011/3438/SJ tanggal 13 September 2011 Perihal Persetujuan Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kapus IPDN di Provinsi Sumatera Barat;
21. 3 (tiga) lembar copy Nota Dinas Nomor 667/SJ/2011 tanggal 23 Agustus 2011, perihal Laporan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di 4 (empat) Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Riau) TA 2011. Ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, ditandatangani oleh DIAH ANGGRAENI, Sekretaris Jenderal. Pada dokumen tersebut terdapat tulisan tangan "Sekjen, 1. Penetapan", paraf dan tanggal "23/8/11";

Hal 32 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar copy surat Nomor : 660/2061/PAKPA/XI/2011 tanggal 23 November 2011 Hal : Pengantar Studi AMDAL;
23. 1 (satu) bundel copy surat Nomor : 700/2652/SJ tanggal 10 Juli 2011 Perihal : TLHP BPK RI;
24. 4 (empat) lembar copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 900.05-292 PAKPA 2011 tentang Tim Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, tanggal 4 Mei 2011;
25. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 005/20/Sj/2010 Tanggal 27 Desember 2010 Perihal: Undangan Penyerahan DIPA Tahun 2011;
26. 3 (tiga) lembar copy Program Peningkatan Sarpras Aparatur Kemendagri;
27. 1 (satu) lembar copy Ilustrasi Alur Perencanaan TA 2011;
28. 3 (tiga) lembar copy Dokumen Perencanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011;
29. 3 (tiga) lembar copy Surat Nomor: BU.01.06-Cb/79 Tanggal 19 Januari 2011 Perihal: Pendapat Teknis Pekerjaan Lanjutan Pengadaan Konsultan Perencanaan Untuk Pembangunan Gedung Kampus IPDN Daerah;
30. 1 (satu) bundel asli Surat Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor : KP.01.08-Cb/182 tanggal 10 Februari 2011 dan lampirannya
31. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Nomor: 826.2/29/01.PAKPA Tanggal 25 Februari 2015 (Itriah Afsolin sedang melaksanakan tugas belajar (S2) terhitung mulai tanggal 1 September 2004 s/d. 31 Agustus 2015) dengan lampiran: 2 (dua) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 894-1655 Tahun 2014 Tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar (S2) Pada Program Master Of Arts Governance And Public Policy The University Of Sheffield dan 1 (satu) lembar Surat Nomor: R-228/22/02/2015 Tanggal 23 Februari 2015 Perihal: Permintaan Keterangan.

Hal 33 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 3 (tiga) lembar copy Keputusan Direksi PT. Utama Karya (Persero) Nomor: 1739/KPTS/41/2010 Tanggal 19 Oktober 2010 Tentang Susunan Pengurus Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan PT. Hakapole dan PT. Hakaaton.
33. 3 (tiga) lembar copy Deskripsi Jabatan Direktur Produksi, Mulai Berlaku: 20 Desember 2005 dan 3 (tiga) lembar printout Curriculum Vitae a.n. Ir. R Soetanto, MM.
34. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT. Utama Karya (Persero) Nomor: 1615/KPTS/20/2011 Tanggal 27 Juli 2011 Tentang Perubahan Struktur Organisasi Kamtor Puat, Divisi dan Wilayah.
35. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT. Utama Karya (Persero) Nomor: 001/KPTS/01/2011 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Pada Divisi Pemasaran tanggal 03 Januari 2011, ditandatangani oleh S. SUBAGYONO, Direktur Utama PT. Utama Karya (Persero).
36. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT. Utama Karya Nomor: 1083/KPTS/14/2011 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat PT. Utama Karya (Persero) tanggal 31 Mei 2011, ditandatangani oleh S. SUBAGYONO, Direktur Utama PT. Utama Karya (Persero).
37. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT. Utama Karya (Persero) Nomor: 1640/KPTS/23/2011 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat PT. Utama Karya (Persero) tanggal 27 Juli 2011, ditandatangani oleh Ir. TRI WIDJAJANTO J, MT., Direktur Utama PT. Utama Karya (Persero).
38. 2 (dua) lembar copy Dokumen No. Dokumen: OPS/DDO/P/002 Diterbitkan Tanggal: 29 Maret 2010: Halaman: 16-17 dari 19.
39. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: HKDG/Smr.1842/ST/199 Tanggal 20 Oktober 2011, Hal: Penugasan (Remon Debal sebagai Deputy Project Manager pada Proyek IPDN Bukit Tinggi).
40. 2 (dua) lembar copy Surat Tanggal 10 September 2012, Hal: Pengunduran Diri (Remon Debal) dengan lampiran Surat Keterangan Kesehatan.

Hal 34 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Kartu ATM atas nama Gregorius Aji Sentosa tanggal 27 Januari 2012, ditandatangani oleh Remon Debal, ST dan Dedy Susetyo, SE.
42. 1 (satu) lembar copy Surat PT. Utama Karya Nomor : HKDG/Smr.2145/ST/228 Hal Tugas Perbantuan Kepada Sdr. G. Aji Sentosa, ST tanggal 15 November 2011
43. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: HKDG/Smr.180/UDP/02 Tanggal 26 Januari 2012, Hal: Koordinasi Pembagian Tugas (Pergantuan Tugas Operasional Proyek di Lapangan dari Ir. Padi Lestario kepada Remon Debal).
44. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: HKDG/Smr.1208/ST/104 Tanggal 06 Juli 2012, Perihal: Penugasan (Yusuf Sitorus sebagai SOM Proyek Mall Saint Morits).
45. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: HKDG/Smr.1784/ST/194 Tanggal 18 Oktober 2011, Perihal: Penugasan (Yusuf Sitorus sebagai SOM pada Proyek IPDN Bukit Tinggi).
46. 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 179/KPTS/04/2011/5-7 Tanggal 25 Januari 2011 Perihal: Pembebasan dan Pengangkatan Kembali Sebagai Pejabat (Pengangkatan Rudy Hertanto sebagai GM Sumber Daya pada Direktorat IV).
 - b. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 1640/KPTS/23/2011/1-91 Tanggal 27 Juli 2011 Perihal: Pembebasan dan Pengangkatan Sebagai Pejabat (Pengangkatan Rudy Hertanto sebagai GM Produksi pada Direktorat Operasi I).
 - c. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 121/KPTS/05/2012/1-23 Tanggal 25 Januari 2012 Perihal: Pembebasan dan Pengangkatan Sebagai Pejabat (Pengangkatan Rudy Hertanto sebagai GM SDM & Umum pada Direktorat SDM & Umum).
 - d. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: GMSU/Gh.1323/UDP/65 Tanggal 30 Juli 2012 Perihal: Pengakhiran Hubungan Kerja Dengan Mendapat Hak Pensiun Normal.
47. 15 (lima belas) lembar copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1260004347711, nama R. PEDI LESTARIO periode 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2014.

Hal 35 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 19 (sembilan belas) lembar copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1110006241331, nama R. PEDI LESTARIO periode 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2014.
49. 19 (sembilan belas) lembar copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1050004679845, nama REMON DEBAL periode 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2014.
50. 7 (tujuh) lembar copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1110006322479, nama REMON DEBAL periode 17 Februari 2012 s.d. 1 Agustus 2013.
51. 6 (enam) lembar copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1080001363838, nama REMON DEBAL periode 1 Januari 2011 s.d. 1 Maret 2014.
52. 5 (lima) lembar copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1110012031973, nama GREGORIUS AJI SENTOSA periode 18 November 2011 s.d. 31 Desember 2014.
53. 12 (dua belas) lembar copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1260004019930, nama GREGORIUS AJI SENTOSA periode 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2014.
54. 1 (satu) bundel copy legalisir Daftar Harga Satuan Upah, Bahan, Pekerjaan (HSPK) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Agam dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Triwulan III (September) tahun 2010.
55. 1 (satu) bundel copy legalisir Daftar Harga Satuan Upah, Bahan, Pekerjaan (HSPK) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Agam dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Triwulan III (September) tahun 2011.
56. 1 (satu) bundel copy legalisir Daftar Harga Satuan Upah, Bahan, Pekerjaan (HSPK) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Agam dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Triwulan III (September) tahun 2012
57. 1 (satu) bundel fc dokumen surat penawaran harga dan daftar analisa pekerjaan atap baja ringan gonjong IPDN Baso TA 2011 dari sdr Sudiswar
58. 1 (satu) bundel copy Dokumen Analisa Harga Satuan dan Barang, Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, PT. Bina Karya (Persero).

Hal 36 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. 1 (satu) lembar copy Pengumuman Prakualifikasi
Nomor: 08/Peng/P3/KK/KDN/V/2011 Iklan Harian: Koran Tempo Hal: F9,
Hari/Tanggal: Senin, 30 Mei 2011, Perihal: Pengumuman PQ/Lelang.
60. 1 (satu) bundel copy dokumen terkait Pekerjaan
Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat,
Tahun Anggaran 2011, yang terdiri dari:
- a) Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis Nomor:
169/BA/EV/KK/KDN/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011.
 - b) Pengumuman Peringkat Teknis Nomor:
181/Peng/P3/KK/KDN/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011,
61. 1 (satu) lembar copy Surat Setjen Kemendagri
Nomor: 175/Und/KK/KDN/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011, perihal
Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II, ditujukan kepada PT.
Hutama Karya, PT. Wijaya Karya dan PT. Wakita Karya. Ditandatangani
oleh MOHAMMAD NOVAL, ST., Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi di Lingkungan Setjen
Kemendagri;
62. Copy Dokumen yang terdiri dari:
- a) 2 (dua) lembar copy Surat PT. Utama Karya, Divisi Gedung,
Nomor HK.DG/A.1357/TENDER/066 tanggal 12 Agustus 2011
ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Konsultasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri, perihal Penawaran Harga untuk
Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi
Sumatera Barat. Ditandatangani oleh Ir. BUDI RACHMAT K. MM.,
General Manager Divisi Gedung, PT. Utama Karya.
 - b) 2 (dua) lembar copy dokumen Rekapitulasi Biaya, nilai
pembulatan Rp 125,686,000,000.00 ditandatangani di Jakarta
tanggal 12 Agustus 2011 oleh Ir. BUDI RACHMAT K. MM., General
Manager Divisi Gedung, PT. HK.
63. 1 (satu) bundel copy dokumen terkait Pekerjaan
Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat,
Tahun Anggaran 2011, yang terdiri dari:
- a) Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga Nomor:
144/BA/PPH/KK/KDN/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011.
 - b) Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Harga Nomor:
177/BA/EV/KK/KDN/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 180/BA/EV/KK/KDN/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011.
64. 1 (satu) lembar copy Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 011/3438/SJ, tanggal 13 September 2011, perihal Persetujuan Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemendagri, ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI, Meteri Dalam Negeri selaku Pengguna Anggaran;
65. 1 (satu) lembar copy Pengumuman Pemenang Nomor: 299/Peng/P3/KK/KDN/IX/2011 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, ditandatangani di Jakarta tanggal 13 September 2011 oleh MOHAMMAD NOVAL, ST., Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal.
66. 1 (satu) lembar copy Surat Setjen Kemendagri, Nomor: 027/1057,PAKPA/IX/2011 tanggal 21 September 2011 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, ditujukan kepada Direktur PT. Hutama Karya (Persero), ditandatangani oleh Ir. DUDY JOCOM, Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
67. 1 (satu) bundel copy Nota Dinas Nomor : 562/PBMN/IX/12 tanggal 31 Oktober 2011 Perihal : Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Minggu kelima
68. 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 027/1820.3/BASTPHP/PAKPA/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011
 - b. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Kesanggupan a.n. Ir. Budi Rachmat Kurniawan.MM, Jabatan : General Manager PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung
69. 5 (lima) lembar copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (Tahap III) Nomor : 027/1761.2/BASTPHP/PAKPA/XII/2011 Tanggal 9 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 06/BAPKP-HKDG/IPDN BT/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011

Hal 38 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan Pelaksana Nomor: 027/2023/BAST/PAKPA/XII/2011 Tanggal: 29 Desember 2011, Pekerjaan: Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Lokasi: Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
71. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Dalam Masa Pemeliharaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Nomor: 534/BAP/PAKPA/VIII/2012 Tanggal: 6 Agustus 2012.
72. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima II Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Nomor: 027/1561/BAST/VIII/2012 Tanggal: 7 Agustus 2012
73. 1 (satu) bundel copy Kwitansi, Kwitansi Nomor: 01/U.Muka/IPDN/September/2011 Tanggal 28 September 2011, Dari: Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sebesar Rp. 25.137.200.000,-, Untuk Pembayaran: Pembayaran Uang Muka Pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan SPMK Nomor: 027/1078/PAKPA/IX/2011 dan Kontrak Nomor: 011/1075/PAKPA/IX/2011 Tanggal 23 September 2011, MAK.010.01.02-1224.01.011.533111.
74. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor: HK.DG/R.4100/DIV.C/325 Tanggal 30 November 2011 Perihal: Pembayaran Tahap Pertama Pekerjaan Kostruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat TA 2011.
75. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 03/Tahap ke-2/IPDN/XII/2011 Tanggal 30 Nopember 2011, Dari: Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sebesar Rp. 30.164.640.000,-, Untuk Pembayaran: Pembayaran Tahap Kedua Pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kostruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan SPMK Nomor: 027/1078/PAKPA/IX/2011 dan Kontrak Nomor: 011/1075/PAKPA/IX/2011, Tanggal 23 September 2011, MAK.010.01.02-1224.01.011.533111 dan Progress 55,5998%.
76. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: S45627T/133/110 Tanggal 20-10-2011.

Hal 39 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: S84138T/133/110 Tanggal 14-12-2011.
78. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 160439X/133/110 Tanggal 22-12-2011.
79. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 163654X/133/110 Tanggal 27-12-2011.
80. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 164934X/133/110 Tanggal 29-12-2011.
81. 1 (satu) bundel copy Dokumen dalam Map Plastik yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bundel copy Daftar Suplier Item Dominan (SKBDN).
 - b. 1 (satu) bundel copy Daftar Kontrak Subkontraktor Divisi dan Realisasi Tagihan Tahun 2011 - 2012.
 - c. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 01/U.Muka/IPDN/September/2011 Tanggal 28 September 2011 Sejumlah Rp. 25.137.200.000,- Untuk Pembayaran: Pembayaran Uang Muka Pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kostruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan SPMK Nomor: 027/1078/PAKPA/IX/2011 dan Kontrak Nomor: 011/1075/PAKPA/IX/2011, Tanggal 23 September 2011, MAK.010.01.02-1224.01.011.533111.
 - d. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor: HK.DG/R.4100/DIV.C/325 Tanggal 30 Nopember 2011 Perihal: Pembayaran Tahap Pertama Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera barat TA 2011 (Kwitansi Nomor: 01/Tahap ke-1/IPDN/XI/2011 Tanggal 30 Nopember 2011 Sejumlah Rp. 20.109.760.000,- Untuk Pembayaran: Pembayaran Tahap Pertama Pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kostruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan SPMK Nomor: 027/1078/PAKPA/IX/2011 dan Kontrak Nomor: 011/1075/PAKPA/IX/2011, Tanggal 23 September 2011, MAK.010.01.02-1224.01.011.533111 dan Progress 25,3961%).
 - e. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 03/Tahap ke-2/IPDN/XII/2011 Tanggal 30 Nopember 2011 Sejumlah Rp. 30.164.640.000,- Untuk Pembayaran: Pembayaran Tahap Kedua Pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kostruksi Pembangunan Gedung

Hal 40 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan SPMK Nomor: 027/1078/PAKPA/IX/2011 dan Kontrak Nomor: 011/1075/PAKPA/IX/2011, Tanggal 23 September 2011, MAK.010.01.02-1224.01.011.533111 dan Progress 55,5998%).

f. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 160439X/133/110 Tanggal 22-12-2011.

82.3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penjamin yang ditandatangani oleh Ir. BUDI RACHMAT KURNIAWAN, MM tanggal 18 April 2012

83.2 (dua) lembar copy Jaminan Bank (Bank Garansi) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No. 032917110284 dengan nilai Rp. 20.109.760.000 (Dua puluh Milyar Seratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

84.1 (satu) lembar copy Bank Garansi (Jaminan Pemeliharaan) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor No. 032917110288 dengan nilai Rp. 6.284.300.000,- (Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

85.3 (tiga) lembar copy buku daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, diterbitkan oleh : Ikatan Notaris Indonesia 2006

86.1 (satu) bundel asli Anggaran Rencana Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Baso-Kab. Agam No. Karya : K.09.016 PT. Hutama Karya

87.1 (satu) odner warna Putih berisikan dokumen BQ Proyek IPDN Baso

88.1 (satu) lembar copy Master Schedule Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Prov. Sumatera Barat di Kabupaten Agam PT. Hutama Karya (Persero) tertanggal 29 Desember 2011.

89.1 (satu) lembar copy Master Schedule Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Prov. Sumatera Barat di Kabupaten Agam PT. Hutama Karya (Persero) tertanggal 23 September 2011 (tidak ada tanda tangannya).

90.1 (satu) bundel dokumen gambar kerja/shop drawing untuk pemasangan atap pada gedung auditorium gedung administrasi, Rumah doa (T125), serta rumah dinas (T 72)

91.3 (tiga) lembar copy Jadwal Penyelesaian dan Monitoring Gedung Administrasi Proyek IPDN Kabupaten Agam – Sumatera Barat (Januari 2012 dan Pebruari 2012).

Hal 41 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92.6 (enam) lembar copy Jadwal Penyelesaian dan Monitoring Gedung Administrasi Proyek IPDN Kabupaten Agam – Sumatera Barat (Oktober 2011, November 2011 dan Desember 2011).
- 93.1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 05/LKP-HKDG/IPDN BT/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampirannya.
- 94.1 (satu) bundel map merah yang didepannya terdapat print out Rekapitulasi Prestasi Mingguan Kemajuan Pekerjaan Periode : 15 (Lima Belas) Tanggal 30 Desember s/d 5 Januari 2012 Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Lokasi Kabupaten Agam
- 95.3 (tiga) lembar Rekapitulasi Prestasi Kemajuan Pekerjaan Tanggal 03 April 2012 yang dibuat oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Arkitek Team Empat ditandatangani oleh Dedi Junaidi selaku Site Manager
- 96.4 (empat) lembar printout capture blackberry messenger display name: BR | Budi HK, Dikirim Sel @ 19:58 - 22:51.
- 97.5 (lima) lembar copy Pengesahan Direksi P.T. Utama Karya (Persero) Tentang Anggaran Rencana Pelaksanaan, Berdasarkan Rapat Eksekutif Pelaksanaan (REP) tgl. 28 Oktober 2011.
- 98.1 (satu) bundel copy Foto Progres 100% Proyek Pembangunan IPDN Sumatera Barat.
- 99.1 (satu) bundel asli dokumen foto dokumentasi pekerjaan atap baja ringan gonjong IPDN Baso TA 2011
100. 1 (satu) bundel dokumen asli Progress Visual Sampai Tanggal 11 Maret 2012 Proyek Pembangunan Kampus IPDN Bukit Tinggi Sumatera Barat Konsultan Manajemen Konstruksi Arkitek Team Empat dan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia
101. 1 (satu) bundel print out Lporan Pemeriksaan Lapangan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Regional di Kabupaten Agam, Sumatera barat Tanggal 6 Januari 2013
102. 1 (satu) bundel dokumen ASLI Pengujian Material Urugan Pilihan Pekerjaan Parkir dan Jalan Lingkungan Kampus IPDN di Baso PT Utama Karya Oktober 2011.
103. 1 (satu) bundel dokumen ASLI Laporan Pelaksanaan Pengujian Dinamis Pondasi Tiang Pancang dengan Metode Pile Driving Analyzer (PDA) Test Doc.No.080/PDA-HK/SB/XI/2011.

Hal 42 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) bundel copy Surat No. 050/4117/SJ Perihal: Rancangan Renstra Depdagri Tahun 2010-2014 Tanggal 20 Nopember 2009, Rancangan Renstra Depdagri Tahun 2010-2014: Surat Menteri Dalam Negeri kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi dan Kepala UKP4.
105. 1 (satu) bundel copy Surat No. 050/4661/SJ Perihal: Renstra Depdagri Tahun 2010-2014 Tanggal 28 Desember 2009, Penyempurnaan Rancangan Renstra Depdagri Tahun 2010-2014: Surat Menteri Dalam Negeri kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi dan Kepala UKP4.
106. 1 (satu) bundel copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 20 Januari 2010, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Lampiran Buku 11: Rencana Tindak Kementerian/Lembaga Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 Per Kementerian/Lembaga, Kementerian Dalam Negeri: 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur Kernenterian Dalam Negeri.
107. 1 (satu) bundel Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi, No. 050/265/SJ Perihal: Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 Tanggal 30 Januari 2010 beserta lampirannya.
108. 1 (satu) buku copy Permendagri No. 16 Tahun 2010 Tanggal 30 Januari 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kernenterian Dalam Negeri Tahun 2010-2014.
109. 1 (satu) bundel copy Materi Sidang Kabinet tentang Rencana Keria Pemerintah Tahun 2011 lingkup Kemendagri, Tanggal 24 Maret 2010.
110. 1 (satu) bundel copy Materi Sidang Kabinet Paripurna Bidang Perekonomian tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 lingkup Kemendagri, Tanggal 5 April 2010.
111. 1 (satu) bundel copy Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Republik Indonesia perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Keria Pemerintah (RKP) Tahun 2011 No. 0181/M.PPN/04/2010 dan No. SE-120/MK/2010 Tanggal 6 April 2010.
112. 1 (satu) bundel copy TOR Pembangunan Sarpras Sarana Fisik Kampus IPDN Daerah 4 (empat) Daerah TA. 2011, April 2010, beserta lampiran

Hal 43 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Rencana Anggaran Biaya dan Laporan Akhir Master Plan Kampus IPDN Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Riau.

113. 1 (satu) bundel copy Trilateral Meeting Rencana Keria Kernendagri Tahun 2011, 12-15 April 2010.
114. 1 (satu) bundel copy Materi Rencana Keria Pemerintah (RKP) lingkup Kernenterian Dalam Negeri Tahun 2011, 28 April 2010.
115. 1 (satu) bundel copy Surat Penyampaian Pagu Indikatif Hasil Trilateral Meeting dan Sekretaris Jenderal kepada Komponen Kemendagri No. 900/17131/SJ Tanggal 30 April 2010.
116. 1 (satu) bundel copy Rencana Keria Pemerintah (RKP) lingkup Kernendagri, 3 Mei 2010.
117. 1 (satu) bundel copy Alokasi Pagu Indikatif Tahun 2011 Kernenterian Dalam Negeri Berdasarkan Program, Satker dan Alokasi Anggaran, 4 Mei 2010.
118. 1 (satu) bundel copy Perpres No. 29 Tahun 2010 Tanggal 14 Mei 2010, Rencana Keria Pemerintah (RKP).
119. 1 (satu) bundel copy Materi Kernenterian Dalam Negeri pada Rapat Dengar Pendapat Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 dengan Komisi II DPR RI, 3 Juni 2010.
120. 1 (satu) bundel copy Materi Menteri Dalam Negeri pada Sidang Kabinet Paripurna Bidang Perekonomian tentang APBN Tahun 2010 dan RAPBN Tahun 2011, 10 Juni 2010.
121. 1 (satu) bundel copy Materi Kementerian Dalam Negeri pada Rapat Dengar Pendapat Penyempurnaan Alokasi Anggaran Menurut Program dan Kegiatan Kernenterian Dalam Negeri Tahun 2011 (Komisi 11 DPR RI), 16 Juni 2010.
122. 1 (satu) bundel copy Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011 No. SE-294/MK.02/2010 Tanggal 24 Juni 2010.
123. 1 (satu) bundel copy RKA-K/L Tahun 2011 Berdasarkan Pagu Sementara.
124. 1 (satu) bundel copy Materi Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI Pembahasan Rencana Keria dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri TA. 2011, 2 September 2010, 20 September 2010.

Hal 44 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) bundel copy Dokumen Kesepakatan Trilateral Meeting ke 2 Tahun 2010 Berdasarkan Pagu Sementara Kemendagri Tahun 2011, 11-12 Oktober 2010.
126. 1 (satu) bundel copy Materi Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri TA. 2011, 21 Oktober 2010.
127. 1 (satu) bundel copy Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Definitif Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011 No. SE-676/MK.02/2010 Tanggal 3 November 2010.
128. 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, 19 November 2010.
129. 1 (satu) bundel copy Pagu Definitif Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 (Persetujuan Komisi II DPR RI), 22 November 2010.
130. 1 (satu) bundel copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2011 tanggal 30 November 2010, beserta Lampiran 1 Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2011 Menurut Organisasi, Bagian Anggaran, Unit Organisasi, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Jenis Belanja, dan Sumber Dana (010) Kementerian Dalam Negeri (010.01) Sekretariat Jenderal Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
131. 1 (satu) bundel copy Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri (RKA-K/L) Tahun 2011 Berdasarkan Pagu Definitif, 1 Desember 2010.
132. 1 (satu) bundel copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 No. 2863/010-01.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010.
133. 1 (satu) buku copy Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011, Nomor 5 Tahun 2011 Tanggal 21 Januari 2011.
134. 6 (enam) lembar copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tanggal 12 Januari 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 Tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan.

Hal 45 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



135. 2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134/M Tahun 2010 Tanggal 16 September 2010 (SK Pengangkatan Sdr, Dr. Ir. Yuswandi A. Temenggung, M.Sc., M.A. sebagai Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri).
136. 2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89/M Tahun 2014 Tanggal 13 Juni 2014 (SK Pengangkatan Sdr, Dr. Ir. Yuswandi A. Temenggung, M.Sc., M.A. sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri).
137. 2 (dua) lembar copy Petikan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.22-514 Tahun 2004 Tanggal 29 Juni 2004 (SK Pengangkatan Sdr, Dr. Ir. Yuswandi A. Temenggung, M.Sc., M.A. sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran pada Sekretariat Jendral Departemen Dalam Negeri).
138. 2 (dua) lembar copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2004 Tanggal 6 Oktober 2004 Tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan.
139. 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
140. 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
141. 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
142. 1 (satu) Bundel Copy Perjanjian/Kontrak Kerja tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Di Kabupaten Agam tahun Anggaran 2011 Antara Kementerian Dalam Negeri RI dan PT. Utama Karya (Persero), Nomor Kontrak : 011/1075/PAKPA/IX/2011 Tanggal 23 September 2011.
143. 1 (satu) bundel asli Perjanjian/Kontrak Kerja tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011, antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan PT. Utama Karya (Persero). Nomor Kontrak: -11/1075/PAKPA/IX/2011, tanggal 23 September 2011.
144. 1 (satu) bundel copy Perjanjian/Kontrak Kerja Tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011 Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan PT. Utama Karya (Persero) Nomor Kontrak: 011/1075/PAKPA/IX/2011 Tanggal: 23 September 2011

145. 1 (satu) bundel copy Pekerjaan Tambah Kurang Contract Change Order (C.C.O) Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011.

146. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian/ Kontrak Kerja tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011 Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dan PT. Utama Karya (Persero) dengan nomor kontrak : 011/ 1075/ PAKPA/ IX/ 2011 tanggal 23 September 2011 yang pada pasal 18 memuat Sanksi dimana pada poin (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka atas keterlambatan ini PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5 % (lima per seratus) dari nilai kontrak

147. 3 (tiga) lembar copy Addendum Perjanjian/ Kontrak Kerja Tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatra Barat Di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011 antara Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dan PT Utama Karya (Persero), Nomor Kontrak: 011/1682/PAKPA/XII/2011, tanggal 7 Desember 2011.

148. 1 (satu) bundel copy Dokumen IPDN Kampus Sumatera Barat TA 2011 yang terdiri dari :

a. 1 (satu) bundel copy Dokumen Kontrak (Perjanjian/Kontrak Kerja Tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011 antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan PT. Utama Karya (Persero) Nomor Kontrak : 011/1075/PAKPA/IX/2011 Tanggal 23 September 2011

b. 1 (satu) bundel copy Permohonan Pembayaran dari PT. Utama Karya yang terdiri dari :

aa. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor : KH.D/R.2230/DIV.C/343 Tanggal 14 Desember 2011 perihal : Pembayaran Tahap

Hal 47 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus
IPDN Provinsi Sumatera Barat TA 2011

- bb. 2 (dua) bundel copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 027/2078/PAKPAK/IX/2011 Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011
- c. 1 (satu) bundel copy Daftar Jasa Konsultansi (Daftar Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Bukittinggi Tahun Anggaran 2011
- d. 1 (satu) bundel copy Persetujuan Penetapan Menteri Dalam Negeri Perihal Penetapan Pemenang (Surat Nomor 011/3438/SJ Tanggal 13 September 2011 Perihal : Persetujuan Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat
- e. 1 (satu) bundel copy Pengumuman Pemenang Lelang (Pengumuman Pemenang Nomor : 229/Peng/P3/KK/KDN/IX/2011 Tanggal 13 September 2011 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011
- f. 1 (satu) bundel copy SK Penetapan Panitia Lelang (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 027-129 Tahun 2011 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011
- 149. 2 (dua) lembar copy dokumen Dasar Penetapan Kontrak Lumpsum
- 150. 3 (tiga) lembar copy dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2010 nomor : 0001/010-01.1/-/2010 tanggal 31 desember 2009
- 151. 16 (enam belas) lembar copy dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2011 nomor : 2863/010-01.1.01/00/2011 tanggal 20 desember 2010
- 152. 1 (satu) map kuning KABITA dengan tulisan “ Baru” pada sudut atas kanan dan kiri serta berjudul “Perencana Sumatera Barat (Ulang) 2011
- 153. 1 (satu) map kuning KABITA dengan tulisan “ Lama” pada sudut atas kanan dan kiri serta berjudul “Perencana Sumatera Barat 2011
- 154. 1 (satu) bundel asli dokumen pelelangan Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat (berita acara) yang lembar pertamanya berupa Surat Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan

Hal 48 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Aset selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal Kemendagri Nomor : 027/420/PAKPA/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 Hal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat

155. 1 (satu) lembar copy Dokumen 7, Perhitungan Kemampuan Dasar Perusahaan (KD) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
156. 1 (satu) lembar copy Perhitungan SKK, SKP dan KD, PT. Nindya Karya (Persero).
157. 2 (dua) lembar copy Formulir Isian Perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP) Penyedia Jasa Kualifikasi, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.
158. 3 (tiga) lembar copy Daftar Sisa Kemampuan Nyata (SKN), SKK, & KD Jasa Pemborongan, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.
159. 4 (empat) lembar copy Dokumen Prakualifikasi, Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), PT. Waskita Karya (Persero).
160. 2 (dua) lembar copy Perhitungan SKK, SKP & KD, PT. PP (Persero) Tbk.
161. 1 (satu) lembar copy surat nomor 011/2153/SJ tanggal 9 Juni 2011 perihal Permintaan Pendampingan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampus IPDN
162. 1 (satu) lembar copy surat S-311/D4/1/2011 tanggal 12 Juli 2011 Hal Reviu dan Supervisi atas Pengadaan Barang dan Jasa dan 1 (satu) lembar lampiran Surat Tugas Nomor : ST-415/D4.01/2010 tanggal 12 Juli 2011
163. 2 (dua) lembar copy surat nomor S-484/D4.1/2011 tanggal 3 Agustus 2011, hal Reviu dan Supervisi Pengadaan Barang dan Jasa
164. 1 (satu) bundel dokumen dalam map berwarna kuning berisikan :
 - a. 1 (satu) bundel dokumen berisikan
 - (1) 2 (dua) lembar copy dokumen keputusan menteri dalam negeri nomor : 892.1-829 tahun 2009 tentang Lokasi Pembangunan Kampus IPDN di Daerah
 - (2) 2 (dua) lembar copy dokumen keputusan menteri dalam negeri nomor : 425.12-22 tahun 2009 tentang Lokasi Kampus IPDN Daerah
 - (3) 2 (dua) lembar copy dokumen keputusan menteri dalam negeri nomor : 011-496 tahun 2009 tentang Penunjukkan Unit

Hal 49 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Pelaksana Pembangunan Kampus IPDN Daerah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri

- (4) 1 (satu) lembar copy dokumen Nota Dinas nomor : 051/149/PAKPA/XII/09 perihal Laporan Hasil Survey Lokasi Rencana Pembangunan IPDN dan Net Konsep Surat Sekretaris Jenderal Depdagri Kepada Para Gubernur di Empat Provinsi Perihal Pemberitahuan Lokasi Pembangunan Kampus IPDN Di tingkat Kabupaten
- (5) 1 (bundel) copy dokumen Laporan Survey Lokasi Pembangunan IPDN Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
- b. 1 (satu) bundel dokumen di clip berisikan :
 - (1) 2 (dua) lembar copy dokumen surat nomor : S-370/D4/01/2011 perihal Hasil Review Proses Pengadaan Gedung Kampus IPDN Pada 4 Lokasi di Daerah Tahun ANggaran 2011 tanggal 22 Agustus 2011
 - (2) 5 (lima) lembar copy dokumen Penjelasan Panitia terkait Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Khususnya Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di 3 Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat) tahun anggaran 2011
 - (3) 2 (dua) lembar copy dokumen Nota Dinas Nomor : 21/ND/KK/KDN/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Laporan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di 4 Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat dan Riau) tahun anggaran 2011
 - (4) 1 (satu) lembar copy dokumen Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran Atas Tambahan Persyaratan SBU Gred – 7 tanggal 8 September 2011 yang ditandatangani oleh DUDY JOCOM
 - (5) 4 (empat) lembar copy dokumen Nota Dinas Nomor : 692/SJ/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Penjelasan Hasil Reviu Proses Pengadaan Gedung Kampus IPDN di 4 Daerah tahun anggaran 2011 oleh BPKP.
- c. 10 (sepuluh) lembar copy dokumen Laporan BPKP nomor : LAP-506/D4.01/2011 laporan Hasil Reviu Proses Pengadaan

Hal 50 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Kampus IPDN pada Empat Lokasi di Daerah tahun anggaran 2011 tanggal 19 Agustus 2011.

165. 9 (sembilan) lembar fotokopi Simpulan Hasil Reviu dan Supervisi atas Proses Pengadaan Gedung Kampus IPDN pada Empat Lokasi di Daerah Tahun Anggaran 2011, Lampiran surat Nomor: S-(kosong)/D4/01/2011 tanggal: (kosong) Agustus 2011.

166. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait kegiatan riviw pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN pada empat lokasi di daerah Tahun Anggaran 2011, dimana diantaranya terdapat:

1. Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 011/2153/SJ perihal Permintaan Pendampingan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampus IPDN, tanggal 9 Juni 2011, ditujukan kepada Kepala BPKP cq Deputy Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendagri DIAH ANGGRAENI.
2. Fotokopi Surat Deputy Pengawasan bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Nomor: S-311/D4/1/2011 tanggal 12 Juli 2011, perihal: Reviu dan Supervisi atas Pengadaan Barang dan Jasa, serta Surat Tugas Nomor: ST-415/D4.01/2010 tanggal 12 Juli 2011.
3. Fotokopi Surat Deputy Pengawasan bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Nomor: S-484/D4/1/2011 tanggal 03 Agustus 2011, perihal: Reviu dan Supervisi atas Pengadaan Barang dan Jasa, serta Surat Tugas Nomor: ST-483/D4.01/2010 tanggal 03 Agustus 2011.
4. Fotokopi Kertas Kerja Evaluasi BPKP, Daftar Perbandingan Pekerjaan, kegiatan: Pembangunan Gedung Kampus Baso IPDN SUMBAR tahun anggaran 2011, dibuat oleh: M. ROFIQ, direview oleh: Marselina Tetty S.

167. 1 (satu) bundel copy Dokumen Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat PT. Bina Karya (Persero

168. 1 (satu) bundel copy Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat PT. Bina Karya (Persero

Hal 51 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) bundel copy Dokumen Bill of Quantity, Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, PT. Bina Karya (Persero).
170. 1 (satu) bundel copy Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat TA. 2011, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
171. 1 (satu) bundel copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat TA. 2011, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
172. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat TA. 2011, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
173. 1 (satu) bundel copy Gambar Perencanaan Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat PT. Bina Karya (Persero)
174. 1 (satu) budel As Build Drawing pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam TA 2011.
175. 1 (satu) bundel copy Cut Off-Karya Rampung Bulan Oktober 2012 Proyek Kampus IPDN Baso – Sumatera Barat PT. Utama Karya
176. 1 (satu) bundel copy Cut Off – Karya Rampung Bulan Agustus 2013 Proyek IPDN Baso- Sumatera Barat PT. Utama Karya
177. 1 (satu) bundel Dokumentasi Photo Nama Proyek Pembangunan Kampus IPDN-Baso Periode Desember 2011 s/d Maret 2012
178. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Proyek pembangunan gedung kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun 2011.
179. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke I Periode 23 September s.d. 27 Oktober 2011, Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, TA 2011.
180. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke II Periode 28 Oktobers.d. 01 Desember 2011, Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, TA 2011.
181. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke III Periode 2 Desember s.d. 29 Desember 2011, Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, TA 2011.
182. 1 (satu) bundel copy laporan Mingguan Minggu Ke: 7 (Tujuh) Tanggal: 4 November s/d 10 November 2011 Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Kecamatan Baso - Kabupaten Agam, Utama Karya (Persero) Divisi Gedung, arkitek team empat.

Hal 52 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) buah ASLI buku Laporan Mingguan ke-8 Periode 11 November s/d 17 November 2011 Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011.
184. 1 (satu) bundel copy laporan Mingguan Minggu Ke: 9 (Sembilan) Tanggal: 18 November s/d 24 November 2011 Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Kecamatan Baso - Kabupaten Agam, Utama Karya (Persero) Divisi Gedung, arsitek team empat.
185. 1 (satu) bundel copy laporan Mingguan Minggu Ke: 11 (Sebelas) Tanggal: 2 Desember s/d 8 Desember 2011 Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Kecamatan Baso - Kabupaten Agam, Utama Karya (Persero) Divisi Gedung, arsitek team empat.
186. 1 (satu) buah Copy buku Laporan Mingguan ke-12 Periode 09 Desember s/d 15 Desember 2011 Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011.
187. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Akhir Master Plan Kampus IPDN Regional Baso Bukit Tinggi Sumatera Barat Desember 2009 LPPM ITB Bandung
188. 1 (satu) bundel buku Pembangunan Kampus IPDN 4 Provinsi (Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara) Tahun Anggaran 2011 Kementerian Dalam Negeri Sekretariat Jenderal
189. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Regional Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat Tahun Anggaran 2010
190. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Regional Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 PT. Bina Karya (Persero).
191. 1 (satu) bundel copy Laporan Konsepsi Desain Kampus IPDN Baso-Sumatera Barat Tahun 2010 PT. Billitonica Indomatra Consultant
192. 1 (satu) bundel copy Dokumen Rencana Kerja Dan Syarat (Tahap I) Kampus IPDN Baso-Provinsi Sumatera Barat PT. Billitonica Indomatra Consultant

Hal 53 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 1 (satu) bundel copy Dokumen Tahap I (Administrasi & Teknis) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Jakarta 02 Agustus 2011, PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung.
194. 1 (satu) bundel copy Dokumen Kualifikasi (1 – 2) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Jakarta 14 Juni 2011, PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung.
195. 1 (satu) bundel copy Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Rekaman, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.
196. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuilifikasi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Buku I, PT. Nindya Karya (Persero).
197. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuilifikasi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Buku II, PT. Nindya Karya (Persero).
198. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuilifikasi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.
199. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuilifikasi Vol. 1 of 2 Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Rekaman, PT. Waskita Karya (Persero).
200. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuilifikasi Vol. 2 of 2 Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Rekaman, PT. Waskita Karya (Persero).
201. 1 (satu) bundel copy Dokumen Administrasi & Teknis Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Rekaman, PT. Waskita Karya (Persero).
202. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Rekaman, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.
203. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Pembangunan: Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat DIPA APBN Tahun Anggaran 2011, PT. PP (Persero) Tbk – Cabang IX.

Hal 54 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 1 (satu) bundel copy Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pembangunan: Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumbar DIPA APBN Tahun Anggaran 2011, PT. PP (Persero) Tbk – Cabang IX.
205. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Nomor: 018/PRA/KK/KDN/III/2011 Tanggal: 28 Maret 2011, Paket Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, Kegiatan: Review Desain dan Pengawasan Berkala, Sumber Dana: DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tahun Anggaran: 2011.
206. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Bina Karya (Persero).
207. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Kampus IPDN Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011 PT. Bina Karya (Persero)
208. 1 (satu) bundel copy Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Indomas Mulia.
209. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat April 2011, PT. Indah Karya (Persero).
210. 1 (satu) bundel copy Dokumen Administrasi dan Teknis Paket Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung IPDN di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Yodya Karya (Persero).
211. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Rekayasapratama Grhayasaciptaloka.
212. 1 (satu) bundel copy Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Review Desain dan Pengawasan Berkala Tahun Anggaran 2011, Arkonin.
213. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Review Desain dan Pengawasan Berkala Tahun Anggaran 2011, Arkonin.

Hal 55 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan: Perencanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun: 2011, PT. Cakra Manggilingan Jaya
215. 1 (satu) bundel copy Data Administrasi Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Indomas Mulya.
216. 1 (satu) bundel copy Data Teknis Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Indomas Mulya.
217. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011 PT. Bina Karya (Persero)
218. 1 (satu) bundel copy Dokumen Administrasi Dan Penawaran Teknis Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011 PT. Bina Karya (Persero).
219. 1 (satu) bundel copy Dokumen Proposal Teknis Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011 PT Bina Karya (Persero)
220. 1 (satu) Bundel copy Kontrak Nomor Kontrak : 011/420/PAKPA/VII/2011 Tanggal 6 Juli 2011 untuk Jasa Konsultasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kab. Agam Antara Pusat Administrtasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 dan PT. Bina Karya (persero).
221. 1 (satu) bundel copy dokumen tagihan/pencairan PT. Bina Karya Pekerjaaan Jasa Konsultasi Perencana Pembangunan Gedung IPDN Kampus Provinsi Sumatra Barat Tahun Anggaran 2011.
222. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, Arkitek Team Empat.
223. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Kabupaten Agam, Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Bita Enarcon Engineering.

Hal 56 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuilifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Rancang Persada.
225. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuilifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Yodya Karya (Persero).
226. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuilifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Gubahlaras.
227. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, Gubahlaras.
228. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Kegiatan: Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Wahanacipta Bangunwisma.
229. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuilifikasi Kegiatan: Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Wahanacipta Bangunwisma.
230. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Rancang Persada.
231. 1 (satu) bundel copy Dokumen Administrasi & Teknis Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat 2011, PT. Ciriajasa Cipta Mandiri.
232. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuilifikasi Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat 2011, PT. Ciriajasa Cipta Mandiri.
233. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian/Kontrak Kerja Tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011 Antara Kementerian Dalam Negeri Republik

Hal 57 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan PT. Arkitek Team Empat Nomor :
011/22/PAKPA/VI/2011 Tanggal 6 Juni 2011

234. 1 (satu) bundel copy Perjanjian / Kontrak Kerja Tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Di Kab. Agam Tahun Anggaran 2011 antara Kementerian Dalam Negeri RI dan PT. Arkitek Team Empat, Nomor Kontrak : 011/22/PAKPA/VI/2011 Tanggal 6 Juni 2011.
235. 1 (satu) bundel copy dokumen tagihan/pencairan PT. Arkitek Team Empat Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung IPDN Kampus Provinsi Sumatra Barat Tahun Anggaran 2011.
236. 1 (satu) copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.2343/SPP/295 Tanggal 4 Oktober 2011 Pekerjaan Infrastruktur Area Perpustakaan & Poliklinik antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Yulian Berkah Abadi untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
237. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK – DG / A.2085 / SPP / 240 Tanggal: 8 September 2011, Pekerjaan Infrastruktur Area Asrama antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan CV. Prima Karya Sentosa untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat
238. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK – DG / A.2344 / SPP / 296 Tanggal: 4 Oktober 2011, Pekerjaan Infrastruktur Area Menza antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan CV. Prima Karya Sentosa untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
239. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK – DG / A.2101 / SPP / 245 Tanggal: 14 Oktober 2011, Pekerjaan Infrastruktur Area Auditorium antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan CV. Prima Karya Sentosa untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
240. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 4664 kepada CV. Prima Karya Sentosa sejumlah 524,000,000 Tanggal 16 November 2011.

Hal 58 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 5278 kepada CV. Prima Karya Sentosa sejumlah 2,000,000,000 Tanggal 27 Desember 2011.
242. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank Bukopin atas nama HUSAIN REDWIN NURLETTE No Rekening 0102038969 periode Desember 2011 s.d. Juni 2012
243. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-320/WPJ.04/KP.0903/2015, Nama: CV. Restu Kreasi Mandiri, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 02.143.028.5-016.000.
244. 1 (satu) lembar copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-02581/WPJ.04/KP.0903/2009, Nama: CV. Restu Kreasi Mandiri, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 02.143.028.5-016.000.
245. 1 (satu) lembar copy Surat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil Nomor: 01431/1.824.51, Nama Perusahaan: CV. Restu Kreasi Mandiri.
246. 1 (satu) bundel copy Akta Perseroan Komanditer "CV. Restu Kreasi Mandiri", Nomor 15.-, Tanggal 7 September 2005.-.
247. 2 (dua) lembar copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kepada: Nur Wahid ST Sejumlah Uang: Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Untuk penerimaan, dengan rincian sebagai berikut: Perintisan Proyek IPDN Bukit Tinggi tanggal 03/05/2011.
248. 1 (satu) copy Surat Perjanjian Pembedaan Nomor: HK-DG/A.1987/SPP/214 Tanggal 26 Oktober 2011 Pekerjaan Patung IPDN antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan Y. Sumartono,S.Sn untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011.
249. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 42911 kepada J. Sumartono S. SN sejumlah Rp. 42.484.000 Tanggal 08 November 2011.
250. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: W 3300 kepada Sumartono sejumlah Rp. 31.863.000 Tanggal 28-Mei-12.
251. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 4418 kepada Muslim sejumlah Rp. 17.150.000 Tanggal 11-Nov-11.

Hal 59 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero)
Kode Kas/Bank: H 45 kepada Muslim sejumlah Rp. 40.002.240,00
Tanggal Jan-13.
253. 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen Surat Perjanjian Jual Beli
nomor : HK.DG/A.2047/SPP/235, tanggal 15 November 2011,
Pekerjaan Jual Beli Material Rangka Baja antara PT. HUTAMA KARYA
(Persero) dengan PT. SINARINDO MEGAH PERKASA untuk Proyek
Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di
Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011. -
254. 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen Addendum-I Surat
Perjanjian Jual Beli nomor : HK.DG/A.2047/SPP-ADD I/235, tanggal
15 Desember 2011, Pekerjaan Jual Beli Material Rangka Baja antara
PT. HUTAMA KARYA (Persero) dengan PT. SINARINDO MEGAH
PERKASA untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN
Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011. -
255. 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen Surat Perjanjian
Pemborongan nomor : HK-DG/A.2048/SPP/236, tanggal 16
November 2011, Pekerjaan Rangka Atap Baja antara PT. HUTAMA
KARYA (Persero) dengan PT. SINARINDO MEGAH PERKASA untuk
Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera
Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011. -
256. 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen Addendum-I Surat
Perjanjian Pemborongan nomor : HK-DG/A.2048/SPP-ADD I/236,
tanggal 15 Desember 2011, Pekerjaan Rangka Atap Baja antara PT.
HUTAMA KARYA (Persero) dengan PT. SINARINDO MEGAH
PERKASA untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN
Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011. -
257. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Perintah Mulai Kerja nomor :
004/HK-IPDN.BT/FES/SPMK/XI/2011 tanggal 15-Nov-11.
258. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Perintah Mulai Kerja nomor :
005/HK-IPDN.BT/FES/SPMK/XI/2011 tanggal 15-Nov-11.-
259. 2 (dua) lembar copy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
Pengadaan & Pemasangan Rangka Atap Baja PT. Sinarindo Megah
Perkasa Pada Proyek IPDN Provinsi Sumatera Barat tanggal 4 Mei
2012.
260. 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen Lampiran Berita Acara
Pemeriksaan Pekerjaan Rangka Baja Atap. -

Hal 60 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



261. 1 (satu) bundel Rekap Pembayaran Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Baja Sinarindo Megah Perkasa,PT.
262. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Rekening Koran Pinjaman BANK MANDIRI atas nama PT Sinarindo Megah Perkasa Nomor Rekening 60102003468 periode : -
- a. 1/11/11 s/d 30/11/11;
 - b. 1/12/11 s/d 30/12/11;
 - c. 1/01/12 s/d 31/01/12;
 - d. 1/02/12 s/d 29/02/12;
 - e. 1/10/12 s/d 31/10/12;
 - f. 1/02/13 s/d 28/02/13;
 - g. 1/05/13 s/d 31/05/13;
 - h. 1/06/13 s/d 30/06/13;
 - i. 1/08/13 s/d 31/08/13;
 - j. 1/03/14 s/d 31/03/14;
 - k. 1/04/14 s/d 30/04/14;
 - l. 1/07/14 s/d 31/07/14.
263. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK: B 2496 kepada PT. Sinarindo Megah Perkasa sejumlah 75.000.000 Tanggal Juli 2014.
264. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Kode & No. Dok: W 1040 kepada PT. Sinarindo Megah Perkasa sejumlah Rp. 186.083.937 Tanggal 20-Feb-12.
265. 1 (satu) copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.151/SPP/013 Tanggal 17 Januari 2012 Pekerjaan GRC antara PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Gatrindo Jaya Abadi untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
266. 1 (satu) copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.256/SPP/016 Tanggal 2 Pebruari 2012 Pekerjaan Rangka Baja Gerbang antara PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Gatrindo Jaya Abadi untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
267. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Kode & No. Dok: W 4240 kepada PT. Gatrindo Jaya Abadi sejumlah Rp. 99.012.509 Tanggal 26-Jul-12.



268. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero)
Kode & No. Dok: BBK W 2624 kepada PT. Gatrindo Jaya Abadi
sejumlah Rp. 50.000.000 Tanggal 25 April 2012.
269. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero)
Kode & No. Dok: BBK: W 4540 kepada CV. Karya Jaya sejumlah
24.572.955 Tanggal 09-Agust-12.
270. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero)
Kode & No. Dok: BBK 2842 kepada CV. Bimantara Utama sejumlah
9,151,509 Tanggal 21 Mei 2012.
271. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero)
Kode & No. Dok: W 3776 kepada PT. Arunggatra Cakrawala sejumlah
Rp. 44.670.000,00 Tanggal ... Mei 2012.
272. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero)
Kode & No. Dok: BBK W (tidak jelas) kepada CV. Dua Putra Mandiri
sejumlah 25,000,000 Tanggal 24 September 2012.
273. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero)
Kode No. Dok: B 124 kepada CV. Duta Putra Mandiri sejumlah
36.218.287 Tanggal 03-Des-12.
274. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero)
Kode No. Dok: B 126 kepada CV. Duta Putra Mandiri sejumlah
107.805.793 Tanggal 03-Des-12.
275. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 2463 2012, Untuk: 60 – Divisi
Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 25 – 05 – 2012, BNI 1116,
Kredit Suplier JT PT Mandiri Unggul Pro Gd IPDN Sumbar DGD,
Jumlah: Rp. 404,308,197.
276. 1 (satu) bundel asli dokumen Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor
: HK-DG/St.1893/SPP/203 Tanggal 11 Oktober 2011 Pekerjaan
Elektrikal Antara PT. Utama Karya Divisi Gedung dengan PT. Indah
Yamamitra Persada Untuk Proyek IPDN Bukittinggi
277. 1 (satu) bundel copy Addendum – I Kontrak Perjanjian Pemborongan
Nomor : HK-DG/St.2091/SPP-ADD-I/225 Tanggal : 14 Desember 2011
Pekerjaan Elektronik antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi
Gedung dengan PT. Indah Yamamitra Persada Untuk Proyek IPDN
Bukit Tinggi.
278. 1 (satu) copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-
DG/St.2091/SPP/225 Tanggal 10 November 2011 Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Indah Yamamitra Persada untuk Proyek IPDN Bukit Tinggi.

279. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.2048/SPP/236 Tanggal 16 Oktober 2011, Pekerjaan Rangka Atap Baja antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Sinarindo Megah Perkasa untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011.
280. 1 (satu) bundel copy Addendum – I Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor : HK-DG/St.1893/SPP-ADD-I/203 Tanggal : 14 Desember 2011 Pekerjaan Elektrikal antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Indah Yamamitra Persada untuk Proyek IPDN Bukit Tinggi.
281. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 4287 kepada PT. Indah Yamamitra Persada sejumlah Rp. 866.700.000 Tanggal 08 November 2011.
282. 1 (satu) bundel copy Check List Pembayaran Suplier/Sub.Kont/Sewa Alat (*), Nama Karya: IPDN – Buting, Nama Rekanan: PT. Iyada, Jenis Pekerjaan: Elektrikal.
283. 1 (satu) bundel copy Routing Pencairan KMK Bank BTN Cabang Cawang, Patriapark kepada PT. Indah Yamamitra Persada sebesar 968,417,501.
284. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 1738 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 18 – 04 – 2012, Keterangan BTN 1116, PT. Yamamitra Persada, Pro Gedung IPDN Sumbang Kab Agam, DGD, Jumlah: Rp. 300,620,444.
285. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 3737 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 04 – 07 – 2012, BTN 1116, PT. Indah Yamamitra Persada, JT.KS.Pro Gedung Kampus IPDN Bukit Tinggi, Jumlah: Rp. 1,587,992,193.
286. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Serah terima – I Proyek Pembangunan IPDN Sumatera Barat, Pekerjaan: Elektrikal Sub-Kontraktor: PT. Indah Yamamitra Persada Tanggal 30 Desember 2011 beserta lampiran (Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/St.1893/SPP/203 Tanggal 11 Oktober 2011, Addendum – I Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/St.1893/SPP-ADD-I/203 Tanggal 14 Desember 2011 dan Addendum – II Kontrak

Hal 63 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/St.1893/SPP-ADD-II/203
Tanggal 16 Desember 2011).

287. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Serah terima – I Proyek Pembangunan IPDN Sumatera Barat, Pekerjaan: Elektronik Sub-Kontraktor: PT. Indah Yamamitra Persada Tanggal 30 Desember 2011 beserta lampiran (Surat No.: 063/SP2K/JKC.I/III/2012 Tanggal 26 Maret 2012 Perihal: Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K), Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/St.2091/SPP/225 Tanggal 10 November 2011, Addendum – I Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/St.2091/SPP-ADD-I/225 Tanggal 14 Desember 2011).
288. 3 (tiga) lembar copy Surat No.: 056/SP2K/JKC.I/XII/2011 Tanggal 27 Desember 2011 Perihal: Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K).
289. 1 (satu) lembar copy Surat No.: 840/JKC.I/HCLU/IV/2012 Tanggal 11 April 2012 Perihal: Rincian Transaksi Pencairan KMK an. PT. Indah Yamamitra Persada.
290. 1 (satu) lembar copy Surat No.: 1179/JKC.I/HCLU/V/2012 Tanggal 14 Mei 2012 Perihal: Rincian Transaksi Pencairan KMK an. PT. Indah Yamamitra Persada.
291. 2 (dua) lembar copy Surat No.: 261/JKC.I/HCLU/II/2012 Tanggal 03 Februari 2012 Perihal: Rincian Transaksi Pencairan KMK an. PT. Indah Yamamitra Persada.
292. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Giro Bank BTN A/C. No: 00241-01-30-000187-7 a.n. PT. Indah Yamamitra Persada dengan rincian sebagai berikut:
- Periode: 01 Jan 12 – 31 Jan 12.
 - Periode: 01 Feb 12 – 29 Feb 12.
 - Periode: 01 Mar 12 – 31 Mar 12.
 - Periode: 01 Apr 12 – 30 Apr 12.
 - Periode: 01 May 12 – 31 May 12.
 - Periode: 01 Jul 12 – 31 Jul 12.
 - Periode: 01 Aug 12 – 31 Aug 12.
 - Periode: 01 Sep 12 – 30 Sep 12.
 - Periode: 1/10/12 – 1/10/12.
 - Periode: 01 Nov 12 – 30 Nov 12.
 - Periode: 01 Des 12 – 31 Des 12.

Hal 64 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Mandiri Syariah A/C. No: 7045020155 a.n. Indo Dayasurya Persada PT, Periode: 01 November s/d 30 November 2012 dan Periode: 01 Desember 2012.

294. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Giro Bank BTN A/C. No: 00241-01-30-000187-7 a.n. PT. Indah Yamamitra Persada dengan rincian sebagai berikut:

- Periode: 01 Jan 11 – 31 Jan 11.
- Periode: 01 Feb 11 – 28 Feb 11.
- Periode: 01 Mar 11 – 31 Mar 11.
- Periode: 01 Apr 11 – 30 Apr 11.
- Periode: 01 May 11 – 31 May 11.
- Periode: 01 Jun 11 – 31 Jun 11.
- Periode: 01 Jul 11 – 31 Jul 11.
- Periode: (tidak jelas).
- Periode: 01 Sep 11 – 30 Sep 11.
- Periode: 01 Okt 11 – 31 Okt 11.
- Periode: 01 Nov 11 – 30 Nov 11.
- Periode: 01 Des 11 – 31 Des 11.

295. 1 (satu) bundel copy Rekening Giro Bank BNI A/C. No: 0014143262 a.n. Indah Yamamitra Pers** dengan rincian sebagai berikut:

- Periode: 01/01/2011 s/d 31/01/2011.
- Periode: 01/02/2011 s/d 28/02/2011.
- Periode: 01/03/2011 s/d 31/03/2011.
- Periode: 01/04/2011 s/d 30/04/2011.
- Periode: 01/05/2011 s/d 31/05/2011.
- Periode: 01/06/2011 s/d 30/06/2011.
- Periode: 01/07/2011 s/d 31/07/2011.
- Periode: 01/08/2011 s/d 31/08/2011.
- Periode: 01/09/2011 s/d 30/09/2011.
- Periode: 01/10/2011 s/d 31/10/2011.
- Periode: 01/11/2011 s/d 30/11/2011.
- Periode: 01/12/2011 s/d 31/12/2011.

296. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 013-IYD/HK/03/12 tanggal 13 Maret 2012 Sebesar Rp. 723.265.884,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-3 Progress ke-2 sebesar 75,8461% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektronik Sesuai Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.2091/SPP/225 Tanggal 10 November 2011 dari nilai kontrak Rp.

Hal 65 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.805.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak) dan 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 003-IYD/HK/01/12 tanggal 11 Januari 2012 Sebesar Rp. 978.720.600,00.
297. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 052-IYD/HK/XI/11 tanggal 11 November 2011 Sebesar Rp. 420.750.000,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-1 Uang Muka sebesar 15% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektronik Sesuai Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.2091/SPP/225 Tanggal 10 November 2011 dari nilai kontrak Rp. 2.805.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).
298. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 017-IYD/HK/04/12 tanggal 11 April 2012 Sebesar Rp. 225.003.636,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-4 sebesar 85,8730% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektronik Sesuai Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.2091/SPP/225 Tanggal 10 November 2011 dari nilai kontrak Rp. 2.805.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).
299. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 059-IYD/HK/09/12 tanggal 24 September 2012 Sebesar Rp. 317.009.880,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-5 sebesar 100% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektronik Sesuai Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.2091/SPP/225 Tanggal 10 November 2011 dari nilai kontrak Rp. 2.805.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).
300. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 048-IYD/HK/XI/11 tanggal 03 November 2011 Sebesar Rp. 891.000.000,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-1 uang Muka sebesar 10% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektrikal Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: HKDG/St.1814/SPK/64 Tanggal 11 Oktober 2011 dan Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.1893/SPP/203 Tanggal 11 Oktober 2011 dari nilai kontrak Rp. 8.910.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).
301. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 058-IYD/HK/XII/11 tanggal 02 Desember 2011 Sebesar Rp. 816.809.549,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-2 progress ke-1 sebesar 10,7851% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektrikal Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: HKDG/St.1814/SPK/64 Tanggal 11 Oktober 2011 dan Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.1893/SPP/203 Tanggal 11

Hal 66 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 dari nilai kontrak Rp. 8.910.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).

302. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 002-IYD/HK/01/12 tanggal 11 Januari 2012 Sebesar Rp. 3.306.824.879,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-3 progress ke-2 sebesar 54,4482% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektrikal Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: HKDG/St.1814/SPK/64 Tanggal 11 Oktober 2011 dan Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.1893/SPP/203 Tanggal 11 Oktober 2011 dari nilai kontrak Rp. 8.910.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).

303. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 012-IYD/HK/03/12 tanggal 13 Maret 2012 Sebesar Rp. 1.007.550.007,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-4 progress ke-3 sebesar 68,6761% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektrikal Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: HKDG/St.1814/SPK/64 Tanggal 11 Oktober 2011 dan Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.1893/SPP/203 Tanggal 11 Oktober 2011 dari nilai kontrak Rp 8.910.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).

304. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 016-IYD/HK/04/12 tanggal 11 April 2012 Sebesar Rp. 770.565.758,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-5 progress ke-4 sebesar 78,8506% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektrikal Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: HKDG/St.1814/SPK/64 Tanggal 11 Oktober 2011 dan Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.1893/SPP/203 Tanggal 11 Oktober 2011 dari nilai kontrak Rp. 8.910.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).

305. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 058-IYD/HK/09/12 tanggal 24 September 2012 Sebesar Rp. 870.250.045,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-6 progress ke-5 sebesar 100% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektrikal Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: HKDG/St.1814/SPK/64 Tanggal 11 Oktober 2011 dan Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.1893/SPP/203 Tanggal 11 Oktober 2011 beserta Addendumnya dari nilai kontrak Rp. 8.140.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).

306. 1 (satu) bundel copy Akta: Perseroan terbatas PT. Indah Yamamitra Persada, Tanggal: 24 – 6 – 2002,- Nomor: 96.-.

Hal 67 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. 1 (satu) lembar copy Struktur PT. Indo Dayasurya Persada.
308. 1 (satu) lembar copy Perbandingan Hutang PT. Indo Daya Surya Per 26 Mei 2015.
309. 1 (satu) lembar copy Final Account, Nama Sub: PT. Indah Yamamitra Persada, Pekerjaan: Eletronik.
310. 1 (satu) lembar copy Final Account, Nama Sub: PT. Indah Yamamitra Persada, Pekerjaan: Elektrikal.
311. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor:HK.DG/Ln.1288/DIV.A/071/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Perihal Tanggapan Surat beserta lampiran.
312. 1 (satu) bundel copy Outstanding (tulisan tangan) Resume Tagihan PT. Indo Dayasurya Persada Terhadap PT. Hutama Karya Proyek Pembangunan Gedung Kampus Sumatera Barat Pekerjaan Elektrikal & Elektronik.
313. 1 (satu) bundel copy Akta: Perseroan terbatas PT. Indah Yamamitra Persada, Tanggal: 24 – 6 – 2002,- Nomor: 96.-. (lengkap).
314. 1 (satu) bundel asli dokumen Adendum-II Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor : HK-DG/St.1893/SPP-ADD-II/203 Tanggal 16 Desember 2011 Pekerjaan Elektrikal Antara PT. Hutama Karya Divisi Gedung dengan PT. Indah Yamamitra Persada Untuk Proyek IPDN Bukittinggi
315. 1 (satu) bundel print out FINAL ACCOUNT Nama Sub : PT. INDAH YAMAMITRA PERSADA pekerjaan elektrikal yang dibuat oleh bagian Keuangan PT. IYADA an. Hendry Filyandi dan Keuangan PT. HUTAMA KARYA an. Andri Setyawan.
316. 1 (satu) bundel copy dokumen SPMK Nomor HKDG/ St.1814/SPK/64 tanggal 11 Oktober 2011 antara PT. Hutama Karya Ir. Budi Rachmat K. GM Divisi Gedung dengan Ir. Sugeng Hindaryo Dirut PT. Yamamitra Persada
317. 1 (satu) bundel asli dokumen penentuan rekanan pekerjaan elektronik IPDN Bukittinggi atas nama PT. Indah Yamamitra Persada Tanggal 10 November 2011
318. 1 (satu) bundel copy dokumen gambar kontrak pekerjaan elektronik antara PT. Hutama Karya dengan PT. Indah yamamitra persada untuk pembangunan Gedung Induk Kampus IPDN Baso Sumatera Barat
319. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.1857/SPP/200 Tanggal 19 Oktober 2011, Pekerjaan Jasa Pabrikasi, Transportasi & Install Baja antara PT. Hutama Karya

Hal 68 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Surya Baja Jaya untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
320. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 5124 kepada PT. Surya Baja Jaya sejumlah Rp. 749.187.289 Tanggal 19 Desember 2011.
321. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: W 4241 kepada PT. Surya Baja Jaya sejumlah Rp. 100.000.000 Tanggal 26-Jul-12.
322. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Pertanggung jawaban uang masuk dari PT. Utama Karya proyek pembangunan Kampus IPDN Sumatera Barat.
323. 1 (satu) bundel photo copy Rekening Tahapan BCA , cabang Pemohon : 6600-KCP BULEVARD TIMUR dengan Nomor Rekening : 06600284531-MATIAS SITORUS , Tanggal 20/10/2017, Periode 05/2011 – 12/2011 dan Periode 01/2011 – 12/2012.
324. 1 (satu) bundel photo copy Rekening BNI Taplus Periode tgl 01/05/2011 s/d 31/12/2012 dengan No. Rekening 0013499209, kepada Bpk Matias sitorus Jl. Perdana No. 4 Cakung Timur 13910.
325. 1 (satu) bundel photo copy Rekening Koran dengan Nomor Rekening 577010160811, Cabang 02577 Kantor Rawamangun Periode 1 Januari 2012 – 31 Januari 2012, OCBC NISP , kepada PT. Surya Baja Jaya , Jl. Pegangsaan II No. 25 D 1 Pulo Gadung Pegangsaan Dua , Jakarta Utara.
326. 1 (satu) bundel photo copy Rekening Koran dengan Nomor Rekening 577010160811, Cabang 02577 Kantor Rawamangun Periode 1 Mei 2011 – 31 Mei 2011 OCBC NISP kepada PT. Surya Baja Jaya , Jl. Pegangsaan II No. 25 D 1 Pulo Gadung Pegangsaan Dua , Jakarta Utara.
327. 1 (satu) bundel photo copy Pembayaran dengan RTGS dengan Jumlah 2.586.217.971 yang di tanda tangani oleh sdr. Ir. BUDI RACHMAT K.MM pada tanggal 27 Oktober 2011.-
328. 1 (satu) bundel photo copy Faktur Pajak dengan Nomor Seri 010.000-11.00020516 dengan Pembeli PT. SURYA BAJA JAYA alamat Jl. Pegangsaan II No. 25 D Jakarta Timur dengan NPWP 02.506.604.4-013.000.berikut kwitansi pembelian material baja.
329. 1 (satu) bundel photo copy Surat Bukti Pengiriman Barang Nomor : SJ/HJ/EXP/073/SBJ/XI, dengan Pengirim PT. Surya Baja Jaya Jl.

Hal 69 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangsaan II Kav. 25 D Pulo Gadung Jakarta Timur melalui ekspedisi PT. HINALANG JAYA.

330. 1 (satu) bundel photo copy Kwitansi pengiriman PT. Surya Baja Jaya melalui PT. Hinalang Jaya untuk jasa pengiriman barang.
331. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK – DG / A.1620 / SPP / 162 Tanggal: 28 September 2011, Pekerjaan Pintu, Jendela Alumunium antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Jagat Interindo untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
332. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 4839 kepada PT. Jagat Interindo sejumlah Rp. 588.500.000 Tanggal 22 November 2011.
333. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 3017 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 05 – 06 – 2012, BTN 1116, Pem. Kredit SupplierJT PT. Jagat Interindo, Pry. Kampus IPDN, Jumlah: Rp. 95,823,745.
334. 1 (satu) lembar copy Buku Besar Jagat Interindo periode Januari s/d April 2017 beserta lampirannya berupa copy rekening koran Jagat Interindo di Bank Ekonomi (No Rek. 0000068456) dan copy Buku Harian Bank BTN (No Rek 00241-01-30-000143-7..
335. 1 (satu) lembar copy Daftar Tagihan Proyek-Proyek Pekerjaan Alumunium & Interior File Kwitansi No 24 (2011) Status Tanggal : 25 Februari 2015 beserta lampirannya berupa copy Kwitansi.
336. 1 (satu) lembar copy Surat PT. Jagat Interindo No. 161R2/AL/QP-JI/X/11 tanggal 12 Agustus 2011 hal Penawaran Harga Pekerjaan Pertisi Aluminium & Kaca, Proyek Kampus IPDN Baso Sumbar.
337. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi, Jenis Pekerjaan Pindu, Jendela Alumunium, PT. Jagat Interindo, Proyek IPDN Bukittinggi, tanggal 13 September 2011.
338. 1 (satu) bundel Surat PT. Jagat Interindo Nomor: 00017/Fin/Hutama Karya/JI-V/14 tanggal 07 Mei 2014 perihal Penyelesaian Outstanding Payment, beserta lampiran berupa Perincian Aging Hutang PT. Utama Karya.
339. 1 (satu) lembar print out Jurnal Umum PT. Jagat Interindo JM-1612007, Jurnal Penyesuaian TA 2016 dengan total 9.906.342.245,00.
340. 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian pengikatan Jual Beli The “H” Tower yang terdiri dari:

Hal 70 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | a. | Perjanjian | Pengikatan | Jual | Beli | No. |
|----|------------|------------|------|------|-----------------------------------|
| | | | | | 962/HKR.DU/Ryn./Perj.118/IX/2013. |
| b. | Perjanjian | Pengikatan | Jual | Beli | No. |
| | | | | | 963/HKR.DU/Ryn./Perj.119/IX/2013. |
| c. | Perjanjian | Pengikatan | Jual | Beli | No. |
| | | | | | 964/HKR.DU/Ryn./Perj.120/IX/2013. |

341. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.2175/SPP/255 Tanggal 17 Nopember 2011, Pekerjaan Pemasangan Baja Gedung Auditorium antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan CV. Sakha Sinergy untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.

342. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: HK-DG/A.2084/SPP/239 Tanggal 17 Nopember 2011, Jual Beli Material Baja Gedung Auditorium antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan CV. Sakha Sinergy untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011.

343. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 5126 kepada CV. Skha Sinergy sejumlah Rp. 713.411.006 Tanggal 19 Desember 2011.

344. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK: W S729 kepada CV. Sakha Sinergy sejumlah 58.152.745 Tanggal 24-Sep-12.

345. 1 (satu) bundel dokumen Permintaan Pembayaran Pekerjaan Jual Beli dan Pemasangan Material Baja Gedung Auditorium Kampus IPDN Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat dengan nomor:

- 44/SS.IPDN/XI/2011 tanggal 20 Nopember 2011.
- 45/SS.IPDN/XI/2011 tanggal 20 Nopember 2011.
- 01/SS.IPDN/II/2012 tanggal 20 Januari 2012.
- 02/SS.IPDN/II/2012 tanggal 20 Januari 2012.
- 05/SS.IPDN/III/2012 tanggal 09 Maret 2012.
- 06/SS.IPDN/III/2012 tanggal 09 Maret 2012.
- 42/SS.IPDN/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012.
- 43/SS.IPDN/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012.

346. 1 (satu) lembar print out dokumen berjudul "Daftar Pembayaran Dalam Pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN, Propinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Anggaran Tahun 2011".

Hal 71 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347. 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor 108-00-0609390-1 a.n. MULIADI periode 01 Januari 2011 s.d. 19 September 2017.
348. 1 (satu) bundel Akta Pemasukan Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer “ CV. Sakha Sinergy”, tanggal 31 Oktober 2011, Nomor 61, Penghadap: Tn.P. PASU PATHI, S.Kom.Cs, Notaris Gordon E. Harianja, S.H.
349. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 5122 kepada PT. Dwijaya Selaras sejumlah Rp. 447.480.000 Tanggal 19 Desember 2011.
350. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Invoice PT. DWIJAYA SELARAS dengan nomor invoice INV1111.471 dengan nomor PO HK-DG/St.2159/SPP/2 beserta faktur pajaknya.
351. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Invoice PT. DWIJAYA SELARAS dengan nomor invoice INV1112.516 dengan nomor PO HK-DG/St.2159/SPP/2 beserta faktur pajaknya.
352. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. DWIJAYA SELARAS dengan nomor rekening 117-00-0216486-1 periode bulan 1/12/11 sd. 31/12/11.
353. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Invoice PT. DWIJAYA SELARAS dengan nomor invoice INV1205.226 dengan nomor PO HK-DG/St.2159/SPP/2 beserta faktur pajaknya, dengan catatan dalam tulisan tangan yang terbaca “BELUM DIBAYAR”.
354. 1 (satu) bundel asli dokumen Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor : HK-DG/St.1809/SPP/191 Tanggal 11 Oktober 2011 Pekerjaan Mekanikal Antara PT. Utama Karya Divisi Gedung dengan PT. Karya /duta Konsulindo Untuk Proyek IPDN Bukittinggi
355. 1 (satu) bundel asli dokumen Adendum-I Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor : HK-DG/St.1809/SPP-ADD-I/2191 Tanggal 12 Desember 2011 Pekerjaan Mekanikal Antara PT. Utama Karya Divisi Gedung dengan PT.Karya Duta Konsolindo Untuk Proyek IPDN Bukittinggi
356. 1 (satu) bundel dokumen SPMK Nomor HKDG/ St.1804/SPK/63 tanggal 11 Oktober 2011 antara PT. Utama Karya Ir. Budi Rachmat K. GM Divisi Gedung dengan Dirut PT. Duta Konsulindo Ridwan Rasyid
357. 1 (satu) bundel dokumen asli Bill of Quantity tanggal 27 Oktober 2011 Proyek kampus IPDN Sumatera Barat Paket Pekerjaan Mekanikal

Hal 72 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



358. 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Breakdown VO (Tambah Kurang) project IPDN Lokasi Baso Sumatera Barat Pekerjaan Mekanikal dibuat oleh PT. Karya Duta Konsulindo tanggal 11 oktober 2011 Project manager Yudi Arief
359. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Pembayaran Progress 65.4372% Pekerjaan Mekanikal Project IPDN Bukit Tinggi No. Invoice: 010/KDK-IPDN/III/12 Kepada PT. Karya Duta Konsulindo Sebesar Rp. 2,140,622,000.00.
360. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 3732 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 02 – 07 – 2012, BTN 1116, PT. Karya Duta Konsulindo, JT.KS, Pro.Kampus IPDN Sumbar Kab.Agam, Jumlah: Rp. 1,887,639,499.
361. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 4449 kepada PT. Karya Duta Konsulindo sejumlah Rp. 583.150.000 Tanggal 20....
362. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 1735 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 17 – 04 – 2012, Keterangan BTN 1116, PT. Karya Duta Konsulindo, Pro Kampus IPDN Sumbar Kab Agam, DGD, Jumlah: Rp. 18,535,636.
363. 1 (Satu) bundel copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Karya Duta Konsulindo, Nomor 02 (dua), tanggal 31 Januari 2008, Notaris Dian Trianawaty, SH
364. 1 (satu) bundel copy salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Karya Duta Konsulindo, Nomor : 58, tanggal 28 Mei 2014, Notaris Surjadi, SH, MKn., MM
365. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.2033/SPP/234 Tanggal 10 Nopember 2011, Pekerjaan Kusen kayu dan Pintu Kayu antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Mondila Bersaudara untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
366. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 4842 kepada Modila Bersaudara sejumlah Rp. 170.665.000 Tanggal 07-Dec-11.
367. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 3029 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 01 – 06 – 2012, Keterangan BTN 1116, Pemby. Kredit Suplier JT PT. Modila Bersaudara, Pry. IPDN Sumbar Kab Agam, DGD, Jumlah: Rp. 460,276,463 dan Nota Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DN 3030 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 01 – 06 – 2012, Keterangan BTN 1116, FP Pemby. Kredit Suplier JT PT. Modila Bersaudara, Pry. IPDN Sumbar Kab Agam, DGD, Jumlah: Rp. 47,451,182.

368. 1 (satu) bundel copy Kwitansi No.: KW-055/05/2012 Pembayaran Progress 95,00% Pengadaan dan Pemasangan Kusen dan Pintu Kayu pada Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat SPP no. HK.DG/A.2033/SPP/234 Tanggal 10 November 2011 Kepada PT. Modulla Bersaudara Sebesar Rp. 292.299.000.

369. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 3013 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 01 – 06 – 2012, Keterangan BTN 1116, Pembayaran Kredit Suplier JT PT. Modila Bersaudara, Pry. Kampus IPDN, Jumlah: Rp. 328,769,155 dan 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 3014 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 01 – 06 – 2012, Keterangan BTN 1116, FP Pembayaran Kredit Suplier JT PT. Modila Bersaudara, Pry. Kampus IPDN, Jumlah: Rp. 33,893,727.

370. 1 (satu) bundel risalah penawaran harga Periode 11 Oct 2011 hingga 11/11/2011 dari PT. Mondilla Bersaudara ke PT. Utama Karya yang di cap perusahaan PT. Mondilla dan ditandatangani oleh Maridin Jamil beserta lampirannya berupa surat penawaran

371. 1 (satu) bundel SPK/SPP Periode 10 Nov 2011 hingga 01 Dec 2011 yang diterima PT. Mondilla Bersaudara dari PT. Utama Karya yang di cap perusahaan PT. Mondilla dan ditandatangani oleh Maridin Jamil beserta lampirannya.

372. 1 (satu) bundel copy catatan pembayaran PT. Utama Karya kepada PT. Mondilla Bersaudara yang di cap dan ditandatangani Maridin Jamil beserta lampirannya

373. 1 (satu) bundel copy kwitansi penagihan biaya retensi dari PT. Mondilla Bersaudara dengan nomor KW-26/04/2013 tanggal 08 April 2013 yang ditujukan kepada PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung beserta lampirannya.

374. 1 (satu) bundel copy dokumen surat dengan nomor 085/SRT/MDL/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 dari PT. Mondilla Bersaudara yang ditujukan kepada PT. Utama Karya (Persero) perihal Permohonan tagihan retensi 5% untuk Proyek IPDN Bukit Tinggi beserta lampirannya berupa kwitansi.

Hal 74 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri Cabang KC Jkt Pulogadung an. Mondilla dengan nomor rekening 1250007932593 Periode Desember 2011 hingga Desember 2012
376. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank BTN Cabang Jakarta Cawang an. PT Mondilla Bersaudara dengan no rekening 0024101300003138 Periode Januari 2012 hingga Desember 2012.
377. 1 (satu) bundel rekapitulasi pengiriman barang dari PT. Mondilla Bersaudara kepada PT. Utama Karya (Persero) berupa kusen dan pintu kayu dari Jakarta ke Bukit Tinggi periode 20 Desember 2011 hingga 09 April 2012 yang dicap dan ditandatangani oleh Maridin Jami
378. 1 (satu) Rekapitulasi Penjualan PT. Mondilla Bersaudara Kpd PT. Utama Karya (Proyek IPDN Bukit Tinggi) yang sudah dibayar dan yang belum dibayar oleh Utama Karya yang di cap dan ditandatangani oleh Maridin Jamil.
379. 1 (satu) bundel copy Dokumen Legalitas a.n. PT. Modilla Bersaudara yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar copy NPWP an. PT. Mondilla Bersaudara Nomor : 01.917.637.9-432.000
 - b. 1 (satu) lembar copy TDP an. PT. Mondilla Bersaudara Nomor 102614605513 yang dikeluarkan tanggal 08 Oktober 2014
 - c. 1 (satu) lembar copy SKDU Nomor : 503/5/ -Ekbanf/Kel.Jts tanggal 18 Maret 2015
 - d. 1 (satu) lembar copy SIUP Nomor 510/161-BPPT/ PM/ II/ 2012 tanggal 2 Februari 2012
 - e. 1 (satu) lembar copy SPPKP Nomor : PEM-10164/WPJ.22/KP.1203/2008 tanggal 25 November 2008 an. PT Mondilla Bersaudara
 - f. 1 (satu) lembar copy SKT Nomor: PEM-10165/WPJ.22/KP.1203/2008 tanggal 25 November 2008 an. PT Mondilla Bersaudara.
 - g. 1 (satu) lembar copy SK Menkeh Nomor : c-15643 HT 01.01. TH 99 tanggal dikeluarkan 27 Agustus 1999
 - h. 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian PT Mondilla Bersaudara oleh Notaris & PPAT Evawani Alissa Chairil Anwar, SH. No : -2- tertanggal 11 Mei 1999

Hal 75 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) bundle Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mondilla Bersaudara Nomor 15 tanggal 21 Maret 2009 oleh Notaris Halimah Sa'diyah, SH
- j. 1 (satu) bundle Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mondilla Bersaudara Nomor 8 tanggal 25 Juni 2013 oleh Notaris Bedjo Sarwono, SH.Mkn
380. 1 (satu) lembar surat No. 321/PR/X/11 tanggal 03 Oktober 2011 yang ditujukan kepada PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung, u.p. Bp. Toga Tambunan, ditandatangani oleh Ir. James Karosekali, PT. Proteksindo Utama.
381. 1 (satu) lembar surat No. 166/PR/IV/12 tanggal 27 April 2012 yang ditujukan kepada PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung, u.p. Bp. Ir. Barry. ST, ditandatangani oleh Ir. Erwina Suray Setiawaty, PT. Proteksindo Utama.
382. 1 (satu) bundel copy surat No. 004/HK-IPDN-BS/Div.C/XII/11 tanggal 10 Desember 2011, hal Permohonan Addendum Perpanjangan Waktu dan Perubahan Nilai Kontrak Pekerjaan Pengecatan di Proyek Pembangunan Gedung IPDN Sum-Bar, ditujukan kepada PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung, u.p. Bpk. Ir. Tjahyo Purnomo, ditandatangani oleh Ir. Pedi Lestario, Kepala Proyek, beserta lampirannya.
383. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.2030/SPP/231 Tanggal 14 Nopember 2011, Pekerjaan Pengecatan antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Proteksindo Utama untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
384. 1 (satu) bundel copy Addendum-I, Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.2030/SPP-ADD I/231, tanggal 12 Desember 2011, Pekerjaan Pengecatan antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Proteksindo Utama untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
385. 1 (satu) lembar copy Surat No. 093/PR/III/13 tanggal 5 Maret 2013, perihal Piutang PT. Proteksindo Utama, ditujukan kepada PT. Utama Karya, up. Bp. Aditya, ditandatangani oleh Ir. Erwina Suray Setiawaty, PT. Proteksindo Utama.
386. 1 (satu) bundel copy Surat No. HK.DG/TRIS.485/DIV.A/47 tanggal 20 Maret 2013, hal Kesepakatan pembayaran, ditujukan kepada PT.

Hal 76 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proteksindo, ditandatangani oleh Narwatri Kurniasih, SE., beserta copy surat kesepakatan pembayaran.

387. 1 (satu) bundel dokumen Penerimaan Proyek, Nama Proyek: HK-IPDN, Bukit Tinggi, Cost Code: 156.CC.18.11.11, Nilai Kontrak: 987.951.622, tanggal cetak 16/09/2017, beserta lampirannya.
388. 1 (satu) lembar print out dokumen berjudul "Data Tagihan PT. Hutama Karya Proyek IPDN Sumbar", diparaf oleh ERWINA SURYA S. (Direktur PT. Proteksindo Utama).
389. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 0060004946863, atas nama PROTEKSINDO UTAMA, periode 1 Des 2011 s.d. 23 Juni 2014, terkait penerimaan dari PT. Hutama Karya.
390. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 4840 kepada PT. Proteksindo Utama sejumlah Rp. 151.649.543 Tanggal 07-Dec-11.
391. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK – DG / A.1327 / SPP / 100 Tanggal: 26 Juli 2012, Pekerjaan Plafond Metal Linier 84-C antara PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Jof Metal Works untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
392. 1 (satu) buah fotokopi Kwitansi PT. JOF METAL WORKS LTD No. 3016 tanggal (terbaca) 10-09-2012 yang ditandatangani oleh LEE BOK BIO dengan jumlah Rp. 60.164.200,- untuk pembayaran uang muka beserta Faktur Pajak Nomor seri 030.000-12.00000922 tanggal 10 September 2012 dan Surat Perjanjian Pemborongan Pemborongan Nomor: HK-DG/A.1327/SPP/100 tanggal 26 Juli 2012 untuk Pekerjaan Plafond Metal Linier 84-C antara PT. HUTAMA KARYA (Persero) Divisi Gedung dengan PT. JOF METAL WORKS untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
393. 1 (satu) buah fotokopi Kwitansi PT. JOF METAL WORKS LTD No. 3431 tanggal (terbaca) 28-11-2012 yang ditandatangani oleh LEE BOK BIO dengan jumlah Rp. 130.355.940,- untuk pembayaran prestasi 100% beserta Faktur Pajak Nomor seri 030.000-12.00001195 tanggal 29 November 2012 dan Berita Acara Pembayaran No. 001/BAP/HK-IPDN/JOF/IX/2012 dan Berita Acara Serah Terima Pertama, yang ditandatangani oleh RAYMOND, ST selaku Project Manager PT. HUTAMA KARYA (Persero) dan SUBARKAH selaku Project Manager

Hal 77 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. JOF METAL WORKS serta Berita Acara Prestasi No. 002-14HH/BA-NC/XI/12.

394. 1 (satu) buah fotokopi Kwitansi PT. JOF METAL WORKS LTD No. 4863 tanggal (terbaca) 30-10-2013 yang ditandatangani oleh LEE BOK BIO dengan jumlah Rp. 10.027.385,- untuk pembayaran retensi beserta Faktur Pajak Nomor seri 030.902-13.44220887 tanggal 30 Oktober 2013 dan Berita Acara Serah Terima Kedua, yang ditandatangani oleh RAYMOND DEBAL, ST selaku Project Manager Proyek Kampus IPDN Sumatera Barat PT. HUTAMA KARYA (Persero) Divisi Gedung dan SUBARKAH selaku Project Manager PT. JOF METAL WORKS.

395. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri an. PT. JOF METAL WORKS Ltd. Dengan nomor rekening 119-00-9109216-1 periode 1/10/12 sd. 31/10/12.

396. 1 (satu) lembar kertas berjudul 5. IPDN Sumbar yang mana merupakan rincian pembayaran pekerjaan dan sisa tagihan PT. HUTAMA KARYA (Persero) pada PT. JOF METAL WORKS yang berjumlah Rp. 152.316.000,00.

397. 1 (satu) bundel print out email dengan Judul : Re : Fw : Bls : Kebutuhan sanitair; Dari : rozi rinjayadi (rinjayadi@gmail.com); Kepada : indokeramika@yahoo.co.id; Tanggal Kamis, 3 November 2011 8 : 39

398. 4 (empat) lembar copy dokumen PESANAN PEMBELIAN BARANG No. HK.DG/Ba.2074/ORD/188 tanggal 08 November 2011 kepada PT Indokeramikatama Perkasa; No. HK.DG/Ba.2017/ORD/191 tanggal 14 November 2011; No. HK.DG/Ba.2112/ORD/201 tanggal 23 November 2011 dan No. HK.DG/Ba.0414/ORD/039 tanggal 05 Maret 2012

399. 1 (satu) bundel copy dokumen Kontrak Perjanjian Jual Beli Nomor : HK-DG/Ba.2272/SPP/267 Tanggal 08 November 2011 Pengadaan Sanitair Merek TOTO Antara PT Utama Karya (Persero) Divisi Gedung Dengan PT Indokeramikatama Perkasa Untuk Proyek IPDN Baso-Bukit Tinggi.

400. 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari Faktur No 1079/IP/XI/2011; Faktur No. 1098/IP/XI/2011; Faktur No. 1152/IP/XI/2011; Faktur No. 1225/IP/XII/2011; Faktur No. 214/IP/II/2012; Faktur No. 215/IP/II/2012 dan Faktur No. 318/IP/III/2012 beserta lampiran Surat Jalan, Memo Dinas Angkutan dan Tanda Terima Barang.

401. 4 (empat) lembar printout Daftar Kontrak Supplier Dominan.

Hal 78 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



402. 1 (satu) bundel copy catatan tangan bertuliskan “voucher Pembayaran Subkon P. Bukit Tinggi” disertai daftar subkon / supplier PT. Utama Karya
403. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan “SPP IPDN SUMBAR yang terdiri dari : Jagat Interindo, Yulian Berkah, Prima Karya, dst. OPS/DDO/P/001 SATUAN KERJA SUMBER DAYA Tahun 2011 KODE SUMBAR-01”
404. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan “SPP IPDN SUMBAR yang terdiri dari : Jatrindo, Jof Metal, Dst. OPS/DDO/P/001 SATUAN KERJA SUMBER DAYA Tahun 2011 KODE SUMBAR-01”
405. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan “BUKTI KERJA DATA TENDER IPDN BUKTITINGGI OPS/DDO/P/001 SATUAN KERJA TEKNIK 2011-2012 KODE BKT-1”
406. 1 (satu) bundel copy dokumen Pesanan Pembelian Barang No. HK.DG/hd.2050/ORD/186 tanggal 07 November 2011 beserta Faktur Pajak, Surat Pengantar dan draf Surat Direktur PT Dinamika pancar Kencana kepada PT Utama Karya (Persero) tanggal 23 Desember 2011;
407. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) Masa Pajak Desember Tahun Pajak 2011, NPWP 01 554 714 4 211 000, Nama WP : PT Dinamika Panca Kencana tanggal 17 Januari 2012;
408. 1 (satu) lembar copy dokumen Rekening Giro Bank Mandiri Nomor : 108-00-339988-9 atas nama PT Dinamika Panca Kencana tanggal 01/04/12 hingga tanggal 30/04/12
409. 1 (satu) lembar copy dokumen Rekening Giro Bank Mandiri Nomor : 108-00-339988-9 atas nama PT Dinamika Panca Kencana tanggal 01/12/11 hingga tanggal 30/12/11 beserta Surat PT Bank Mandiri kepada PT Dinamika Pancakencana Nomor : EX11772120614768 tanggal 28 Desember 2011 Perihal : Advis Kredit
410. 1 (satu) bundel copy dokumen Pesanan Pembelian Barang No. 132 /IPDN/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 beserta Faktur Pajak, Surat Pengantar dan draf Surat Direktur PT Dinamika Panca Kencana kepada PT Utama Karya (Persero) tanggal 23 Desember 2011;
411. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) Masa Pajak November Tahun Pajak 2011, NPWP 01 554 714 4 211 000, Nama WP : PT Dinamika Panca Kencana tanggal 20 Desember 2011;



412. 1 (satu) lembar dokumen berjudul "Dafar Surat Perjanjian dan Uang Masuk ke Rekening a.n. EKA SAPUTRA, S.Sos".
413. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Sewa Alat, Jenis Alat Exavator, Comatsu antara Ir. R. PEDI LESTARIO (Kapro Proyek) dan EKA SAPUTRA (Pemilik Alat).
414. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Sewa Alat, Jenis Kendaraan Truck (Dump Truck), Mitshubishi antara Ir. R. PEDI LESTARIO (Kapro Proyek) dan EKA SAPUTRA (Pemilik Kendaraan).
415. 1 (satu) asli buku tabungan rupiah mandiri a.n. EKA SAPUTRA, S. Sos, No. Rek: 111-00-0621480-9, KC Bukittinggi, tanggal cetak 19/10/2011.
416. 1 (satu) bundel fc dokumen kontrak/SPK subkontraktor untuk pekerjaan : Upah pemasangan atap, subkon baja ringan dan subkon pekerjaan koral sikat
417. 1 (satu) bundel fc dokumen pembelian bahan berupa batu bata, terpal dan plastik cor kepada UD Arnelin
418. 1 (satu) bundel fc dokumen realisasi penerimaan dari PT. Utama Karya/pembayaran bahan dan upah
419. 1 (satu) bundel fc dokumen rekening koran di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1110006176149 atas nama SUDISWAR
420. 1 (satu) lembar rekapitulasi material kayu CV. Jasa Keluarga untuk PT. Utama Karya tanggal 16 Januari 2012 s.d. 19 Januari 2012 senilai total Rp. 96.369.000,- yang harus dibayarkan ke rekening milik Sdri. Iyvone Anesia Bank Mandiri no rek 111.00.0402648.6
421. 1 (satu) lembar asli Rangkuman Piutang Pelanggan CV Trijaya Greshindo s.d. Tanggal 21/03/2016 dengan Grand Total Saldo Rp. 41.813.897,22 ter cap CV. Tri Jaya Greshindo;
422. 1 (satu) bundel copy faktur pembayaran No. 058736 dengan jumlah Rp. 1.997124.000 dari CV Trijaya Greshindo untuk IPDN Baso tertanggal 24-10-2011 beserta lampirannya;
423. 1 (satu) bundel copy faktur pembayaran No. 005286 dengan jumlah Rp. 27.627.600 dari CV Trijaya Graeshindo untuk HK tertanggal 27-03-2012 beserta lampirannya
424. 1 (satu) bundel copy Dokumen Rincian Pembelian PT Utama Karya pada Toko Alam Indah Granit ditandatangani oleh CHE ICHSAN tanggal 21 Maret 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425. 2 (dua) lembar copy Dokumen Rekening Tabungan Bank Mandiri Cbg Imam Bonjol Padang, Nomor 1110005868894 atas nama CHE ICHSAN, tanggal 29/02/12 s.d 26/03/12 dan tanggal 28/03/12 s.d 07/04/12
426. 1 (satu) bundel dokumen tindasan berwarna kuning yang terdiri dari Nota ALAM INDAH GRANITE No. 35195; 35196; 35301; dan 35374
427. 1 (satu) lembar print out dokumen Rekap Penjualan PT Citra Bhakti Semestajaya ke PT Utama Karya u/Proyek IPDN, total Rp. 2.034.630.400,-
428. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PT Citra Bhakti Semestajaya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 001/CBS-BANK/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 Hal : Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang dan Surat Pengantar;
429. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PT Citra Bhakti Semestajaya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 001/CBS-BANK/II/2012 tanggal Januari 2012 Hal : Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;
430. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PT Citra Bhakti Semestajaya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 003/CBS-BANK-H/II/2012 tanggal Januari 2012 Hal : Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;
431. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PT Citra Bhakti Semestajaya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 004/CBS/DIS-HK/III/2012 tanggal Maret 2012 Hal : Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita

Hal 81 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima Barang, Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;

432. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PT Citra Bhakti Semestajaya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 005/CBS/DIS-HK/III/2012 tanggal Maret 2012 Hal : Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;

433. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PT Citra Bhakti Semestajaya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 006/CBS/DIS-HK/IV/2012 tanggal 17 April 2012 Hal : Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;

434. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PT Citra Bhakti Semestajaya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 007/CBS/DIS-HK/IV/2012 tanggal 11 April 2012 Hal : Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;

435. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PT Citra Bhakti Semestajaya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 008/CBS/DIS-HK/V/2012 tanggal Mei 2012 Hal : Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;

436. 1 (satu) buah buku tulis Merck Paperline berwarna hijau dengan tulisan tangan "Hutama Karya Baso";

437. 1 (satu) lembar print out dokumen Rekening BNI Taplus Nomor : 0213964963 atas nama WELMAN FERI, SH periode 01/01/2012 s/d 30/01/2012

438. 1 (satu) bundel dokumen asli Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 23 September 2011 dan copy dokumen Pesanan Pembelian

Hal 82 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang tanggal 14 September 2011, 16 September 2011 dan 19 September 2011;

439. 1 (satu) bundel dokumen asli Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 29 September 2011 dan copy dokumen Pesanan Pembelian Barang tanggal 23 September 2011;

440. 1 (satu) bundel dokumen asli yang terdiri dari :

- a. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 10 Oktober 2011;
- b. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 17 Oktober 2011;
- c. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 26 Oktober 2011;
- d. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 01 November 2011;
- e. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 14 November 2011;
- f. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 29 November 2011;
- g. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 27 Desember 2011;
- h. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 12 Desember 2011;
- i. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 17 Oktober 2011;
- j. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 27 Januari 2012.

441. 1 (satu) bundel copy dokumen terdiri dari Pesanan Pembelian Barang tanggal 24 Nopember 2010, Kartu Piutang, Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan, Kwitansi, Faktur/Kontan, draf Tanda Terima Tagihan, dan Bukti Pengiriman Barang;

442. 1 (satu) bundel copy dokumen Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Faktur Pajak : 010.000-12.00000009; 010.000-12.00000010; 010.000-12.00000015; draf Tanda Terima dan NPWP PT Utama Karya;

443. 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari :

- a. Surat CV Karya Jaya No. : 052/KJ/V/2012 tanggal 28 April 2012 Hal : Konfirmasi Tagihan;
- b. Surat CV Karya Jaya No. : 061/KJ/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 Hal : Tagihan;
- c. Surat CV Karya Jaya No. : 082/KJ/IX/2012 tanggal 7 September 2012 Hal : Konfirmasi Tagihan;
- d. Surat CV Karya Jaya No. : 087/KJ/IX/2012 tanggal 13 September 2012 Hal : Konfirmasi Tagihan;

444. 1 (satu) bundel copy dokumen Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening : 111.000.559.3427 atas nama : CV. KARYA JAYA tanggal 02/06/12 s.d 06/06/12; tanggal 06/08/12 s.d 13/08/12; tanggal 16-Oct-2012 s.d 23-Oct-2012; dan copy rekening giro Wadiah Institusi Bank

Hal 83 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Mandiri Syariah Nomor : 7899989998 tanggal 04 Dec 12 s.d 31 Dec 12;

445. 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari fc KTP, fc NPWP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan; Surat Izin Usaha Perdagangan dan Salinan Akta Perseroan Komanditer "CV KARYA JAYA" No. 46 tanggal 15 Januari 2004.

446. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening Bank Mandiri Cabang Padang Nomor rekening : 1110006231019 nama : KREDO KERAMINDO SEJA Periode : 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.

447. 1 (satu) bundel dokumen Copy Faktur PT Kredo Keramindo Sejahtera Faktur No : JL1201/ beserta copy dokumen Faktur Pajak Nomor Seri : 010.000-12.00000004 atas nama PT Kredo Keramindo Sejahtera tanggal 6 Januari 2012.

448. 1 (satu) bundel dokumen dokumen ASLI Faktur PT Kredo Keramindo Sejahtera Faktur No : JL02804 beserta fax dokumen Pesanan Pembelian Barang PT Utama Karya No. HK.DG/Ba.1889/ORD/170 tanggal 27 Oktober 2011.

449. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Nomor EX11771060614865 tanggal 13/01/2012 kepada Yth. Kredo Keramindo Sejahtera perihal Advis Kredit ditandatangani Surya Musfarita;
- b. 1 (satu) lembar fax Surat Pengalihan Hak PT Kredo Keramindo Sejahtera tanggal 13 Januari 2012 ditandatangani oleh Wicky Leonardi;
- c. 1 (satu) lembar fax Surat kepada Yth Kredo Keramindo Sejahtera Perihal : Advice of Refusal;
- d. 1 (satu) lembar ASLI Surat Nomor EX11771060614865 tanggal 20/12/2011 kepada Yth. Kredo Keramindo Sejahtera perihal Advis Debit ditandatangani Surya Musfarita;
- e. 1 (satu) lembar ASLI Aplikasi Wesel Dokumenter Bank Mandiri tanggal 16 Desember 2011 tanggal 24 November 2011 sebesar Rp 1.423.748.000,-
- f. 1 (satu) lembar Wesel lembar kedua sejumlah satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh rupiah tanggal 24 November 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450. 1 (satu) bundel surat PT Kredo Keramindo Sejahtera Nomor : 1010/KKS/1.1/12.11 Hal : Advising SKBDN ke PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Pusat – Jakarta tanggal 15 Desember 2011, beserta lampirannya.
451. 1 (satu) bundel Surat Jalan dan Tanda Terima Proyek IPDN Baso.
452. 1 (satu) bundel Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-11.00000061 atas nama PT Kredo Keramindo Sejahtera NPWP : 03.142.231.4-216.001 tanggal 12 Desember 2011 beserta lampirannya.
453. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening : 1110002265383 Nama : Kredo Bajataman Persa Periode : 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.
454. 1 (satu) bundel copy dokumen PT Kredo Bajatama Persada Daftar Piutang PT Utama Karya – Proyek IPDN Bukittinggi.
455. 1 (satu) bundel dokumen copy Rekening Koran Giro Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat No Rekening : 2103 . 0103.00049-8 atas nama EGYA PRATAMA CV Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 dan periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.
456. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001.SPK/140/CBKT/2012 Tanggal 06 Februari 2012 antara PT PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Bukittinggi dengan CV EGYA PRATAA Tentang Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan : PAL IPDN Kampus Sumbar dan Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi Lokasi : Baso PT PLN (Persero) Ranting Baso; Nilai Kontrak : Rp. 45.663.000,-.
457. 1 (satu) bundel copy dokumen bertandatangan M. IRFAN Buku Rekening Tabungan Bank Mandiri Cab. Bukittinggi Nomor 111.000.5873-7 atas nama MUHAMMAD IRFAN tanggal 15 September 2011 s/d 31 Juli 2013.
458. 2 (dua) lembar dokumen tulisan tangan Catatan Faktur Tagihan Toko Muaro Bangunan - Proyek IPDN Bukittinggi
459. 1 (satu) bundel dokumen print out Rekening Bank Mandiri Cabang Bukittinggi Nomor Rekening : 1110005515222, Nama : CHAIRUNNAS Periode 1 September 2011 sampai dengan 04 April 2013.
460. 1 (satu) lembar Tulisan Tangan Sdr. MUSLIM yang berisi catatan pekerjaan pemasangan tiang pancang proyek IPDN di Kabupaten

Hal 85 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam sebagaimana tercantum dalam Buku Agenda milik Sdr. MUSLIM dengan tulisan The Infinity Design SM 0433.

461. 1 (satu) bundel dokumen copy Rekening Koran Giro Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi Nomor Rekening : 0200 .0103.00158-8 atas nama TAJAK ENGINEERING CV Periode : 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;

462. 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari :

- a. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 01/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, Harga Kontrak Rp. 77,000,000.00;
- b. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 02/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011, Harga kontrak 106,370,000.00;
- c. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 03/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011, Harga Kontrak Rp 91,630,000.00;
- d. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 04/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, Harga Kontrak Rp. 77,000,000.00;
- e. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 05/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011, Harga Kontrak Rp. 106,370,000.00;
- f. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 06/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011, Harga Kontrak Rp. 91,630,000.00;

463. 1 (satu) lembar dokumen copy Surat Direktur CV Tajak Engineering kepada PT Utama Karya Proyek IPDN Bukittinggi Sumatera Barat Nomor : 037/TE/V-2012 tanggal 30 Mei 2012, Perihal : Rincian Pembayaran Deep Well;

464. 1 (satu) lembar dokumen copy Surat Wakil Kepala Proyek Kampus IPDN Baso Bukittinggi kepada General Manager PT Utama Karya (Persero) Divisi Gedung Nomor : 084/HK.IPDN/DIV.G.BT/UM/VII/12 tanggal 16 Juli 2012, Perihal : Permohonan Pembayaran Hutang Tajak Engineering & Mina Karya;

465. 2 (dua) lembar dokumen print out terdiri dari Berita Acara Pekerjaan tanggal 15 Maret 2012 sesuai kontrak No : 01/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dan Berita Acara

Hal 86 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan tanggal 15 Maret 2012 sesuai kontrak No : 02/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011.

466. 1 (satu) bundel dokumen asli yang terdiri dari :

- a. Kwitansi No. 306/KWT-RU/HK-IPDN/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 399,572,250 dan Tanda Terima tanggal 4 Januari 2012;
- b. Kwitansi No. 311/KWT-RU/HK-IPDN/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 19,800,000 dan Tanda Terima tanggal 4 Januari 2012;
- c. Kwitansi No. 312/KWT-RU/HK-IPDN/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 164,318,000 dan Tanda Terima tanggal 4 Januari 2012;
- d. Kwitansi No. 318/KWT-RU/HK-IPDN/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 915,524,597 dan Tanda Terima tanggal 18 Januari 2012;
- e. Kwitansi No. 28/KWT-RU/HK-IPDN/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 10,980,420 dan Tanda Terima tanggal 25 Februari 2012;
- f. Kwitansi No. 41/KWT-RU/HK-IPDN/III/2012 tanggal 08 Maret 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 39,640,425 dan Tanda Terima tanggal 21 Maret 2012;
- g. Kwitansi No. 45/KWT-RU/HK-IPDN/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 27,488,175 dan Tanda Terima tanggal 31 Maret 2012;
- h. Kwitansi No. 47/KWT-RU/HK-IPDN/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 18,884,899 dan Tanda Terima tanggal 31 Maret 2012;
- i. Kwitansi No. 48/KWT-RU/HK-IPDN/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA

Hal 87 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Persero) senilai Rp. 4,675,000 dan Tanda Terima tanggal 31 Maret 2012;
- j. Kwitansi No. 55/KWT-RU/HK-IPDN/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 29,816,111 dan Tanda Terima tanggal 25 April 2012;
- k. Kwitansi No. 61/KWT-RU/HK-IPDN/IV/2012 tanggal 16 April 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 25,300,000 dan Tanda Terima tanggal 25 April 2012;
- l. Kwitansi No. 62/KWT-RU/HK-IPDN/IV/2012 tanggal 16 April 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 2,337,500 dan Tanda Terima tanggal 25 April 2012;
- m. Kwitansi No. 66/KWT-RU/HK-IPDN/IV/2012 tanggal 16 April 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 10,120,000 dan Tanda Terima tanggal 03 Mei 2012;
- n. Kwitansi No. 68/KWT-RU/HK-IPDN/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 10,672,200 dan Tanda Terima tanggal 23 Mei 2012;
- o. Kwitansi No. 69/KWT-RU/HK-IPDN/IV/2012 tanggal 25 April 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 25,300,000 dan Tanda Terima tanggal 23 Mei 2012;
- p. Kwitansi No. 73/KWT-RU/HK-IPDN/V/2012 tanggal 01 Mei 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 7,781,400 dan Tanda Terima tanggal 23 Mei 2012;
- q. Kwitansi No. 80/KWT-RU/HK-IPDN/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 1,402,500 dan Tanda Terima tanggal 30 Mei 2012;
467. 1 (satu) bundel dokumen asli yang terdiri dari :
- a. Surat Pengantar tanggal 17 Nopember 2011 dan tanggal 20 Nopember 2011;

Hal 88 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 48/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 90 KV A/XI/2011 tanggal 21 November 2011 dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 21 November 2011;
 - c. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 99/HK.IPDN.BT/DIV.G/SKR-ALAT GENSET 90 KV A/XII/2011 tanggal 21 November 2011 tentang Addendum II Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : : 48/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 90 KV A/XI/2011 tentang Sewa Alat (Genset) Antara PT Utama Karya pada Proyek IPDN-Baso Bukittinggi dengan Edy Yusuf dan dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 16 Desember 2011;
 - d. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 45/HK.IPDN.BT/DIV.G/SKR/XI/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Addendum I Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 47/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 140 KV A/XI/2011 dan Nomor : 48/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 90 KV A/XI/2011 tentang Sewa Alat (Genset) Antara PT Utama Karya pada Proyek IPDN-Baso Bukittinggi dengan Edy Yusuf;
 - e. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 170/HK/IPDN-SPK-ALAT GENSET 90 KV A/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 20 Januari 2012;
 - f. Surat Perjanjian Sewa Alat tanggal 20 Februari 2012 tentang Addendum I Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 170/HK/IPDN-SPK-ALAT GENSET 90 KV A/I/2012 tentang Sewa Alat (Genset) Antara PT. HUTAMA KARYA (Persero) pada Proyek Kampus IPDN Bukittinggi dengan Rita Jusuf dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 20 Februari 2011;
 - g. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 91/HK.IPDN.BT/DIV.G/SKR/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Addendum I Nomor : 47/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 140 KV A/XI/2011 dan Nomor : 48/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 90 KV A/XI/2011 tentang Sewa Alat (Genset) Antara PT Utama Karya pada Proyek IPDN-Baso Bukittinggi dengan Edy Yusuf ;
 - h. Bukti Kirim/Tanda Terima tanggal 3 Februari 2012.
468. 1 (satu) bundel dokumen asli yang terdiri dari :
- a. Surat Pengantar tanggal 21 Nopember 2011;

Hal 89 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 47/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 140 KV A/XI/2011 tanggal 16 November 2011 dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 16 November 2011;
 - c. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 91/HK.IPDN.BT/DIV.G/SKR-ALAT GENSET 140 KV A/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Addendum II Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 47/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 140 KV A/XI/2011 tentang Sewa Alat (Genset) Antara PT Utama Karya pada Proyek IPDN-Baso Bukittinggi dengan Edy Yusuf dan dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 16 Desember 2011;
 - d. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 172/HK/IPDN-SPK-ALAT GENSET 140 KV A/II/2012 tanggal 20 Januari 2012 dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 20 Januari 2012;
 - e. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 178/HK/IPDN-SPPK-ALAT GENSET 140 KV A/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 20 Maret 2012;
 - f. Kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 21 April 2012 sejumlah Rp. 4.250.000,-;
 - g. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 26 April 2012.
469. 1 (satu) bundel dokumen asli yang terdiri dari :
- a. Surat Pengantar tanggal 21 Nopember 2011;
 - b. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 96/HK.IPDN.BT/DIV.G/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 26 Desember 2011;
 - c. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 171/HK/IPDN-SPK-ALAT GENSET 100 KV A/II/2012 tanggal 26 Januari 2012 dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 26 Januari 2012;
 - d. Surat Perjanjian Sewa Alat tanggal 27 Februari 2012 tentang Addendum I Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 171/HK/IPDN-SPK-ALAT GENSET 100 KV A/II/2012 tentang Sewa Alat (Genset) Antara PT Utama Karya pada Proyek Kampus IPDN Bukittinggi dengan Rita Yusuf dan dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 27 Februari 2012;
 - e. Kwitansi telah terima dari Rita Jusuf tanggal 21 Maret 2012 sejumlah Rp. 5.000.000,-;

Hal 90 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Berita Acara Serah Terima Pengembalian Uang Sewa Alat Genset 100 KV A Merek Mercedes Benz tanggal 15 Maret 2012.
470. 1 (satu) lembar copy dokumen Rekening Bank BNI Cabang Bukittinggi Nomor 59225948 atas nama PT PLN Cab. Bukittinggi tanggal 23 Dec 2011 s/d 28 Dec 2011
471. 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari :
- a. Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT PLN (Persero) dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat tanggal 21 Desember 2011;
 - b. Surat Kepala Bagian Tata Usaha Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat kepada Kepala PLN Cabang Bukittinggi Nomor : 015/610/IPDN-SB/2011 tanggal 25 Oktober 2011, Perihal : Permohonan Penyambungan Daya PLN;
 - c. Surat Kepala Bagian Tata Usaha Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat kepada Kepala PLN Cabang Bukittinggi Nomor : 642/633/IPDN-SB/2011 tanggal 14 November 2011, Perihal : Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Tagihan Beban Bulanan Listrik;
 - d. Surat Manager PT PLN (Persero) Ranting Baso kepada PT PLN (Persero) Cab Bukittinggi Nomor : 084/160/RBSO/2011 tanggal 16 November 2011, Perihal : Usulan Calon Pelanggan TM;
 - e. Surat Manager PT PLN (Persero) Cabang Bukittinggi kepada Direktur IPDN Kampus Sumbar Nomor : 548/161/CBKT/2011 tanggal 5 Desember 2011, Perihal : Persetujuan PAL;
 - f. Berita Acara Penyegehan KWH Meter No. 210/PB/10/2012.
472. 1 (satu) bundel dokumen copy yang terdiri dari :
- a. Berita Acara Pemasangan/Penyambungan/Pembongkaran*) Sambungan Tenaga Listrik/Penggantian*) Nomor : 04/APP/CBKT/02/2012 tanggal 27 Februari 2012;
 - b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai No. 023/BAST/613/CBKT/2012 tanggal 6 Maret 2012, Pekerjaan : PAL IPDN Kampus Sumbar dan Pusdiklat Kemendagri Reg. Bukittinggi;
 - c. Kwitansi Uang sebesar Rp.45,981,000 yang diterima oleh CV EGYA PRATAMA dari PT PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Bukittinggi.
473. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam Nomor

Hal 91 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 s.d. 23/IMB/KPMPT-2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Kampus IPDN Sumatera Barat atas nama Drs. BAHARUDDIN PPABBA, M.Si, tanggal 10 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Fatimah S.Sos, M.Si, Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam.

474. 2 (dua) lembar copy Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012 pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam, SKPD Dinas Pekerjaan Umum (IMB), bulan Februari 2012.
475. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri KCP Cabang Padang Muara dengan no rekening 1110100004940 a.n. PT. Statika Mitrasarana berikut lampirannya.
476. 1 (satu) bundel copy rekapitulasi transaksi antara PT. Statika Mitrasarana dan PT. Utama Karya untuk proyek pembangunan IPDN Baso Sumbang Thn. 2011 dan 2012
477. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 001/XI/2011 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 90.750.000,- untuk pembayaran readymix K.300=100 M3 termasuk PPN 10% di cap dan ditandatangani pada tanggal 28 November 2011 berikut lampirannya
478. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 002/XI/2011 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 9.075.000,- untuk pembayaran readymix K.300=10 M3 di cap dan ditandatangani pada tanggal 28 November 2011 berikut lampirannya.
479. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 003/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 486.057.000 untuk pembayaran readymix K.300=535.6 M3 dicap dan ditandatangani pada tanggal 28 November 2011 berikut lampirannya
480. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 004/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 499.125.000 untuk pembayaran readymix K.300=550 M3 di cap dan ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2011 berikut lampirannya

Hal 92 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



481. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 006 CP A/I/2012 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 25.725.000,- dengan rincian:
- a. Concrete Pump < 40 M3 = 4X Rp. 1.800.000;
 - b. Concrete Pump > 40M3 x Rp.35.000,- dan
 - c. Mobilisasi Pompa = 3x Rp. 750.000,-
- dicap dan ditandatangani pada tanggal 5 Desember 2011 berikut lampirannya.
482. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 005/I/2012 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 453.750.000,- untuk pembayaran readymix K.300=500 M3 di cap dan ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2012 berikut lampirannya
483. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 006/I/2012 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 453.750.000,- untuk pembayaran readymix K.300=500 M3 di cap dan ditandatangani pada tanggal 13 Januari 2012 berikut lampirannya
484. 1 (satu) bundel copy Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan yang dikeluarkan oleh PT. Utama Karya (Persero) terima dari PT. Statika M.S dengan uraian untuk pemb. C. Pump dan pemb. Beton ditandatangani oleh Manto dan tertanggal 25 Januari 2012 berikut lampirannya
485. 1 (satu) bundel copy Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan yang dikeluarkan oleh PT. Utama Karya (Persero) terima dari PT. Statika M.S dengan uraian untuk pemb readymix K 300, pemb Pemakaian C.P, Pemb. Readymix K.300, pemb. Pemakaian CP ditandatangani oleh Mando dan tertanggal 28 Februari 2012 dan bertuliskan *revisi* Faktur No:010.000.12.00000013 tanggal 13/1-12 dan 010.000.12.00000018 tgl 20/1-12 berikut lampirannya
486. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 010/III/2012 yang dikeluarkan oleh diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 136.125.000 untuk pembayaran readymix K.300=150 M3 di cap dan ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2012 berikut lampirannya
487. 1 (satu) bundel copy Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan yang dikeluarkan oleh PT. Utama Karya (Persero) terima dari PT. Statika



dengan uraian untuk pemb. Beton K.300 senilai Rp. 45.375.000 ditandatangani oleh Manto dan tertanggal 29 Maret 2012 berikut lampirannya

488. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 002 CP A/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PT.Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp.9.375.000,- dengan rincian :

- a. Concrete Pump Rp. 1.800.000,-
- b. Concrete Pump > 40 M3 = 195 M3 x Rp. 35.000,- dan
- c. Mobilisasi Pompa Rp. 750.000

Di cap dan ditandatangani pada tanggal 05 Desember 2011 berikut lampirannya

489. 1 (Satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 004 CP A/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PT.Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 9.900.000,- dengan rincian :

- a. Concrete Pump Rp. 1.800.000,-
- b. Concrete Pump > 40 M3 = 210 M3 x Rp. 35.000,- dan
- c. Mobilisasi Pompa Rp. 750.000

Di cap dan ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2011 berikut lampirannya

490. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 005 CP A/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PT.Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 5.700.000,- dengan rincian :

- a. Concrete Pump < 40 M3 Rp. 1.800.000,-
- b. Concrete Pump > 40 M3 = 90 M3 x Rp. 35.000,- dan
- c. Mobilisasi Pompa Rp. 750.000

Di cap dan ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2011 berikut lampirannya

491. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 006 CP A/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PT.Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 9.075.000,- dengan rincian :

- a. Concrete Pump < 40 M3 = 2 X Rp. 1.800.000,-
- b. Concrete Pump > 40 M3 = 135 M3 x Rp. 35.000,- dan
- c. Mobilisasi Pompa Rp. 750.000

Di cap dan ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2011 berikut lampirannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

492. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "BUTING => BUKTI2 UMUM (4)" berisikan dokumen pembayaran subkon/supplier PT. Utama Karya
493. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "BUTING (2)" berisikan dokumen pembayaran subkon/supplier PT. Utama Karya
494. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "BANK W DES-2011" berisikan dokumen pembayaran subkon/supplier PT. Utama Karya
495. 1 (satu) odner warna hitam bertuliskan "IPDN" yang berisikan dokumen Risalah Rapat , Gambar Metode Kerjaan Perkerasan Jalan, Review Laporan Konsultan Manajemen Konstruksi, Kontrak Perjanjian Jual Beli dan dokumen pendukung lainnya.
496. 1 (satu) odner berwarna biru bertuliskan "IPDN-BUKITTINGGI" yang berisikan Notulen Meeting dan lampirannya
497. 1 (satu) odner berwarna biru bertuliskan "Surat Masuk"
498. 1 (satu) bundel dokumen copy Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 158/Und/KK/KDN/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 perihal : Undangan Rapat penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Pembangunan Gedung IPDN di Propinsi Sumatera Barat, beserta Berita Acara dan Risalah Penjelasan Pekerjaan.
499. 4 (empat) halaman dokumen print out Risalah Rapat Minutes of Meeting Arkitek Team Empat.
500. 1 (satu) buah buku tulis Big Boss warna merah muda bermotif garis dengan tulisan "[build on:your hope]".
501. 1 (satu) bundel dokumen Rekaman Data Biaya Penawaran Pengadaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011.
502. 1 (satu) lembar copy Rincian Penerimaan Proyek PT. Arkitek Team Empat tahun 2011 tertanggal 31/12/2011.
503. 1 (satu) lembar copy Surat dengan Kop Surat Arkitek Team Empat no. surat; 239/MZ/06.11 tanggal 27 Juni 2011, perihal Pergantian Personil Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, TA 2011.
504. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri a/n MAHDIAR ZAMZAMI dengan no. rek: 1210004146480 periode 1 januari 2011 s/d 31 Desember 2012.

Hal 95 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

505. 1 (satu) bundel copy dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Penerimaan/Saldo Bank periode bulan Januari 2011 s.d. Desember 2011, PT. Arkitek Team Empat.
506. 1 (satu) bundel copy dokumen Penerimaan/Saldo Bank periode bulan Januari 2012 s.d. Desember 2012 PT. Arkitek Team Empat.
507. 1 (satu) bundel copy Rekening Giro Bank BNI Cabang Harmoni No. Rekening: 0018305425 a.n. Arkitek Team Empat Periode: 01/01/2011 s/d. 31/12/2011.
508. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Giro Bank Mandiri KC Jkt Kebon Sirih No. Rekening: 121-00-0207130-0 a.n. PT Arkitek Team Empat periode: 1/01/11 s.d. 31/12/11.
509. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Giro Bank Mandiri No. Rekening: 121-00-0207130-0 a.n. PT Arkitek Team Empat Periode: 1/01/12 s/d. 31/12/12.
510. 1 (satu) bundel copy Laporan Transaksi Bank BRI cabang Veteran No. Rekening: 03290100976306 a.n. Arkitek Team Empat periode 02 Desember 2011 s.d. 31 Mei 2012, 01 Juli 2012 s.d. 31 Agustus 2013, 01 Oktober 2013 s.d. 28 Februari 2014.
511. 1 (satu) bundel copy Laporan Transaksi Bank BRI cabang Tanah Abang No. Rekening: 001801000493301 a.n. Arkitek Team Empat PT. Periode Transaksi: 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012 dan 01 Januari 2014 s.d. 28 Februari 2014.
512. 1 (satu) bundel copy Gaji Karyawan PT. Arkitek Team Empat Bulan : Januari 2011 s.d. Desember 2011.
513. 1 (satu) bundel copy Gaji Karyawan PT. Arkitek Team Empat Bulan : Januari 2012 s.d. Desember 2012.
514. 1 (satu) bundel dokumen Pra-Kualifikasi Seleksi Umum Pengadaan Jasa Konsultasi Nomor 001/PRA/KK/KDN/III/2011 tanggal 16 Maret 2011, Paket Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
515. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1210002071300, atas nama PT. Arkitek Team Empat periode 1 November 2010 s.d. 31 Desember 2012.
516. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0018305425 atas nama PT. Arkitek Team Empat periode 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2011 beserta lampirannya.

Hal 96 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

517. 1 (satu) bundel print out rincian penerimaan proyek PT Arkitek Team Empat tahun 2011 beserta lampirannya.
518. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Arkitek Team Empat Per Tanggal 31 Desember 2012 Tahun 2012
519. 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat Surat Nomor: 239/MZ/06.11 perihal Pergantian Personil Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011 tanggal 27 Juni 2011
520. 1 (satu) lembar Reakpitulasi Prestasi Mingguan Kemajuan Pekerjaan periode 11 tanggal 2 Desember s.d. 8 Desember 2011 Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam.
521. 1 (satu) bundel Reakpitulasi Prestasi Mingguan Kemajuan Pekerjaan periode minggu 1 s.d. minggu ke 7, Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam.
522. 2 (dua) lembar surat Undangan Nomor: 005/1157/PAKPA/VIII/2011 Tanggal 19 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Ir. Dudy Jocom4
523. 4 (empat) lembar Surat Sanggahan Nomor : 522/NK.WI/TEKMAS/06/2011 tanggal 28 Juni 2011 yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan jasa Konsultasi di Lingkungan Setjen Kemendagri dan ditandatangani oleh Rachman, ST, MM General manager Wilayah I PT. Nindya Karya
524. 1 (satu) lembar surat Nomor: 418/NZ/11.11 tanggal 11 November 2011 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Arkitek Team Empat, Ir. Mahdiar Zamzami.
525. 1 (satu) lembar surat Nomor: 025/AT-4/XI/IPDN/2011 perihal evaluasi pelaksanaan tanggal 8 November 2011 yang ditandatangani oleh team leader PT. Arkitek Team Empat, Ir. Dadang Pratisto.
526. 1 (satu) lembar surat Nomor:005/1628/PAKPA/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Arya Sumbayak, SH, MM
527. 1 (satu) bundel copy cek BRI No. Cek CEW 085999 s/d 086000, cek Bank mandiri NO. Cek FI 379639 s.d. 379642 beserta lampirannya

Hal 97 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

528. 1 (satu) bundel dokumen gambar “KEYPLAN” kampus IPDN Baso Sumatera Barat, Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Artefak Arkindo.
529. 1 (satu) bundel surat nomor 418/IPDN/DIV.1.BK/X/2011 perihal konversi tiang pancang 300x300 menjadi 250x250 tanggal 13 Oktober 2011, konsultan perencanaan PT. Bina Karya beserta lampirannya.
530. 1 (satu) bundel dokumen pelelangan nomor 96/PU/KK/KDN/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat TA 2011.
531. 1 (satu) bundel dokumen pemilihan Manajemen Konstruksi Nomor 026/SU/KK/KDN/IV/2011 tanggal 18 April 2011, Paket Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat.
532. 1 (satu) bundel map berwarna biru bertuliskan “IPDN” yang berisi dokumen diantaranya “rencana pengajuan penagihan”.
533. 1 (Satu) bundel dokumen berisikan slip Bukti Pembayaran/Penerimaan terkait IPDN Baso B. Tinggi Padang, PT. Arkitek Team Empat
534. 1 (satu) bundel dokumen Rapat Kordinasi Proyek IPDN Sumatera Barat Pekerjaan Perencanaan Hari Selasa Tanggal 15-11-2011 Jam 11.30 s.d. 18.45 tempat R. Rapat Manajemen Konstruksi
535. 1 (satu) bundel print out yang bertuliskan IPDN Baso, Agam, manajemen Konstruksi Cost Plan dst. Dimana didalamnya berisikan juga copy Cek Bank Rakyat Indonesia Nomor Cek : CEW 085987 s/d CEW 085990 serta copy cek BNI Nomor : CR 691622 s/d 691623
536. 1 (satu) lembar print out rekapitulasi pengeluaran rapat IPDN.
537. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pemilihan Manajemen Konstruksi Nomor : 026/SU/KK/KDN/IV/2011 Tanggal 18 April 2011 Paket Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011
538. 1 (satu) buku berwarna coklat merk “Spiral Note” yang pada sampul depan terdapat tulisan tangan.
539. 1 (satu) bundel Map merah yang bertuliskan Masjid IPDN Baso didalamnya terdapat gambar Denah bangunan Masjid dan catatan Masjid IPDN 840 m2 = 672 OR, dst.
540. 1 (satu) bundel asli rekening Koran Bank Mandiri KCP Jkt D.I. Panjaitan PT. Bina Karya (Persero) nomor rekening 006-00-0040525-2 periode Januari sampai dengan Desember 2011

Hal 98 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

541. 1 (satu) bundel asli Tabel Monitoring Proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Propinsi Sumatera Barat Kode Proyek 1431 Divisi I PT. Bina Karya (Persero) Tahun 2010 beserta dokumen pendukung
542. 1 (satu) bundel asli Tabel Monitoring Proyek Perencanaan Pembangunan Gedung IPDN Propinsi Sumatera Barat Di Kabupaten Agam. Kode Proyek 1486 Divisi I PT. Bina Karya (Persero) Tahun 2011, beserta dokumen pendukung
543. 1 (satu) bundel copy Laporan Semester I Divisi I (Bangunan dan Lingkungan) PT. Bina Karya (Persero) Tahun 2011 beserta Laporan Bulanan Divisi I (Bangunan dan Lingkungan) PT. Bina Karya (Persero) Periode Bulan Agustus sampai dengan Desember 2011
544. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 16/01/2014 senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan nama penerima MOHAMMAD NOVAL no. Rekening Bank Mandiri 123.00.0460956.8
545. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 21/04/2015 senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nama penerima YUDHI MUHAMMAD FAUZI no. Rekening Bank mandiri 900-00-2716865-8
546. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 19/09/2014 senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan nama penerima MOHAMMAD NOVAL no. Rekening Bank Mandiri 123.00.0460956.8
547. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI tanggal 24/06/2014 senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan nama penerima MOHAMMAD NOVAL SL no. Rekening Bank BNI 0666888963
548. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI tanggal 13/02/2014 senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan nama penerima MOHAMMAD NOVAL SL no. Rekening Bank BNI 0666888963
549. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BCA tanggal 6/2/2014 dengan catatan 1062261972 dengan nama penerima dan no rekening tidak terbaca
550. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tanggal 06 Feb 2014 dengan nama penerima MOHAMMAD NOVAL no. Rekening Bank BCA 1062261972
551. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Desember 2011 senilai lima ratus ribu rupiah diterima dari Tn. Ir. MOHAMMAD NOVAL SLABADJO untuk pembayaran Biaya Legislasi No : 382/L/2011 Tanggal 21 Desember

Hal 99 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 (surat persetujuan dan kuasa) dan Fotocopy sesuai asli dengan tanda tangan Notaris REFIZAL, S.H., M.Hum

552. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI tanggal 10/11/2014 senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan nama penerima YAYASAN CIPTAVISI KARYA KREASI dengan no. Rekening Bank BCA 505.501.8020 dengan pengirim MOHAMMAD NOVAL no. Rekening BNI 0666888963
553. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cab. Pecenongan No. Rekening: 0324050704 atas nama Bpk. MOHAMMAD NOVAL SL
554. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cab. Pecenongan No. Rekening: 0666888963 atas nama Bpk. MOHAMMAD NOVAL SL
555. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI tanpa identitas dan tanpa nomor rekening, periode awal tanggal 08/05/12 no buku C.6714011
556. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI tanpa identitas dan tanpa nomor rekening, periode awal tanggal 22/11/13 no buku C9632330
557. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Cabang Pintu Air No. Rekening 1062261972 atas nama MOHAMMAD NOVAL SL IR
558. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega Cabang Cikini NO. Rekening 01-035-00-20-31614-8 no. Seri AA 015655 atas nama Ir. MOHAMMAD NOVAL S L
559. 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Nomer rekening 115-00-0409735 -0 Kc Jakarta Mangga Besar 14/10/2003 1150321 atas nama Muhammad Noval S.L, IR QQ Nurul Jihan Khairunnissa Perum Jati Negara Baru Jl. Taman Sari V No. 22 Rt. 003 Rw. 016 Penggilingan.
560. 1 (satu) buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri Nomer rekening 123-00-0460956 -8 Kcp Kramat Raya 12303 tgl Cetak 05/09/2013 atas nama Ir. Muhammad Noval S.L Jl. Kramat IV No. 14 Rt 005 Rw 009 Senen Kwitang Jakarta 10420.
561. 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri tanpa identitas dan tanpa Nomer rekening, periode awal tanggal 12/09/06 saldo 500,000.00.
562. 1(satu) buku Tabungan Bank Mandiri tanpa identitas dan tanpa Nomer rekening, periode awal tanggal 24/08/11 saldo 25,619,851.36.00.
563. 1(satu) buku Tabungan BRI Britama Nomer rekening 0329-01-025513-50-1 Cabang 0329 Jakarta Veteran tgl 21 April 2015 atas nama Muhammad Noval Jl. Kramat IV Kel Kwitang Kec Senen Jakarta Pusat tanda pengenal KTP 3175060702720005 Nomer buku 17855802.

Hal 100 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

564. 1(satu) buku Tabungan BRI Britama tanpa Identitas dan tanpa Nomer rekening Cabang 0329 Kanca BRI JKT Nomer Buku 1934580.
565. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama RAHADI WIYANTO Nomor Rekening : 1270005673213 periode 01/01/2011 s.d. 31 Juli 2013
566. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama HUSAIN REDWIN NURLETTE Nomor Rekening : 1170004152047 periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2014
567. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama HUSAIN REDWIN NURLETTE Nomor Rekening : 1650000067133 periode 01/01/2011 s.d. 31/07/2013
568. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama CV PRIMA KARYA SENTOSA Nomor Rekening : 1640000405334 periode 17/11/2011 s.d. 31/01/2013
569. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama MUSLIM Nomor Rekening : 1080002392612 periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2013
570. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama MUSLIM qq BIN SYUKUR Nomor Rekening : 1110005234501 periode 02/02/2011 s.d. 25/10/2011
571. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama MUSLIM Nomor Rekening : 1110005802430 periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2013
572. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama JOKO TRIMANTO Nomor Rekening : 1110004566085 periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2013
573. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama SUDISWAR Nomor Rekening : 1110006176149 periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2013
574. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama EKA SAPUTRA Nomor Rekening : 1110006214809 periode 19/10/2011 s.d. 31/01/2013
575. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama DASRIL KATIK MUDO Nomor Rekening : 1110006182337 periode 14/09/2011 s.d. 31/12/2015

Hal 101 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

576. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama Eko Santoso, nomor rekening 32901018786503, periode 3 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2014
577. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama Mohammad Noval, nomor rekening : 32901008903501, periode 3 Januari 2011 s.d. 28 Desember 2014
578. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama Sugeng Gunawan, nomor rekening 3290100890303505, periode 3 Januari 2011 s.d. 30 Desember 2014
579. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama Kasdan, nomor rekening 32901027350501, periode 2 Januari 2011 s.d. 20 Desember 2014
580. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama PT. Arkitek Team Empat, nomor rekening 1801000493301, periode 25 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2014
581. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama PT. Arkitek Team Empat, nomor rekening 32901002976306, periode 14 Desember 2011 s.d. 25 Februari 2014
582. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama Mohammad Noval S.L Nomor Rekening : 1230004609568 periode 01/01/2011 s.d. 31 Desember 2014
583. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama SUGENG GUNAWAN nomor rekening 1190006326464 periode 14/08/2012 s.d. 31/12/2014
584. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama ARKITEK TEAM EMPAT Nomor Rekening : 121000207300 periode 01/01/2011 s.d 31/12/2014
585. 1 (satu) bundel copy dokumen Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Pengadaan Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung kampus IPDN Regional di Kab. Agam, Sumatera Barat tahun Anggaran 2010
586. 3 (tiga) lembar Surat Nomor 011/273.A/PAKPA/V/2010 tanggal 5 Mei 2010, perihal Persetujuan Penetapan Pemenang Pelelangan yang ditandatangani oleh DR. Rizari, MBA, Msi, selaku PPK Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelola Asset Kemendagri, beserta lampirannya.
587. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian pekerjaan manajemen konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Nomor

Hal 102 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011/317/PKPA/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan PT. Artefak Arkindo

588. 1 (satu) bundel dokumen Pembangunan Kampus IPDN – Kabupaten Agam Bukit Tinggi – Sumatera Barat, Tahun Anggaran 2010
589. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan – Laporan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Tahap Perencanaan – Pembangunan Gedung Kampus IPDN Propinsi Sumatera Barat, Tahun Anggaran 2010.
590. 1 (satu) bundel copy Penelitian tanah dengan alat bor mesin Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Regional Kabupaten Agam-Sumbar Tahun Anggaran 2010 bulan September 2010
591. 1 (satu) bundel copy Laporan bulanan divisi I Bulan Desember 2010 PT. Bina Karya (Persero)
592. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pekerjaan Struktur dan Infrastruktur Proyek Pembangunan Kampus IPDN Baso – Sumatera Barat Tahap 1 Tahun Anggaran 2010
593. 1 (satu) lembar asli Rencana Anggaran Pelaksanaan Proyek (RAPP) Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Regional Bukit Tinggi Jangka Waktu Mei 2010 sampai dengan Desember 2010 tertanggal 16 Agustus 2010 beserta 1 (satu) lembar asli perincian RAPP-nya
594. 2 (dua) lembar asli Rencana Anggaran Pelaksanaan Proyek (RAPP) Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Regional Bukit Tinggi Jangka Waktu Mei 2010 sampai dengan Desember 2010 tertanggal 25 Juni 2010 beserta 2 (dua) lembar asli perincian RAPP-nya
595. 1 (satu) odner warna hitam berisikan dokumen Bukti Kasbon Proyek Kampus IPDN Sumatera Barat
596. 1 (satu) odner warna hitam berisikan dokumen Buku Harian Gudang Penerimaan P4 B/P4 Logistik Proyek IPDN Baso
597. 1 (satu) odner warna hitam berisikan dokumen Buku Harian Gudang Penerimaan Nomor odner GB-8401 F
598. 1 (satu) odner warna hitam berisikan dokumen Persediaan Bahan, Alat, SPK Satuan Kerja Adm. Keuangan Kampus IPDN Bukittinggi
599. 1 (satu) odner warna hitam berisikan dokumen Bukti Pembayaran Subkon (Bank) Proyek Kampus IPDN Sumatera Barat

Hal 103 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600. 1 (satu) odner warna hitam berisikan dokumen Catatan KAS IPDN Baso - (01) GB401F
601. 1 (satu) odner warna hitam berisikan dokumen Bukti Kerja Daftar Rekanan Terseleksi/Terpilih Satuan Kerja Logistik Proyek IPDN Baso
602. 1 (satu) odner warna hitam berisikan dokumen Catatan Kas Proyek IPDN Baso - (02) GB401F
603. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Bukti Kasbon Pertanggungjawaban Peti Kas
604. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Tanda Terima Barang Logistik
605. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Catatan Peti Kas Proyek IPDN (01)
606. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen SPK Mandor/Opname Proyek IPDN
607. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Bukti Kerja Kas Proyek IPDN Baso Padang Sumatera Barat- BKK 01-53
608. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Bukti Kerja Kas Proyek Kampus IPDN Baso Padang Sumatera Barat - BKK 692 - 759
609. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Catatan Peti Kas Proyek IPDN (02)
610. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Catatan Peti Kas Proyek IPDN (03)
611. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Catatan Peti Kas Proyek IPDN (04)
612. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Bukti Kerja KAS, Proyek Kampus IPDN - Baso Padang Sumatera Barat BKK 192 - BKK 238
613. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Bukti Kerja KAS, Proyek Kampus IPDN - Baso Padang Sumatera Barat BKK 365 - BKK 435
614. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "BUTING (3) " berisikan dokumen pembayaran subkon/supplier PT. Utama Karya.
615. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "Bukti Nop-Des 2011" berisikan dokumen pembayaran subkon/supplier PT. Utama Karya.
616. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "IPDN BUTING 3" berisikan dokumen pembayaran subkon/supplier PT. Utama Karya

Hal 104 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

617. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "SPJB IPDN BUKIT TINGGI" yang terdiri dari : CV. Trijaya, PT. Kredo, PT. Aneka Cipta, PT. Baskara, PT. Dwi Prima, PT. Cijete, PT. Sinarindo, PT. Dwijaya Selaras, PT. Petro, PT. Indokeramikatana Tahun 2011-2012 dengan Kode : BT-1
618. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "SPB & PO IPDN BUTING SD/LOG/P/001 TEKNIK 2011-2012 KODE BT-1"
619. Satu bundel dokumen terdiri dari:
- 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Direksi PT Utama Karya (Persero) Nomor:2312/KPTS/78/2008 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat-Pejabat PT Utama Karya (Persero) tanggal 13 Oktober 2008 yang di antaranya berisikan keterangan mengangkat Ir. BUDI RACHMAT KURNIAWAN dari Wakil General Manager Divisi Gedung pada Direktorat I menjadi Pj. General Manager Divisi Gedung pada Direktorat I PT Utama Karya (Persero) di Jakarta.
 - 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Direksi PT Utama Karya (Persero) Nomor: 942/KPTS/29/2009 tentang Pengangkatan Status Jabatan Pejabat PT Utama Karya (Persero) tanggal 12 Juni 2009 yang di antaranya berisikan keterangan mengangkat Ir. BUDI RACHMAT KURNIAWAN dari Pj. General Manager Divisi Gedung PT Utama Karya (Persero) di Jakarta menjadi General Manager Divisi Gedung PT Utama Karya (Persero) di Jakarta" beserta 2 (dua) lembar lampiran "Job Description" Jabatan General Manager Divisi
620. 1 (satu) bundel copy Prosedur Prakualifikasi Tender PT. Utama Karya diterbitkan tanggal 29/03/2010.
621. 1 (satu) bundel copy Prosedur Rapat Eksekutif Marketing (REM) PT. Utama Karya diterbitkan tanggal 29/03/2010.
622. 1 (satu) bundel copy Prosedur Perintisan Proyek PT. Utama Karya diterbitkan tanggal 29/03/2010.
623. 1 (satu) bundel copy Prosedur Manajemen Kegiatan Pemasaran PT. Utama Karya diterbitkan tanggal 29/03/2010.
624. 1 (satu) bundel copy Prosedur Pelaksanaan PT. Utama Karya diterbitkan tanggal 29/03/2010.
625. 1 (satu) bundel copy Prosedur Karya Rampung PT. Utama Karya diterbitkan tanggal 29/03/2010.

Hal 105 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

626. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank BNI a.n. PT. YULIAN BERKAH ABADI No. Rek. 0096249910 periode 1 Oktober 2011 s.d. 31 Desember 2011.
627. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2006 s/d Desember 2006.
628. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2007 s/d Agustus 2007 dan Oktober 2007 s/d Desember 2007.
629. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2008 s/d Desember 2008.
630. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2009 s/d Desember 2009.
631. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2010 s/d Desember 2010.
632. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2011 dan Maret 2011 s/d Desember 2011.
633. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2012 s/d Desember 2012.
634. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2013 s/d Desember 2013.
635. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2014 s/d Oktober 2014.
636. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan No (kosong) PT Utama Karya Divisi Gedung U/ Proyek Apartemen Sentra Timur, tertanggal 27 Oktober 2014 beserta 2 (dua) lembar tindasannya.
637. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Emmy Marlina Simanjuntak, SH tentang Pendirian PT Yulian Berkah Abadi tanggal 28 Oktober 2005.
638. 1 (satu) lembar rekening koran BNI dengan nomor account 0096249910 atas nama PT Yulian Berkah Abadi periode transaksi bulan September 2007.
639. 1 (satu) lembar rekening koran BNI dengan nomor account 0096249910 atas nama PT Yulian Berkah Abadi periode transaksi bulan 03 November 2014 sampai dengan 8 Desember 2014.
640. 1 (satu) lembar rekening koran BNI dengan nomor account 0096249910 atas nama PT Yulian Berkah Abadi periode transaksi bulan Februari 2011.

Hal 106 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

641. 1 (satu) bundel fotokopi cek BNI beserta tanda terimanya dengan nomor cek sebagai berikut:
- CX836259, tanggal 29 Februari 2012.
 - CX836252, tanggal 22 Februari 2012.
 - CX836254, tanggal 20 Februari 2012.
 - CX836253, tanggal 21 Februari 2012.
 - CX836256, tanggal 15 Februari 2012.
 - CX836255, tanggal 18 Februari 2012.
 - CX836251, tanggal 12 Februari 2012.
 - CX836247, tanggal 04 Februari 2012.
 - CX836245, tanggal 06 Februari 2012.
 - CX836246, tanggal 05 Februari 2012.
 - CX054852, tanggal 30 November 2011.
 - CX054870, tanggal 27 Januari 2012.
 - CX054505, tanggal 31 Oktober 2011.
642. 1 (satu) lembar copy kertas yang terdiri 2 atas dua buah copy dokumen yakni : 1 (satu) lembar kwitansi dari PT Yulian Berkah Abadi senilai Rp.77.046.000,00 tertanggal 25 Januari 2012 dan 1 (satu) lembar copy cek BNI dengan nomor CX 054870 tertanggal 27 Januari 2012 senilai Rp.42.881.600,00.
643. 3 (tiga) lembar copy Cek Bank BNI terdiri atas Cek BNI nomor CX 836247 tertanggal 4 Februari 2012 senilai Rp. 300.013.754,00, Cek BNI nomor CX 836245 tertanggal 6 Februari 2012 senilai Rp.380.000.000,00, dan Cek BNI nomor CX 836246 tertanggal 5 Februari 2012 senilai Rp.335.000.000,00.
644. 1(satu) lembar copy Cek Bank Mandiri dengan nomor FG 952078 senilai enam ratus dua puluh lima juta rupiah (Rp.625.000.000,00) tertanggal 18 Januari 2012.
645. 1(satu) lembar copy Cek Bank Mandiri dengan nomor FG 952079 senilai lima ratus juta rupiah (Rp.500.000.000,00) tertanggal 20 Januari 2012.
646. 2 (dua) lembar copy Cek Bank Mandiri dengan nomor FG 952080 dan FG 952081 senilai masing masing tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah (Rp.742.810.500,00) tertanggal 18 Januari 2012.

Hal 107 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

647. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX054505 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 28.000.000,- tanggal pencarian 31 Oktober 2011.
648. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX836256 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 360.000.000,- tanggal pencarian 24 Februari 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa copy identitas pencair.
649. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX836255 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 340.000.000,- tanggal pencarian 24 Februari 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair.
650. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX836245 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 380.000.000,- tanggal pencarian 6 Februari 2012.
651. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX836246 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 335.000.000,- tanggal pencarian 6 Februari 2012.
652. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX054501 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 300.000.000,- tanggal pencarian 28 Oktober 2011, beserta 1 lembar lampiran berupa copy identitas pencair.
653. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX054504 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 472.000.000,- tanggal pencarian 28 Oktober 2011, beserta 1 lembar lampiran berupa copy identitas pencair.
654. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CV116480 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 600.000.000,- tanggal pencarian 27 Oktober 2011, beserta 1 lembar lampiran berupa copy identitas pencair.
655. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX836247 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 300.013.754,- tanggal pencarian 07 Februari 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa copy identitas pencair.
656. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX836252 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 300.000.000,- tanggal pencarian 23 Februari 2012.
657. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX836253 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 475.000.000,- tanggal pencarian 23 Februari 2012.

Hal 108 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

658. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX836254 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 300.000.000,- tanggal pencarian 23 Februari 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair.
659. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CA915402 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 191.805.000,- tanggal pencarian 06 Maret 2012.
660. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX054870 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 42.881.600,- tanggal pencarian 06 Maret 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair.
661. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CA915421 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 640.610.000,- tanggal pencarian 09 Mei 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair.
662. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CA915420 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 197.198.400,- tanggal pencarian 10 Mei 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair.
663. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CA915424 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 25.000.000,- tanggal pencarian 29 Mei 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair.
664. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX054852 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 330.000.000,- tanggal pencarian 30 November 2011, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair.
665. 1 (Satu) Buah buku berukuran folio berwarna biru bertuliskan Register Bank Bukopin Operasional A/C 101.9467.011 Tahun 2012.
666. 1 (Satu) Buah Buku berukuran folio berwarna biru bertuliskan Bukopin
667. 1 (Satu) Buah Buku berukuran folio berwarna hijau tua bertuliskan Bank Mandiri Iskandarsyah A/C 126.000.44.79.324
668. 1 (satu) file odner berwarna biru yang berisi dokumen sebagai berikut:
- a) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Bukopin PT Utama Karya, Div Gedung dengan nomor rekening 1019467011 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
 - b) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Bukopin PT Utama Karya, Div Gedung dengan nomor rekening 1019469014 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
 - c) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Bukopin PT Utama Karya, Div Gedung dengan nomor rekening 1019370018 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.

Hal 109 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Bukopin PT Utama Karya, Div Gedung dengan nomor rekening 1019468018 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
 - e) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jkt Iskandarsyah PT Utama Karya, jl. Iskandarsyah 1/6 Kebayoran Baru Melawai Jakarta 12160 dengan nomor rekening 1260004479324 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
 - f) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jkt Jatinegara Timur PT Utama Karya, jl. Iskandarsyah 1/6 Kebayoran Baru Melawai Jakarta 12160 dengan nomor rekening 0060092009087 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
 - g) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI KCP Jkt Cikajang PT Utama Karya, Wilayah II jl. Iskandarsyah 1/6 Melawai Kebayoran Baru dengan nomor rekening 065101000034303 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
 - h) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BTN Cabang Bekasi PT Utama Karya jl. Iskandarsyah 1 no. 6 Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 dengan nomor rekening 0001601300018227 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
 - i) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Cabang 63 Senayan PT Utama Karya jl. Iskandarsyah 1 no. 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 dengan nomor rekening 0004453322 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
 - j) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Cabang 63 Senayan PT Utama Karya jl. Iskandarsyah 1 no. 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 dengan nomor rekening 0004453286 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
 - k) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank DBS Cabang Thamrin Jakarta PT Utama Karya Divisi Gedung jl. Iskandarsyah 1 no. 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 dengan nomor rekening 3020000356 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
669. 1 (satu) file odner berwarna biru yang berisi dokumen sebagai berikut:
- a) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1019467011 Periode Bulan Januari s/d Desember 2012.

Hal 110 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1019469014 Periode Bulan Januari s/d Desember 2012.
- c) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1019468018 Periode Bulan Januari s/d Desember 2012.
- d) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1019370018 Periode Bulan Januari s/d Desember 2012.
- e) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BTN Cabang Bekasi milik PT Utama Karya Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan 12160, dengan nomor rekening 0001601300018227 Periode Bulan Januari s/d Desember 2012.
- f) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BRI milik PT Utama Karya Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 032901002977302 Periode Bulan Januari s/d Desember 2012.
- g) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BRI milik PT Utama Karya Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 032901003002304 Periode Bulan Januari s/d Desember 2012.
- h) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BRI milik PT Utama Karya Wilayah II KCP Cikajang Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 065101000034303 Periode Bulan Januari s/d Desember 2012.
- i) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BNI milik PT Utama Karya Cabang: 63 Senayan Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 0271533722 Periode Bulan Oktober s/d Desember 2012.
- j) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Mandiri milik PT Utama Karya KCP Jkt Iskandarsyah Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 126.00.0447932.4 Periode Bulan Januari s/d Desember 2012.

Hal 111 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



- k) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Mandiri milik PT Utama Karya KCP Jkt Jatinegara Timur Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 0060092009087 Periode Bulan Januari s/d Desember 2012.

670. 1 (satu) file odner berwarna biru yang berisi dokumen sebagai berikut:

- a) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1019467011 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
- b) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1019469014 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
- c) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1019468018 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
- d) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1019370018 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
- e) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 0271533722 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
- f) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Mandiri milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1260004479324 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
- g) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BRI milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 032901002977302 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
- h) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BRI milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 032901003002304 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.

Hal 112 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



- i) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 2715337224 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
 - j) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BRI milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 065101000034303 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
 - k) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Mandiri milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 0060092009087 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
 - l) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BTN milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 0001601300018227 Periode tanggal 1 Januari s/d 31 Januari 2013.
- 671.1 (satu) bundel copy Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Nomor: 011/837/PAKPA/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010. Ditandatangani oleh Ir. DUDY JOCOM (Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset, Kementerian Dalam Negeri) dan RACHMAN ST, MM. (General Manager Wilayah I PT. Nindya Karya (Persero))
672. 2 (dua) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 910-739 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-2A Tahun 2010 Tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Serta Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010, ditandatangani oleh DIAH ANGGRAENI a.n. Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal tanggal 27 September 2010, beserta 1 (satu) lembar copy lampirannya
673. 2 (dua) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 910-940 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-16 Tahun 2010 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Tahun Anggaran 2010 di Lingkungan Departemen

Hal 113 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI, Menteri Dalam Negeri tanggal 15 November 2010 beserta 4 (empat) lembar copy lampirannya

Barang Bukti Elektronik yaitu :

1. 1 (satu) keping CD-RW kapasitas 700 MB, Merk SONY dengan tulisan tangan " Data SPM BMN Komputer Alm Prihartawan" yang ditandatangani Arya tanggal 1/3-2016, S/N : AK05D131W0419 80B1,
2. 1 (satu) keping DVD+R 8X Double Layer kapasitas 240Min/8.5 GB, Merk RITEK, S/N : TEg405144614E09, dengan tulisan "Data IPDN Ibu Yurike" yang ditandatangani Arya tanggal 1/3-2016
3. 1 (satu) Harddisk, Merk: Hitachi, kapasitas: 250 GB, S/N : JP0272J20KV8TM yang diambil dari komputer Tri Adji Bawono di Ruang Bidang Pengelolaan BMN Lt. 4 Kementerian Dalam Negeri
4. 1 (satu) buah flashdisk berwarna hijau muda, Merk TDK, S/N : 070753ED991F3887 (dilihat dengan USB Deview).
5. (satu) keping DVD dengan merk: Verbatim, S/N: MAPA18RC281219103, kapasitas: 4.7 GB, yang di dapat dari Ruang keuangan dan penguasa barang Sugeng
6. 1 (satu) hard disk dengan merk: Seagate, S/N: 9RXN2YKY, tipe: ST3160215A, kapasitas: 160 GB yang didapat dari ruang keuangan
7. 1 (satu) keping DVD dengan merk: Ritek, S/N: TEg405144036D10, kapasitas: 8.5 GB, yang di dapat dari Ruang Logistik dan penguasa barang Budi Ardianto.
8. 1 (satu) keping DVD dengan merk: Ritek, S/N: TEg405144039A10, kapasitas: 8.5 GB, yang di dapat dari Ruang Logistik dan penguasa barang Kurniati Evilia
9. 1 (satu) keping CD-R dengan merk: Verbatim, S/N: B3131RE04131629LH, kapasitas: 700 MB, yang di dapat dari Ruang Teknik dan penguasa barang Isfiyanto
10. 1 (satu) keping DVD dengan merk: Verbatim, S/N: MAPA18RC281218005, kapasitas: 8.5 GB, yang di dapat dari Ruang pemasaran
11. 1 (satu) keping DVD dengan merk: Ritek, S/N: TEg405140246A11, kapasitas: 8.5 GB, yang di dapat dari Ruang Pemasaran dan penguasa barang Anton

Hal 114 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah hardisk 3,5" Merek SEAGATE BARRACUDA, Type ST3250318AS, S/n: 6VMDZTL6, Kapasitas 250GB, yang digunakan oleh BAMBANG SUDIBYO.
13. 1 (satu) buah hardisk 3,5" Merek SEAGATE BARRACUDA, Type ST3250318AS, S/n: 6VMAM19Z, Kapasitas 250GB, yang digunakan oleh YUSNITA VERAWATI.
14. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan S/n: A3131RE04112693LH, kapasitas 700MB yang berisi data Keuangan Catatan Kas dan Bank tahun 2010 s/d 2012 PT.BINA KARYA, yang diperoleh dari komputer kasir yang digunakan dan ditandatangani oleh Ibu RIKA ROLA
15. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan S/n: A3131RE04131508LH, kapasitas 700MB yang berisi data Keuangan Buku Besar (GL) tahun 2010 s/d 2014 PT.BINA KARYA, yang diperoleh dari komputer Akuntansi yang digunakan dan ditandatangani oleh FIRLI RANSYAH
16. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan S/n: A3131RE04131500LH, kapasitas 700MB yang berisi File-File dari hasil pencarian dengan kata kunci "IPDN" yang diperoleh dari komputer yang digunakan oleh IWAN.
17. 1 (satu) keping CD dengan merk: Verbatim, S/N: A3131RE04063229LH, kapasitas: 700 MB, penguasa barang Ratna Juwita bagian administrasi.
18. 1 (satu) keping CD dengan merk: Verbatim, S/N: N129RD26D8100092C1, kapasitas: 700 MB, bertuliskan CCO GEDUNG KAMPUS IPDN PROVINSI SUMATERA BARAT KABUPATEN AGAM 22052015 – YOSSII.
19. 1 (satu) keping CD dengan merk: Verbatim, S/N: N129RD26D8100093E2, kapasitas: 700 MB, bertuliskan ASBUILT + CCO IPDN BASO.
20. 1 (satu) keping DVD dengan merk: Verbatim, S/N: MAPA07RC26191913, kapasitas: 4.7 GB, yang didapat dari ruang administrasi akunting.
21. 1 (satu) keping DVD dengan merk: Verbatim, S/N: MAPA18RC281221536, kapasitas: 4.7 GB, yang didapat dari ruang administrasi akunting.
22. 1 (satu) keping DVD dengan merk: RITEK, S/N: 1Eg405143633S10, kapasitas: 8.5 GB, yang didapat dari ruang studio designer.

Hal 115 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) buah Ipad warna silver hitam dengan casing BELK warna hitam kapasitas 64 GB model A1430 IMEI 013314001854108 Serial DMPJP00YDVGJ
24. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia MODEL 225 warna kuning TYPE RM-1011 IMEI 1 353672060388286 IMEI 2 353672060388294 tanpa SIM CARD dan tanpa MEMORY CARD
25. 1 (satu) buah Harddisk Eksternal merk SMART DRIVE, model no: HD3-SU2, S/N: 0836851, yang di dalamnya terdapat Harddisk 2.5 inchi merk FUJITSU,model: MHZ2160BH G2, S/N: K60HT872ANWG, kapaitas: 160 GB, beserta dengan kabel data dan cover harddisk warna hitam bertuliskan DPR.
26. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Bold 9790 warna hitam, model: REC71UW, IMEI: 359201040965247, PIN: 28CB3A52, tanpa SIM Card dan tanpa Memory Card
27. 1 (satu) keping DVD-R Merk Verbatim, S/N : MAPA07RC270440392 berisi data dari laptop milik DADANG PRASTITO yang ditandatangani ENNY DEWI ANGGRAINI tanggal 02-03-2016.
28. 1 (satu) buah CD yang bertuliskan "File Kontrak" yang berisikan:
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Gatrindo Baja Gerbang".
 - 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Gatrindo GRC".
 - 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Excel nama "ipdn sumbar".
 - 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Jagat Alumunium".
 - 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Job Metal Plafond".
 - 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Mandiri Plafond".
 - 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Pengadaan Baja".
 - 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Prima Karya area asrama".
 - 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Prima Karya Infra".

Hal 116 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Prima Karya InfrastrukturAdm".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Proteksindo Cat".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "RESTU InfrastrukturAdm".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Sakha Baja".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Sinarindo baja".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Sinarindo JB Baja".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "sumarto-Patung".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Surya Baja Angkutan".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "YULIAN AREA PERPUS".

29. 1 (satu) buah DVD-R merk Verbatim, SN : MAPA24TC27011199, bertuliskan "History Cash Flow Bukit Tinggi" yang didalamnya terdapat file "History Cash Flow Bukit Tinggi 2011 s.d. 2014_Pie Chart.xlsx"

30. 1 (satu) buah Bluray Disc merk Maxell S/N : BRF663RL 8 RB L3 yang didalamnya terdapat file dengan nama "Outlook Data File - ate.pst", dengan kapasitas : 8.745.737 KB. (nilai MD5 Hash dari file tersebut adalah b310826bc959e8a341e320d012b3f2fc & SHA1 HASH: 896f48eca3ccf9f45214cac85cd80c61972727a6e4

31. 1 (satu) keping CD-R plus dengan tulisan IPDN Sumbar I RAB

32. 1 (satu) keping CD-R plus dengan tulisan IPDN Sumbar II GAMBAR

33. 1 (satu) buah DVD-R merk Verbatim, SN : MAPA24TC27011101, dengan tulisan "Petty Kas IPDN Bukit Tinggi," yang di dalamnya berisi file excel dengan nama "Rekap 2011 dan 2012."

34. 1 (satu) buah Hard Disk Merk Seagate Model ST9500420AS Nomor Seri : 5VJ99LLB Kapasitas 500 GB diambil dari Laptop Andri Budi Setyawan.

Hal 117 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) buah Hard Disk Merk Seagate Model ST1000DM003
Nomor Seri : Z1D4LJNL Kapasitas 1000 GB diambil dari PC Server
Akuntansi
 36. 1 (satu) buah Hard Disk Merk Seagate Model ST3160021A Nomor
Seri : 4JS26FSM Kapasitas 160 GB diambil dari Komputer Kasir
 37. 1 (satu) buah Hard Disk Merk Seagate Model ST340014A Nomor
Seri : 5MQ0EBAJ Kapasitas 40 GB diambil dari komputer PC
Ruangan Logistik lantai 2.
 38. 1 (satu) buah Hard Disk Merk Hitachi model HDT721016SLA380
Nomor Seri : MB2SRB6B Kapasitas 160 GB diambil dari ruangan
Administrasi dan Akutansi.
 39. 1 (satu) buah Hard Disk WD 640GB, S/N : WX41A21H3299 yang
digunakan oleh R. Soetanto
 40. 1 (satu) buah Hard Disk WD 1.0 TB, S/N : WX41E44LND88 yang
digunakan oleh NGATIJO.
- Seluruhnya dipergunakan dalam perkara BUDI RACHMAT
KURNIAWAN ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
10.000,00; (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Nopember
2018 Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt Pst, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DUDY JOCOM, M.si telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ KORUPSI
SECARA BERSAMA-SAMA “sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke 2;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara
selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti
dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti
kepada Terdakwa sejumlah Rp. 4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta
rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam
waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap,

Hal 118 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

4. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel dokumen dalam odner plastik warna biru berisikan :
 - a. 1 (satu) lembar copy Daftar isi,
 - b. 1 (satu) lembar copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai penjamin,
 - c. 5 (lima) lembar keputusan menteri dalam negeri nomor : 900-1097 tahun 2010 beserta lampirannya,
 - d. 5 (lima) lembar copy keputusan menteri dalam negeri nomor: 900-1127 tahun 2010 beserta lampirannya,
 - e. 22 (dua puluh dua) lembar copy peraturan menteri dalam negeri nomor:3 tahun 2011beserta lampirannya,
 - f. 2 (dua) lembar copy harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan kegiatan kampus IPDN Baso Sumatera Barat tahun anggaran 2011,
 - g. 2 (dua) lembar copy Bill of Quantity (BQ) pekerjaan kegiatan kampus IPDN Baso Sumatera Barat tahun anggaran 2011,
 - h. 2 (dua) lembar copy dokumen draft Surat Perjanjian,
 - i. 27 (dua puluh tujuh) lemabr dokumen draft syarat-syarat umum kontrak,
 - j. 3 (tiga) lembar copy dokumen draft syarat-syarat khusus kontrak,
 - k. 1 (satu) lembar copy Bank Garansi BRI nomor: 032917110288,
 - l. 2 (dua) lembar copy Bank Garansi BRI nomor : 032917110284,
 - m. 1 (satu) lembar copy Bank Garansi BRI nomor : 032917110288,

Hal 119 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 4 (empat) lembar copy dokumen pekerjaan tambah kurang pembangunan kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam tahun anggaran 2011,
- o. 11 (sebelas) lembar copy dokumen perjanjian kontrak kerja nomor : 011/420/PAKPA/VII/2011 tanggal 6 juli 2011 pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung kampus IPDN Provisni Sumatera Barat di Kabupaten Agam tahun anggaran 2011,
- p. 16 (enam belas) lembar copy dokumen perjanjian kontrak kerja nomor : 011/22/PAKPA/VI/2011 tanggal 6 juni 2011 pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung kampus IPDN Provisni Sumatera Barat di Kabupaten Agam tahun anggaran 2011,
- q. 33 (tiga puluh tiga) lembar copy dokumen perjanjian kontrak kerja nomor : 011/1075/PAKPA/IX/2011 tanggal 23 September 2011 pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung kampus IPDN Provisni Sumatera Barat di Kabupaten Agam tahun anggaran 2011
2. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pelelangan Nomor : 96/PU/KK/KDN/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. 1 (satu) bundel Dokumen Lelang pembangunan gedung kampus IPDN di Bukit Tinggi Sumatera Barat pada Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011;
4. 1 (satu) Bundel dokumen copy, Kronologis Pembangunan Gedung IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT TAHUN 2011;
5. 1 (satu) odner warna oranye yang bertuliskan "DOKUMEN PROYEK IPDN SUMBAR TAHUN 2011";
6. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-1097 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Tahun Anggaran 2011 di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
7. 5 (lima) lembar copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;

Hal 120 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
9. 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
10. 2 (dua) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 811.212.2-707 Tahun 2010 tanggal 17-9-2010 (SK pengangkatan Ir. DUDY JOCOM pada jabatan Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Sekretariat Jenderal Kemendagri), beserta 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 811.212.2/2023/SJ tanggal 17 September 2010, ditandatangani oleh KISWANTO, SH;
11. 2 (dua) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900-147 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1126 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 ditandatangani DIAH ANGGRAENI a.n. Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal, beserta 3 (tiga) lembar copy lampirannya;
12. 4 (empat) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 027-129 Tahun 2011 Tanggal 22 Februari 2011 Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011;
13. 3 (tiga) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 027-130 Tahun 2011 Tentang Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Pengadaan barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Februari 2011;
14. 3 (tiga) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 811.212.3-708 Tahun 2010 Tanggal 17-9-2010 (SK Urkanus Sihombing menjadi Kepala Bidang Analisis Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Kajian Kebijakan Strategik Setjen Kemendagri);
15. 3 (tiga) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 811.212.3-682 tahun 2009 tanggal 24 September 2009, ditujukan kepada Drs. Burhanuddin, jabatan baru : Kepala Bidang

Hal 121 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inventarisasi Kekayaan Milik Negara pada Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Asset Sekretariat Jenderal;

16. 3 (tiga) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 811.212.3.708 tahun 2010 tanggal 17 September 2010, ditujukan kepada Drs. Burhanuddin, jabatan baru : Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Badan Litbang Kemendagri;
17. 5 (lima) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 811.212.2-530 Tahun 2012 Tanggal 7 Agustus 2012 (SK Restuady Daud sebagai Kepala Pusat Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi Sekretariat Jenderal);
18. 3 (tiga) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 811.212.3-708 Tahun 2010 Tanggal 17 September 2010 (SK Restuady Daud sebagai Kepala Bagian Perencanaan Program pada Biro Perencanaan Setjen Kemendagri);
19. 1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-738 tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010;
20. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor : 011/3438/SJ tanggal 13 September 2011 Perihal Persetujuan Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kapus IPDN di Provinsi Sumatera Barat;
21. 3 (tiga) lembar copy Nota Dinas Nomor 667/SJ/2011 tanggal 23 Agustus 2011, perihal Laporan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di 4 (empat) Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Riau) TA 2011. Ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, ditandatangani oleh DIAH ANGGRAENI, Sekretaris Jenderal. Pada dokumen tersebut terdapat tulisan tangan "Sekjen, 1. Penetapan", paraf dan tanggal "23/8/11";
22. 1 (satu) lembar copy surat Nomor : 660/2061/PAKPA/XI/2011 tanggal 23 November 2011 Hal : Pengantar Studi AMDAL;
23. 1 (satu) bundel copy surat Nomor : 700/2652/SJ tanggal 10 Juli 2011 Perihal : TLHP BPK RI;
- 24.4 (empat) lembar copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 900.05-292 PAKPA 2011 tentang Tim Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten

Hal 122 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, tanggal 4 Mei 2011;

25.1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 005/20/Sj/2010 Tanggal 27 Desember 2010 Perihal: Undangan Penyerahan DIPA Tahun 2011;

26.3 (tiga) lembar copy Program Peningkatan Sarpras Aparatur Kemendagri;

27. 1 (satu) lembar copy Ilustrasi Alur Perencanaan TA 2011;

28. 3 (tiga) lembar copy Dokumen Perencanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011;

29. 3 (tiga) lembar copy Surat Nomor: BU.01.06-Cb/79 Tanggal 19 Januari 2011 Perihal: Pendapat Teknis Pekerjaan Lanjutan Pengadaan Konsultan Perencanaan Untuk Pembangunan Gedung Kampus IPDN Daerah;

30.1 (satu) bundel asli Surat Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor : KP.01.08-Cb/182 tanggal 10 Februari 2011 dan lampirannya

31. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Nomor: 826.2/29/01.PAKPA Tanggal 25 Februari 2015 (Itriah Afsolin sedang melaksanakan tugas belajar (S2) terhitung mulai tanggal 1 September 2004 s/d. 31 Agustus 2015) dengan lampiran: 2 (dua) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 894-1655 Tahun 2014 Tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar (S2) Pada Program Master Of Arts Gevernance And Public Policy The University Of Sheffield dan 1 (satu) lembar Surat Nomor: R-228/22/02/2015 Tanggal 23 Februari 2015 Perihal: Permintaan Keterangan.

32. 3 (tiga) lembar copy Keputusan Direksi PT. Utama Karya (Persero) Nomor: 1739/KPTS/41/2010 Tanggal 19 Oktober 2010 Tentang Susunan Pengurus Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan PT. Haka pole dan PT. Hakaaton.

33. 3 (tiga) lembar copy Deskripsi Jabatan Direktur Produksi, Mulai Berlaku: 20 Desember 2005 dan 3 (tiga) lembar printout Curriculum Vitae a.n. Ir. R Soetanto, MM.

34. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT. Utama Karya (Persero) Nomor: 1615/KPTS/20/2011 Tanggal 27 Juli 2011 Tentang Perubahan Struktur Organisasi Kamtor Puat, Divisi dan Wilayah.

Hal 123 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT. Utama Karya (Persero) Nomor: 001/KPTS/01/2011 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Pada Divisi Pemasaran tanggal 03 Januari 2011, ditandatangani oleh S. SUBAGYONO, Direktur Utama PT. Utama Karya (Persero).
36. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT. Utama Karya Nomor: 1083/KPTS/14/2011 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat PT. Utama Karya (Persero) tanggal 31 Mei 2011, ditandatangani oleh S. SUBAGYONO, Direktur Utama Pt. Utama Karya (Persero).
37. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT. Utama Karya (Persero) Nomor: 1640/KPTS/23/2011 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat PT. Utama Karya (Persero) tanggal 27 Juli 2011, ditandatangani oleh Ir. TRI WIDJAJANTO J, MT., Direktur Utama PT. Utama Karya (Persero).
- 38.2 (dua) lembar copy Dokumen No. Dokumen: OPS/DDO/P/002 Diterbitkan Tanggal: 29 Maret 2010: Halaman: 16-17 dari 19.
- 39.1 (satu) lembar copy Surat Nomor: HKDG/Smr.1842/ST/199 Tanggal 20 Oktober 2011, Hal: Penugasan (Remon Debal sebagai Deputy Project Manager pada Proyek IPDN Bukit Tinggi).
- 40.2 (dua) lembar copy Surat Tanggal 10 September 2012, Hal: Pengunduran Diri (Remon Debal) dengan lampiran Surat Keterangan Kesahatan.
- 41.1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Kartu ATM atas nama Gregorius Aji Sentosa tanggal 27 Januari 2012, ditandatangani oleh Remon Debal, ST dan Dedy Susetyo, SE.
- 42.1 (satu) lembar copy Surat PT. Utama Karya Nomor : HKDG/Smr.2145/ST/228 Hal Tugas Perbantuan Kepada Sdr. G. Aji Sentosa, ST tanggal 15 November 2011
43. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: HKDG/Smr.180/UDP/02 Tanggal 26 Januari 2012, Hal: Koordinasi Pembagian Tugas (Pergantuan Tugas Operasional Proyek di Lapangan dari Ir. Pedi Lestario kepada Remon Debal).
44. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: HKDG/Smr.1208/ST/104 Tanggal 06 Juli 2012, Perihal: Penugasan (Yusuf Sitorus sebagai SOM Proyek Mall Saint Morits).
45. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: HKDG/Smr.1784/ST/194 Tanggal 18 Oktober 2011, Perihal: Penugasan (Yusuf Sitorus sebagai SOM pada Proyek IPDN Bukit Tinggi).

Hal 124 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 179/KPTS/04/2011/5-7 Tanggal 25 Januari 2011 Perihal: Pembebasan dan Pengangkatan Kembali Sebagai Pejabat (Pengangkatan Rudy Hertanto sebagai GM Sumber Daya pada Direktorat IV).
 - b) 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 1640/KPTS/23/2011/1-91 Tanggal 27 Juli 2011 Perihal: Pembebasan dan Pengangkatan Sebagai Pejabat (Pengangkatan Rudy Hertanto sebagai GM Produksi pada Direktorat Operasi I).
 - c) 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 121/KPTS/05/2012/1-23 Tanggal 25 Januari 2012 Perihal: Pembebasan dan Pengangkatan Sebagai Pejabat (Pengangkatan Rudy Hertanto sebagai GM SDM & Umum pada Direktorat SDM & Umum).
 - d) 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: GMSU/Gh.1323/UDP/65 Tanggal 30 Juli 2012 Perihal: Pengakhiran Hubungan Kerja Dengan Mendapat Hak Pensiun Normal.
47. 15 (lima belas) lembar copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1260004347711, nama R. PEDI LESTARIO periode 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2014.
48. 19 (sembilan belas) lembar copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1110006241331, nama R. PEDI LESTARIO periode 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2014.
49. 19 (sembilan belas) lembar copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1050004679845, nama REMON DEBAL periode 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2014.
50. 7 (tujuh) lembar copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1110006322479, nama REMON DEBAL periode 17 Februari 2012 s.d. 1 Agustus 2013.
51. 6 (enam) lembar copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1080001363838, nama REMON DEBAL periode 1 Januari 2011 s.d. 1 Maret 2014.
52. 5 (lima) lembar copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1110012031973, nama GREGORIUS AJI SENTOSA periode 18 November 2011 s.d. 31 Desember 2014.
53. 12 (dua belas) lembar copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1260004019930, nama GREGORIUS AJI SENTOSA periode 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2014.

Hal 125 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) bundel copy legalisir Daftar Harga Satuan Upah, Bahan, Pekerjaan (HSPK) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Agam dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Triwulan III (September) tahun 2010.
55. 1 (satu) bundel copy legalisir Daftar Harga Satuan Upah, Bahan, Pekerjaan (HSPK) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Agam dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Triwulan III (September) tahun 2011.
56. 1 (satu) bundel copy legalisir Daftar Harga Satuan Upah, Bahan, Pekerjaan (HSPK) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Agam dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Triwulan III (September) tahun 2012
57. 1 (satu) bundel fc dokumen surat penawaran harga dan daftar analisa pekerjaan atap baja ringan gonjong IPDN Baso TA 2011 dari sdr Sudiswar
58. 1 (satu) bundel copy Dokumen Analisa Harga Satuan dan Barang, Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, PT. Bina Karya (Persero).
- 59.1 (satu) lembar copy Pengumuman Prakualifikasi Nomor: 08/Peng/P3/KK/KDN/V/2011 Iklan Harian: Koran Tempo Hal: F9, Hari/Tanggal: Senin, 30 Mei 2011, Perihal: Pengumuman PQ/Lelang.
60. 1 (satu) bundel copy dokumen terkait Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, Tahun Anggaran 2011, yang terdiri dari:
 - a) Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis Nomor: 169/BA/EV/KK/KDN/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011.
 - b) Pengumuman Peringkat Teknis Nomor: 181/Peng/P3/KK/KDN/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011,
- 61.1 (satu) lembar copy Surat Setjen Kemendagri Nomor: 175/Und/KK/KDN/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011, perihal Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II, ditujukan kepada PT. Utama Karya, PT. Wijaya Karya dan PT. Wakita Karya. Ditandatangani oleh MOHAMMAD NOVAL, ST., Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi di Lingkungan Setjen Kemendagri;
62. Copy Dokumen yang terdiri dari:

Hal 126 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 2 (dua) lembar copy Surat PT. Utama Karya, Divisi Gedung, Nomor HK.DG/A.1357/TENDER/066 tanggal 12 Agustus 2011 ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, perihal Penawaran Harga untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat. Ditandatangani oleh Ir. BUDI RACHMAT K. MM., General Manager Divisi Gedung, PT. Utama Karya.
- b) 2 (dua) lembar copy dokumen Rekapitulasi Biaya, nilai pembulatan Rp 125,686,000,000.00 ditandatangani di Jakarta tanggal 12 Agustus 2011 oleh Ir. BUDI RACHMAT K. MM., General Manager Divisi Gedung, PT. HK.
63. 1 (satu) bundel copy dokumen terkait Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, Tahun Anggaran 2011, yang terdiri dari:
- a) Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga Nomor: 144/BA/PPH/KK/KDN/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011.
- b) Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Harga Nomor: 177/BA/EV/KK/KDN/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011.
- c) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 180/BA/EV/KK/KDN/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011.
- 64.1 (satu) lembar copy Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 011/3438/SJ, tanggal 13 September 2011, perihal Persetujuan Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemendagri, ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI, Menteri Dalam Negeri selaku Pengguna Anggaran;
- 65.1 (satu) lembar copy Pengumuman Pemenang Nomor: 299/Peng/P3/KK/KDN/IX/2011 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, ditandatangani di Jakarta tanggal 13 September 2011 oleh MOHAMMAD NOVAL, ST., Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal.
66. 1 (satu) lembar copy Surat Setjen Kemendagri, Nomor: 027/1057,PAKPA/IX/2011 tanggal 21 September 2011 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi

Hal 127 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, ditujukan kepada Direktur PT. Hutama Karya (Persero), ditandatangani oleh Ir. DUDY JOCOM, Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

67. 1 (satu) bundel copy Nota Dinas Nomor : 562/PBMN/IX/12 tanggal 31 Oktober 2011 Perihal : Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Minggu kelima
68. 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 027/1820.3/BASTPHP/PAKPA/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011
 - b. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Kesanggupan a.n. Ir. Budi Rachmat Kurniawan.MM, Jabatan : General Manager PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung
69. 5 (lima) lembar copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (Tahap III) Nomor : 027/1761.2/BASTPHP/PAKPA/XII/2011 Tanggal 9 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 06/BAPKP-HKDG/IPDN BT/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011
70. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan Pelaksana Nomor: 027/2023/BAST/PAKPA/XII/2011 Tanggal: 29 Desember 2011, Pekerjaan: Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Lokasi: Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
71. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Dalam Masa Pemeliharaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Nomor: 534/BAP/PAKPA/VIII/2012 Tanggal: 6 Agustus 2012.
72. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima II Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Nomor: 027/1561/BAST/VIII/2012 Tanggal: 7 Agustus 2012
73. 1 (satu) bundel copy Kwitansi, Kwitansi Nomor: 01/U.Muka/IPDN/September/2011 Tanggal 28 September 2011, Dari: Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sebesar Rp. 25.137.200.000,-, Untuk Pembayaran: Pembayaran Uang Muka Pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan SPMK Nomor: 027/1078/PAKPA/IX/2011 dan Kontrak Nomor:

Hal 128 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011/1075/PAKPA/IX/2011 Tanggal 23 September 2011,
MAK.010.01.02-1224.01.011.533111.

74. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor: HK.DG/R.4100/DIV.C/325 Tanggal 30 November 2011 Perihal: Pembayaran Tahap Pertama Pekerjaan Kostruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat TA 2011.
75. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 03/Tahap ke-2/IPDN/XII/2011 Tanggal 30 Nopember 2011, Dari: Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sebesar Rp. 30.164.640.000,-, Untuk Pembayaran: Pembayaran Tahap Kedua Pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kostruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan SPMK Nomor: 027/1078/PAKPA/IX/2011 dan Kontrak Nomor: 011/1075/PAKPA/IX/2011, Tanggal 23 September 2011, MAK.010.01.02-1224.01.011.533111 dan Progress 55,5998%.
76. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: S45627T/133/110 Tanggal 20-10-2011.
77. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: S84138T/133/110 Tanggal 14-12-2011.
78. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 160439X/133/110 Tanggal 22-12-2011.
79. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 163654X/133/110 Tanggal 27-12-2011.
80. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 164934X/133/110 Tanggal 29-12-2011.
81. 1 (satu) bundel copy Dokumen dalam Map Plastik yang terdiri dari:
- 1 (satu) bundel copy Daftar Suplier Item Dominan (SKBDN).
 - 1 (satu) bundel copy Daftar Kontrak Subkontraktor Divisi dan Realisasi Tagihan Tahun 2011 - 2012.
 - 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 01/U.Muka/IPDN/September/2011 Tanggal 28 September 2011 Sejumlah Rp. 25.137.200.000,- Untuk Pembayaran: Pembayaran Uang Muka Pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kostruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan SPMK Nomor: 027/1078/PAKPA/IX/2011 dan

Hal 129 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Nomor: 011/1075/PAKPA/IX/2011, Tanggal 23 September 2011, MAK.010.01.02-1224.01.011.533111.

- d. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor: HK.DG/R.4100/DIV.C/325 Tanggal 30 Nopember 2011 Perihal: Pembayaran Tahap Pertama Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera barat TA 2011 (Kwitansi Nomor: 01/Tahap ke-1/IPDN/XI/2011 Tanggal 30 Nopember 2011 Sejumlah Rp. 20.109.760.000,- Untuk Pembayaran: Pembayaran Tahap Pertama Pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kostruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan SPMK Nomor: 027/1078/PAKPA/IX/2011 dan Kontrak Nomor: 011/1075/PAKPA/IX/2011, Tanggal 23 September 2011, MAK.010.01.02-1224.01.011.533111 dan Progress 25,3961%).
- e. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 03/Tahap ke-2/IPDN/XII/2011 Tanggal 30 Nopember 2011 Sejumlah Rp. 30.164.640.000,- Untuk Pembayaran: Pembayaran Tahap Kedua Pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kostruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan SPMK Nomor: 027/1078/PAKPA/IX/2011 dan Kontrak Nomor: 011/1075/PAKPA/IX/2011, Tanggal 23 September 2011, MAK.010.01.02-1224.01.011.533111 dan Progress 55,5998%).
- f. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 160439X/133/110 Tanggal 22-12-2011.

82.3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penjamin yang ditandatangani oleh Ir. BUDI RACHMAT KURNIAWAN, MM tanggal 18 April 2012

83.2 (dua) lembar copy Jaminan Bank (Bank Garansi) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No. 032917110284 dengan nilai Rp. 20.109.760.000 (Dua puluh Milyar Seratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

84.1 (satu) lembar copy Bank Garansi (Jaminan Pemeliharaan) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor No. 032917110288 dengan nilai Rp. 6.284.300.000,- (Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Hal 130 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85.3 (tiga) lembar copy buku daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, diterbitkan oleh : Ikatan Notaris Indonesia 2006
- 86.1 (satu) bundel asli Anggaran Rencana Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Baso-Kab. Agam No. Karya : K.09.016 PT. Utama Karya
- 87.1 (satu) odner warna Putih berisikan dokumen BQ Proyek IPDN Baso
- 88.1 (satu) lembar copy Master Schedule Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Prov. Sumatera Barat di Kabupaten Agam PT. Utama Karya (Persero) tertanggal 29 Desember 2011.
- 89.1 (satu) lembar copy Master Schedule Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Prov. Sumatera Barat di Kabupaten Agam PT. Utama Karya (Persero) tertanggal 23 September 2011 (tidak ada tanda tangannya).
- 90.1 (satu) bundel dokumen gambar kerja/shop drawing untuk pemasangan atap pada gedung auditorium gedung administrasi, Rumah doa (T125), serta rumah dinas (T 72)
- 91.3 (tiga) lembar copy Jadwal Penyelesaian dan Monitoring Gedung Administrasi Proyek IPDN Kabupaten Agam – Sumatera Barat (Januari 2012 dan Pebruari 2012).
- 92.6 (enam) lembar copy Jadwal Penyelesaian dan Monitoring Gedung Administrasi Proyek IPDN Kabupaten Agam – Sumatera Barat (Oktober 2011, November 2011 dan Desember 2011).
- 93.1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 05/LKP-HKDG/IPDN BT/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampirannya.
- 94.1 (satu) bundel map merah yang didepannya terdapat print out Rekapitulasi Prestasi Mingguan Kemajuan Pekerjaan Periode : 15 (Lima Belas) Tanggal 30 Desember s/d 5 Januari 2012 Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Lokasi Kabupaten Agam
- 95.3 (tiga) lembar Rekapitulasi Prestasi Kemajuan Pekerjaan Tanggal 03 April 2012 yang dibuat oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Arkitek Team Empat ditandatangani oleh Dedi Junaidi selaku Site Manager
- 96.4 (empat) lembar printout capture blackberry messenger display name: BR | Budi HK, Dikirim Sel @ 19:58 - 22:51.

Hal 131 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97.5 (lima) lembar copy Pengesahan Direksi P.T. Utama Karya (Persero) Tentang Anggaran Rencana Pelaksanaan, Berdasarkan Rapat Eksekutif Pelaksanaan (REP) tgl. 28 Oktober 2011.
- 98.1 (satu) bundel copy Foto Progres 100% Proyek Pembangunan IPDN Sumatera Barat.
- 99.1 (satu) bundel asli dokumen foto dokumentasi pekerjaan atap baja ringan gonjong IPDN Baso TA 2011
100. 1 (satu) bundel dokumen asli Progress Visual Sampai Tanggal 11 Maret 2012 Proyek Pembangunan Kampus IPDN Bukit Tinggi Sumatera Barat Konsultan Manajemen Konstruksi Arkitek Team Empat dan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia
101. 1 (satu) bundel print out Lporan Pemeriksaan Lapangan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Regional di Kabupaten Agam, Sumatera barat Tanggal 6 Januari 2013
102. 1 (satu) bundel dokumen ASLI Pengujian Material Urugan Pilihan Pekerjaan Parkir dan Jalan Lingkungan Kampus IPDN di Baso PT Utama Karya Oktober 2011.
103. 1 (satu) bundel dokumen ASLI Laporan Pelaksanaan Pengujian Dinamis Pondasi Tiang Pancang dengan Metode Pile Driving Analyzer (PDA) Test Doc.No.080/PDA-HK/SB/XI/2011.
104. 1 (satu) bundel copy Surat No. 050/4117/SJ Perihal: Rancangan Renstra Depdagri Tahun 2010-2014 Tanggal 20 Nopember 2009, Rancangan Renstra DepdagriTahun 2010-2014: Surat Menteri Dalam Negeri kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi dan Kepala UKP4.
105. 1 (satu) bundel copy Surat No. 050/4661/SJ Perihal: Renstra Depdagri Tahun 2010-2014 Tanggal 28 Desember 2009, Penyempurnaan Rancangan Renstra Depdagri Tahun 2010-2014: Surat Menteri Dalam Negeri kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi dan Kepala UKP4.
106. 1 (satu) bundel copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 20 Januari 2010, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Lampiran Buku 11: Rencana Tindak Kementerian/Lembaga Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 Per Kementerian/Lembaga, Kementerian Dalam Negeri: 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur Kernenterian Dalam Negeri.

Hal 132 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) bundel Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi, No. 050/265/SJ Perihal: Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 Tanggal 30 Januari 2010 beserta lampirannya.
108. 1 (satu) buku copy Permendagri No. 16 Tahun 2010 Tanggal 30 Januari 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014.
109. 1 (satu) bundel copy Materi Sidang Kabinet tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 lingkup Kemendagri, Tanggal 24 Maret 2010.
110. 1 (satu) bundel copy Materi Sidang Kabinet Paripurna Bidang Perekonomian tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 lingkup Kemendagri, Tanggal 5 April 2010.
111. 1 (satu) bundel copy Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Republik Indonesia perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 No. 0181/M.PPN/04/2010 dan No. SE-120/MK/2010 Tanggal 6 April 2010.
112. 1 (satu) bundel copy TOR Pembangunan Sarpras Sarana Fisik Kampus IPDN Daerah 4 (empat) Daerah TA. 2011, April 2010, beserta lampiran berupa Rencana Anggaran Biaya dan Laporan Akhir Master Plan Kampus IPDN Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Riau.
113. 1 (satu) bundel copy Trilateral Meeting Rencana Kerja Kernendagri Tahun 2011, 12-15 April 2010.
114. 1 (satu) bundel copy Materi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) lingkup Kernenterian Dalam Negeri Tahun 2011, 28 April 2010.
115. 1 (satu) bundel copy Surat Penyampaian Pagu Indikatif Hasil Trilateral Meeting dan Sekretaris Jenderal kepada Komponen Kemendagri No. 900/17131/SJ Tanggal 30 April 2010.
116. 1 (satu) bundel copy Rencana Kerja Pemerintah (RKP) lingkup Kernendagri, 3 Mei 2010.
117. 1 (satu) bundel copy Alokasi Pagu Indikatif Tahun 2011 Kernenterian Dalam Negeri Berdasarkan Program, Satker dan Alokasi Anggaran, 4 Mei 2010.
118. 1 (satu) bundel copy Perpres No. 29 Tahun 2010 Tanggal 14 Mei 2010, Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Hal 133 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) bundel copy Materi Kementerian Dalam Negeri pada Rapat Dengar Pendapat Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 dengan Komisi II DPR RI, 3 Juni 2010.
120. 1 (satu) bundel copy Materi Menteri Dalam Negeri pada Sidang Kabinet Paripurna Bidang Perekonomian tentang APBN Tahun 2010 dan RAPBN Tahun 2011, 10 Juni 2010.
121. 1 (satu) bundel copy Materi Kementerian Dalam Negeri pada Rapat Dengar Pendapat Penyempurnaan Alokasi Anggaran Menurut Program dan Kegiatan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 (Komisi 11 DPR RI), 16 Juni 2010.
122. 1 (satu) bundel copy Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011 No. SE-294/MK.02/2010 Tanggal 24 Juni 2010.
123. 1 (satu) bundel copy RKA-K/L Tahun 2011 Berdasarkan Pagu Sementara.
124. 1 (satu) bundel copy Materi Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri TA. 2011, 2 September 2010, 20 September 2010.
125. 1 (satu) bundel copy Dokumen Kesepakatan Trilateral Meeting ke 2 Tahun 2010 Berdasarkan Pagu Sementara Kemendagri Tahun 2011, 11-12 Oktober 2010.
126. 1 (satu) bundel copy Materi Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri TA. 2011, 21 Oktober 2010.
127. 1 (satu) bundel copy Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Definitif Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011 No. SE-676/MK.02/2010 Tanggal 3 November 2010.
128. 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, 19 November 2010.
129. 1 (satu) bundel copy Pagu Definitif Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 (Persetujuan Komisi II DPR RI), 22 November 2010.
130. 1 (satu) bundel copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2011 tanggal 30 November 2010, beserta Lampiran 1 Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2011 Menurut Organisasi, Bagian Anggaran, Unit Organisasi, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan,

Hal 134 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Belanja, dan Sumber Dana (010) Kernenterian Dalam Negeri (010.01) Sekretariat Jenderal Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

131. 1 (satu) bundel copy Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri (RKA-K/L) Tahun 2011 Berdasarkan Pagu Deftnitif, 1 Desember 2010.
132. 1 (satu) bundel copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 No. 2863/010-01.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010.
133. 1 (satu) buku copy Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Keria Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011, Nomor 5 Tahun 2011 Tanggal 21 Januari 2011.
134. 6 (enam) lembar copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tanggal 12 Januari 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 Tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan.
135. 2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134/M Tahun 2010 Tanggal 16 September 2010 (SK Pengangkatan Sdr, Dr. Ir. Yuswandi A. Temenggung, M.Sc., M.A. sebagai Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri).
136. 2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89/M Tahun 2014 Tanggal 13 Juni 2014 (SK Pengangkatan Sdr, Dr. Ir. Yuswandi A. Temenggung, M.Sc., M.A. sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri).
137. 2 (dua) lembar copy Petikan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.22-514 Tahun 2004 Tanggal 29 Juni 2004 (SK Pengangkatan Sdr, Dr. Ir. Yuswandi A. Temenggung, M.Sc., M.A. sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran pada Sekretariat Jendral Departemen Dalam Negeri).
138. 2 (dua) lembar copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2004 Tanggal 6 Oktober 2004 Tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan.
139. 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Hal 135 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
141. 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
142. 1 (satu) Bundel Copy Perjanjian/Kontrak Kerja tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Di Kabupaten Agam tahun Anggaran 2011 Antara Kementerian Dalam Negeri RI dan PT. Utama Karya (Persero), Nomor Kontrak : 011/1075/PAKPA/IX/2011 Tanggal 23 September 2011.
143. 1 (satu) bundel asli Perjanjian/Kontrak Kerja tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011, antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan PT. Utama Karya (Persero). Nomor Kontrak: -11/1075/PAKPA/IX/2011, tanggal 23 September 2011.
144. 1 (satu) bundel copy Perjanjian/Kontrak Kerja Tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011 Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan PT. Utama Karya (Persero) Nomor Kontrak: 011/1075/PAKPA/IX/2011 Tanggal: 23 September 2011
145. 1 (satu) bundel copy Pekerjaan Tambah Kurang Contract Change Order (C.C.O) Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011.
146. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian/ Kontrak Kerja tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011 Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dan PT. Utama Karya (Persero) dengan nomor kontrak : 011/ 1075/ PAKPA/ IX/ 2011 tanggal 23 September 2011 yang pada pasal 18 memuat Sanksi dimana pada poin (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka atas keterlambatan ini PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5 % (lima per seratus) dari nilai kontrak

Hal 136 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 3 (tiga) lembar copy Addendum Perjanjian/ Kontrak Kerja Tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatra Barat Di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011 antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan PT Utama Karya (Persero), Nomor Kontrak: 011/1682/PAKPA/XII/2011, tanggal 7 Desember 2011.

148. 1 (satu) bundel copy Dokumen IPDN Kampus Sumatera Barat TA 2011 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) bundel copy Dokumen Kontrak (Perjanjian/Kontrak Kerja Tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011 antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan PT. Utama Karya (Persero) Nomor Kontrak : 011/1075/PAKPA/IX/2011 Tanggal 23 September 2011
- b. 1 (satu) bundel copy Permohonan Pembayaran dari PT. Utama Karya yang terdiri dari :
 - aa. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor : KH.D/R.2230/DIV.C/343 Tanggal 14 Desember 2011 perihal : Pembayaran Tahap Keempat Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat TA 2011
 - bb. 2 (dua) bundel copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 027/2078/PAKPAK/IX/2011 Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011
- c. 1 (satu) bundel copy Daftar Jasa Konsultansi (Daftar Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Bukittinggi Tahun Anggaran 2011
- d. 1 (satu) bundel copy Persetujuan Penetapan Menteri Dalam Negeri Perihal Penetapan Pemenang (Surat Nomor 011/3438/SJ Tanggal 13 September 2011 Perihal : Persetujuan Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat
- e. 1 (satu) bundel copy Pengumuman Pemenang Lelang (Pengumuman Pemenang Nomor : 229/Peng/P3/KK/KDN/IX/2011 Tanggal 13 September 2011 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011

Hal 137 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) bundel copy SK Penetapan Panitia Lelang (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 027-129 Tahun 2011 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011
149. 2 (dua) lembar copy dokumen Dasar Penetapan Kontrak Lumpsum
150. 3 (tiga) lembar copy dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2010 nomor : 0001/010-01.1/-/2010 tanggal 31 desember 2009
151. 16 (enam belas) lembar copy dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2011 nomor : 2863/010-01.1.01/00/2011 tanggal 20 desember 2010
152. 1 (satu) map kuning KABITA dengan tulisan “ Baru” pada sudut atas kanan dan kiri serta berjudul “Perencana Sumatera Barat (Ulang) 2011
153. 1 (satu) map kuning KABITA dengan tulisan “ Lama” pada sudut atas kanan dan kiri serta berjudul “Perencana Sumatera Barat 2011
154. 1 (satu) bundel asli dokumen pelelangan Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat (berita acara) yang lembar pertamanya berupa Surat Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal Kemendagri Nomor : 027/420/PAKPA/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 Hal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat
155. 1 (satu) lembar copy Dokumen 7, Perhitungan Kemampuan Dasar Perusahaan (KD) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
156. 1 (satu) lembar copy Perhitungan SKK, SKP dan KD, PT. Nindya Karya (Persero).
157. 2 (dua) lembar copy Formulir Isian Perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP) Penyedia Jasa Kualifikasi, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.
158. 3 (tiga) lembar copy Daftar Sisa Kemampuan Nyata (SKN), SKK, & KD Jasa Pemborongan, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.
159. 4 (empat) lembar copy Dokumen Prakualifikasi, Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), PT. Waskita Karya (Persero).
160. 2 (dua) lembar copy Perhitungan SKK, SKP & KD, PT. PP (Persero) Tbk.

Hal **138** Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) lembar copy surat nomor 011/2153/SJ tanggal 9 Juni 2011 perihal Permintaan Pendampingan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampus IPDN
162. 1 (satu) lembar copy surat S-311/D4/1/2011 tanggal 12 Juli 2011 Hal Reviu dan Supervisi atas Pengadaan Barang dan Jasa dan 1 (satu) lembar lampiran Surat Tugas Nomor : ST-415/D4.01/2010 tanggal 12 Juli 2011
163. 2 (dua) lembar copy surat nomor S-484/D4.1/2011 tanggal 3 Agustus 2011, hal Reviu dan Supervisi Pengadaan Barang dan Jasa
164. 1 (satu) bundel dokumen dalam map berwarna kuning berisikan :
- a. 1 (satu) bundel dokumen berisikan
 - (1) 2 (dua) lembar copy dokumen keputusan menteri dalam negeri nomor : 892.1-829 tahun 2009 tentang Lokasi Pembangunan Kampus IPDN di Daerah
 - (2) 2 (dua) lembar copy dokumen keputusan menteri dalam negeri nomor : 425.12-22 tahun 2009 tentang Lokasi Kampus IPDN Daerah
 - (3) 2 (dua) lembar copy dokumen keputusan menteri dalam negeri nomor : 011-496 tahun 2009 tentang Penunjukkan Unit Kerja Pelaksana Pembangunan Kampus IPDN Daerah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
 - (4) 1 (satu) lembar copy dokumen Nota Dinas nomor : 051/149/PAKPA/XII/09 perihal Laporan Hasil Survey Lokasi Rencana Pembangunan IPDN dan Net Konsep Surat Sekretaris Jenderal Depdagri Kepada Para Gubernur di Empat Provinsi Perihal Pemberitahuan Lokasi Pembangunan Kampus IPDN Di tingkat Kabupaten
 - (5) 1 (bundel) copy dokumen Laporan Survey Lokasi Pembangunan IPDN Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
 - b. 1 (satu) bundel dokumen di clip berisikan :
 - (1) 2 (dua) lembar copy dokumen surat nomor : S-370/D4/01/2011 perihal Hasil Review Proses Pengadaan Gedung Kampus IPDN Pada 4 Lokasi di Daerah Tahun ANggaran 2011 tanggal 22 Agustus 2011
 - (2) 5 (lima) lembar copy dokumen Penjelasan Panitia terkait Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa

Hal 139 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khususnya Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di 3 Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat) tahun anggaran 2011

- (3) 2 (dua) lembar copy dokumen Nota Dinas Nomor : 21/ND/KK/KDN/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Laporan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di 4 Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat dan Riau) tahun anggaran 2011
- (4) 1 (satu) lembar copy dokumen Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran Atas Tambahan Persyaratan SBU Gred – 7 tanggal 8 September 2011 yang ditandatangani oleh DUDY JOCOM
- (5) 4 (empat) lembar copy dokumen Nota Dinas Nomor : 692/SJ/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Penjelasan Hasil Reviu Proses Pengadaan Gedung Kampus IPDN di 4 Daerah tahun anggaran 2011 oleh BPKP.
- c. 10 (sepuluh) lembar copy dokumen Laporan BPKP nomor : LAP-506/D4.01/2011 laporan Hasil Reviu Proses Pengadaan Gedung Kampus IPDN pada Empat Lokasi di Daerah tahun anggaran 2011 tanggal 19 Agustus 2011.

165. 9 (sembilan) lembar fotokopi Simpulan Hasil Reviu dan Supervisi atas Proses Pengadaan Gedung Kampus IPDN pada Empat Lokasi di Daerah Tahun Anggaran 2011, Lampiran surat Nomor: S-(kosong)/D4/01/2011 tanggal: (kosong) Agustus 2011.

166. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait kegiatan rivi pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN pada empat lokasi di daerah Tahun Anggaran 2011, dimana diantaranya terdapat:

1. Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 011/2153/SJ perihal Permintaan Pendampingan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampus IPDN, tanggal 9 Juni 2011, ditujukan kepada Kepala BPKP cq Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendagri DIAH ANGGRAENI.
2. Fotokopi Surat Deputi Pengawasan bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Nomor: S-311/D4/1/2011 tanggal 12 Juli 2011, perihal: Reviu dan Supervisi atas Pengadaan Barang dan Jasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Surat Tugas Nomor: ST-415/D4.01/2010 tanggal 12 Juli 2011.

3. Fotokopi Surat Deputi Pengawasan bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Nomor: S-484/D4/1/2011 tanggal 03 Agustus 2011, perihal: Reviu dan Supervisi atas Pengadaan Barang dan Jasa, serta Surat Tugas Nomor: ST-483/D4.01/2010 tanggal 03 Agustus 2011.

4. Fotokopi Kertas Kerja Evaluasi BPKP, Daftar Perbandingan Pekerjaan, kegiatan: Pembangunan Gedung Kampus Baso IPDN SUMBAR tahun anggaran 2011, dibuat oleh: M. ROFIQ, direview oleh: Marselina Tetty S.

167. 1 (satu) bundel copy Dokumen Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat PT. Bina Karya (Persero

168. 1 (satu) bundel copy Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat PT. Bina Karya (Persero

169. 1 (satu) bundel copy Dokumen Bill of Quantity, Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, PT. Bina Karya (Persero).

170. 1 (satu) bundel copy Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat TA. 2011, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

171. 1 (satu) bundel copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat TA. 2011, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

172. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat TA. 2011, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

173. 1 (satu) bundel copy Gambar Perencanaan Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat PT. Bina Karya (Persero

174. 1 (satu) budel As Build Drawing pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam TA 2011.

175. 1 (satu) bundel copy Cut Off-Karya Rampung Bulan Oktober 2012 Proyek Kampus IPDN Baso – Sumatera Barat PT. Utama Karya

176. 1 (satu) bundel copy Cut Off – Karya Rampung Bulan Agustus 2013 Proyek IPDN Baso- Sumatera Barat PT. Utama Karya

Hal 141 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) bundel Dokumentasi Photo Nama Proyek Pembangunan Kampus IPDN-Baso Periode Desember 2011 s/d Maret 2012
178. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Proyek pembangunan gedung kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun 2011.
179. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke I Periode 23 September s.d. 27 Oktober 2011, Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, TA 2011.
180. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke II Periode 28 Oktobers.d. 01 Desember 2011, Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, TA 2011.
181. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke III Periode 2 Desember s.d. 29 Desember 2011, Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, TA 2011.
182. 1 (satu) bundel copy laporan Mingguan Minggu Ke: 7 (Tujuh) Tanggal: 4 November s/d 10 November 2011 Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Kecamatan Baso - Kabupaten Agam, Utama Karya (Persero) Divisi Gedung, arkitek team empat.
183. 1 (satu) buah ASLI buku Laporan Mingguan ke-8 Periode 11 November s/d 17 November 2011 Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011.
184. 1 (satu) bundel copy laporan Mingguan Minggu Ke: 9 (Sembilan) Tanggal: 18 November s/d 24 November 2011 Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Kecamatan Baso - Kabupaten Agam, Utama Karya (Persero) Divisi Gedung, arkitek team empat.
185. 1 (satu) bundel copy laporan Mingguan Minggu Ke: 11 (Sebelas) Tanggal: 2 Desember s/d 8 Desember 2011 Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Kecamatan Baso - Kabupaten Agam, Utama Karya (Persero) Divisi Gedung, arkitek team empat.
186. 1 (satu) buah Copy buku Laporan Mingguan ke-12 Periode 09 Desember s/d 15 Desember 2011 Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011.

Hal 142 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Akhir Master Plan Kampus IPDN Regional Baso Bukit Tinggi Sumatera Barat Desember 2009 LPPM ITB Bandung
188. 1 (satu) bundel buku Pembangunan Kampus IPDN 4 Provinsi (Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara) Tahun Anggaran 2011 Kementerian Dalam Negeri Sekretariat Jenderal
189. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Regional Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat Tahun Anggaran 2010
190. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Regional Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 PT. Bina Karya (Persero).
191. 1 (satu) bundel copy Laporan Konsepsi Desain Kampus IPDN Baso-Sumatera Barat Tahun 2010 PT. Billitonica Indomatra Consultant
192. 1 (satu) bundel copy Dokumen Rencana Kerja Dan Syarat (Tahap I) Kampus IPDN Baso-Provinsi Sumatera Barat PT. Billitonica Indomatra Consultant
193. 1 (satu) bundel copy Dokumen Tahap I (Administrasi & Teknis) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Jakarta 02 Agustus 2011, PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung.
194. 1 (satu) bundel copy Dokumen Kualifikasi (1 – 2) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Jakarta 14 Juni 2011, PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung.
195. 1 (satu) bundel copy Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Rekaman, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.
196. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuilifikasi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Buku I, PT. Nindya Karya (Persero).
197. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuilifikasi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Buku II, PT. Nindya Karya (Persero).
198. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuilifikasi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.

Hal 143 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Vol. 1 of 2 Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Rekaman, PT. Waskita Karya (Persero).
200. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Vol. 2 of 2 Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Rekaman, PT. Waskita Karya (Persero).
201. 1 (satu) bundel copy Dokumen Administrasi & Teknis Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Rekaman, PT. Waskita Karya (Persero).
202. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Rekaman, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.
203. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pembangunan: Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat DIPA APBN Tahun Anggaran 2011, PT. PP (Persero) Tbk – Cabang IX.
204. 1 (satu) bundel copy Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pembangunan: Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumbar DIPA APBN Tahun Anggaran 2011, PT. PP (Persero) Tbk – Cabang IX.
205. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Nomor: 018/PRA/KK/KDN/III/2011 Tanggal: 28 Maret 2011, Paket Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, Kegiatan: Review Desain dan Pengawasan Berkala, Sumber Dana: DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tahun Anggaran: 2011.
206. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Bina Karya (Persero).
207. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Kampus IPDN Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011 PT. Bina Karya (Persero)
208. 1 (satu) bundel copy Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Indomas Mulia.

Hal 144 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat April 2011, PT. Indah Karya (Persero).
210. 1 (satu) bundel copy Dokumen Administrasi dan Teknis Paket Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung IPDN di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Yodya Karya (Persero).
211. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Rekayasapratama Grhayasaciptaloka.
212. 1 (satu) bundel copy Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Review Desain dan Pengawasan Berkala Tahun Anggaran 2011, Arkonin.
213. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Review Desain dan Pengawasan Berkala Tahun Anggaran 2011, Arkonin.
214. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan: Perencanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun: 2011, PT. Cakra Manggilingan Jaya
215. 1 (satu) bundel copy Data Administrasi Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Indomas Mulya.
216. 1 (satu) bundel copy Data Teknis Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Indomas Mulya.
217. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011 PT. Bina Karya (Persero)
218. 1 (satu) bundel copy Dokumen Administrasi Dan Penawaran Teknis Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011 PT. Bina Karya (Persero).
219. 1 (satu) bundel copy Dokumen Proposal Teknis Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011 PT Bina Karya (Persero)

Hal 145 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 1 (satu) Bundel copy Kontrak Nomor Kontrak : 011/420/PAKPA/VII/2011 Tanggal 6 Juli 2011 untuk Jasa Konsultasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kab. Agam Antara Pusat Administrtasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 dan PT. Bina Karya (persero).
221. 1 (satu) bundel copy dokumen tagihan/pencairan PT. Bina Karya Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencana Pembangunan Gedung IPDN Kampus Provinsi Sumatra Barat Tahun Anggaran 2011.
222. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuilifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, Arkitek Team Empat.
223. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuilifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Kabupaten Agam, Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Bita Enarcon Engineering.
224. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuilifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Rancang Persada.
225. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuilifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Yodya Karya (Persero).
226. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuilifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Gubahlaras.
227. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, Gubahlaras.
228. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Kegiatan: Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Wahanacipta Bangunwisma.

Hal 146 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Kegiatan: Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Wahanacipta Bangunwisma.
230. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Rancang Persada.
231. 1 (satu) bundel copy Dokumen Administrasi & Teknis Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat 2011, PT. Ciriajasa Cipta Mandiri.
232. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat 2011, PT. Ciriajasa Cipta Mandiri.
233. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian/Kontrak Kerja Tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011 Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan PT. Arkitek Team Empat Nomor : 011/22/PAKPA/VI/2011 Tanggal 6 Juni 2011
234. 1 (satu) bundel copy Perjanjian / Kontrak Kerja Tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Di Kab. Agam Tahun Anggaran 2011 antara Kementerian Dalam Negeri RI dan PT. Arkitek Team Empat, Nomor Kontrak : 011/22/PAKPA/VI/2011 Tanggal 6 Juni 2011.
235. 1 (satu) bundel copy dokumen tagihan/pencairan PT. Arkitek Team Empat Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung IPDN Kampus Provinsi Sumatra Barat Tahun Anggaran 2011.
236. 1 (satu) copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.2343/SPP/295 Tanggal 4 Oktober 2011 Pekerjaan Infrastruktur Area Perpustakaan & Poliklinik antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Yulian Berkah Abadi untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
237. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK – DG / A.2085 / SPP / 240 Tanggal: 8 September 2011, Pekerjaan

Hal 147 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur Area Asrama antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan CV. Prima Karya Sentosa untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat

238. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK – DG / A.2344 / SPP / 296 Tanggal: 4 Oktober 2011, Pekerjaan Infrastruktur Area Menza antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan CV. Prima Karya Sentosa untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
239. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK – DG / A.2101 / SPP / 245 Tanggal: 14 Oktober 2011, Pekerjaan Infrastruktur Area Auditorium antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan CV. Prima Karya Sentosa untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
240. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 4664 kepada CV. Prima Karya Sentosa sejumlah 524,000,000 Tanggal 16 November 2011.
241. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 5278 kepada CV. Prima Karya Sentosa sejumlah 2,000,000,000 Tanggal 27 Desember 2011.
242. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank Bukopin atas nama HUSAIN REDWIN NURLETTE No Rekening 0102038969 periode Desember 2011 s.d. Juni 2012
243. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-320/WPJ.04/KP.0903/2015, Nama: CV. Restu Kreasi Mandiri, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 02.143.028.5-016.000.
244. 1 (satu) lembar copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-02581/WPJ.04/KP.0903/2009, Nama: CV. Restu Kreasi Mandiri, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 02.143.028.5-016.000.
245. 1 (satu) lembar copy Surat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil Nomor: 01431/1.824.51, Nama Perusahaan: CV. Restu Kreasi Mandiri.
246. 1 (satu) bundel copy Akta Perseroan Komanditer “CV. Restu Kreasi Mandiri”, Nomor 15.-, Tanggal 7 September 2005.-.
247. 2 (dua) lembar copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kepada: Nur Wahid ST Sejumlah Uang: Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Untuk penerimaan, dengan rincian sebagai berikut: Perintisan Proyek IPDN Bukit Tinggi tanggal 03/05/2011.

Hal 148 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 1 (satu) copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.1987/SPP/214 Tanggal 26 Oktober 2011 Pekerjaan Patung IPDN antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan Y. Sumartono, S.Sn untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011.
249. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 42911 kepada J. Sumartono S. SN sejumlah Rp. 42.484.000 Tanggal 08 November 2011.
250. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: W 3300 kepada Sumartono sejumlah Rp. 31.863.000 Tanggal 28-Mei-12.
251. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 4418 kepada Muslim sejumlah Rp. 17.150.000 Tanggal 11-Nov-11.
252. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode Kas/Bank: H 45 kepada Muslim sejumlah Rp. 40.002.240,00 Tanggal Jan-13.
253. 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen Surat Perjanjian Jual Beli nomor : HK.DG/A.2047/SPP/235, tanggal 15 November 2011, Pekerjaan Jual Beli Material Rangka Baja antara PT. HUTAMA KARYA (Persero) dengan PT. SINARINDO MEGAH PERKASA untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011. -
254. 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen Addendum-I Surat Perjanjian Jual Beli nomor : HK.DG/A.2047/SPP-ADD I/235, tanggal 15 Desember 2011, Pekerjaan Jual Beli Material Rangka Baja antara PT. HUTAMA KARYA (Persero) dengan PT. SINARINDO MEGAH PERKASA untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011. -
255. 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen Surat Perjanjian Pemborongan nomor : HK-DG/A.2048/SPP/236, tanggal 16 November 2011, Pekerjaan Rangka Atap Baja antara PT. HUTAMA KARYA (Persero) dengan PT. SINARINDO MEGAH PERKASA untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011. -
256. 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen Addendum-I Surat Perjanjian Pemborongan nomor : HK-DG/A.2048/SPP-ADD I/236,

Hal 149 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2011, Pekerjaan Rangka Atap Baja antara PT. HUTAMA KARYA (Persero) dengan PT. SINARINDO MEGAH PERKASA untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011. -

257. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Perintah Mulai Kerja nomor : 004/HK-IPDN.BT/FES/SPMK/XI/2011 tanggal 15-Nov-11.
258. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Perintah Mulai Kerja nomor : 005/HK-IPDN.BT/FES/SPMK/XI/2011 tanggal 15-Nov-11.-
259. 2 (dua) lembar copy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan Rangka Atap Baja PT. Sinarindo Megah Perkasa Pada Proyek IPDN Provinsi Sumatera Barat tanggal 4 Mei 2012.
260. 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Rangka Baja Atap. -
261. 1 (satu) bundel Rekap Pembayaran Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Baja Sinarindo Megah Perkasa,PT.
262. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Rekening Koran Pinjaman BANK MANDIRI atas nama PT Sinarindo Megah Perkasa Nomor Rekening 60102003468 periode : -
 - a. 1/11/11 s/d 30/11/11;
 - b. 1/12/11 s/d 30/12/11;
 - c. 1/01/12 s/d 31/01/12;
 - d. 1/02/12 s/d 29/02/12;
 - e. 1/10/12 s/d 31/10/12;
 - f. 1/02/13 s/d 28/02/13;
 - g. 1/05/13 s/d 31/05/13;
 - h. 1/06/13 s/d 30/06/13;
 - i. 1/08/13 s/d 31/08/13;
 - j. 1/03/14 s/d 31/03/14;
 - k. 1/04/14 s/d 30/04/14;
 - l. 1/07/14 s/d 31/07/14.
263. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK: B 2496 kepada PT. Sinarindo Megah Perkasa sejumlah 75.000.000 Tanggal Juli 2014.
264. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Kode & No. Dok: W 1040 kepada PT. Sinarindo Megah Perkasa sejumlah Rp. 186.083.937 Tanggal 20-Feb-12.

Hal 150 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. 1 (satu) copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.151/SPP/013 Tanggal 17 Januari 2012 Pekerjaan GRC antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Gatrindo Jaya Abadi untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
266. 1 (satu) copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.256/SPP/016 Tanggal 2 Pebruari 2012 Pekerjaan Rangka Baja Gerbang antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Gatrindo Jaya Abadi untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
267. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: W 4240 kepada PT. Gatrindo Jaya Abadi sejumlah Rp. 99.012.509 Tanggal 26-Jul-12.
268. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 2624 kepada PT. Gatrindo Jaya Abadi sejumlah Rp. 50.000.000 Tanggal 25 April 2012.
269. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK: W 4540 kepada CV. Karya Jaya sejumlah 24.572.955 Tanggal 09-Agust-12.
270. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK 2842 kepada CV. Bimantara Utama sejumlah 9,151,509 Tanggal 21 Mei 2012.
271. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: W 3776 kepada PT. Arungatra Cakrawala sejumlah Rp. 44.670.000,00 Tanggal ... Mei 2012.
272. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W (tidak jelas) kepada CV. Dua Putra Mandiri sejumlah 25,000,000 Tanggal 24 September 2012.
273. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode No. Dok: B 124 kepada CV. Duta Putra Mandiri sejumlah 36.218.287 Tanggal 03-Des-12.
274. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode No. Dok: B 126 kepada CV. Duta Putra Mandiri sejumlah 107.805.793 Tanggal 03-Des-12.
275. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 2463 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 25 – 05 – 2012, BNI 1116,

Hal 151 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Suplier JT PT Mandiri Unggul Pro Gd IPDN Sumbar DGD,
Jumlah: Rp. 404,308,197.

276. 1 (satu) bundel asli dokumen Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor : HK-DG/St.1893/SPP/203 Tanggal 11 Oktober 2011 Pekerjaan Elektrikal Antara PT. Utama Karya Divisi Gedung dengan PT. Indah Yamamitra Persada Untuk Proyek IPDN Bukittinggi
277. 1 (satu) bundel copy Addendum – I Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor : HK-DG/St.2091/SPP-ADD-I/225 Tanggal : 14 Desember 2011 Pekerjaan Elektronik antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Indah Yamamitra Persada Untuk Proyek IPDN Bukit Tinggi.
278. 1 (satu) copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/St.2091/SPP/225 Tanggal 10 November 2011 Pekerjaan Elektronik antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Indah Yamamitra Persada untuk Proyek IPDN Bukit Tinggi.
279. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.2048/SPP/236 Tanggal 16 Oktober 2011, Pekerjaan Rangka Atap Baja antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Sinarindo Megah Perkasa untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011.
280. 1 (satu) bundel copy Addendum – I Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor : HK-DG/St.1893/SPP-ADD-I/203 Tanggal : 14 Desember 2011 Pekerjaan Elektrikal antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Indah Yamamitra Persada untuk Proyek IPDN Bukit Tinggi.
281. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 4287 kepada PT. Indah Yamamitra Persada sejumlah Rp. 866.700.000 Tanggal 08 November 2011.
282. 1 (satu) bundel copy Check List Pembayaran Suplier/Sub.Kont/Sewa Alat (*), Nama Karya: IPDN – Buting, Nama Rekanan: PT. Iyada, Jenis Pekerjaan: Elektrikal.
283. 1 (satu) bundel copy Routing Pencairan KMK Bank BTN Cabang Cawang, Patriapark kepada PT. Indah Yamamitra Persada sebesar 968,417,501.
284. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 1738 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00–Kantor Pusat, Tanggal: 18–04–2012, Keterangan

Hal 152 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN 1116, PT. Yamamitra Persada, Pro Gedung IPDN Sumbar Kab Agam, DGD, Jumlah: Rp. 300,620,444.

285. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 3737 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00–Kantor Pusat, Tanggal: 04–07–2012, BTN 1116, PT. Indah Yamamitra Persada, JT.KS.Pro Gedung Kampus IPDN Bukit Tinggi, Jumlah: Rp. 1,587,992,193.
286. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Serah terima – I Proyek Pembangunan IPDN Sumatera Barat, Pekerjaan: Elektrikal Sub-Kontraktor: PT. Indah Yamamitra Persada Tanggal 30 Desember 2011 beserta lampiran (Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/St.1893/SPP/203 Tanggal 11 Oktober 2011, Addendum – I Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/St.1893/SPP-ADD-I/203 Tanggal 14 Desember 2011 dan Addendum – II Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/St.1893/SPP-ADD-II/203 Tanggal 16 Desember 2011).
287. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Serah terima – I Proyek Pembangunan IPDN Sumatera Barat, Pekerjaan: Elektronik Sub-Kontraktor: PT. Indah Yamamitra Persada Tanggal 30 Desember 2011 beserta lampiran (Surat No.: 063/SP2K/JKC.I/III/2012 Tanggal 26 Maret 2012 Perihal: Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K), Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/St.2091/SPP/225 Tanggal 10 November 2011, Addendum – I Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/St.2091/SPP-ADD-I/225 Tanggal 14 Desember 2011).
288. 3 (tiga) lembar copy Surat No.: 056/SP2K/JKC.I/XII/2011 Tanggal 27 Desember 2011 Perihal: Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K).
289. 1 (satu) lembar copy Surat No.: 840/JKC.I/HCLU/IV/2012 Tanggal 11 April 2012 Perihal: Rincian Transaksi Pencairan KMK an. PT. Indah Yamamitra Persada.
290. 1 (satu) lembar copy Surat No.: 1179/JKC.I/HCLU/V/2012 Tanggal 14 Mei 2012 Perihal: Rincian Transaksi Pencairan KMK an. PT. Indah Yamamitra Persada.
291. 2 (dua) lembar copy Surat No.: 261/JKC.I/HCLU/II/2012 Tanggal 03 Februari 2012 Perihal: Rincian Transaksi Pencairan KMK an. PT. Indah Yamamitra Persada.

Hal 153 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



292. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Giro Bank BTN A/C. No: 00241-01-30-000187-7 a.n. PT. Indah Yamamitra Persada dengan rincian sebagai berikut:

- Periode: 01 Jan 12 – 31 Jan 12.
- Periode: 01 Feb 12 – 29 Feb 12.
- Periode: 01 Mar 12 – 31 Mar 12.
- Periode: 01 Apr 12 – 30 Apr 12.
- Periode: 01 May 12 – 31 May 12.
- Periode: 01 Jul 12 – 31 Jul 12.
- Periode: 01 Aug 12 – 31 Aug 12.
- Periode: 01 Sep 12 – 30 Sep 12.
- Periode: 1/10/12 – 1/10/12.
- Periode: 01 Nov 12 – 30 Nov 12.
- Periode: 01 Des 12 – 31 Des 12.

293. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Mandiri Syariah A/C. No: 7045020155 a.n. Indo Dayasurya Persada PT, Periode: 01 November s/d 30 November 2012 dan Periode: 01 Desember 2012.

294. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Giro Bank BTN A/C. No: 00241-01-30-000187-7 a.n. PT. Indah Yamamitra Persada dengan rincian sebagai berikut:

- Periode: 01 Jan 11 – 31 Jan 11.
- Periode: 01 Feb 11 – 28 Feb 11.
- Periode: 01 Mar 11 – 31 Mar 11.
- Periode: 01 Apr 11 – 30 Apr 11.
- Periode: 01 May 11 – 31 May 11.
- Periode: 01 Jun 11 – 31 Jun 11.
- Periode: 01 Jul 11 – 31 Jul 11.
- Periode: (tidak jelas).
- Periode: 01 Sep 11 – 30 Sep 11.
- Periode: 01 Okt 11 – 31 Okt 11.
- Periode: 01 Nov 11 – 30 Nov 11.
- Periode: 01 Des 11 – 31 Des 11.

295. 1 (satu) bundel copy Rekening Giro Bank BNI A/C. No: 0014143262 a.n. Indah Yamamitra Pers** dengan rincian sebagai berikut:

- Periode: 01/01/2011 s/d 31/01/2011.
- Periode: 01/02/2011 s/d 28/02/2011.
- Periode: 01/03/2011 s/d 31/03/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode: 01/04/2011 s/d 30/04/2011.
- Periode: 01/05/2011 s/d 31/05/2011.
- Periode: 01/06/2011 s/d 30/06/2011.
- Periode: 01/07/2011 s/d 31/07/2011.
- Periode: 01/08/2011 s/d 31/08/2011.
- Periode: 01/09/2011 s/d 30/09/2011.
- Periode: 01/10/2011 s/d 31/10/2011.
- Periode: 01/11/2011 s/d 30/11/2011.
- Periode: 01/12/2011 s/d 31/12/2011.

296. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 013-IYD/HK/03/12 tanggal 13 Maret 2012 Sebesar Rp. 723.265.884,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-3 Progress ke-2 sebesar 75,8461% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektronik Sesuai Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.2091/SPP/225 Tanggal 10 November 2011 dari nilai kontrak Rp. 2.805.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak) dan 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 003-IYD/HK/01/12 tanggal 11 Januari 2012 Sebesar Rp. 978.720.600,00.

297. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 052-IYD/HK/XI/11 tanggal 11 November 2011 Sebesar Rp. 420.750.000,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-1 Uang Muka sebesar 15% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektronik Sesuai Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.2091/SPP/225 Tanggal 10 November 2011 dari nilai kontrak Rp. 2.805.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).

298. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 017-IYD/HK/04/12 tanggal 11 April 2012 Sebesar Rp. 225.003.636,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-4 sebesar 85,8730% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektronik Sesuai Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.2091/SPP/225 Tanggal 10 November 2011 dari nilai kontrak Rp. 2.805.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).

299. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 059-IYD/HK/09/12 tanggal 24 September 2012 Sebesar Rp. 317.009.880,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-5 sebesar 100% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektronik Sesuai Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.2091/SPP/225 Tanggal 10 November 2011 dari nilai kontrak Rp. 2.805.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).

Hal 155 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



300. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 048-IYD/HK/XI/11 tanggal 03 November 2011 Sebesar Rp. 891.000.000,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-1 uang Muka sebesar 10% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektrikal Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: HKDG/St.1814/SPK/64 Tanggal 11 Oktober 2011 dan Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.1893/SPP/203 Tanggal 11 Oktober 2011 dari nilai kontrak Rp. 8.910.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).
301. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 058-IYD/HK/XII/11 tanggal 02 Desember 2011 Sebesar Rp. 816.809.549,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-2 progress ke-1 sebesar 10,7851% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektrikal Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: HKDG/St.1814/SPK/64 Tanggal 11 Oktober 2011 dan Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.1893/SPP/203 Tanggal 11 Oktober 2011 dari nilai kontrak Rp. 8.910.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).
302. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 002-IYD/HK/01/12 tanggal 11 Januari 2012 Sebesar Rp. 3.306.824.879,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-3 progress ke-2 sebesar 54,4482% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektrikal Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: HKDG/St.1814/SPK/64 Tanggal 11 Oktober 2011 dan Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.1893/SPP/203 Tanggal 11 Oktober 2011 dari nilai kontrak Rp. 8.910.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).
303. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 012-IYD/HK/03/12 tanggal 13 Maret 2012 Sebesar Rp. 1.007.550.007,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-4 progress ke-3 sebesar 68,6761% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektrikal Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: HKDG/St.1814/SPK/64 Tanggal 11 Oktober 2011 dan Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.1893/SPP/203 Tanggal 11 Oktober 2011 dari nilai kontrak Rp 8.910.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).
304. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 016-IYD/HK/04/12 tanggal 11 April 2012 Sebesar Rp. 770.565.758,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-5 progress ke-4 sebesar 78,8506% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektrikal Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: HKDG/St.1814/SPK/64 Tanggal 11 Oktober 2011 dan Kontrak

Hal 156 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.1893/SPP/203 Tanggal 11 Oktober 2011 dari nilai kontrak Rp. 8.910.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).

305. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 058-IYD/HK/09/12 tanggal 24 September 2012 Sebesar Rp. 870.250.045,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-6 progress ke-5 sebesar 100% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektrikal Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: HKDG/St.1814/SPK/64 Tanggal 11 Oktober 2011 dan Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.1893/SPP/203 Tanggal 11 Oktober 2011 beserta Addendumnya dari nilai kontrak Rp. 8.140.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).
306. 1 (satu) bundel copy Akta: Perseroan terbatas PT. Indah Yamamitra Persada, Tanggal: 24 – 6 – 2002,- Nomor: 96.-.
307. 1 (satu) lembar copy Struktur PT. Indo Dayasurya Persada.
308. 1 (satu) lembar copy Perbandingan Hutang PT. Indo Daya Surya Per 26 Mei 2015.
309. 1 (satu) lembar copy Final Account, Nama Sub: PT. Indah Yamamitra Persada, Pekerjaan: Eletronik.
310. 1 (satu) lembar copy Final Account, Nama Sub: PT. Indah Yamamitra Persada, Pekerjaan: Elektrikal.
311. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor:HK.DG/Ln.1288/DIV.A/071/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Perihal Tanggapan Surat beserta lampiran.
312. 1 (satu) bundel copy Outstanding (tulisan tangan) Resume Tagihan PT. Indo Dayasurya Persada Terhadap PT. Hutama Karya Proyek Pembangunan Gedung Kampus Sumatera Barat Pekerjaan Elektrikal & Elektronik.
313. 1 (satu) bundel copy Akta: Perseroan terbatas PT. Indah Yamamitra Persada, Tanggal: 24 – 6 – 2002,- Nomor: 96.-. (lengkap).
314. 1 (satu) bundel asli dokumen Adendum-II Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor : HK-DG/St.1893/SPP-ADD-II/203 Tanggal 16 Desember 2011 Pekerjaan Elektrikal Antara PT. Hutama Karya Divisi Gedung dengan PT. Indah Yamamitra Persada Untuk Proyek IPDN Bukittinggi
315. 1 (satu) bundel print out FINAL ACCOUNT Nama Sub : PT. INDAH YAMAMITRA PERSADA pekerjaan elektrikal yang dibuat oleh bagian

Hal 157 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan PT. IYADA an. Hendry Filyandi dan Keuangan PT. HUTAMA KARYA an. Andri Setyawan.

316. 1 (satu) bundel copy dokumen SPMK Nomor HKDG/ St.1814/SPK/64 tanggal 11 Oktober 2011 antara PT. Utama Karya Ir. Budi Rachmat K. GM Divisi Gedung dengan Ir. Sugeng Hindaryo Dirut PT. Yamamitra Persada
317. 1 (satu) bundel asli dokumen penentuan rekanan pekerjaan elektronik IPDN Bukittinggi atas nama PT. Indah Yamamitra Persada Tanggal 10 November 2011
318. 1 (satu) bundel copy dokumen gambar kontrak pekerjaan elektronik antara PT. Utama Karya dengan PT. Indah yamamitra persada untuk pembangunan Gedung Induk Kampus IPDN Baso Sumatera Barat
319. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.1857/SPP/200 Tanggal 19 Oktober 2011, Pekerjaan Jasa Pabrikasi, Transportasi & Install Baja antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Surya Baja Jaya untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
320. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 5124 kepada PT. Surya Baja Jaya sejumlah Rp. 749.187.289 Tanggal 19 Desember 2011.
321. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: W 4241 kepada PT. Surya Baja Jaya sejumlah Rp. 100.000.000 Tanggal 26-Jul-12.
322. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Pertanggung jawaban uang masuk dari PT. Utama Karya proyek pembangunan Kampus IPDN Sumatera Barat.
323. 1 (satu) bundel photo copy Rekening Tahapan BCA , cabang Pemohon : 6600-KCP BULEVARD TIMUR dengan Nomor Rekening : 06600284531-MATIAS SITORUS , Tanggal 20/10/2017, Periode 05/2011 – 12/2011 dan Periode 01/2011 – 12/2012.
324. 1 (satu) bundel photo copy Rekening BNI Taplus Periode tgl 01/05/2011 s/d 31/12/2012 dengan No. Rekening 0013499209, kepada Bpk Matias sitorus Jl. Perdana No. 4 Cakung Timur 13910.
325. 1 (satu) bundel photo copy Rekening Koran dengan Nomor Rekening 577010160811, Cabang 02577 Kantor Rawamangun Periode 1 Januari 2012 – 31 Januari 2012, OCBC NISP , kepada PT. Surya Baja

Hal 158 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya , Jl. Pegangsaan II No. 25 D 1 Pulo Gadung Pegangsaan Dua , Jakarta Utara.

326. 1 (satu) bundel photo copy Rekening Koran dengan Nomor Rekening 577010160811, Cabang 02577 Kantor Rawamangun Periode 1 Mei 2011 – 31 Mei 2011 OCBC NISP kepada PT. Surya Baja Jaya , Jl. Pegangsaan II No. 25 D 1 Pulo Gadung Pegangsaan Dua , Jakarta Utara.
327. 1 (satu) bundel photo copy Pembayaran dengan RTGS dengan Jumlah 2.586.217.971 yang di tanda tangani oleh sdr. Ir. BUDI RACHMAT K.MM pada tanggal 27 Oktober 2011.-
328. 1 (satu) bundel photo copy Faktur Pajak dengan Nomor Seri 010.000-11.00020516 dengan Pembeli PT. SURYA BAJA JAYA alamat Jl. Pegangsaan II No. 25 D Jakarta Timur dengan NPWP 02.506.604.4-013.000.berikut kwitansi pembelian material baja.
329. 1 (satu) bundel photo copy Surat Bukti Pengiriman Barang Nomor : SJ/HJ/EXP/073/SBJ/XI, dengan Pengirim PT. Surya Baja Jaya Jl. Pegangsaan II Kav. 25 D Pulo Gadung Jakarta Timur melalui ekspedisi PT. HINALANG JAYA.
330. 1 (satu) bundel photo copy Kwitansi pengiriman PT. Surya Baja Jaya melalui PT. Hinalang Jaya untuk jasa pengiriman barang.
331. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK – DG / A.1620 / SPP / 162 Tanggal: 28 September 2011, Pekerjaan Pintu, Jendela Alumunium antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Jagat Interindo untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
332. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 4839 kepada PT. Jagat Interindo sejumlah Rp. 588.500.000 Tanggal 22 November 2011.
333. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 3017 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 05 – 06 – 2012, BTN 1116, Pem. Kredit SupplierJT PT. Jagat Interindo, Pry. Kampus IPDN, Jumlah: Rp. 95,823,745.
334. 1 (satu) lembar copy Buku Besar Jagat Interindo periode Januari s/d April 2017 beserta lampirannya berupa copy rekening koran Jagat Interindo di Bank Ekonomi (No Rek. 0000068456) dan copy Buku Harian Bank BTN (No Rek 00241-01-30-000143-7..

Hal 159 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



335. 1 (satu) lembar copy Daftar Tagihan Proyek-Proyek Pekerjaan Alumunium & Interior File Kwitansi No 24 (2011) Status Tanggal : 25 Februari 2015 beserta lampirannya berupa copy Kwitansi.
336. 1 (satu) lembar copy Surat PT. Jagat Interindo No. 161R2/AL/QP-JI/X/11 tanggal 12 Agustus 2011 hal Penawaran Harga Pekerjaan Pertisi Aluminium & Kaca, Proyek Kampus IPDN Baso Sumbar.
337. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi, Jenis Pekerjaan Pindu, Jendela Alumunium, PT. Jagat Interindo, Proyek IPDN Bukittinggi, tanggal 13 September 2011.
338. 1 (satu) bundel Surat PT. Jagat Interindo Nomor: 00017/Fin/Hutama Karya/JI-V/14 tanggal 07 Mei 2014 perihal Penyelesaian Outstanding Payment, beserta lampiran berupa Perincian Aging Hutang PT. Utama Karya.
339. 1 (satu) lembar print out Jurnal Umum PT. Jagat Interindo JM-1612007, Jurnal Penyesuaian TA 2016 dengan total 9.906.342.245,00.
340. 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian pengikatan Jual Beli The "H" Tower yang terdiri dari:
- | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|------|------|-----|
| a. | Perjanjian | Pengikatan | Jual | Beli | No. |
| | 962/HKR.DU/Ryn./Perj.118/IX/2013. | | | | |
| b. | Perjanjian | Pengikatan | Jual | Beli | No. |
| | 963/HKR.DU/Ryn./Perj.119/IX/2013. | | | | |
| c. | Perjanjian | Pengikatan | Jual | Beli | No. |
| | 964/HKR.DU/Ryn./Perj.120/IX/2013. | | | | |
341. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.2175/SPP/255 Tanggal 17 Nopember 2011, Pekerjaan Pemasangan Baja Gedung Auditorium antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan CV. Sakha Sinergy untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
342. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: HK-DG/A.2084/SPP/239 Tanggal 17 Nopember 2011, Jual Beli Material Baja Gedung Auditorium antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan CV. Sakha Sinergy untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011.
343. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 5126 kepada CV. Skha Sinergy sejumlah Rp. 713.411.006 Tanggal 19 Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero)
Kode & No. Dok: BBK: W S729 kepada CV. Sakha Sinergi sejumlah
58.152.745 Tanggal 24-Sep-12.
345. 1 (satu) bundel dokumen Permintaan Pembayaran Pekerjaan Jual Beli
dan Pemasangan Material Baja Gedung Auditorium Kampus IPDN
Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat dengan nomor:
- a. 44/SS.IPDN/XI/2011 tanggal 20 Nopember 2011.
 - b. 45/SS.IPDN/XI/2011 tanggal 20 Nopember 2011.
 - c. 01/SS.IPDN/II/2012 tanggal 20 Januari 2012.
 - d. 02/SS.IPDN/II/2012 tanggal 20 Januari 2012.
 - e. 05/SS.IPDN/III/2012 tanggal 09 Maret 2012.
 - f. 06/SS.IPDN/III/2012 tanggal 09 Maret 2012.
 - g. 42/SS.IPDN/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012.
 - h. 43/SS.IPDN/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012.
346. 1 (satu) lembar print out dokumen berjudul "Daftar Pembayaran
Dalam Pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN,
Propinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Anggaran Tahun 2011".
347. 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor 108-00-0609390-1 a.n.
MULIADI periode 01 Januari 2011 s.d. 19 September 2017.
348. 1 (satu) bundel Akta Pemasukan Persero Serta Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan Komanditer " CV. Sakha Sinergy", tanggal 31
Oktober 2011, Nomor 61, Penghadap: Tn.P. PASU PATHI, S.Kom.Cs,
Notaris Gordon E. Harianja, S.H.
349. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero)
Kode & No. Dok: BBK W 5122 kepada PT. Dwijaya Selaras sejumlah
Rp. 447.480.000 Tanggal 19 Desember 2011.
350. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Invoice PT. DWIJAYA SELARAS
dengan nomor invoice INV1111.471 dengan nomor PO HK-
DG/St.2159/SPP/2 beserta faktur pajaknya.
351. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Invoice PT. DWIJAYA SELARAS
dengan nomor invoice INV1112.516 dengan nomor PO HK-
DG/St.2159/SPP/2 beserta faktur pajaknya.
352. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas nama PT.
DWIJAYA SELARAS dengan nomor rekening 117-00-0216486-1
periode bulan 1/12/11 sd. 31/12/11.
353. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Invoice PT. DWIJAYA SELARAS
dengan nomor invoice INV1205.226 dengan nomor PO HK-

Hal 161 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG/St.2159/SPP/2 beserta faktur pajaknya, dengan catatan dalam tulisan tangan yang terbaca "BELUM DIBAYAR".

354. 1 (satu) bundel asli dokumen Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor : HK-DG/St.1809/SPP/191 Tanggal 11 Oktober 2011 Pekerjaan Mekanikal Antara PT. Utama Karya Divisi Gedung dengan PT. Karya /duta Konsulindo Untuk Proyek IPDN Bukittinggi
355. 1 (satu) bundel asli dokumen Adendum-I Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor : HK-DG/St.1809/SPP-ADD-I/2191 Tanggal 12 Desember 2011 Pekerjaan Mekanikal Antara PT. Utama Karya Divisi Gedung dengan PT.Karya Duta Konsolindo Untuk Proyek IPDN Bukittinggi
356. 1 (satu) bundel dokumen SPMK Nomor HKDG/ St.1804/SPK/63 tanggal 11 Oktober 2011 antara PT. Utama Karya Ir. Budi Rachmat K. GM Divisi Gedung dengan Dirut PT. Duta Konsulindo Ridwan Rasyid
357. 1 (satu) bundel dokumen asli Bill of Quantity tanggal 27 Oktober 2011 Proyek kampus IPDN Sumatera Barat Paket Pekerjaan Mekanikal
358. 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Breakdown VO (Tambah Kurang) project IPDN Lokasi Baso Sumatera Barat Pekerjaan Mekanikal dibuat oleh PT. Karya Duta Konsulindo tanggal 11 oktober 2011 Project manager Yudi Arief
359. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Pembayaran Progress 65.4372% Pekerjaan Mekanikal Project IPDN Bukit Tinggi No. Invoice: 010/KDK-IPDN/III/12 Kepada PT. Karya Duta Konsulindo Sebesar Rp. 2,140,622,000.00.
360. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 3732 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 02 – 07 – 2012, BTN 1116, PT. Karya Duta Konsulindo,JT.KS, Pro.Kampus IPDN Sumbar Kab.Agam, Jumlah: Rp. 1,887,639,499.
361. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 4449 kepada PT. Karya Duta Konsulindo sejumlah Rp. 583.150.000 Tanggal 20....
362. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 1735 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 17 – 04 – 2012, Keterangan BTN 1116, PT. Karya Duta Konsulindo, Pro Kampus IPDN Sumbar Kab Agam, DGD, Jumlah: Rp. 18,535,636.

Hal 162 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363. 1 (Satu) bundel copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Karya Duta Konsulindo, Nomor 02 (dua), tanggal 31 Januari 2008, Notaris Dian Trianawaty, SH
364. 1 (satu) bundel copy salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Karya Duta Konsulindo, Nomor : 58, tanggal 28 Mei 2014, Notaris Surjadi, SH, MKn., MM
365. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.2033/SPP/234 Tanggal 10 Nopember 2011, Pekerjaan Kusen kayu dan Pintu Kayu antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Mondila Bersaudara untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
366. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 4842 kepada Modila Bersaudara sejumlah Rp. 170.665.000 Tanggal 07-Dec-11.
367. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 3029 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 01 – 06 – 2012, Keterangan BTN 1116, Pemby. Kredit Suplier JT PT. Modila Bersaudara, Pry. IPDN Sumbar Kab Agam, DGD, Jumlah: Rp. 460,276,463 dan Nota Nomor: DN 3030 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 01 – 06 – 2012, Keterangan BTN 1116, FP Pemby. Kredit Suplier JT PT. Modila Bersaudara, Pry. IPDN Sumbar Kab Agam, DGD, Jumlah: Rp. 47,451,182.
368. 1 (satu) bundel copy Kwitansi No.: KW-055/05/2012 Pembayaran Progress 95,00% Pengadaan dan Pemasangan Kusen dan Pintu Kayu pada Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat SPP no. HK.DG/A.2033/SPP/234 Tanggal 10 November 2011 Kepada PT. Modulla Bersaudara Sebesar Rp. 292.299.000.
369. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 3013 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 01 – 06 – 2012, Keterangan BTN 1116, Pembayaran Kredit Suplier JT PT. Modila Bersaudara, Pry. Kampus IPDN, Jumlah: Rp. 328,769,155 dan 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 3014 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 01 – 06 – 2012, Keterangan BTN 1116, FP Pembayaran Kredit Suplier JT PT. Modila Bersaudara, Pry. Kampus IPDN, Jumlah: Rp. 33,893,727.
370. 1 (satu) bundel risalah penawaran harga Periode 11 Oct 2011 hingga 11/11/2011 dari PT. Mondilla Bersaudara ke PT. Utama Karya yang di

Hal 163 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap perusahaan PT. Mondilla dan ditandatangani oleh Maridin Jamil beserta lampirannya berupa surat penawaran

371. 1 (satu) bundel SPK/SPP Periode 10 Nov 2011 hingga 01 Dec 2011 yang diterima PT. Mondilla Bersaudara dari PT. Utama Karya yang di cap perusahaan PT. Mondilla dan ditandatangani oleh Maridin Jamil beserta lampirannya.
372. 1 (satu) bundel copy catatan pembayaran PT. Utama Karya kepada PT. Mondilla Bersaudara yang di cap dan ditandatangani Maridin Jamil beserta lampirannya
373. 1 (satu) bundel copy kwitansi penagihan biaya retensi dari PT. Mondilla Bersaudara dengan nomor KW-26/04/2013 tanggal 08 April 2013 yang ditujukan kepada PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung beserta lampirannya.
374. 1 (satu) bundel copy dokumen surat dengan nomor 085/SRT/MDL/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 dari PT. Mondilla Bersaudara yang ditujukan kepada PT. Utama Karya (Persero) perihal Permohonan tagihan retensi 5% untuk Proyek IPDN Bukit Tinggi beserta lampirannya berupa kwitansi.
375. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri Cabang KC Jkt Pulogadung an. Mondilla dengan nomor rekening 1250007932593 Periode Desember 2011 hingga Desember 2012
376. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank BTN Cabang Jakarta Cawang an. PT Mondilla Bersaudara dengan no rekening 0024101300003138 Periode Januari 2012 hingga Desember 2012.
377. 1 (satu) bundel rekapitulasi pengiriman barang dari PT. Mondilla Bersaudara kepada PT. Utama Karya (Persero) berupa kusen dan pintu kayu dari Jakarta ke Bukit Tinggi periode 20 Desember 2011 hingga 09 April 2012 yang dicap dan ditandatangani oleh Maridin Jami
378. 1 (satu) Rekapitulasi Penjualan PT. Mondilla Bersaudara Kpd PT. Utama Karya (Proyek IPDN Bukit Tinggi) yang sudah dibayar dan yang belum dibayar oleh Utama Karya yang di cap dan ditandatangani oleh Maridin Jamil.
379. 1 (satu) bundel copy Dokumen Legalitas a.n. PT. Modilla Bersaudara yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar copy NPWP an. PT. Mondilla Bersaudara Nomor : 01.917.637.9-432.000

Hal 164 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



- b. 1 (satu) lembar copy TDP an. PT. Mondilla Bersaudara Nomor 102614605513 yang dikeluarkan tanggal 08 Oktober 2014
 - c. 1 (satu) lembar copy SKDU Nomor : 503/5/ -Ekbanf/Kel.Jts tanggal 18 Maret 2015
 - d. 1 (satu) lembar copy SIUP Nomor 510/161-BPPT/ PM/ II/ 2012 tanggal 2 Februari 2012
 - e. 1 (satu) lembar copy SPPKP Nomor : PEM-10164/WPJ.22/KP.1203/2008 tanggal 25 November 2008 an. PT Mondilla Bersaudara
 - f. 1 (satu) lembar copy SKT Nomor: PEM-10165/WPJ.22/KP.1203/2008 tanggal 25 November 2008 an. PT Mondilla Bersaudara.
 - g. 1 (satu) lembar copy SK Menkeh Nomor : c-15643 HT 01.01. TH 99 tanggal dikeluarkan 27 Agustus 1999
 - h. 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian PT Mondilla Bersaudara oleh Notaris & PPAT Evawani Alissa Chairil Anwar, SH. No : -2- tertanggal 11 Mei 1999
 - i. 1 (satu) bundle Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mondilla Bersaudara Nomor 15 tanggal 21 Maret 2009 oleh Notaris Halimah Sa'diyah, SH
 - j. 1 (satu) bundle Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mondilla Bersaudara Nomor 8 tanggal 25 Juni 2013 oleh Notaris Bedjo Sarwono, SH.Mkn
380. 1 (satu) lembar surat No. 321/PR/X/11 tanggal 03 Oktober 2011 yang ditujukan kepada PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung, u.p. Bp. Toga Tambunan, ditandatangani oleh Ir. James Karosekali, PT. Proteksindo Utama.
381. 1 (satu) lembar surat No. 166/PR/IV/12 tanggal 27 April 2012 yang ditujukan kepada PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung, u.p. Bp. Ir. Barry. ST, ditandatangani oleh Ir. Erwina Suray Setiawaty, PT. Proteksindo Utama.
382. 1 (satu) bundel copy surat No. 004/HK-IPDN-BS/Div.C/XII/11 tanggal 10 Desember 2011, hal Permohonan Addendum Perpanjangan Waktu dan Perubahan Nilai Kontrak Pekerjaan Pengecatan di Proyek Pembangunan Gedung IPDN Sum-Bar, ditujukan kepada PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung, u.p. Bpk. Ir. Tjahyo Purnomo,

Hal 165 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. Pedi Lestario, Kepala Proyek, beserta lampirannya.

383. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.2030/SPP/231 Tanggal 14 Nopember 2011, Pekerjaan Pengecatan antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Proteksindo Utama untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
384. 1 (satu) bundel copy Addendum-I, Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.2030/SPP-ADD I/231, tanggal 12 Desember 2011, Pekerjaan Pengecatan antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Proteksindo Utama untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
385. 1 (satu) lembar copy Surat No. 093/PR/III/13 tanggal 5 Maret 2013, perihal Piutang PT. Proteksindo Utama, ditujukan kepada PT. Utama Karya, up. Bp. Aditya, ditandatangani oleh Ir. Erwina Suray Setiawaty, PT. Proteksindo Utama.
386. 1 (satu) bundel copy Surat No. HK.DG/TRIS.485/DIV.A/47 tanggal 20 Maret 2013, hal Kesepakatan pembayaran, ditujukan kepada PT. Proteksindo, ditandatangani oleh Narwatri Kurniasih, SE., beserta copy surat kesepakatan pembayaran.
387. 1 (satu) bundel dokumen Penerimaan Proyek, Nama Proyek: HK-IPDN, Bukit Tinggi, Cost Code: 156.CC.18.11.11, Nilai Kontrak: 987.951.622, tanggal cetak 16/09/2017, beserta lampirannya.
388. 1 (satu) lembar print out dokumen berjudul "Data Tagihan PT. Utama Karya Proyek IPDN Sumbar", diparaf oleh ERWINA SURYA S. (Direktur PT. Proteksindo Utama).
389. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 0060004946863, atas nama PROTEKSINDO UTAMA, periode 1 Des 2011 s.d. 23 Juni 2014, terkait penerimaan dari PT. Utama Karya.
390. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 4840 kepada PT. Proteksindo Utama sejumlah Rp. 151.649.543 Tanggal 07-Dec-11.
391. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK – DG / A.1327 / SPP / 100 Tanggal: 26 Juli 2012, Pekerjaan Plafond Metal Linier 84-C antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Jof Metal Works untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.

Hal 166 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



392. 1 (satu) buah fotokopi Kwitansi PT. JOF METAL WORKS LTD No. 3016 tanggal (terbaca) 10-09-2012 yang ditandatangani oleh LEE BOK BIO dengan jumlah Rp. 60.164.200,- untuk pembayaran uang muka beserta Faktur Pajak Nomor seri 030.000-12.00000922 tanggal 10 September 2012 dan Surat Perjanjian Pemborongan Pemborongan Nomor: HK-DG/A.1327/SPP/100 tanggal 26 Juli 2012 untuk Pekerjaan Plafond Metal Linier 84-C antara PT. HUTAMA KARYA (Persero) Divisi Gedung dengan PT. JOF METAL WORKS untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
393. 1 (satu) buah fotokopi Kwitansi PT. JOF METAL WORKS LTD No. 3431 tanggal (terbaca) 28-11-2012 yang ditandatangani oleh LEE BOK BIO dengan jumlah Rp. 130.355.940,- untuk pembayaran prestasi 100% beserta Faktur Pajak Nomor seri 030.000-12.00001195 tanggal 29 November 2012 dan Berita Acara Pembayaran No. 001/BAP/HK-IPDN/JOF/IX/2012 dan Berita Acara Serah Terima Pertama, yang ditandatangani oleh RAYMOND, ST selaku Project Manager PT. HUTAMA KARYA (Persero) dan SUBARKAH selaku Project Manager PT. JOF METAL WORKS serta Berita Acara Prestasi No. 002-14HH/BA-NC/XI/12.
394. 1 (satu) buah fotokopi Kwitansi PT. JOF METAL WORKS LTD No. 4863 tanggal (terbaca) 30-10-2013 yang ditandatangani oleh LEE BOK BIO dengan jumlah Rp. 10.027.385,- untuk pembayaran retensi beserta Faktur Pajak Nomor seri 030.902-13.44220887 tanggal 30 Oktober 2013 dan Berita Acara Serah Terima Kedua, yang ditandatangani oleh RAYMOND DEBAL, ST selaku Project Manager Proyek Kampus IPDN Sumatera Barat PT. HUTAMA KARYA (Persero) Divisi Gedung dan SUBARKAH selaku Project Manager PT. JOF METAL WORKS.
395. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri an. PT. JOF METAL WORKS Ltd. Dengan nomor rekening 119-00-9109216-1 periode 1/10/12 sd. 31/10/12.
396. 1 (satu) lembar kertas berjudul 5.IPDN Sumbar yang mana merupakan rincian pembayaran pekerjaan dan sisa tagihan PT. HUTAMA KARYA (Persero) pada PT. JOF METAL WORKS yang berjumlah Rp. 152.316.000,00.
397. 1 (satu) bundel print out email dengan Judul : Re : Fw : Bls : Kebutuhan sanitair; Dari : rozi rinjayadi (rinjayadi@gmail.com); Kepada : indokeramika@yahoo.co.id; Tanggal Kamis, 3 November 2011 8 : 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

398. 4 (empat) lembar copy dokumen PESANAN PEMBELIAN BARANG No. HK.DG/Ba.2074/ORD/188 tanggal 08 November 2011 kepada PT Indokeramikatama Perkasa; No. HK.DG/Ba.2017/ORD/191 tanggal 14 November 2011; No. HK.DG/Ba.2112/ORD/201 tanggal 23 November 2011 dan No. HK.DG/Ba.0414/ORD/039 tanggal 05 Maret 2012
399. 1 (satu) bundel copy dokumen Kontrak Perjanjian Jual Beli Nomor : HK-DG/Ba.2272/SPP/267 Tanggal 08 November 2011 Pengadaan Sanitair Merek TOTO Antara PT Utama Karya (Persero) Divisi Gedung Dengan PT Indokeramikatama Perkasa Untuk Proyek IPDN Baso-Bukit Tinggi.
400. 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari Faktur No 1079/IP/XI/2011; Faktur No. 1098/IP/XI/2011; Faktur No. 1152/IP/XI/2011; Faktur No. 1225/IP/XII/2011; Faktur No. 214/IP/II/2012; Faktur No. 215/IP/II/2012 dan Faktur No. 318/IP/III/2012 beserta lampiran Surat Jalan, Memo Dinas Angkutan dan Tanda Terima Barang.
401. 4 (empat) lembar printout Daftar Kontrak Supplier Dominan.
402. 1 (satu) bundel copy catatan tangan bertuliskan "voucher Pembayaran Subkon P. Bukit Tinggi" disertai daftar subkon / supplier PT. Utama Karya
403. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "SPP IPDN SUMBAR yang terdiri dari : Jagat Interindo, Yulian Berkah, Prima Karya, dst. OPS/DDO/P/001 SATUAN KERJA SUMBER DAYA Tahun 2011 KODE SUMBAR-01"
404. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "SPP IPDN SUMBAR yang terdiri dari : Jatrindo, Jof Metal, Dst. OPS/DDO/P/001 SATUAN KERJA SUMBER DAYA Tahun 2011 KODE SUMBAR-01"
405. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "BUKTI KERJA DATA TENDER IPDN BUKTITINGGI OPS/DDO/P/001 SATUAN KERJA TEKNIK 2011-2012 KODE BKT-1"
406. 1 (satu) bundel copy dokumen Pesanan Pembelian Barang No. HK.DG/hd.2050/ORD/186 tanggal 07 November 2011 beserta Faktur Pajak, Surat Pengantar dan draf Surat Direktur PT Dinamika pancar Kencana kepada PT Utama Karya (Persero) tanggal 23 Desember 2011;

Hal 168 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



407. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) Masa Pajak Desember Tahun Pajak 2011, NPWP 01 554 714 4 211 000, Nama WP : PT Dinamika Panca Kencana tanggal 17 Januari 2012;
408. 1 (satu) lembar copy dokumen Rekening Giro Bank Mandiri Nomor : 108-00-339988-9 atas nama PT Dinamika Panca Kencana tanggal 01/04/12 hingga tanggal 30/04/12
409. 1 (satu) lembar copy dokumen Rekening Giro Bank Mandiri Nomor : 108-00-339988-9 atas nama PT Dinamika Panca Kencana tanggal 01/12/11 hingga tanggal 30/12/11 beserta Surat PT Bank Mandiri kepada PT Dinamika Pancakencana Nomor : EX11772120614768 tanggal 28 Desember 2011 Perihal : Advis Kredit
410. 1 (satu) bundel copy dokumen Pesanan Pembelian Barang No. 132 /IPDN/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 beserta Faktur Pajak, Surat Pengantar dan draf Surat Direktur PT Dinamika Panca Kencana kepada PT Utama Karya (Persero) tanggal 23 Desember 2011;
411. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) Masa Pajak November Tahun Pajak 2011, NPWP 01 554 714 4 211 000, Nama WP : PT Dinamika Panca Kencana tanggal 20 Desember 2011;
412. 1 (satu) lembar dokumen berjudul "Dafar Surat Perjanjian dan Uang Masuk ke Rekening a.n. EKA SAPUTRA, S.Sos".
413. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Sewa Alat, Jenis Alat Exavator, Comatsu antara Ir. R. PEDI LESTARIO (Kapro Proyek) dan EKA SAPUTRA (Pemilik Alat).
414. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Sewa Alat, Jenis Kendaraan Truck (Dump Truck), Mitshubishi antara Ir. R. PEDI LESTARIO (Kapro Proyek) dan EKA SAPUTRA (Pemilik Kendaraan).
415. 1 (satu) asli buku tabungan rupiah mandiri a.n. EKA SAPUTRA, S. Sos, No. Rek: 111-00-0621480-9, KC Bukittinggi, tanggal cetak 19/10/2011.
416. 1 (satu) bundel fc dokumen kontrak/SPK subkontraktor untuk pekerjaan : Upah pemasangan atap, subkon baja ringan dan subkon pekerjaan koral sikat
417. 1 (satu) bundel fc dokumen pembelian bahan berupa batu bata, terpal dan plastik cor kepada UD Arnelin
418. 1 (satu) bundel fc dokumen realisasi penerimaan dari PT. Utama Karya/pembayaran bahan dan upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

419. 1 (satu) bundel fc dokumen rekening koran di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1110006176149 atas nama SUDISWAR
420. 1 (satu) lembar rekapitulasi material kayu CV. Jasa Keluarga untuk PT. Utama Karya tanggal 16 Januari 2012 s.d. 19 Januari 2012 senilai total Rp. 96.369.000,- yang harus dibayarkan ke rekening milik Sdri. Iyvone Anesia Bank Mandiri no rek 111.00.0402648.6
421. 1 (satu) lembar asli Rangkuman Piutang Pelanggan CV Trijaya Greshindo s.d. Tanggal 21/03/2016 dengan Grand Total Saldo Rp. 41.813.897,22 ter cap CV. Tri Jaya Greshindo;
422. 1 (satu) bundel copy faktur pembayaran No. 058736 dengan jumlah Rp. 1.997124.000 dari CV Trijaya Greshindo untuk IPDN Baso tertanggal 24-10-2011 beserta lampirannya;
423. 1 (satu) bundel copy faktur pembayaran No. 005286 dengan jumlah Rp. 27.627.600 dari CV Trijaya Graeshindo untuk HK tertanggal 27-03-2012 beserta lampirannya
424. 1 (satu) bundel copy Dokumen Rincian Pembelian PT Utama Karya pada Toko Alam Indah Granit ditandatangani oleh CHE ICHSAN tanggal 21 Maret 2016.
425. 2 (dua) lembar copy Dokumen Rekening Tabungan Bank Mandiri Cbg Imam Bonjol Padang, Nomor 1110005868894 atas nama CHE ICHSAN, tanggal 29/02/12 s.d 26/03/12 dan tanggal 28/03/12 s.d 07/04/12
426. 1 (satu) bundel dokumen tindasan berwarna kuning yang terdiri dari Nota ALAM INDAH GRANITE No. 35195; 35196; 35301; dan 35374
427. 1 (satu) lembar print out dokumen Rekap Penjualan PT Citra Bhakti Semestajaya ke PT Utama Karya u/Proyek IPDN, total Rp. 2.034.630.400,-
428. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PT Citra Bhakti Semestajaya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 001/CBS-BANK/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 Hal : Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang dan Surat Pengantar;
429. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PT Citra Bhakti Semestajaya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 001/CBS-

Hal 170 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK/I/2012 tanggal Januari 2012 Hal : Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;

430. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PT Citra Bhakti Semestajaya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 003/CBS-BANK-H/I/2012 tanggal Januari 2012 Hal : Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;

431. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PT Citra Bhakti Semestajaya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 004/CBS/DIS-HK/III/2012 tanggal Maret 2012 Hal : Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;

432. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PT Citra Bhakti Semestajaya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 005/CBS/DIS-HK/III/2012 tanggal Maret 2012 Hal : Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;

433. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PT Citra Bhakti Semestajaya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 006/CBS/DIS-HK/IV/2012 tanggal 17 April 2012 Hal : Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;

434. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PT Citra Bhakti Semestajaya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 007/CBS/DIS-HK/IV/2012 tanggal 11 April 2012 Hal : Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan

Hal 171 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;

435. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PT Citra Bhakti Semestajaya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 008/CBS/DIS-HK/V/2012 tanggal Mei 2012 Hal : Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;

436. 1 (satu) buah buku tulis Merck Paperline berwarna hijau dengan tulisan tangan "Hutama Karya Baso";

437. 1 (satu) lembar print out dokumen Rekening BNI Taplus Nomor : 0213964963 atas nama WELMAN FERI, SH periode 01/01/2012 s/d 30/01/2012

438. 1 (satu) bundel dokumen asli Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 23 September 2011 dan copy dokumen Pesanan Pembelian Barang tanggal 14 September 2011, 16 September 2011 dan 19 September 2011;

439. 1 (satu) bundel dokumen asli Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 29 September 2011 dan copy dokumen Pesanan Pembelian Barang tanggal 23 September 2011;

440. 1 (satu) bundel dokumen asli yang terdiri dari :

- a. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 10 Oktober 2011;
- b. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 17 Oktober 2011;
- c. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 26 Oktober 2011;
- d. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 01 November 2011;
- e. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 14 November 2011;
- f. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 29 November 2011;
- g. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 27 Desember 2011;
- h. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 12 Desember 2011;
- i. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 17 Oktober 2011;
- j. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 27 Januari 2012.

441. 1 (satu) bundel copy dokumen terdiri dari Pesanan Pembelian Barang tanggal 24 Nopember 2010, Kartu Piutang, Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan, Kwitansi, Faktur/Kontan, draf Tanda Terima Tagihan, dan Bukti Pengiriman Barang;

Hal 172 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

442. 1 (satu) bundel copy dokumen Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Faktur Pajak : 010.000-12.000000009; 010.000-12.000000010; 010.000-12.000000015; draf Tanda Terima dan NPWP PT Utama Karya;
443. 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari :
- a. Surat CV Karya Jaya No. : 052/KJ/V/2012 tanggal 28 April 2012 Hal : Konfirmasi Tagihan;
 - b. Surat CV Karya Jaya No. : 061/KJ/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 Hal : Tagihan;
 - c. Surat CV Karya Jaya No. : 082/KJ/IX/2012 tanggal 7 September 2012 Hal : Konfirmasi Tagihan;
 - d. Surat CV Karya Jaya No. : 087/KJ/IX/2012 tanggal 13 September 2012 Hal : Konfirmasi Tagihan;
444. 1 (satu) bundel copy dokumen Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening : 111.000.559.3427 atas nama : CV. KARYA JAYA tanggal 02/06/12 s.d 06/06/12; tanggal 06/08/12 s.d 13/08/12; tanggal 16-Oct-2012 s.d 23-Oct-2012; dan copy rekening giro Wadiah Institusi Bank Mandiri Syariah Nomor : 7899989998 tanggal 04 Dec 12 s.d 31 Dec 12;
445. 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari fc KTP, fc NPWP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan; Surat Izin Usaha Perdagangan dan Salinan Akta Perseroan Komanditer "CV KARYA JAYA" No. 46 tanggal 15 Januari 2004.
446. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening Bank Mandiri Cabang Padang Nomor rekening : 1110006231019 nama : KREDO KERAMINDO SEJA Periode : 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.
447. 1 (satu) bundel dokumen Copy Faktur PT Kredo Keramindo Sejahtera Faktur No : JL1201/ beserta copy dokumen Faktur Pajak Nomor Seri : 010.000-12.000000004 atas nama PT Kredo Keramindo Sejahtera tanggal 6 Januari 2012.
448. 1 (satu) bundel dokumen dokumen ASLI Faktur PT Kredo Keramindo Sejahtera Faktur No : JL02804 beserta fax dokumen Pesanan Pembelian Barang PT Utama Karya No. HK.DG/Ba.1889/ORD/170 tanggal 27 Oktober 2011.
449. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

Hal 173 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Nomor EX11771060614865 tanggal 13/01/2012 kepada Yth. Kredo Keramindo Sejahtera perihal Advise Kredit ditandatangani Surya Musfarita;
 - b. 1 (satu) lembar fax Surat Pengalihan Hak PT Kredo Keramindo Sejahtera tanggal 13 Januari 2012 ditandatangani oleh Wicky Leonardi;
 - c. 1 (satu) lembar fax Surat kepada Yth Kredo Keramindo Sejahtera Perihal : Advice of Refusal;
 - d. 1 (satu) lembar ASLI Surat Nomor EX11771060614865 tanggal 20/12/2011 kepada Yth. Kredo Keramindo Sejahtera perihal Advise Debit ditandatangani Surya Musfarita;
 - e. 1 (satu) lembar ASLI Aplikasi Wesel Dokumenter Bank Mandiri tanggal 16 Desember 2011 tanggal 24 November 2011 sebesar Rp 1.423.748.000,-
 - f. 1 (satu) lembar Wesel lembar kedua sejumlah satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh rupiah tanggal 24 November 2011.
450. 1 (satu) bundel surat PT Kredo Keramindo Sejahtera Nomor : 1010/KKS/1.1/12.11 Hal : Advising SKBDN ke PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Pusat – Jakarta tanggal 15 Desember 2011, beserta lampirannya.
451. 1 (satu) bundel Surat Jalan dan Tanda Terima Proyek IPDN Baso.
452. 1 (satu) bundel Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-11.00000061 atas nama PT Kredo Keramindo Sejahtera NPWP : 03.142.231.4-216.001 tanggal 12 Desember 2011 beserta lampirannya.
453. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening : 1110002265383 Nama : Kredo Bajataman Persa Periode : 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.
454. 1 (satu) bundel copy dokumen PT Kredo Bajatama Persada Daftar Piutang PT Hutama Karya – Proyek IPDN Bukittinggi.
455. 1 (satu) bundel dokumen copy Rekening Koran Giro Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat No Rekening : 2103 . 0103.00049-8 atas nama EGYA PRATAMA CV Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 dan periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.
456. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001.SPK/140/CBKT/2012 Tanggal 06 Februari 2012 antara PT PLN

Hal 174 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Wilayah Sumbar Cabang Bukittinggi dengan CV EGYA PRATAA Tentang Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan : PAL IPDN Kampus Sumbar dan Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi Lokasi : Baso PT PLN (Persero) Ranting Baso; Nilai Kontrak : Rp. 45.663.000,-.

457. 1 (satu) bundel copy dokumen bertandatangan M. IRFAN Buku Rekening Tabungan Bank Mandiri Cab. Bukittinggi Nomor 111.000.5873-7 atas nama MUHAMMAD IRFAN tanggal 15 September 2011 s/d 31 Juli 2013.

458. 2 (dua) lembar dokumen tulisan tangan Catatan Faktur Tagihan Toko Muaro Bangunan - Proyek IPDN Bukittinggi

459. 1 (satu) bundel dokumen print out Rekening Bank Mandiri Cabang Bukittinggi Nomor Rekening : 1110005515222, Nama : CHAIRUNNAS Periode 1 September 2011 sampai dengan 04 April 2013.

460. 1 (satu) lembar Tulisan Tangan Sdr. MUSLIM yang berisi catatan pekerjaan pemasangan tiang pancang proyek IPDN di Kabupaten Agam sebagaimana tercantum dalam Buku Agenda milik Sdr. MUSLIM dengan tulisan The Infinity Design SM 0433.

461. 1 (satu) bundel dokumen copy Rekening Koran Giro Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi Nomor Rekening : 0200 .0103.00158-8 atas nama TAJAK ENGINEERING CV Periode : 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;

462. 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari :

- a. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 01/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, Harga Kontrak Rp. 77,000,000.00;
- b. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 02/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011, Harga kontrak 106,370,000.00;
- c. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 03/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011, Harga Kontrak Rp 91,630,000.00;
- d. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 04/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, Harga Kontrak Rp. 77,000,000.00;

Hal 175 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 05/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011, Harga Kontrak Rp. 106,370,000.00;
- f. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 06/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011, Harga Kontrak Rp. 91,630,000.00;
- 463. 1 (satu) lembar dokumen copy Surat Direktur CV Tajak Engineering kepada PT Utama Karya Proyek IPDN Bukittinggi Sumatera Barat Nomor : 037/TE/V-2012 tanggal 30 Mei 2012, Perihal : Rincian Pembayaran Deep Well;
- 464. 1 (satu) lembar dokumen copy Surat Wakil Kepala Proyek Kampus IPDN Baso Bukittinggi kepada General Manager PT Utama Karya (Persero) Divisi Gedung Nomor : 084/HK-IPDN/DIV.G.BT/UM/VII/12 tanggal 16 Juli 2012, Perihal : Permohonan Pembayaran Hutang Tajak Engineering & Mina Karya;
- 465. 2 (dua) lembar dokumen print out terdiri dari Berita Acara Pekerjaan tanggal 15 Maret 2012 sesuai kontrak No : 01/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dan Berita Acara Pekerjaan tanggal 15 Maret 2012 sesuai kontrak No : 02/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011.
- 466. 1 (satu) bundel dokumen asli yang terdiri dari :
 - a. Kwitansi No. 306/KWT-RU/HK-IPDN/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 399,572,250 dan Tanda Terima tanggal 4 Januari 2012;
 - b. Kwitansi No. 311/KWT-RU/HK-IPDN/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 19,800,000 dan Tanda Terima tanggal 4 Januari 2012;
 - c. Kwitansi No. 312/KWT-RU/HK-IPDN/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 164,318,000 dan Tanda Terima tanggal 4 Januari 2012;
 - d. Kwitansi No. 318/KWT-RU/HK-IPDN/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 915,524,597 dan Tanda Terima tanggal 18 Januari 2012;

Hal 176 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Kwitansi No. 28/KWT-RU/HK-IPDN/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 10,980,420 dan Tanda Terima tanggal 25 Februari 2012;
- f. Kwitansi No. 41/KWT-RU/HK-IPDN/III/2012 tanggal 08 Maret 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 39,640,425 dan Tanda Terima tanggal 21 Maret 2012;
- g. Kwitansi No. 45/KWT-RU/HK-IPDN/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 27,488,175 dan Tanda Terima tanggal 31 Maret 2012;
- h. Kwitansi No. 47/KWT-RU/HK-IPDN/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 18,884,899 dan Tanda Terima tanggal 31 Maret 2012;
- i. Kwitansi No. 48/KWT-RU/HK-IPDN/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 4,675,000 dan Tanda Terima tanggal 31 Maret 2012;
- j. Kwitansi No. 55/KWT-RU/HK-IPDN/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 29,816,111 dan Tanda Terima tanggal 25 April 2012;
- k. Kwitansi No. 61/KWT-RU/HK-IPDN/IV/2012 tanggal 16 April 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 25,300,000 dan Tanda Terima tanggal 25 April 2012;
- l. Kwitansi No. 62/KWT-RU/HK-IPDN/IV/2012 tanggal 16 April 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 2,337,500 dan Tanda Terima tanggal 25 April 2012;
- m. Kwitansi No. 66/KWT-RU/HK-IPDN/IV/2012 tanggal 16 April 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 10,120,000 dan Tanda Terima tanggal 03 Mei 2012;

Hal 177 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Kwitansi No. 68/KWT-RU/HK-IPDN/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 10,672,200 dan Tanda Terima tanggal 23 Mei 2012;
 - o. Kwitansi No. 69/KWT-RU/HK-IPDN/IV/2012 tanggal 25 April 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 25,300,000 dan Tanda Terima tanggal 23 Mei 2012;
 - p. Kwitansi No. 73/KWT-RU/HK-IPDN/V/2012 tanggal 01 Mei 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 7,781,400 dan Tanda Terima tanggal 23 Mei 2012;
 - q. Kwitansi No. 80/KWT-RU/HK-IPDN/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 1,402,500 dan Tanda Terima tanggal 30 Mei 2012;
467. 1 (satu) bundel dokumen asli yang terdiri dari :
- a. Surat Pengantar tanggal 17 Nopember 2011 dan tanggal 20 Nopember 2011;
 - b. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 48/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 90 KV A/XI/2011 tanggal 21 November 2011 dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 21 November 2011;
 - c. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 99/HK.IPDN.BT/DIV.G/SKR-ALAT GENSET 90 KV A/XII/2011 tanggal 21 November 2011 tentang Addendum II Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : : 48/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 90 KV A/XI/2011 tentang Sewa Alat (Genset) Antara PT Hutama Karya pada Proyek IPDN-Baso Bukittinggi dengan Edy Yusuf dan dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 16 Desember 2011;
 - d. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : : 45/HK.IPDN.BT/DIV.G/SKR/XI/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Addendum I Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : : 47/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 140 KV A/XI/2011 dan Nomor : : 48/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 90 KV A/XI/2011 tentang Sewa Alat (Genset) Antara PT Hutama Karya pada Proyek IPDN-Baso Bukittinggi dengan Edy Yusuf;

Hal 178 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 170/HK/IPDN-SPK-ALAT GENSET 90 KV A/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 20 Januari 2012;
 - f. Surat Perjanjian Sewa Alat tanggal 20 Februari 2012 tentang Addendum I Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 170/HK/IPDN-SPK-ALAT GENSET 90 KV A/I/2012 tentang Sewa Alat (Genset) Antara PT. HUTAMA KARYA (Persero) pada Proyek Kampus IPDN Bukittinggi dengan Rita Jusuf dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 20 Februari 2011;
 - g. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 91/HK.IPDN.BT/DIV.G/SKR/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Addendum I Nomor : 47/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 140 KV A/XI/2011 dan Nomor : 48/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 90 KV A/XI/2011 tentang Sewa Alat (Genset) Antara PT Hutama Karya pada Proyek IPDN-Baso Bukittinggi dengan Edy Yusuf ;
 - h. Bukti Kirim/Tanda Terima tanggal 3 Februari 2012.
468. 1 (satu) bundel dokumen asli yang terdiri dari :
- a. Surat Pengantar tanggal 21 Nopember 2011;
 - b. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 47/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 140 KV A/XI/2011 tanggal 16 November 2011 dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 16 November 2011;
 - c. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 91/HK.IPDN.BT/DIV.G/SKR-ALAT GENSET 140 KV A/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Addendum II Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 47/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 140 KV A/XI/2011 tentang Sewa Alat (Genset) Antara PT Hutama Karya pada Proyek IPDN-Baso Bukittinggi dengan Edy Yusuf dan dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 16 Desember 2011;
 - d. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 172/HK/IPDN-SPK-ALAT GENSET 140 KV A/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 20 Januari 2012;
 - e. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 178/HK/IPDN-SPPK-ALAT GENSET 140 KV A/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 20 Maret 2012;
 - f. Kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 21 April 2012 sejumlah Rp. 4.250.000,-;
 - g. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 26 April 2012.

Hal 179 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



469. 1 (satu) bundel dokumen asli yang terdiri dari :

- a. Surat Pengantar tanggal 21 Nopember 2011;
- b. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 96/HK.IPDN.BT/DIV.G/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 26 Desember 2011;
- c. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 171/HK/IPDN-SPK-ALAT GENSET 100 KV A/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 26 Januari 2012;
- d. Surat Perjanjian Sewa Alat tanggal 27 Februari 2012 tentang Addendum I Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 171/HK/IPDN-SPK-ALAT GENSET 100 KV A/I/2012 tentang Sewa Alat (Genset) Antara PT Utama Karya pada Proyek Kampus IPDN Bukittinggi dengan Rita Yusuf dan dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 27 Februari 2012;
- e. Kwitansi telah terima dari Rita Jusuf tanggal 21 Maret 2012 sejumlah Rp. 5.000.000,-;
- f. Berita Acara Serah Terima Pengembalian Uang Sewa Alat Genset 100 KV A Merek Mercedes Benz tanggal 15 Maret 2012.

470. 1 (satu) lembar copy dokumen Rekening Bank BNI Cabang Bukittinggi Nomor 59225948 atas nama PT PLN Cab. Bukittinggi tanggal 23 Dec 2011 s/d 28 Dec 2011

471. 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari :

- a. Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT PLN (Perrsero) dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat tanggal 21 Desember 2011;
- b. Surat Kepala Bagian Tata Usaha Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat kepada Kepala PLN Cabang Bukittinggi Nomor : 015/610/IPDN-SB/2011 tanggal 25 Oktober 2011, Perihal : Permohonan Penyambungan Daya PLN;
- c. Surat Kepala Bagian Tata Usaha Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat kepada Kepala PLN Cabang Bukittinggi Nomor : 642/633/IPDN-SB/2011 tanggal 14 November 2011, Perihal : Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Tagihan Beban Bulanan Listrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Manager PT PLN (Persero) Ranting Baso kepada PT PLN (Persero) Cab Bukittinggi Nomor : 084/160/RBSO/2011 tanggal 16 November 2011, Perihal : Usulan Calon Pelanggan TM;
 - e. Surat Manager PT PLN (Persero) Cabang Bukittinggi kepada Direktur IPDN Kampus Sumbar Nomor : 548/161/CBKT/2011 tanggal 5 Desember 2011, Perihal : Persetujuan PAL;
 - f. Berita Acara Penyegehan KWH Meter No. 210/PB/10/2012.
472. 1 (satu) bundel dokumen copy yang terdiri dari :
- a. Berita Acara Pemasangan/Penyambungan/Pembongkaran*) Sambungan Tenaga Listrik/Penggantian*) Nomor : 04/APP/CBKT/02/2012 tanggal 27 Februari 2012;
 - b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai No. 023/BAST/613/CBKT/2012 tanggal 6 Maret 2012, Pekerjaan : PAL IPDN Kampus Sumbar dan Pusdiklat Kemendagri Reg. Bukittinggi;
 - c. Kwitansi Uang sebesar Rp.45,981,000 yang diterima oleh CV EGYA PRATAMA dari PT PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Bukittinggi.
473. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam Nomor 05 s.d. 23/IMB/KPMPT-2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Kampus IPDN Sumatera Barat atas nama Drs. BAHARUDDIN PPABBA, M.Si, tanggal 10 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Fatimah S.Sos, M.Si, Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam.
474. 2 (dua) lembar copy Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012 pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam, SKPD Dinas Pekerjaan Umum (IMB), bulan Februari 2012.
475. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri KCP Cabang Padang Muara dengan no rekening 1110100004940 a.n. PT. Statika Mitrasarana berikut lampirannya.
476. 1 (satu) bundel copy rekapitulasi transaksi antara PT. Statika Mitrasarana dan PT. Utama Karya untuk proyek pembangunan IPDN Baso Sumbar Thn. 2011 dan 2012
477. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 001/XI/2011 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 90.750.000,- untuk pembayaran

Hal 181 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

readymix K.300=100 M3 termasuk PPN 10% di cap dan ditandatangani pada tanggal 28 November 2011 berikut lampirannya

478. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 002/XI/2011 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 9.075.000,- untuk pembayaran readymix K.300=10 M3 di cap dan ditandatangani pada tanggal 28 November 2011 berikut lampirannya.

479. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 003/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 486.057.000 untuk pembayaran readymix K.300=535.6 M3 dicap dan ditandatangani pada tanggal 28 November 2011 berikut lampirannya

480. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 004/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 499.125.000 untuk pembayaran readymix K.300=550 M3 di cap dan ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2011 berikut lampirannya

481. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 006 CP A/I/2012 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 25.725.000,- dengan rincian:
a. Concrete Pump < 40 M3 = 4X Rp. 1.800.000;
b. Concrete Pump > 40M3 x Rp.35.000,- dan
c. Mobilisasi Pompa = 3x Rp. 750.000,-
dicap dan ditandatangani pada tanggal 5 Desember 2011 berikut lampirannya.

482. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 005/I/2012 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 453.750.000,- untuk pembayaran readymix K.300=500 M3 di cap dan ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2012 berikut lampirannya

483. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 006/I/2012 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 453.750.000,- untuk pembayaran readymix K.300=500 M3 di cap dan ditandatangani pada tanggal 13 Januari 2012 berikut lampirannya

484. 1 (satu) bundel copy Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan yang dikeluarkan oleh PT. Utama Karya (Persero) terima dari PT. Statika

Hal 182 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.S dengan uraian untuk pemb. C. Pump dan pemb. Beton ditandatangani oleh Manto dan tertanggal 25 Januari 2012 berikut lampirannya

485. 1 (satu) bundel copy Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan yang dikeluarkan oleh PT. Utama Karya (Persero) terima dari PT. Statika M.S dengan uraian untuk pemb readymix K 300, pemb Pemakaian C.P, Pemb. Readymix K.300, pemb. Pemakaian CP ditandatangani oleh Mando dan tertanggal 28 Februari 2012 dan bertuliskan *revisi* Faktur No : 010.000.12.00000013 tanggal 13/1-12 dan 010.000.12.00000018 tgl 20/1-12 berikut lampirannya

486. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 010/III/2012 yang dikeluarkan oleh diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 136.125.000 untuk pembayaran readymix K.300=150 M3 di cap dan ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2012 berikut lampirannya

487. 1 (satu) bundel copy Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan yang dikeluarkan oleh PT. Utama Karya (Persero) terima dari PT. Statika dengan uraian untuk pemb. Beton K.300 senilai Rp. 45.375.000 ditandatangani oleh Manto dan tertanggal 29 Maret 2012 berikut lampirannya

488. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 002 CP A/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PT.Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp.9.375.000,- dengan rincian :

- a. Concrete Pump Rp. 1.800.000,-
- b. Concrete Pump > 40 M3 =195 M3 x Rp. 35.000,- dan
- c. Mobilisasi Pompa Rp. 750.000

Di cap dan ditandatangani pada tanggal 05 Desember 2011 berikut lampirannya

489. 1 (Satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 004 CP A/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PT.Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 9.900.000,- dengan rincian :

- a. Concrete Pump Rp. 1.800.000,-
- b. Concrete Pump > 40 M3 =210 M3 x Rp. 35.000,- dan
- c. Mobilisasi Pompa Rp. 750.000

Di cap dan ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2011 berikut lampirannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

490. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 005 CP A/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PT.Statika Mitrasarana diterima dari PT. Hutama Karya (Persero) senilai Rp. 5.700.000,- dengan rincian :

- a. Concrete Pump <40 M3 Rp. 1.800.000,-
- b. Concrete Pump > 40 M3 = 90 M3 x Rp. 35.000,- dan
- c. Mobilisasi Pompa Rp. 750.000

Di cap dan ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2011 berikut lampirannya

491. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 006 CP A/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PT.Statika Mitrasarana diterima dari PT. Hutama Karya (Persero) senilai Rp. 9.075.000,- dengan rincian :

- a. Concrete Pump < 40 M3 = 2 X Rp. 1.800.000,-
- b. Concrete Pump > 40 M3 = 135 M3 x Rp. 35.000,- dan
- c. Mobilisasi Pompa Rp. 750.000

Di cap dan ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2011 berikut lampirannya

492. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "BUTING => BUKTI2 UMUM (4)" berisikan dokumen pembayaran subkon/supplier PT. Hutama Karya

493. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "BUTING (2)" berisikan dokumen pembayaran subkon/supplier PT. Hutama Karya

494. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "BANK W DES-2011" berisikan dokumen pembayaran subkon/supplier PT. Hutama Karya

495. 1 (satu) odner warna hitam bertuliskan "IPDN" yang berisikan dokumen Risalah Rapat , Gambar Metode Kerjaan Perkerasan Jalan, Review Laporan Konsultan Manajemen Konstruksi, Kontrak Perjanjian Jual Beli dan dokumen pendukung lainnya.

496. 1 (satu) odner berwarna biru bertuliskan "IPDN-BUKITTINGGI" yang berisikan Notulen Meeting dan lampirannya

497. 1 (satu) odner berwarna biru bertuliskan "Surat Masuk"

498. 1 (satu) bundel dokumen copy Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 158/Und/KK/KDN/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 perihal : Undangan Rapat penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Pembangunan Gedung IPDN di Propinsi Sumatera Barat, beserta Berita Acara dan Risalah Penjelasan Pekerjaan.

499. 4 (empat) halaman dokumen print out Risalah Rapat Minutes of Meeting Arkitek Team Empat.

Hal 184 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500. 1 (satu) buah buku tulis Big Boss warna merah muda bermotif garis dengan tulisan "[build on:your hope]".
501. 1 (satu) bundel dokumen Rekaman Data Biaya Penawaran Pengadaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011.
502. 1 (satu) lembar copy Rincian Penerimaan Proyek PT. Arkitek Team Empat tahun 2011 tertanggal 31/12/2011.
503. 1 (satu) lembar copy Surat dengan Kop Surat Arkitek Team Empat no. surat; 239/MZ/06.11 tanggal 27 Juni 2011, perihal Pergantian Personil Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, TA 2011.
504. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri a/n MAHDIAR ZAMZAMI dengan no. rek: 1210004146480 periode 1 januari 2011 s/d 31 Desember 2012.
505. 1 (satu) bundel copy dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Penerimaan/Saldo Bank periode bulan Januari 2011 s.d. Desember 2011, PT. Arkitek Team Empat.
506. 1 (satu) bundel copy dokumen Penerimaan/Saldo Bank periode bulan Januari 2012 s.d. Desember 2012 PT. Arkitek Team Empat.
507. 1 (satu) bundel copy Rekening Giro Bank BNI Cabang Harmoni No. Rekening: 0018305425 a.n. Arkitek Team Empat Periode: 01/01/2011 s/d. 31/12/2011.
508. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Giro Bank Mandiri KC Jkt Kebon Sirih No. Rekening: 121-00-0207130-0 a.n. PT Arkitek Team Empat periode: 1/01/11 s.d. 31/12/11.
509. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Giro Bank Mandiri No. Rekening: 121-00-0207130-0 a.n. PT Arkitek Team Empat Periode: 1/01/12 s/d. 31/12/12.
510. 1 (satu) bundel copy Laporan Transaksi Bank BRI cabang Veteran No. Rekening: 03290100976306 a.n. Arkitek Team Empat periode 02 Desember 2011 s.d. 31 Mei 2012, 01 Juli 2012 s.d. 31 Agustus 2013, 01 Oktober 2013 s.d. 28 Februari 2014.
511. 1 (satu) bundel copy Laporan Transaksi Bank BRI cabang Tanah Abang No. Rekening: 001801000493301 a.n. Arkitek Team Empat PT. Periode Transaksi: 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012 dan 01 Januari 2014 s.d. 28 Februari 2014.

Hal 185 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

512. 1 (satu) bundel copy Gaji Karyawan PT. Arkitek Team Empat Bulan : Januari 2011 s.d. Desember 2011.
513. 1 (satu) bundel copy Gaji Karyawan PT. Arkitek Team Empat Bulan : Januari 2012 s.d. Desember 2012.
514. 1 (satu) bundel dokumen Pra-Kualifikasi Seleksi Umum Pengadaan Jasa Konsultasi Nomor 001/PRA/KK/KDN/III/2011 tanggal 16 Maret 2011, Paket Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
515. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1210002071300, atas nama PT. Arkitek Team Empat periode 1 November 2010 s.d. 31 Desember 2012.
516. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0018305425 atas nama PT. Arkitek Team Empat periode 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2011 beserta lampirannya.
517. 1 (satu) bundel print out rincian penerimaan proyek PT Arkitek Team Empat tahun 2011 beserta lampirannya.
518. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Arkitek Team Empat Per Tanggal 31 Desember 2012 Tahun 2012
519. 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat Surat Nomor: 239/MZ/06.11 perihal Pergantian Personil Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011 tanggal 27 Juni 2011
520. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Prestasi Mingguan Kemajuan Pekerjaan periode 11 tanggal 2 Desember s.d. 8 Desember 2011 Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam.
521. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Prestasi Mingguan Kemajuan Pekerjaan periode minggu 1 s.d. minggu ke 7, Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam.
522. 2 (dua) lembar surat Undangan Nomor: 005/1157/PAKPA/VIII/2011 Tanggal 19 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Ir. Dudy Jocom4.
523. 4 (empat) lembar Surat Sanggahan Nomor : 522/NK.WI/TEKMAS/06/2011 tanggal 28 Juni 2011 yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan jasa Konsultasi di Lingkungan Setjen Kemendagri dan ditandatangani oleh Rachman, ST, MM General manager Wilayah I PT. Nindya Karya.

Hal 186 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



524. 1 (satu) lembar surat Nomor: 418/NZ/11.11 tanggal 11 November 2011 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Arkitek Team Empat, Ir. Mahdiar Zamzami.
525. 1 (satu) lembar surat Nomor: 025/AT-4/XI/IPDN/2011 perihal evaluasi pelaksanaan tanggal 8 November 2011 yang ditandatangani oleh team leader PT. Arkitek Team Empat, Ir. Dadang Pratisto.
526. 1 (satu) lembar surat Nomor: 005/1628/PAKPA/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Arya Sumbayak, SH, MM
527. 1 (satu) bundel copy cek BRI No. Cek CEW 085999 s/d 086000, cek Bank mandiri NO. Cek FI 379639 s.d. 379642 beserta lampirannya
528. 1 (satu) bundel dokumen gambar "KEYPLAN" kampus IPDN Baso Sumatera Barat, Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Artefak Arkindo.
529. 1 (satu) bundel surat nomor 418/IPDN/DIV.1.BK/X/2011 perihal konversi tiang pancang 300x300 menjadi 250x250 tanggal 13 Oktober 2011, konsultan perencana PT. Bina Karya beserta lampirannya.
530. 1 (satu) bundel dokumen pelelangan nomor 96/PU/KK/KDN/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat TA 2011.
531. 1 (satu) bundel dokumen pemilihan Manajemen Konstruksi Nomor 026/SU/KK/KDN/IV/2011 tanggal 18 April 2011, Paket Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat.
532. 1 (satu) bundel map berwarna biru bertuliskan "IPDN" yang berisi dokumen diantaranya "rencana pengajuan penagihan".
533. 1 (satu) bundel dokumen berisikan slip Bukti Pembayaran/Penerimaan terkait IPDN Baso B. Tinggi Padang, PT. Arkitek Team Empat
534. 1 (satu) bundel dokumen Rapat Koordinasi Proyek IPDN Sumatera Barat Pekerjaan Perencanaan Hari Selasa Tanggal 15-11-2011 Jam 11.30 s.d. 18.45 tempat R. Rapat Manajemen Konstruksi
535. 1 (satu) bundel print out yang bertuliskan IPDN Baso, Agam, manajemen Konstruksi Cost Plan dst. Dimana didalamnya berisikan juga copy Cek Bank Rakyat Indonesia Nomor Cek : CEW 085987 s/d CEW 085990 serta copy cek BNI Nomor : CR 691622 s/d 691623
536. 1 (satu) lembar print out rekapitulasi pengeluaran rapat IPDN.

Hal 187 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

537. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pemilihan Manajemen Konstruksi Nomor : 026/SU/KK/KDN/IV/2011 Tanggal 18 April 2011 Paket Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011
538. 1 (satu) buku berwarna coklat merk "Spiral Note" yang pada sampul depan terdapat tulisan tangan.
539. 1 (satu) bundel Map merah yang bertuliskan Masjid IPDN Baso didalamnya terdapat gambar Denah bangunan Masjid dan catatan Masjid IPDN 840 m2 = 672 OR, dst.
540. 1 (satu) bundel asli rekening Koran Bank Mandiri KCP Jkt D.I. Panjaitan PT. Bina Karya (Persero) nomor rekening 006-00-0040525-2 periode Januari sampai dengan Desember 2011
541. 1 (satu) bundel asli Tabel Monitoring Proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Propinsi Sumatera Barat Kode Proyek 1431 Divisi I PT. Bina Karya (Persero) Tahun 2010 beserta dokumen pendukung
542. 1 (satu) bundel asli Tabel Monitoring Proyek Perencanaan Pembangunan Gedung IPDN Propinsi Sumatera Barat Di Kabupaten Agam. Kode Proyek 1486 Divisi I PT. Bina Karya (Persero) Tahun 2011 beserta dokumen pendukung
543. 1 (satu) bundel copy Laporan Semester I Divisi I (Bangunan dan Lingkungan) PT. Bina Karya (Persero) Tahun 2011 beserta Laporan Bulanan Divisi I (Bangunan dan Lingkungan) PT. Bina Karya (Persero) Periode Bulan Agustus sampai dengan Desember 2011
544. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 16/01/2014 senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan nama penerima MOHAMMAD NOVAL no. Rekening Bank Mandiri 123.00.0460956.8
545. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 21/04/2015 senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nama penerima YUDHI MUHAMMAD FAUZI no. Rekening Bank mandiri 900-00-2716865-8
546. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 19/09/2014 senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan nama penerima MOHAMMAD NOVAL no. Rekening Bank Mandiri 123.00.0460956.8
547. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI tanggal 24/06/2014 senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan nama penerima MOHAMMAD NOVAL SL no. Rekening Bank BNI 0666888963

Hal 188 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

548. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI tanggal 13/02/2014 senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan nama penerima MOHAMMAD NOVAL SL no. Rekening Bank BNI 0666888963
549. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BCA tanggal 6/2/2014 dengan catatan 1062261972 dengan nama penerima dan no rekening tidak terbaca
550. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tanggal 06 Feb 2014 dengan nama penerima MOHAMMAD NOVAL no. Rekening Bank BCA 1062261972
551. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Desember 2011 senilai lima ratus ribu rupiah diterima dari Tn. Ir. MOHAMMAD NOVAL SLABADJO untuk pembayaran Biaya Legislasi No : 382/L/2011 Tanggal 21 Desember 2011 (surat persetujuan dan kuasa) dan Fotocopy sesuai asli dengan tanda tangan Notaris REFIZAL, S.H., M.Hum
552. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI tanggal 10/11/2014 senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan nama penerima YAYASAN CIPTAVISI KARYA KREASI dengan no. Rekening Bank BCA 505.501.8020 dengan pengirim MOHAMMAD NOVAL no. Rekening BNI 0666888963
553. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cab. Pecenongan No. Rekening: 0324050704 atas nama Bpk. MOHAMMAD NOVAL SL
554. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cab. Pecenongan No. Rekening: 0666888963 atas nama Bpk. MOHAMMAD NOVAL SL
555. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI tanpa identitas dan tanpa nomor rekening, periode awal tanggal 08/05/12 no buku C.6714011
556. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI tanpa identitas dan tanpa nomor rekening, periode awal tanggal 22/11/13 no buku C9632330
557. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Cabang Pintu Air No. Rekening 1062261972 atas nama MOHAMMAD NOVAL SL IR
558. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega Cabang Cikini NO. Rekening 01-035-00-20-31614-8 no. Seri AA 015655 atas nama Ir. MOHAMMAD NOVAL S L
559. 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Nomer rekening 115-00-0409735 -0 Kc Jakarta Mangga Besar 14/10/2003 1150321 atas nama Muhammad Noval S.L, IR QQ Nurul Jihan Khairunnissa Perum Jati Negara Baru Jl. Taman Sari V No. 22 Rt. 003 Rw. 016 Penggilingan.

Hal 189 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560. 1 (satu) buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri Nomer rekening 123-00-0460956 -8 Kcp Kramat Raya 12303 tgl Cetak 05/09/2013 atas nama Ir. Muhammad Noval S.L Jl. Kramat IV No. 14 Rt 005 Rw 009 Senen Kwitang Jakarta 10420.
561. 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri tanpa identitas dan tanpa Nomer rekening, periode awal tanggal 12/09/06 saldo 500,000.00.
562. 1(satu) buku Tabungan Bank Mandiri tanpa identitas dan tanpa Nomer rekening, periode awal tanggal 24/08/11 saldo 25,619,851.36.00.
563. 1(satu) buku Tabungan BRI Britama Nomer rekening 0329-01-025513-50-1 Cabang 0329 Jakarta Veteran tgl 21 April 2015 atas nama Muhammad Noval Jl. Kramat IV Kel Kwitang Kec Senen Jakarta Pusat tanda pengenal KTP 3175060702720005 Nomer buku 17855802.
564. 1(satu) buku Tabungan BRI Britama tanpa Identitas dan tanpa Nomer rekening Cabang 0329 Kanca BRI JKT Nomer Buku 1934580.
565. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama RAHADI WIYANTO Nomor Rekening : 1270005673213 periode 01/01/2011 s.d. 31 Juli 2013.
566. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama HUSAIN REDWIN NURLETTE Nomor Rekening : 1170004152047 periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2014.
567. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama HUSAIN REDWIN NURLETTE Nomor Rekening : 1650000067133 periode 01/01/2011 s.d. 31/07/2013.
568. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama CV PRIMA KARYA SENTOSA Nomor Rekening : 1640000405334 periode 17/11/2011 s.d. 31/01/2013.
569. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama MUSLIM Nomor Rekening : 1080002392612 periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2013.
570. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama MUSLIM qq BIN SYUKUR Nomor Rekening : 1110005234501 periode 02/02/2011 s.d. 25/10/2011.
571. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama MUSLIM Nomor Rekening : 1110005802430 periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2013.

Hal 190 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

572. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama JOKO TRIMANTO Nomor Rekening : 1110004566085 periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2013.
573. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama SUDISWAR Nomor Rekening : 1110006176149 periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2013.
574. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama EKA SAPUTRA Nomor Rekening : 1110006214809 periode 19/10/2011 s.d. 31/01/2013.
575. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama DASRIL KATIK MUDO Nomor Rekening : 1110006182337 periode 14/09/2011 s.d. 31/12/2015.
576. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama Eko Santoso, nomor rekening 32901018786503, periode 3 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2014.
577. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama Mohammad Noval, nomor rekening : 32901008903501, periode 3 Januari 2011 s.d. 28 Desember 2014.
578. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama Sugeng Gunawan, nomor rekening 3290100890303505, periode 3 Januari 2011 s.d. 30 Desember 2014
579. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama Kasdan, nomor rekening 32901027350501, periode 2 Januari 2011 s.d. 20 Desember 2014.
580. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama PT. Arkitek Team Empat, nomor rekening 1801000493301, periode 25 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2014.
581. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama PT. Arkitek Team Empat, nomor rekening 32901002976306, periode 14 Desember 2011 s.d. 25 Februari 2014.
582. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama Mohammad Noval S.L Nomor Rekening : 1230004609568 periode 01/01/2011 s.d. 31 Desember 2014.
583. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama SUGENG GUNAWAN nomor rekening 1190006326464 periode 14/08/2012 s.d. 31/12/2014.

Hal 191 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

584. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama ARKITEK TEAM EMPAT Nomor Rekening : 121000207300 periode 01/01/2011 s.d 31/12/2014.
585. 1 (satu) bundel copy dokumen Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Pengadaan Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung kampus IPDN Regional di Kab. Agam, Sumatera Barat tahun Anggaran 2010.
586. 3 (tiga) lembar Surat Nomor 011/273.A/PAKPA/V/2010 tanggal 5 Mei 2010, perihal Persetujuan Penetapan Pemenang Pelelangan yang ditandatangani oleh DR. Rizari, MBA, Msi, selaku PPK Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelola Asset Kemendagri, beserta lampirannya.
587. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian pekerjaan manajemen konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Nomor 011/317/PKPA/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan PT. Artefak Arkindo.
588. 1 (satu) bundel dokumen Pembangunan Kampus IPDN – Kabupaten Agam Bukit Tinggi – Sumatera Barat, Tahun Anggaran 2010.
589. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan – Laporan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Tahap Perencanaan – Pembangunan Gedung Kampus IPDN Propinsi Sumatera Barat, Tahun Anggaran 2010.
590. 1 (satu) bundel copy Penelitian tanah dengan alat bor mesin Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Regional Kabupaten Agam-Sumbar Tahun Anggaran 2010 bulan September 2010.
591. 1 (satu) bundel copy Laporan bulanan divisi I Bulan Desember 2010 PT. Bina Karya (Persero).
592. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pekerjaan Struktur dan Infrastruktur Proyek Pembangunan Kampus IPDN Baso – Sumatera Barat Tahap 1 Tahun Anggaran 2010.
593. 1 (satu) lembar asli Rencana Anggaran Pelaksanaan Proyek (RAPP) Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Regional Bukit Tinggi Jangka Waktu Mei 2010 sampai dengan Desember 2010 tertanggal 16 Agustus 2010 beserta 1 (satu) lembar asli perincian RAPP-nya.
594. 2 (dua) lembar asli Rencana Anggaran Pelaksanaan Proyek (RAPP) Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Regional Bukit Tinggi Jangka Waktu Mei 2010 sampai dengan Desember 2010

Hal 192 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Juni 2010 beserta 2 (dua) lembar asli perincian RAPP-nya.

595. 1 (satu) odner warna hitam berisikan dokumen Bukti Kasbon Proyek Kampus IPDN Sumatera Barat.
596. 1 (satu) odner warna hitam berisikan dokumen Buku Harian Gudang Penerimaan P4 B/P4 Logistik Proyek IPDN Baso.
597. 1 (satu) odner warna hitam berisikan dokumen Buku Harian Gudang Penerimaan Nomor odner GB-8401 F.
598. 1 (satu) odner warna hitam berisikan dokumen Persediaan Bahan, Alat, SPK Satuan Kerja Adm. Keuangan Kampus IPDN Bukittinggi.
599. 1 (satu) odner warna hitam berisikan dokumen Bukti Pembayaran Subkon (Bank) Proyek Kampus IPDN Sumatera Barat
600. 1 (satu) odner warna hitam berisikan dokumen Catatan KAS IPDN Baso - (01) GB401F.
601. 1 (satu) odner warna hitam berisikan dokumen Bukti Kerja Daftar Rekanan Terseleksi/Terpilih Satuan Kerja Logistik Proyek IPDN Baso
602. 1 (satu) odner warna hitam berisikan dokumen Catatan Kas Proyek IPDN Baso - (02) GB401F.
603. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Bukti Kasbon Pertanggungjawaban Peti Kas.
604. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Tanda Terima Barang Logistik.
605. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Catatan Peti Kas Proyek IPDN (01).
606. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen SPK Mandor/Opname Proyek IPDN.
607. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Bukti Kerja Kas Proyek IPDN Baso Padang Sumatera Barat- BKK 01-53.
608. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Bukti Kerja Kas Proyek Kampus IPDN Baso Padang Sumatera Barat - BKK 692 – 759.
609. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Catatan Peti Kas Proyek IPDN (02).
610. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Catatan Peti Kas Proyek IPDN (03).
611. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Catatan Peti Kas Proyek IPDN (04).

Hal 193 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

612. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Bukti Kerja KAS, Proyek Kampus IPDN - Baso Padang Sumatera Barat BKK 192 - BKK 238
613. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Bukti Kerja KAS, Proyek Kampus IPDN - Baso Padang Sumatera Barat BKK 365 - BKK 435.
614. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "BUTING (3) " berisikan dokumen pembayaran subkon/supplier PT. Utama Karya.
615. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "Bukti Nop-Des 2011" berisikan dokumen pembayaran subkon/supplier PT. Utama Karya.
616. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "IPDN BUTING 3" berisikan dokumen pembayaran subkon/supplier PT. Utama Karya
617. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "SPJB IPDN BUKIT TINGGI" yang terdiri dari : CV. Trijaya, PT. Kredo, PT. Aneka Cipta, PT. Baskara, PT. Dwi Prima, PT. Cijete, PT. Sinarindo, PT. Dwijaya Selaras, PT. Petro, PT. Indokeramikatana Tahun 2011-2012 dengan Kode : BT-1.
618. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "SPB & PO IPDN BUTING SD/LOG/P/001 TEKNIK 2011-2012 KODE BT-1"
619. Satu bundel dokumen terdiri dari:
- 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Direksi PT Utama Karya (Persero) Nomor:2312/KPTS/78/2008 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat-Pejabat PT Utama Karya (Persero) tanggal 13 Oktober 2008 yang di antaranya berisikan keterangan mengangkat Ir. BUDI RACHMAT KURNIAWAN dari Wakil General Manager Divisi Gedung pada Direktorat I menjadi Pj. General Manager Divisi Gedung pada Direktorat I PT Utama Karya (Persero) di Jakarta.
 - 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Direksi PT Utama Karya (Persero) Nomor: 942/KPTS/29/2009 tentang Pengangkatan Status Jabatan Pejabat PT Utama Karya (Persero) tanggal 12 Juni 2009 yang di antaranya berisikan keterangan mengangkat Ir. BUDI RACHMAT KURNIAWAN dari Pj. General Manager Divisi Gedung PT Utama Karya (Persero) di Jakarta menjadi General Manager Divisi Gedung PT Utama Karya (Persero) di Jakarta" beserta 2 (dua) lembar lampiran "Job Description" Jabatan General Manager Divisi

Hal 194 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620. 1 (satu) bundel copy Prosedur Prakualifikasi Tender PT. Utama Karya diterbitkan tanggal 29/03/2010.
621. 1 (satu) bundel copy Prosedur Rapat Eksekutif Marketing (REM) PT. Utama Karya diterbitkan tanggal 29/03/2010.
622. 1 (satu) bundel copy Prosedur Perintisan Proyek PT. Utama Karya diterbitkan tanggal 29/03/2010.
623. 1 (satu) bundel copy Prosedur Manajemen Kegiatan Pemasaran PT. Utama Karya diterbitkan tanggal 29/03/2010.
624. 1 (satu) bundel copy Prosedur Pelaksanaan PT. Utama Karya diterbitkan tanggal 29/03/2010.
625. 1 (satu) bundel copy Prosedur Karya Rampung PT. Utama Karya diterbitkan tanggal 29/03/2010.
626. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank BNI a.n. PT. YULIAN BERKAH ABADI No. Rek. 0096249910 periode 1 Oktober 2011 s.d. 31 Desember 2011.
627. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2006 s/d Desember 2006.
628. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2007 s/d Agustus 2007 dan Oktober 2007 s/d Desember 2007.
629. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2008 s/d Desember 2008.
630. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2009 s/d Desember 2009.
631. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2010 s/d Desember 2010.
632. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2011 dan Maret 2011 s/d Desember 2011.
633. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2012 s/d Desember 2012.
634. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2013 s/d Desember 2013.
635. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2014 s/d Oktober 2014.

Hal 195 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

636. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan No (kosong) PT Utama Karya Divisi Gedung U/ Proyek Apartemen Sentra Timur, tertanggal 27 Oktober 2014 beserta 2 (dua) lembar tindasannya.
637. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Emmy Marlina Simanjuntak, SH tentang Pendirian PT Yulian Berkah Abadi tanggal 28 Oktober 2005.
638. 1 (satu) lembar rekening koran BNI dengan nomor account 0096249910 atas nama PT Yulian Berkah Abadi periode transaksi bulan September 2007.
639. 1 (satu) lembar rekening koran BNI dengan nomor account 0096249910 atas nama PT Yulian Berkah Abadi periode transaksi bulan 03 November 2014 sampai dengan 8 Desember 2014.
640. 1 (satu) lembar rekening koran BNI dengan nomor account 0096249910 atas nama PT Yulian Berkah Abadi periode transaksi bulan Februari 2011.
641. 1 (satu) bundel fotokopi cek BNI beserta tanda terimanya dengan nomor cek sebagai berikut:
- a. CX836259, tanggal 29 Februari 2012.
 - b. CX836252, tanggal 22 Februari 2012.
 - c. CX836254, tanggal 20 Februari 2012.
 - d. CX836253, tanggal 21 Februari 2012.
 - e. CX836256, tanggal 15 Februari 2012.
 - f. CX836255, tanggal 18 Februari 2012.
 - g. CX836251, tanggal 12 Februari 2012.
 - h. CX836247, tanggal 04 Februari 2012.
 - i. CX836245, tanggal 06 Februari 2012.
 - j. CX836246, tanggal 05 Februari 2012.
 - k. CX054852, tanggal 30 November 2011.
 - l. CX054870, tanggal 27 Januari 2012.
 - m. CX054505, tanggal 31 Oktober 2011.
642. 1 (satu) lembar copy kertas yang terdiri 2 atas dua buah copy dokumen yakni : 1 (satu) lembar kwitansi dari PT Yulian Berkah Abadi senilai Rp.77.046.000,00 tertanggal 25 Januari 2012 dan 1 (satu) lembar copy cek BNI dengan nomor CX 054870 tertanggal 27 Januari 2012 senilai Rp.42.881.600,00.
643. 3 (tiga) lembar copy Cek Bank BNI terdiri atas Cek BNI nomor CX 836247 tertanggal 4 Februari 2012 senilai Rp. 300.013.754,00, Cek BNI nomor CX 836245 tertanggal 6 Februari 2012 senilai

Hal 196 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.380.000.000,00, dan Cek BNI nomor CX 836246 tertanggal 5 Februari 2012 senilai Rp.335.000.000,00.

644. 1(satu) lembar copy Cek Bank Mandiri dengan nomor FG 952078 senilai enam ratus dua puluh lima juta rupiah (Rp.625.000.000,00) tertanggal 18 Januari 2012.

645. 1(satu) lembar copy Cek Bank Mandiri dengan nomor FG 952079 senilai lima ratus juta rupiah (Rp.500.000.000,00) tertanggal 20 Januari 2012.

646. 2 (dua) lembar copy Cek Bank Mandiri dengan nomor FG 952080 dan FG 952081 senilai masing masing tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah (Rp.742.810.500,00) tertanggal 18 Januari 2012.

647. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX054505 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 28.000.000,- tanggal pencarian 31 Oktober 2011.

648. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX836256 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 360.000.000,- tanggal pencarian 24 Februari 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa copy identitas pencair.

649. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX836255 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 340.000.000,- tanggal pencarian 24 Februari 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair.

650. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX836245 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 380.000.000,- tanggal pencarian 6 Februari 2012.

651. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX836246 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 335.000.000,- tanggal pencarian 6 Februari 2012.

652. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX054501 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 300.000.000,- tanggal pencarian 28 Oktober 2011, beserta 1 lembar lampiran berupa copy identitas pencair.

653. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX054504 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 472.000.000,- tanggal pencarian 28 Oktober 2011, beserta 1 lembar lampiran berupa copy identitas pencair.

654. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CV116480 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 600.000.000,- tanggal pencarian 27 Oktober 2011, beserta 1 lembar lampiran berupa copy identitas pencair.

Hal 197 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

655. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX836247 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 300.013.754,- tanggal pencarian 07 Februari 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa copy identitas pencair.
656. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX836252 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 300.000.000,- tanggal pencarian 23 Februari 2012.
657. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX836253 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 475.000.000,- tanggal pencarian 23 Februari 2012.
658. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX836254 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 300.000.000,- tanggal pencarian 23 Februari 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair.
659. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CA915402 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 191.805.000,- tanggal pencarian 06 Maret 2012.
660. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX054870 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 42.881.600,- tanggal pencarian 06 Maret 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair.
661. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CA915421 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 640.610.000,- tanggal pencarian 09 Mei 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair.
662. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CA915420 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 197.198.400,- tanggal pencarian 10 Mei 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair.
663. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CA915424 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 25.000.000,- tanggal pencarian 29 Mei 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair.
664. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX054852 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 330.000.000,- tanggal pencarian 30 November 2011, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair.
665. 1 (Satu) Buah buku berukuran folio berwarna biru bertuliskan Register Bank Bukopin Operasional A/C 101.9467.011 Tahun 2012.
666. 1 (Satu) Buah Buku berukuran folio berwarna biru bertuliskan Bukopin
667. 1 (Satu) Buah Buku berukuran folio berwarna hijau tua bertuliskan Bank Mandiri Iskandarsyah A/C 126.000.44.79.324
668. 1 (satu) file odner berwarna biru yang berisi dokumen sebagai berikut:

Hal 198 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



- a) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Bukopin PT Utama Karya, Div Gedung dengan nomor rekening 1019467011 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
- b) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Bukopin PT Utama Karya, Div Gedung dengan nomor rekening 1019469014 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
- c) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Bukopin PT Utama Karya, Div Gedung dengan nomor rekening 1019370018 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
- d) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Bukopin PT Utama Karya, Div Gedung dengan nomor rekening 1019468018 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
- e) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jkt Iskandarsyah PT Utama Karya, jl. Iskandarsyah 1/6 Kebayoran Baru Melawai Jakarta 12160 dengan nomor rekening 1260004479324 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
- f) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jkt Jatinegara Timur PT Utama Karya, jl. Iskandarsyah 1/6 Kebayoran Baru Melawai Jakarta 12160 dengan nomor rekening 0060092009087 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
- g) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI KCP Jkt Cikajang PT Utama Karya, Wilayah II jl. Iskandarsyah 1/6 Melawai Kebayoran Baru dengan nomor rekening 065101000034303 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
- h) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BTN Cabang Bekasi PT Utama Karya jl. Iskandarsyah 1 no. 6 Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 dengan nomor rekening 0001601300018227 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
- i) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Cabang 63 Senayan PT Utama Karya jl. Iskandarsyah 1 no. 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 dengan nomor rekening 0004453322 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
- j) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Cabang 63 Senayan PT Utama Karya jl. Iskandarsyah 1 no. 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 dengan nomor rekening 0004453286 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.

Hal 199 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



- k) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank DBS Cabang Thamrin Jakarta PT Utama Karya Divisi Gedung jl. Iskandarsyah 1 no. 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 dengan nomor rekening 3020000356 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
669. 1 (satu) file odner berwarna biru yang berisi dokumen sebagai berikut:
- a) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1019467011 Periode Bulan Januari s/d Desember 2012.
 - b) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1019469014 Periode Bulan Januari s/d Desember 2012.
 - c) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1019468018 Periode Bulan Januari s/d Desember 2012.
 - d) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1019370018 Periode Bulan Januari s/d Desember 2012.
 - e) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BTN Cabang Bekasi milik PT Utama Karya Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan 12160, dengan nomor rekening 0001601300018227 Periode Bulan Januari s/d Desember 2012.
 - f) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BRI milik PT Utama Karya Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 032901002977302 Periode Bulan Januari s/d Desember 2012.
 - g) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BRI milik PT Utama Karya Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 032901003002304 Periode Bulan Januari s/d Desember 2012.
 - h) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BRI milik PT Utama Karya Wilayah II KCP Cikajang Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 065101000034303 Periode Bulan Januari s/d Desember 2012.

Hal 200 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



- i) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BNI milik PT Utama Karya Cabang: 63 Senayan Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 0271533722 Periode Bulan Oktober s/d Desember 2012.
 - j) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Mandiri milik PT Utama Karya KCP Jkt Iskandarsyah Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 126.00.0447932.4 Periode Bulan Januari s/d Desember 2012.
 - k) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Mandiri milik PT Utama Karya KCP Jkt Jatinegara Timur Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 0060092009087 Periode Bulan Januari s/d Desember 2012.
670. 1 (satu) file odner berwarna biru yang berisi dokumen sebagai berikut:
- a) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1019467011 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
 - b) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1019469014 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
 - c) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1019468018 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
 - d) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1019370018 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
 - e) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 0271533722 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
 - f) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Mandiri milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1260004479324 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.

Hal 201 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



- g) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BRI milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 032901002977302 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
- h) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BRI milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 032901003002304 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
- i) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 2715337224 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
- j) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BRI milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 065101000034303 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
- k) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Mandiri milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 0060092009087 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
- l) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BTN milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 0001601300018227 Periode tanggal 1 Januari s/d 31 Januari 2013.
- 671.1 (satu) bundel copy Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Nomor: 011/837/PAKPA/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010. Ditandatangani oleh Ir. DUDY JOCOM (Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset, Kementerian Dalam Negeri) dan RACHMAN ST, MM. (General Manager Wilayah I PT. Nindya Karya (Persero))
672. 2 (dua) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 910-739 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-2A Tahun 2010 Tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Serta Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam

Hal 202 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tahun 2010, ditandatangani oleh DIAH ANGGRAENI a.n. Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal tanggal 27 September 2010, beserta 1 (satu) lembar copy lampirannya.

673. 2 (dua) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 910-940 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-16 Tahun 2010 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Tahun Anggaran 2010 di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI, Menteri Dalam Negeri tanggal 15 November 2010 beserta 4 (empat) lembar copy lampirannya.

Barang Bukti Elektronik yaitu :

1. 1 (satu) keping CD-RW kapasitas 700 MB, Merk SONY dengan tulisan tangan “ Data SPM BMN Komputer Alm Prihartawan” yang ditandatangani Arya tanggal 1/3-2016, S/N : AK05D131W0419 80B1
2. 1 (satu) keping DVD+R 8X Double Layer kapasitas 240Min/8.5 GB, Merk RITEK, S/N : TEg405144614E09, dengan tulisan “Data IPDN Ibu Yurike” yang ditandatangani Arya tanggal 1/3-2016
3. 1 (satu) Harddisk, Merk: Hitachi, kapasitas: 250 GB, S/N : JP0272J20KV8TM yang diambil dari komputer Tri Adji Bawono di Ruang Bidang Pengelolaan BMN Lt. 4 Kementerian Dalam Negeri
4. 1 (satu) buah flashdisk berwarna hijau muda, Merk TDK, S/N : 070753ED991F3887 (dilihat dengan USB Deview).
5. (satu) keping DVD dengan merk: Verbatim, S/N: MAPA18RC281219103, kapasitas: 4.7 GB, yang di dapat dari Ruang keuangan dan penguasa barang Sugeng
6. 1 (satu) hard disk dengan merk: Seagate, S/N: 9RXN2YKY, tipe: ST3160215A, kapasitas: 160 GB yang didapat dari ruang keuangan
7. 1 (satu) keping DVD dengan merk: Ritek, S/N: TEg405144036D10, kapasitas: 8.5 GB, yang di dapat dari Ruang Logistik dan penguasa barang Budi Ardianto.
8. 1 (satu) keping DVD dengan merk: Ritek, S/N: TEg405144039A10, kapasitas: 8.5 GB, yang di dapat dari Ruang Logistik dan penguasa barang Kurniati Evilia

Hal 203 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) keping CD-R dengan merk: Verbatim, S/N: B3131RE04131629LH, kapasitas: 700 MB, yang di dapat dari Ruang Teknik dan penguasa barang Isfianto
10. 1 (satu) keping DVD dengan merk: Verbatim, S/N: MAPA18RC281218005, kapasitas: 8.5 GB, yang di dapat dari Ruang pemasaran
11. 1 (satu) keping DVD dengan merk: Ritek, S/N: TEg405140246A11, kapasitas: 8.5 GB, yang di dapat dari Ruang Pemasaran dan penguasa barang Anton
12. 1 (satu) buah hardisk 3,5" Merek SEAGATE BARRACUDA, Type ST3250318AS, S/n: 6VMDZTL6, Kapasitas 250GB, yang digunakan oleh BAMBANG SUDIBYO.
13. 1 (satu) buah hardisk 3,5" Merek SEAGATE BARRACUDA, Type ST3250318AS, S/n: 6VMAM19Z, Kapasitas 250GB, yang digunakan oleh YUSNITA VERAWATI.
14. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan S/n: A3131RE04112693LH, kapasitas 700MB yang berisi data Keuangan Catatan Kas dan Bank tahun 2010 s/d 2012 PT.BINA KARYA, yang diperoleh dari komputer kasir yang digunakan dan ditandatangani oleh Ibu RIKA ROLA.
15. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan S/n: A3131RE04131508LH, kapasitas 700MB yang berisi data Keuangan Buku Besar (GL) tahun 2010 s/d 2014 PT.BINA KARYA, yang diperoleh dari komputer Akuntansi yang digunakan dan ditandatangani oleh FIRLI RANSYAH.
16. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan S/n: A3131RE04131500LH, kapasitas 700MB yang berisi File-File dari hasil pencarian dengan kata kunci "IPDN" yang diperoleh dari komputer yang digunakan oleh IWAN.
17. 1 (satu) keping CD dengan merk: Verbatim, S/N: A3131RE04063229LH, kapasitas: 700 MB, penguasa barang Ratna Juwita bagian administrasi.
18. 1 (satu) keping CD dengan merk: Verbatim, S/N: N129RD26D8100092C1, kapasitas: 700 MB, bertuliskan CCO GEDUNG KAMPUS IPDN PROVINSI SUMATERA BARAT KABUPATEN AGAM 22052015 – YOSSI.

Hal 204 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) keping CD dengan merk: Verbatim, S/N: N129RD26D8100093E2, kapasitas: 700 MB, bertuliskan ASBUILT + CCO IPDN BASO.
20. 1 (satu) keping DVD dengan merk: Verbatim, S/N: MAPA07RC26191913, kapasitas: 4.7 GB, yang didapat dari ruang administrasi akunting.
21. 1 (satu) keping DVD dengan merk: Verbatim, S/N: MAPA18RC281221536, kapasitas: 4.7 GB, yang didapat dari ruang administrasi akunting.
22. 1 (satu) keping DVD dengan merk: RITEK, S/N: 1Eg405143633S10, kapasitas: 8.5 GB, yang didapat dari ruang studio designer.
23. 1 (satu) buah Ipad warna silver hitam dengan casing BELK warna hitam kapasitas 64 GB model A1430 IMEI 013314001854108 Serial DMPJP00YDVGJ.
24. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia MODEL 225 warna kuning TYPE RM-1011 IMEI 1 353672060388286 IMEI 2 353672060388294 tanpa SIM CARD dan tanpa MEMORY CARD
25. 1 (satu) buah Harddisk Eksternal merk SMART DRIVE, model no: HD3-SU2, S/N: 0836851, yang di dalamnya terdapat Harddisk 2.5 inchi merk FUJITSU, model: MHZ2160BH G2, S/N: K60HT872ANWG, kapaitas: 160 GB, beserta dengan kabel data dan cover harddisk warna hitam bertuliskan DPR.
26. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Bold 9790 warna hitam, model: REC71UW, IMEI: 359201040965247, PIN: 28CB3A52, tanpa SIM Card dan tanpa Memory Card.
27. 1 (satu) keping DVD-R Merk Verbatim, S/N : MAPA07RC270440392 berisi data dari laptop milik DADANG PRASTITO yang ditandatangani ENNY DEWI ANGGRAINI tanggal 02-03-2016.
28. 1 (satu) buah CD yang bertuliskan "File Kontrak" yang berisikan:
 - 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Gatrindo Baja Gerbang".
 - 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Gatrindo GRC".
 - 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Excel nama "ipdn sumbar".
 - 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Jagat Alumunium".

Hal 205 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Job Metal Plafond".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Mandiri Plafond".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Pengadaan Baja".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Prima Karya area asrama".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Prima Karya Infra".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Prima Karya InfrastrukturAdm".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Proteksindo Cat".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "RESTU InfrastrukturAdm".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Sakha Baja".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Sinarindo baja".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Sinarindo JB Baja".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "sumarto-Patung".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Surya Baja Angkutan".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "YULIAN AREA PERPUS".

29. 1 (satu) buah DVD-R merk Verbatim, SN : MAPA24TC27011199, bertuliskan "History Cash Flow Bukit Tinggi" yang didalamnya terdapat file "History Cash Flow Bukit Tinggi 2011 s.d. 2014_Pie Chart.xlsx"

30. 1 (satu) buah Bluray Disc merk Maxell S/N : BRF663RL 8 RB L3 yang didalamnya terdapat file dengan nama "Outlook Data File - ate.pst", dengan kapasitas : 8.745.737 KB. (nilai MD5 Hash dari file tersebut adalah b310826bc959e8a341e320d012b3f2fc & SHA1 HASH: 896f48eca3ccf9f45214cac85cd80c61972727a6e4.

Hal 206 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) keping CD-R plus dengan tulisan IPDN Sumbar I RAB
32. 1 (satu) keping CD-R plus dengan tulisan IPDN Sumbar II GAMBAR
33. 1 (satu) buah DVD-R merk Verbatim, SN : MAPA24TC27011101, dengan tulisan "Petty Kas IPDN Bukit Tinggi," yang di dalamnya berisi file excel dengan nama "Rekap 2011 dan 2012."
34. 1 (satu) buah Hard Disk Merk Seagate Model ST9500420AS Nomor Seri : 5VJ99LLB Kapasitas 500 GB diambil dari Laptop Andri Budi Setyawan.
35. 1 (satu) buah Hard Disk Merk Seagate Model ST1000DM003 Nomor Seri : Z1D4LJNL Kapasitas 1000 GB diambil dari PC Server Akuntansi.
36. 1 (satu) buah Hard Disk Merk Seagate Model ST3160021A Nomor Seri : 4JS26FSM Kapasitas 160 GB diambil dari Komputer Kasir.
37. 1 (satu) buah Hard Disk Merk Seagate Model ST340014A Nomor Seri : 5MQ0EBAJ Kapasitas 40 GB diambil dari komputer PC Ruang Logistik lantai 2.
38. 1 (satu) buah Hard Disk Merk Hitachi model HDT721016SLA380 Nomor Seri : MB2SRB6B Kapasitas 160 GB diambil dari ruangan Administrasi dan Akutansi.
39. 1 (satu) buah Hard Disk WD 640GB, S/N : WX41A21H3299 yang digunakan oleh R. Soetanto.
40. 1 (satu) buah Hard Disk WD 1.0 TB, S/N : WX41E44LND88 yang digunakan oleh NGATIJO.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara BUDI RACHMAT KURNIAWAN ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

Telah membaca Akta permintaan banding Nomor : 37 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2018/PN.Jkt.Pst yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2018, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 53/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Nopember 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2018;

Hal 207 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta permintaan banding Nomor : 37 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2018/PN.Jkt.Pst yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2018, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 53/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Nopember 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 26 Nopember 2018;

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Desember 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2018 ;

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 26 Desember 2018 ;

Telah membaca surat dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 7 Desember 2018 Nomor : W10-U1/201/HN.05.XII.2018.03 tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Nopember 2018, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut disertai memori banding, dan memori banding tersebut jika disimpulkan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

Hal 208 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penjatuhan pidana (straat marcht) dalam putusan pembedanaan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan fakta yang diperoleh pada pemeriksaan sidang (onvoldoen degemotiveerd) terkait dengan pembuktian unsur "dengan tujuan menguntungkan orang lain" yakni Hendra yang hanya memperoleh keuntungan dalam jumlah seluruhnya Rp.2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian memori banding yang disimpulkan di atas, selanjutnya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 11 Desember 2018, harus dianggap tertulis dan termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut disertai memori banding, dan memori banding tersebut jika disimpulkan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan adanya pemberian uang kepada terdakwa dengan hanya mendengarkan pada keterangan satu saksi saja sebagaimana dalam putusan Majelis pada halaman 522;
2. Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan materi pembelaan Tim Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa tentang status satu saksi yang sifatnya unus testis nullus testis;
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor harus dibatalkan karena merupakan pertimbangan yang tidak cukup atau tidak layak (onvoldoende Gematireerd);

Menimbang, bahwa dari uraian memori banding yang disimpulkan di atas, selanjutnya memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Desember 2018, harus dianggap tertulis dan termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 14 Nopember 2018,serta Memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum

Hal 209 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding baik dari Tim Pensehat Hukum Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum berpendapat, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pidana denda dan pengganti pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti atas uang pengganti, karena dirasa tidak adil dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada proyek dimaksud telah sangat menghambat proses berlangsungnya pendidikan bagi anak-anak sekaligus juga menghambat pengisian jabatan birokrasi pada Kemendagri;

Menimbang, bahwa disamping itu kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa jumlahnya cukup besar yang sudah barang tentu memerlukan pemulihan dana dalam waktu yang relatif lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat dipandang cukup adil apabila terhadap terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat yang lamanya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 14 Nopember 2018 Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, pidana denda dan pengganti pidana denda serta pidana penjara atas uang pengganti yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 210 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat :

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53 /Pid.Sus / TPK / 2018 / PN Jkt.Pst, tanggal 14 Nopember 2018, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pidana denda dan pengganti pidana denda dan lamanya pidana penjara atas uang pengganti sehingga amar selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa DUDY JOCOM, M.si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA “sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke 2;
 - 2.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 - 2.3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp. 4.200.000.000,00; (empat milyar dua ratus juta rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 - 2.4. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 211 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

2.6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bundel dokumen dalam odner plastik warna biru berisikan :
 - a. 1 (satu) lembar copy Daftar isi,
 - b. 1 (satu) lembar copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai penjamin,
 - c. 5 (lima) lembar keputusan menteri dalam negeri nomor : 900-1097 tahun 2010 beserta lampirannya,
 - d. 5 (lima) lembar copy keputusan menteri dalam negeri nomor: 900-1127 tahun 2010 beserta lampirannya,
 - e. 22 (dua puluh dua) lembar copy peraturan menteri dalam negeri nomor:3 tahun 2011beserta lampirannya,
 - f. 2 (dua) lembar copy harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan kegiatan kampus IPDN Baso Sumatera Barat tahun anggaran 2011,
 - g. 2 (dua) lembar copy Bill of Quantity (BQ) pekerjaan kegiatan kampus IPDN Baso Sumatera Barat tahun anggaran 2011,
 - h. 2 (dua) lembar copy dokumen draft Surat Perjanjian,
 - i. 27 (dua puluh tujuh) lemabr dokumen draft syarat-syarat umum kontrak,
 - j. 3 (tiga) lembar copy dokumen draft syarat-syarat khusus kontrak,
 - k. 1 (satu) lembar copy Bank Garansi BRI nomor: 032917110288,
 - l. 2 (dua) lembar copy Bank Garansi BRI nomor : 032917110284,
 - m. 1 (satu) lembar copy Bank Garansi BRI nomor : 032917110288,
 - n. 4 (empat) lembar copy dokumen pekerjaan tambah kurang pembangunan kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam tahun anggaran 2011,
 - o. 11 (sebelas) lembar copy dokumen perjanjian kontrak kerja nomor : 011/420/PAKPA/VII/2011 tanggal

Hal 212 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 juli 2011 pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung kampus IPDN Provisni Sumatera Barat di Kabupaten Agam tahun anggaran 2011,

p. 16 (enam belas) lembar copy dokumen perjanjian kontrak kerja nomor : 011/22/PAKPA/VI/2011 tanggal 6 juni 2011 pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung kampus IPDN Provisni Sumatera Barat di Kabupaten Agam tahun anggaran 2011,

q. 33 (tiga puluh tiga) lembar copy dokumen perjanjian kontrak kerja nomor : 011/1075/PAKPA/IX/2011 tanggal 23 September 2011 pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung kampus IPDN Provisni Sumatera Barat di Kabupaten Agam tahun anggaran 2011

2. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pelelangan Nomor : 96/PU/KK/KDN/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

3. 1 (satu) bundel Dokumen Lelang pembangunan gedung kampus IPDN di Bukit Tinggi Sumatera Barat pada Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011;

4. 1 (satu) Bundel dokumen copy, Kronologis Pembangunan Gedung IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT TAHUN 2011;

5. 1 (satu) odner warna oranye yang bertuliskan "DOKUMEN PROYEK IPDN SUMBAR TAHUN 2011";

6. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-1097 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Tahun Anggaran 2011 di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

7. 5 (lima) lembar copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;

8. 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

9. 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Hal 213 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

10. 2 (dua) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 811.212.2-707 Tahun 2010 tanggal 17-9-2010 (SK pengangkatan Ir. DUDY JOCOM pada jabatan Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Sekretariat Jenderal Kemendagri), beserta 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 811.212.2/2023/SJ tanggal 17 September 2010, ditandatangani oleh KISWANTO, SH;
11. 2 (dua) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900-147 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1126 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 ditandatangani DIAH ANGGRAENI a.n. Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal, beserta 3 (tiga) lembar copy lampirannya;
12. 4 (empat) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 027-129 Tahun 2011 Tanggal 22 Februari 2011 Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011;
13. 3 (tiga) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 027-130 Tahun 2011 Tentang Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Pengadaan barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Februari 2011;
14. 3 (tiga) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 811.212.3-708 Tahun 2010 Tanggal 17-9-2010 (SK Urkanus Sihombing menjadi Kepala Bidang Analisis Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Kajian Kebijakan Strategik Setjen Kemendagri);
15. 3 (tiga) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 811.212.3-682 tahun 2009 tanggal 24 September 2009, ditujukan kepada Drs. Burhanuddin, jabatan baru : Kepala Bidang Inventarisasi Kekayaan Milik Negara pada Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Asset Sekretariat Jenderal;
16. 3 (tiga) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 811.212.3.708 tahun 2010 tanggal 17 September 2010, ditujukan

Hal 214 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Drs. Burhanuddin, jabatan baru : Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Badan Litbang Kemendagri;

17. 5 (lima) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 811.212.2-530 Tahun 2012 Tanggal 7 Agustus 2012 (SK Restu Hardy Daud sebagai Kepala Pusat Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi Sekretariat Jenderal);
18. 3 (tiga) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 811.212.3-708 Tahun 2010 Tanggal 17 September 2010 (SK Restu Hardy Daud sebagai Kepala Bagian Perencanaan Program pada Biro Perencanaan Setjen Kemendagri);
19. 1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-738 tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010;
20. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor : 011/3438/SJ tanggal 13 September 2011 Perihal Persetujuan Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat;
21. 3 (tiga) lembar copy Nota Dinas Nomor 667/SJ/2011 tanggal 23 Agustus 2011, perihal Laporan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di 4 (empat) Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Riau) TA 2011. Diturunkan kepada Menteri Dalam Negeri, ditandatangani oleh DIAH ANGGRAENI, Sekretaris Jenderal. Pada dokumen tersebut terdapat tulisan tangan "Sekjen, 1. Penetapan", paraf dan tanggal "23/8/11";
22. 1 (satu) lembar copy surat Nomor : 660/2061/PAKPA/XI/2011 tanggal 23 November 2011 Hal : Pengantar Studi AMDAL;
23. 1 (satu) bundel copy surat Nomor : 700/2652/SJ tanggal 10 Juli 2011 Perihal : TLHP BPK RI;
24. 4 (empat) lembar copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 900.05-292 PAKPA 2011 tentang Tim Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, tanggal 4 Mei 2011;
25. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 005/20/Sj/2010 Tanggal 27 Desember 2010 Perihal: Undangan Penyerahan DIPA Tahun 2011;

Hal 215 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.3 (tiga) lembar copy Program Peningkatan Sarpras Aparatur Kemendagri;
27. 1 (satu) lembar copy Ilustrasi Alur Perencanaan TA 2011;
28. 3 (tiga) lembar copy Dokumen Perencanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011;
29. 3 (tiga) lembar copy Surat Nomor: BU.01.06-Cb/79 Tanggal 19 Januari 2011 Perihal: Pendapat Teknis Pekerjaan Lanjutan Pengadaan Konsultan Perencanaan Untuk Pembangunan Gedung Kampus IPDN Daerah;
- 30.1 (satu) bundel asli Surat Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor : KP.01.08-Cb/182 tanggal 10 Februari 2011 dan lampirannya
31. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Nomor: 826.2/29/01.PAKPA Tanggal 25 Februari 2015 (Itriah Afsolin sedang melaksanakan tugas belajar (S2) terhitung mulai tanggal 1 September 2004 s/d. 31 Agustus 2015) dengan lampiran: 2 (dua) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 894-1655 Tahun 2014 Tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar (S2) Pada Program Master Of Arts Governance And Public Policy The University Of Sheffield dan 1 (satu) lembar Surat Nomor: R-228/22/02/2015 Tanggal 23 Februari 2015 Perihal: Permintaan Keterangan.
32. 3 (tiga) lembar copy Keputusan Direksi PT. Utama Karya (Persero) Nomor: 1739/KPTS/41/2010 Tanggal 19 Oktober 2010 Tentang Susunan Pengurus Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan PT. Hakaполе dan PT. Hakaaton.
33. 3 (tiga) lembar copy Deskripsi Jabatan Direktur Produksi, Mulai Berlaku: 20 Desember 2005 dan 3 (tiga) lembar printout Curriculum Vitae a.n. Ir. R Soetanto, MM.
34. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT. Utama Karya (Persero) Nomor: 1615/KPTS/20/2011 Tanggal 27 Juli 2011 Tentang Perubahan Struktur Organisasi Kamtor Puat, Divisi dan Wilayah.
35. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT. Utama Karya (Persero) Nomor: 001/KPTS/01/2011 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Pada Divisi Pemasaran tanggal 03 Januari 2011, ditandatangani oleh S. SUBAGYONO, Direktur Utama PT. Utama Karya (Persero).

Hal 216 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT. Utama Karya Nomor: 1083/KPTS/14/2011 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat PT. Utama Karya (Persero) tanggal 31 Mei 2011, ditandatangani oleh S. SUBAGYONO, Direktur Utama Pt. Utama Karya (Persero).
37. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT. Utama Karya (Persero) Nomor: 1640/KPTS/23/2011 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat PT. Utama Karya (Persero) tanggal 27 Juli 2011, ditandatangani oleh Ir. TRI WIDJAJANTO J, MT., Direktur Utama PT. Utama Karya (Persero).
- 38.2 (dua) lembar copy Dokumen No. Dokumen: OPS/DDO/P/002 Diterbitkan Tanggal: 29 Maret 2010: Halaman: 16-17 dari 19.
- 39.1 (satu) lembar copy Surat Nomor: HKDG/Smr.1842/ST/199 Tanggal 20 Oktober 2011, Hal: Penugasan (Remon Debal sebagai Deputy Project Manager pada Proyek IPDN Bukit Tinggi).
- 40.2 (dua) lembar copy Surat Tanggal 10 September 2012, Hal: Pengunduran Diri (Remon Debal) dengan lampiran Surat Keterangan Kesahatan.
- 41.1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Kartu ATM atas nama Gregorius Aji Sentosa tanggal 27 Januari 2012, ditandatangani oleh Remon Debal, ST dan Dedy Susetyo, SE.
- 42.1 (satu) lembar copy Surat PT. Utama Karya Nomor : HKDG/Smr.2145/ST/228 Hal Tugas Perbantuan Kepada Sdr. G. Aji Sentosa, ST tanggal 15 November 2011
43. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: HKDG/Smr.180/UDP/02 Tanggal 26 Januari 2012, Hal: Koordinasi Pembagian Tugas (Pergantuan Tugas Operasional Proyek di Lapangan dari Ir. Pedi Lestario kepada Remon Debal).
44. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: HKDG/Smr.1208/ST/104 Tanggal 06 Juli 2012, Perihal: Penugasan (Yusuf Sitorus sebagai SOM Proyek Mall Saint Morits).
45. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: HKDG/Smr.1784/ST/194 Tanggal 18 Oktober 2011, Perihal: Penugasan (Yusuf Sitorus sebagai SOM pada Proyek IPDN Bukit Tinggi).
46. 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari:
- a)1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 179/KPTS/04/2011/5-7 Tanggal 25 Januari 2011 Perihal: Pembebasan dan Pengangkatan Kembali

Hal 217 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pejabat (Pengangkatan Rudy Hertanto sebagai GM Sumber Daya pada Direktorat IV).

b) 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 1640/KPTS/23/2011/1-91 Tanggal 27 Juli 2011 Perihal: Pembebasan dan Pengangkatan Sebagai Pejabat (Pengangkatan Rudy Hertanto sebagai GM Produksi pada Direktorat Operasi I).

c) 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 121/KPTS/05/2012/1-23 Tanggal 25 Januari 2012 Perihal: Pembebasan dan Pengangkatan Sebagai Pejabat (Pengangkatan Rudy Hertanto sebagai GM SDM & Umum pada Direktorat SDM & Umum).

d) 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: GMSU/Gh.1323/UDP/65 Tanggal 30 Juli 2012 Perihal: Pengakhiran Hubungan Kerja Dengan Mendapat Hak Pensiun Normal.

47. 15 (lima belas) lembar copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1260004347711, nama R. PEDI LESTARIO periode 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2014.

48. 19 (sembilan belas) lembar copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1110006241331, nama R. PEDI LESTARIO periode 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2014.

49. 19 (sembilan belas) lembar copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1050004679845, nama REMON DEBAL periode 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2014.

50. 7 (tujuh) lembar copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1110006322479, nama REMON DEBAL periode 17 Februari 2012 s.d. 1 Agustus 2013.

51. 6 (enam) lembar copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1080001363838, nama REMON DEBAL periode 1 Januari 2011 s.d. 1 Maret 2014.

52. 5 (lima) lembar copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1110012031973, nama GREGORIUS AJI SENTOSA periode 18 November 2011 s.d. 31 Desember 2014.

53. 12 (dua belas) lembar copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1260004019930, nama GREGORIUS AJI SENTOSA periode 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2014.

54. 1 (satu) bundel copy legalisir Daftar Harga Satuan Upah, Bahan, Pekerjaan (HSPK) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Agam dan Harga

Hal 218 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Triwulan III (September) tahun 2010.

55. 1 (satu) bundel copy legalisir Daftar Harga Satuan Upah, Bahan, Pekerjaan (HSPK) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Agam dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Triwulan III (September) tahun 2011.

56. 1 (satu) bundel copy legalisir Daftar Harga Satuan Upah, Bahan, Pekerjaan (HSPK) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Agam dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Triwulan III (September) tahun 2012

57. 1 (satu) bundel fc dokumen surat penawaran harga dan daftar analisa pekerjaan atap baja ringan gonjong IPDN Baso TA 2011 dari sdr Sudiswar

58. 1 (satu) bundel copy Dokumen Analisa Harga Satuan dan Barang, Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, PT. Bina Karya (Persero).

59.1 (satu) lembar copy Pengumuman Prakuilifikasi Nomor: 08/Peng/P3/KK/KDN/V/2011 Iklan Harian: Koran Tempo Hal: F9, Hari/Tanggal: Senin, 30 Mei 2011, Perihal: Pengumuman PQ/Lelang.

60. 1 (satu) bundel copy dokumen terkait Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, Tahun Anggaran 2011, yang terdiri dari:

a) Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis Nomor: 169/BA/EV/KK/KDN/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011.

b) Pengumuman Peringkat Teknis Nomor: 181/Peng/P3/KK/KDN/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011,

61.1 (satu) lembar copy Surat Setjen Kemendagri Nomor: 175/Und/KK/KDN/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011, perihal Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II, ditujukan kepada PT. Utama Karya, PT. Wijaya Karya dan PT. Wakita Karya. Ditandatangani oleh MOHAMMAD NOVAL, ST., Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi di Lingkungan Setjen Kemendagri;

62. Copy Dokumen yang terdiri dari:

a) 2 (dua) lembar copy Surat PT. Utama Karya, Divisi Gedung, Nomor HK.DG/A.1357/TENDER/066 tanggal 12 Agustus 2011

Hal 219 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, perihal Penawaran Harga untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat. Ditandatangani oleh Ir. BUDI RACHMAT K. MM., General Manager Divisi Gedung, PT. Utama Karya.

b) 2 (dua) lembar copy dokumen Rekapitulasi Biaya, nilai pembulatan Rp 125,686,000,000.00 ditandatangani di Jakarta tanggal 12 Agustus 2011 oleh Ir. BUDI RACHMAT K. MM., General Manager Divisi Gedung, PT. HK.

63. 1 (satu) bundel copy dokumen terkait Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, Tahun Anggaran 2011, yang terdiri dari:

- a) Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga Nomor: 144/BA/PPH/KK/KDN/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011.
- b) Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Harga Nomor: 177/BA/EV/KK/KDN/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011.
- c) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 180/BA/EV/KK/KDN/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

64.1 (satu) lembar copy Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 011/3438/SJ, tanggal 13 September 2011, perihal Persetujuan Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemendagri, ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI, Menteri Dalam Negeri selaku Pengguna Anggaran;

65.1 (satu) lembar copy Pengumuman Pemenang Nomor: 299/Peng/P3/KK/KDN/IX/2011 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, ditandatangani di Jakarta tanggal 13 September 2011 oleh MOHAMMAD NOVAL, ST., Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal.

66. 1 (satu) lembar copy Surat Setjen Kemendagri, Nomor: 027/1057,PAKPA/IX/2011 tanggal 21 September 2011 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, ditujukan kepada Direktur PT. Utama Karya (Persero), ditandatangani

Hal 220 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ir. DUDY JOCOM, Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

67. 1 (satu) bundel copy Nota Dinas Nomor : 562/PBMN/IX/12 tanggal 31 Oktober 2011 Perihal : Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi sumatera Barat Minggu kelima
68. 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 027/1820.3/BASTPHP/PAKPA/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011
 - b. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Kesanggupan a.n. Ir. Budi Rachmat Kurniawan.MM, Jabatan : General Manager PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung
69. 5 (lima) lembar copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (Tahap III) Nomor : 027/1761.2/BASTPHP/PAKPA/XII/2011 Tanggal 9 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 06/BAPKP-HKDG/IPDN BT/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011
70. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan Pelaksana Nomor: 027/2023/BAST/PAKPA/XII/2011 Tanggal: 29 Desember 2011, Pekerjaan: Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Lokasi: Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
71. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Dalam Masa Pemeliharaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Nomor: 534/BAP/PAKPA/VIII/2012 Tanggal: 6 Agustus 2012.
72. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima II Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Nomor: 027/1561/BAST/VIII/2012 Tanggal: 7 Agustus 2012
73. 1 (satu) bundel copy Kwitansi, Kwitansi Nomor: 01/U.Muka/IPDN/September/2011 Tanggal 28 September 2011, Dari: Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sebesar Rp. 25.137.200.000,-, Untuk Pembayaran: Pembayaran Uang Muka Pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan SPMK Nomor: 027/1078/PAKPA/IX/2011 dan Kontrak Nomor: 011/1075/PAKPA/IX/2011 Tanggal 23 September 2011, MAK.010.01.02-1224.01.011.533111.

Hal 221 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor: HK.DG/R.4100/DIV.C/325 Tanggal 30 November 2011 Perihal: Pembayaran Tahap Pertama Pekerjaan Kostruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat TA 2011.
75. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 03/Tahap ke-2/IPDN/XII/2011 Tanggal 30 Nopember 2011, Dari: Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sebesar Rp. 30.164.640.000,-, Untuk Pembayaran: Pembayaran Tahap Kedua Pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kostruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan SPMK Nomor: 027/1078/PAKPA/IX/2011 dan Kontrak Nomor: 011/1075/PAKPA/IX/2011, Tanggal 23 September 2011, MAK.010.01.02-1224.01.011.533111 dan Progress 55,5998%.
76. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: S45627T/133/110 Tanggal 20-10-2011.
77. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: S84138T/133/110 Tanggal 14-12-2011.
78. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 160439X/133/110 Tanggal 22-12-2011.
79. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 163654X/133/110 Tanggal 27-12-2011.
80. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 164934X/133/110 Tanggal 29-12-2011.
81. 1 (satu) bundel copy Dokumen dalam Map Plastik yang terdiri dari:
- 1 (satu) bundel copy Daftar Suplier Item Dominan (SKBDN).
 - 1 (satu) bundel copy Daftar Kontrak Subkontraktor Divisi dan Realisasi Tagihan Tahun 2011 - 2012.
 - 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 01/U.Muka/IPDN/September/2011 Tanggal 28 September 2011 Sejumlah Rp. 25.137.200.000,- Untuk Pembayaran: Pembayaran Uang Muka Pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kostruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan SPMK Nomor: 027/1078/PAKPA/IX/2011 dan Kontrak Nomor: 011/1075/PAKPA/IX/2011, Tanggal 23 September 2011, MAK.010.01.02-1224.01.011.533111.

Hal 222 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor: HK.DG/R.4100/DIV.C/325 Tanggal 30 Nopember 2011 Perihal: Pembayaran Tahap Pertama Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera barat TA 2011 (Kwitansi Nomor: 01/Tahap ke-1/IPDN/XI/2011 Tanggal 30 Nopember 2011 Sejumlah Rp. 20.109.760.000,- Untuk Pembayaran: Pembayaran Tahap Pertama Pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kostruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan SPMK Nomor: 027/1078/PAKPA/IX/2011 dan Kontrak Nomor: 011/1075/PAKPA/IX/2011, Tanggal 23 September 2011, MAK.010.01.02-1224.01.011.533111 dan Progress 25,3961%).
- e. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 03/Tahap ke-2/IPDN/XII/2011 Tanggal 30 Nopember 2011 Sejumlah Rp. 30.164.640.000,- Untuk Pembayaran: Pembayaran Tahap Kedua Pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kostruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan SPMK Nomor: 027/1078/PAKPA/IX/2011 dan Kontrak Nomor: 011/1075/PAKPA/IX/2011, Tanggal 23 September 2011, MAK.010.01.02-1224.01.011.533111 dan Progress 55,5998%).
- f. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 160439X/133/110 Tanggal 22-12-2011.
- 82.3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penjamin yang ditandatangani oleh Ir. BUDI RACHMAT KURNIAWAN, MM tanggal 18 April 2012
- 83.2 (dua) lembar copy Jaminan Bank (Bank Garansi) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No. 032917110284 dengan nilai Rp. 20.109.760.000 (Dua puluh Milyar Seratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- 84.1 (satu) lembar copy Bank Garansi (Jaminan Pemeliharaan) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor No. 032917110288 dengan nilai Rp. 6.284.300.000,- (Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- 85.3 (tiga) lembar copy buku daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, diterbitkan oleh : Ikatan Notaris Indonesia 2006

Hal 223 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86.1 (satu) bundel asli Anggaran Rencana Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Baso-Kab. Agam No. Karya : K.09.016 PT. Utama Karya
- 87.1 (satu) odner warna Putih berisikan dokumen BQ Proyek IPDN Baso
- 88.1 (satu) lembar copy Master Schedule Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Prov. Sumatera Barat di Kabupaten Agam PT. Utama Karya (Persero) tertanggal 29 Desember 2011.
- 89.1 (satu) lembar copy Master Schedule Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Prov. Sumatera Barat di Kabupaten Agam PT. Utama Karya (Persero) tertanggal 23 September 2011 (tidak ada tanda tangannya).
- 90.1 (satu) bundel dokumen gambar kerja/shop drawing untuk pemasangan atap pada gedung auditorium gedung administrasi, Rumah doa (T125), serta rumah dinas (T 72)
- 91.3 (tiga) lembar copy Jadwal Penyelesaian dan Monitoring Gedung Administrasi Proyek IPDN Kabupaten Agam – Sumatera Barat (Januari 2012 dan Pebruari 2012).
- 92.6 (enam) lembar copy Jadwal Penyelesaian dan Monitoring Gedung Administrasi Proyek IPDN Kabupaten Agam – Sumatera Barat (Oktober 2011, November 2011 dan Desember 2011).
- 93.1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 05/LKP-HKDG/IPDN BT/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampirannya.
- 94.1 (satu) bundel map merah yang didepannya terdapat print out Rekapitulasi Prestasi Mingguan Kemajuan Pekerjaan Periode : 15 (Lima Belas) Tanggal 30 Desember s/d 5 Januari 2012 Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Lokasi Kabupaten Agam
- 95.3 (tiga) lembar Rekapitulasi Prestasi Kemajuan Pekerjaan Tanggal 03 April 2012 yang dibuat oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Arkitek Team Empat ditandatangani oleh Dedi Junaidi selaku Site Manager
- 96.4 (empat) lembar printout capture blackberry messenger display name: BR | Budi HK, Dikirim Sel @ 19:58 - 22:51.
- 97.5 (lima) lembar copy Pengesahan Direksi P.T. Utama Karya (Persero) Tentang Anggaran Rencana Pelaksanaan, Berdasarkan Rapat Eksekutif Pelaksanaan (REP) tgl. 28 Oktober 2011.

Hal 224 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98.1 (satu) bundel copy Foto Progres 100% Proyek Pembangunan IPDN Sumatera Barat.
- 99.1 (satu) bundel asli dokumen foto dokumentasi pekerjaan atap baja ringan gonjong IPDN Baso TA 2011
100. 1 (satu) bundel dokumen asli Progress Visual Sampai Tanggal 11 Maret 2012 Proyek Pembangunan Kampus IPDN Bukit Tinggi Sumatera Barat Konsultan Manajemen Konstruksi Arkitek Team Empat dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
101. 1 (satu) bundel print out Lporan Pemeriksaan Lapangan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Regional di Kabupaten Agam, Sumatera barat Tanggal 6 Januari 2013
102. 1 (satu) bundel dokumen ASLI Pengujian Material Urugan Pilihan Pekerjaan Parkir dan Jalan Lingkungan Kampus IPDN di Baso PT Utama Karya Oktober 2011.
103. 1 (satu) bundel dokumen ASLI Laporan Pelaksanaan Pengujian Dinamis Pondasi Tiang Pancang dengan Metode Pile Driving Analyzer (PDA) Test Doc.No.080/PDA-HK/SB/XI/2011.
104. 1 (satu) bundel copy Surat No. 050/4117/SJ Perihal: Rancangan Renstra Depdagri Tahun 2010-2014 Tanggal 20 Nopember 2009, Rancangan Renstra DepdagriTahun 2010-2014: Surat Menteri Dalam Negeri kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi dan Kepala UKP4.
105. 1 (satu) bundel copy Surat No. 050/4661/SJ Perihal: Renstra Depdagri Tahun 2010-2014 Tanggal 28 Desember 2009, Penyempurnaan Rancangan Renstra Depdagri Tahun 2010-2014: Surat Menteri Dalam Negeri kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi dan Kepala UKP4.
106. 1 (satu) bundel copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 20 Januari 2010, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Lampiran Buku 11: Rencana Tindak Kementerian/Lembaga Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 Per Kementerian/Lembaga, Kementerian Dalam Negeri: 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur Kernenterian Dalam Negeri.
107. 1 (satu) bundel Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi, No. 050/265/SJ Perihal: Renstra

Hal 225 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 Tanggal 30 Januari 2010 beserta lampirannya.

108. 1 (satu) buku copy Permendagri No. 16 Tahun 2010 Tanggal 30 Januari 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014.
109. 1 (satu) bundel copy Materi Sidang Kabinet tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 lingkup Kemendagri, Tanggal 24 Maret 2010.
110. 1 (satu) bundel copy Materi Sidang Kabinet Paripurna Bidang Perekonomian tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 lingkup Kemendagri, Tanggal 5 April 2010.
111. 1 (satu) bundel copy Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Republik Indonesia perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 No. 0181/M.PPN/04/2010 dan No. SE-120/MK/2010 Tanggal 6 April 2010.
112. 1 (satu) bundel copy TOR Pembangunan Sarpras Sarana Fisik Kampus IPDN Daerah 4 (empat) Daerah TA. 2011, April 2010, beserta lampiran berupa Rencana Anggaran Biaya dan Laporan Akhir Master Plan Kampus IPDN Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Riau.
113. 1 (satu) bundel copy Trilateral Meeting Rencana Kerja Kernendagri Tahun 2011, 12-15 April 2010.
114. 1 (satu) bundel copy Materi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) lingkup Kernenterian Dalam Negeri Tahun 2011, 28 April 2010.
115. 1 (satu) bundel copy Surat Penyampaian Pagu Indikatif Hasil Trilateral Meeting dan Sekretaris Jenderal kepada Komponen Kemendagri No. 900/17131/SJ Tanggal 30 April 2010.
116. 1 (satu) bundel copy Rencana Kerja Pemerintah (RKP) lingkup Kernendagri, 3 Mei 2010.
117. 1 (satu) bundel copy Alokasi Pagu Indikatif Tahun 2011 Kernenterian Dalam Negeri Berdasarkan Program, Satker dan Alokasi Anggaran, 4 Mei 2010.
118. 1 (satu) bundel copy Perpres No. 29 Tahun 2010 Tanggal 14 Mei 2010, Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
119. 1 (satu) bundel copy Materi Kernenterian Dalam Negeri pada Rapat Dengar Pendapat Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 dengan Komisi II DPR RI, 3 Juni 2010.

Hal 226 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) bundel copy Materi Menteri Dalam Negeri pada Sidang Kabinet Paripurna Bidang Perekonomian tentang APBN Tahun 2010 dan RAPBN Tahun 2011, 10 Juni 2010.
121. 1 (satu) bundel copy Materi Kementerian Dalam Negeri pada Rapat Dengar Pendapat Penyempurnaan Alokasi Anggaran Menurut Program dan Kegiatan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 (Komisi 11 DPR RI), 16 Juni 2010.
122. 1 (satu) bundel copy Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011 No. SE-294/MK.02/2010 Tanggal 24 Juni 2010.
123. 1 (satu) bundel copy RKA-K/L Tahun 2011 Berdasarkan Pagu Sementara.
124. 1 (satu) bundel copy Materi Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri TA. 2011, 2 September 2010, 20 September 2010.
125. 1 (satu) bundel copy Dokumen Kesepakatan Trilateral Meeting ke 2 Tahun 2010 Berdasarkan Pagu Sementara Kemendagri Tahun 2011, 11-12 Oktober 2010.
126. 1 (satu) bundel copy Materi Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri TA. 2011, 21 Oktober 2010.
127. 1 (satu) bundel copy Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Definitif Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011 No. SE-676/MK.02/2010 Tanggal 3 November 2010.
128. 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, 19 November 2010.
129. 1 (satu) bundel copy Pagu Definitif Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 (Persetujuan Komisi II DPR RI), 22 November 2010.
130. 1 (satu) bundel copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2011 tanggal 30 November 2010, beserta Lampiran 1 Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2011 Menurut Organisasi, Bagian Anggaran, Unit Organisasi, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Jenis Belanja, dan Sumber Dana (010) Kementerian Dalam Negeri (010.01) Sekretariat Jenderal Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Hal 227 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) bundel copy Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri (RKA-K/L) Tahun 2011 Berdasarkan Pagu Definitif, 1 Desember 2010.
132. 1 (satu) bundel copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 No. 2863/010-01.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010.
133. 1 (satu) buku copy Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011, Nomor 5 Tahun 2011 Tanggal 21 Januari 2011.
134. 6 (enam) lembar copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tanggal 12 Januari 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 Tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan.
135. 2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134/M Tahun 2010 Tanggal 16 September 2010 (SK Pengangkatan Sdr, Dr. Ir. Yuswandi A. Temenggung, M.Sc., M.A. sebagai Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri).
136. 2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89/M Tahun 2014 Tanggal 13 Juni 2014 (SK Pengangkatan Sdr, Dr. Ir. Yuswandi A. Temenggung, M.Sc., M.A. sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri).
137. 2 (dua) lembar copy Petikan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.22-514 Tahun 2004 Tanggal 29 Juni 2004 (SK Pengangkatan Sdr, Dr. Ir. Yuswandi A. Temenggung, M.Sc., M.A. sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran pada Sekretariat Jendral Departemen Dalam Negeri).
138. 2 (dua) lembar copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2004 Tanggal 6 Oktober 2004 Tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan.
139. 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
140. 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Hal 228 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
142. 1 (satu) Bundel Copy Perjanjian/Kontrak Kerja tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Di Kabupaten Agam tahun Anggaran 2011 Antara Kementerian Dalam Negeri RI dan PT. Utama Karya (Persero), Nomor Kontrak : 011/1075/PAKPA/IX/2011 Tanggal 23 September 2011.
143. 1 (satu) bundel asli Perjanjian/Kontrak Kerja tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011, antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan PT. Utama Karya (Persero). Nomor Kontrak: -11/1075/PAKPA/IX/2011, tanggal 23 September 2011.
144. 1 (satu) bundel copy Perjanjian/Kontrak Kerja Tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011 Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan PT. Utama Karya (Persero) Nomor Kontrak: 011/1075/PAKPA/IX/2011 Tanggal: 23 September 2011
145. 1 (satu) bundel copy Pekerjaan Tambah Kurang Contract Change Order (C.C.O) Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011.
146. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian/ Kontrak Kerja tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011 Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dan PT. Utama Karya (Persero) dengan nomor kontrak : 011/ 1075/ PAKPA/ IX/ 2011 tanggal 23 September 2011 yang pada pasal 18 memuat Sanksi dimana pada poin (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka atas keterlambatan ini PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5 % (lima per seratus) dari nilai kontrak
147. 3 (tiga) lembar copy Addendum Perjanjian/ Kontrak Kerja Tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatra Barat Di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011 antara

Hal 229 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dan PT Utama Karya (Persero), Nomor Kontrak: 011/1682/PAKPA/XII/2011, tanggal 7 Desember 2011.

148. 1 (satu) bundel copy Dokumen IPDN Kampus Sumatera Barat TA 2011 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) bundel copy Dokumen Kontrak (Perjanjian/Kontrak Kerja Tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011 antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan PT. Utama Karya (Persero) Nomor Kontrak : 011/1075/PAKPA/IX/2011 Tanggal 23 September 2011
- b. 1 (satu) bundel copy Permohonan Pembayaran dari PT. Utama Karya yang terdiri dari :
 - aa. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor : KH.D/R.2230/DIV.C/343 Tanggal 14 Desember 2011 perihal : Pembayaran Tahap Keempat Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat TA 2011
 - bb. 2 (dua) bundel copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 027/2078/PAKPAK/IX/2011 Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011
- c. 1 (satu) bundel copy Daftar Jasa Konsultansi (Daftar Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Bukittinggi Tahun Anggaran 2011
- d. 1 (satu) bundel copy Persetujuan Penetapan Menteri Dalam Negeri Perihal Penetapan Pemenang (Surat Nomor 011/3438/SJ Tanggal 13 September 2011 Perihal : Persetujuan Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat
- e. 1 (satu) bundel copy Pengumuman Pemenang Lelang (Pengumuman Pemenang Nomor : 229/Peng/P3/KK/KDN/IX/2011 Tanggal 13 September 2011 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011
- f. 1 (satu) bundel copy SK Penetapan Panitia Lelang (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 027-129 Tahun 2011 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011

Hal 230 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 2 (dua) lembar copy dokumen Dasar Penetapan Kontrak Lumpsum
150. 3 (tiga) lembar copy dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2010 nomor : 0001/010-01.1/-/2010 tanggal 31 desember 2009
151. 16 (enam belas) lembar copy dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2011 nomor : 2863/010-01.1.01/00/2011 tanggal 20 desember 2010
152. 1 (satu) map kuning KABITA dengan tulisan “ Baru” pada sudut atas kanan dan kiri serta berjudul “Perencana Sumatera Barat (Ulang) 2011
153. 1 (satu) map kuning KABITA dengan tulisan “ Lama” pada sudut atas kanan dan kiri serta berjudul “Perencana Sumatera Barat 2011
154. 1 (satu) bundel asli dokumen pelelangan Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat (berita acara) yang lembar pertamanya berupa Surat Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal Kemendagri Nomor : 027/420/PAKPA/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 Hal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat
155. 1 (satu) lembar copy Dokumen 7, Perhitungan Kemampuan Dasar Perusahaan (KD) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
156. 1 (satu) lembar copy Perhitungan SKK, SKP dan KD, PT. Nindya Karya (Persero).
157. 2 (dua) lembar copy Formulir Isian Perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP) Penyedia Jasa Kualifikasi, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.
158. 3 (tiga) lembar copy Daftar Sisa Kemampuan Nyata (SKN), SKK, & KD Jasa Pemborongan, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.
159. 4 (empat) lembar copy Dokumen Prakualifikasi, Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), PT. Waskita Karya (Persero).
160. 2 (dua) lembar copy Perhitungan SKK, SKP & KD, PT. PP (Persero) Tbk.
161. 1 (satu) lembar copy surat nomor 011/2153/SJ tanggal 9 Juni 2011 perihal Permintaan Pendampingan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampus IPDN

Hal 231 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) lembar copy surat S-311/D4/1/2011 tanggal 12 Juli 2011 Hal Reviu dan Supervisi atas Pengadaan Barang dan Jasa dan 1 (satu) lembar lampiran Surat Tugas Nomor : ST-415/D4.01/2010 tanggal 12 Juli 2011

163. 2 (dua) lembar copy surat nomor S-484/D4.1/2011 tanggal 3 Agustus 2011, hal Reviu dan Supervisi Pengadaan Barang dan Jasa

164. 1 (satu) bundel dokumen dalam map berwarna kuning berisikan :

a. 1 (satu) bundel dokumen berisikan

(1) 2 (dua) lembar copy dokumen keputusan menteri dalam negeri nomor : 892.1-829 tahun 2009 tentang Lokasi Pembangunan Kampus IPDN di Daerah

(2) 2 (dua) lembar copy dokumen keputusan menteri dalam negeri nomor : 425.12-22 tahun 2009 tentang Lokasi Kampus IPDN Daerah

(3) 2 (dua) lembar copy dokumen keputusan menteri dalam negeri nomor : 011-496 tahun 2009 tentang Penunjukkan Unit Kerja Pelaksana Pembangunan Kampus IPDN Daerah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri

(4) 1 (satu) lembar copy dokumen Nota Dinas nomor : 051/149/PAKPA/XII/09 perihal Laporan Hasil Survey Lokasi Rencana Pembangunan IPDN dan Net Konsep Surat Sekretaris Jenderal Depdagri Kepada Para Gubernur di Empat Provinsi Perihal Pemberitahuan Lokasi Pembangunan Kampus IPDN Di tingkat Kabupaten

(5) 1 (bundel) copy dokumen Laporan Survey Lokasi Pembangunan IPDN Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

b. 1 (satu) bundel dokumen di clip berisikan :

(1) 2 (dua) lembar copy dokumen surat nomor : S-370/D4/01/2011 perihal Hasil Review Proses Pengadaan Gedung Kampus IPDN Pada 4 Lokasi di Daerah Tahun ANggaran 2011 tanggal 22 Agustus 2011

(2) 5 (lima) lembar copy dokumen Penjelasan Panitia terkait Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Khususnya Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di 3 Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat) tahun anggaran 2011

Hal 232 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



- (3) 2 (dua) lembar copy dokumen Nota Dinas Nomor : 21/ND/KK/KDN/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Laporan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di 4 Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat dan Riau) tahun anggaran 2011
- (4) 1 (satu) lembar copy dokumen Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran Atas Tambahan Persyaratan SBU Gred – 7 tanggal 8 September 2011 yang ditandatangani oleh DUDY JOCOM
- (5) 4 (empat) lembar copy dokumen Nota Dinas Nomor : 692/SJ/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Penjelasan Hasil Reviu Proses Pengadaan Gedung Kampus IPDN di 4 Daerah tahun anggaran 2011 oleh BPKP.
- c. 10 (sepuluh) lembar copy dokumen Laporan BPKP nomor : LAP-506/D4.01/2011 laporan Hasil Reviu Proses Pengadaan Gedung Kampus IPDN pada Empat Lokasi di Daerah tahun anggaran 2011 tanggal 19 Agustus 2011.

165. 9 (sembilan) lembar fotokopi Simpulan Hasil Reviu dan Supervisi atas Proses Pengadaan Gedung Kampus IPDN pada Empat Lokasi di Daerah Tahun Anggaran 2011, Lampiran surat Nomor: S- (kosong)/D4/01/2011 tanggal: (kosong) Agustus 2011.

166. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait kegiatan rivi u pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN pada empat lokasi di daerah Tahun Anggaran 2011, dimana diantaranya terdapat:

1. Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 011/2153/SJ perihal Permintaan Pendampingan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampus IPDN, tanggal 9 Juni 2011, ditujukan kepada Kepala BPKP cq Deputy Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendagri DIAH ANGGRAENI.
2. Fotokopi Surat Deputy Pengawasan bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Nomor: S-311/D4/1/2011 tanggal 12 Juli 2011, perihal: Reviu dan Supervisi atas Pengadaan Barang dan Jasa, serta Surat Tugas Nomor: ST-415/D4.01/2010 tanggal 12 Juli 2011.
3. Fotokopi Surat Deputy Pengawasan bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Nomor: S-484/D4/1/2011 tanggal 03 Agustus

Hal 233 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, perihal: Reviu dan Supervisi atas Pengadaan Barang dan Jasa, serta Surat Tugas Nomor: ST-483/D4.01/2010 tanggal 03 Agustus 2011.

4. Fotokopi Kertas Kerja Evaluasi BPKP, Daftar Perbandingan Pekerjaan, kegiatan: Pembangunan Gedung Kampus Baso IPDN SUMBAR tahun anggaran 2011, dibuat oleh: M. ROFIQ, direview oleh: Marselina Tetty S.
167. 1 (satu) bundel copy Dokumen Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat PT. Bina Karya (Persero)
168. 1 (satu) bundel copy Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat PT. Bina Karya (Persero)
169. 1 (satu) bundel copy Dokumen Bill of Quantity, Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, PT. Bina Karya (Persero).
170. 1 (satu) bundel copy Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat TA. 2011, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
171. 1 (satu) bundel copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat TA. 2011, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
172. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat TA. 2011, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
173. 1 (satu) bundel copy Gambar Perencanaan Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat PT. Bina Karya (Persero)
174. 1 (satu) budel As Build Drawing pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam TA 2011.
175. 1 (satu) bundel copy Cut Off-Karya Rampung Bulan Oktober 2012 Proyek Kampus IPDN Baso – Sumatera Barat PT. Utama Karya
176. 1 (satu) bundel copy Cut Off – Karya Rampung Bulan Agustus 2013 Proyek IPDN Baso- Sumatera Barat PT. Utama Karya
177. 1 (satu) bundel Dokumentasi Photo Nama Proyek Pembangunan Kampus IPDN-Baso Periode Desember 2011 s/d Maret 2012
178. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Proyek pembangunan gedung kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun 2011.

Hal 234 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke I Periode 23 September s.d. 27 Oktober 2011, Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, TA 2011.
180. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke II Periode 28 Oktobers.d. 01 Desember 2011, Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, TA 2011.
181. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke III Periode 2 Desember s.d. 29 Desember 2011, Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, TA 2011.
182. 1 (satu) bundel copy laporan Mingguan Minggu Ke: 7 (Tujuh) Tanggal: 4 November s/d 10 November 2011 Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Kecamatan Baso - Kabupaten Agam, Utama Karya (Persero) Divisi Gedung, arkitek team empat.
183. 1 (satu) buah ASLI buku Laporan Mingguan ke-8 Periode 11 November s/d 17 November 2011 Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011.
184. 1 (satu) bundel copy laporan Mingguan Minggu Ke: 9 (Sembilan) Tanggal: 18 November s/d 24 November 2011 Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Kecamatan Baso - Kabupaten Agam, Utama Karya (Persero) Divisi Gedung, arkitek team empat.
185. 1 (satu) bundel copy laporan Mingguan Minggu Ke: 11 (Sebelas) Tanggal: 2 Desember s/d 8 Desember 2011 Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Kecamatan Baso - Kabupaten Agam, Utama Karya (Persero) Divisi Gedung, arkitek team empat.
186. 1 (satu) buah Copy buku Laporan Mingguan ke-12 Periode 09 Desember s/d 15 Desember 2011 Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011.
187. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Akhir Master Plan Kampus IPDN Regional Baso Bukit Tinggi Sumatera Barat Desember 2009 LPPM ITB Bandung
188. 1 (satu) bundel buku Pembangunan Kampus IPDN 4 Provinsi (Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara) Tahun Anggaran 2011 Kementerian Dalam Negeri Sekretariat Jenderal

Hal 235 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Regional Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat Tahun Anggaran 2010
190. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Regional Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 PT. Bina Karya (Persero).
191. 1 (satu) bundel copy Laporan Konsepsi Desain Kampus IPDN Baso-Sumatera Barat Tahun 2010 PT. Billitonica Indomatra Consultant
192. 1 (satu) bundel copy Dokumen Rencana Kerja Dan Syarat (Tahap I) Kampus IPDN Baso-Provinsi Sumatera Barat PT. Billitonica Indomatra Consultant
193. 1 (satu) bundel copy Dokumen Tahap I (Administrasi & Teknis) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Jakarta 02 Agustus 2011, PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung.
194. 1 (satu) bundel copy Dokumen Kualifikasi (1 – 2) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Jakarta 14 Juni 2011, PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung.
195. 1 (satu) bundel copy Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Rekaman, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.
196. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuifikasi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Buku I, PT. Nindya Karya (Persero).
197. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuifikasi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Buku II, PT. Nindya Karya (Persero).
198. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuifikasi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.
199. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuifikasi Vol. 1 of 2 Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Rekaman, PT. Waskita Karya (Persero).
200. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuifikasi Vol. 2 of 2 Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Rekaman, PT. Waskita Karya (Persero).

Hal 236 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) bundel copy Dokumen Administrasi & Teknis Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Rekaman, PT. Waskita Karya (Persero).
202. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat, Rekaman, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.
203. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pembangunan: Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat DIPA APBN Tahun Anggaran 2011, PT. PP (Persero) Tbk – Cabang IX.
204. 1 (satu) bundel copy Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pembangunan: Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumbar DIPA APBN Tahun Anggaran 2011, PT. PP (Persero) Tbk – Cabang IX.
205. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Nomor: 018/PRA/KK/KDN/III/2011 Tanggal: 28 Maret 2011, Paket Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, Kegiatan: Review Desain dan Pengawasan Berkala, Sumber Dana: DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tahun Anggaran: 2011.
206. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Bina Karya (Persero).
207. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Kampus IPDN Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011 PT. Bina Karya (Persero)
208. 1 (satu) bundel copy Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Indomas Mulia.
209. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat April 2011, PT. Indah Karya (Persero).
210. 1 (satu) bundel copy Dokumen Administrasi dan Teknis Paket Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung IPDN di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Yodya Karya (Persero).

Hal 237 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Rekayasapratama Grhayasaciptaloka.
212. 1 (satu) bundel copy Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Review Desain dan Pengawasan Berkala Tahun Anggaran 2011, Arkonin.
213. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Review Desain dan Pengawasan Berkala Tahun Anggaran 2011, Arkonin.
214. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan: Perencanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun: 2011, PT. Cakra Manggilingan Jaya
215. 1 (satu) bundel copy Data Administrasi Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Indomas Mulya.
216. 1 (satu) bundel copy Data Teknis Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Indomas Mulya.
217. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011 PT. Bina Karya (Persero)
218. 1 (satu) bundel copy Dokumen Administrasi Dan Penawaran Teknis Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011 PT. Bina Karya (Persero).
219. 1 (satu) bundel copy Dokumen Proposal Teknis Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011 PT Bina Karya (Persero)
220. 1 (satu) Bundel copy Kontrak Nomor Kontrak : 011/420/PAKPA/VII/2011 Tanggal 6 Juli 2011 untuk Jasa Konsultasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kab. Agam Antara Pusat Administrtasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 dan PT. Bina Karya (persero).

Hal 238 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 1 (satu) bundel copy dokumen tagihan/pencairan PT. Bina Karya Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencana Pembangunan Gedung IPDN Kampus Provinsi Sumatra Barat Tahun Anggaran 2011.
222. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, Arkitek Team Empat.
223. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Kabupaten Agam, Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Bita Enarcon Engineering.
224. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Rancang Persada.
225. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Yodya Karya (Persero).
226. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Gubahlaras.
227. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, Gubahlaras.
228. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Kegiatan: Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Wahanacipta Bangunwisma.
229. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Kegiatan: Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Wahanacipta Bangunwisma.
230. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan

Hal 239 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, PT. Rancang Persada.

231. 1 (satu) bundel copy Dokumen Administrasi & Teknis Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat 2011, PT. Ciriajasa Cipta Mandiri.
232. 1 (satu) bundel copy Dokumen Prakuilifikasi Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat 2011, PT. Ciriajasa Cipta Mandiri.
233. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian/Kontrak Kerja Tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011 Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan PT. Arkitek Team Empat Nomor : 011/22/PAKPA/VI/2011 Tanggal 6 Juni 2011
234. 1 (satu) bundel copy Perjanjian / Kontrak Kerja Tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Di Kab. Agam Tahun Anggaran 2011 antara Kementerian Dalam Negeri RI dan PT. Arkitek Team Empat, Nomor Kontrak : 011/22/PAKPA/VI/2011 Tanggal 6 Juni 2011.
235. 1 (satu) bundel copy dokumen tagihan/pencairan PT. Arkitek Team Empat Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung IPDN Kampus Provinsi Sumatra Barat Tahun Anggaran 2011.
236. 1 (satu) copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.2343/SPP/295 Tanggal 4 Oktober 2011 Pekerjaan Infrastruktur Area Perpustakaan & Poliklinik antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Yulian Berkah Abadi untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
237. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK – DG / A.2085 / SPP / 240 Tanggal: 8 September 2011, Pekerjaan Infrastruktur Area Asrama antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan CV. Prima Karya Sentosa untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat
238. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK – DG / A.2344 / SPP / 296 Tanggal: 4 Oktober 2011, Pekerjaan Infrastruktur Area Menza antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi

Hal 240 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gedung dengan CV. Prima Karya Sentosa untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.

239. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK – DG / A.2101 / SPP / 245 Tanggal: 14 Oktober 2011, Pekerjaan Infrastruktur Area Auditorium antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan CV. Prima Karya Sentosa untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
240. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 4664 kepada CV. Prima Karya Sentosa sejumlah 524,000,000 Tanggal 16 November 2011.
241. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 5278 kepada CV. Prima Karya Sentosa sejumlah 2,000,000,000 Tanggal 27 Desember 2011.
242. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank Bukopin atas nama HUSAIN REDWIN NURLETTE No Rekening 0102038969 periode Desember 2011 s.d. Juni 2012
243. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-320/WPJ.04/KP.0903/2015, Nama: CV. Restu Kreasi Mandiri, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 02.143.028.5-016.000.
244. 1 (satu) lembar copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-02581/WPJ.04/KP.0903/2009, Nama: CV. Restu Kreasi Mandiri, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 02.143.028.5-016.000.
245. 1 (satu) lembar copy Surat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil Nomor: 01431/1.824.51, Nama Perusahaan: CV. Restu Kreasi Mandiri.
246. 1 (satu) bundel copy Akta Perseroan Komanditer “CV. Restu Kreasi Mandiri”, Nomor 15.-, Tanggal 7 September 2005.-.
247. 2 (dua) lembar copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kepada: Nur Wahid ST Sejumlah Uang: Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Untuk penerimaan, dengan rincian sebagai berikut: Perintisan Proyek IPDN Bukit Tinggi tanggal 03/05/2011.
248. 1 (satu) copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.1987/SPP/214 Tanggal 26 Oktober 2011 Pekerjaan Patung IPDN antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan Y. Sumartono,S.Sn untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011.

Hal 241 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero)
Kode & No. Dok: BBK W 42911 kepada J. Sumartono S. SN sejumlah
Rp. 42.484.000 Tanggal 08 November 2011.
250. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero)
Kode & No. Dok: W 3300 kepada Sumartono sejumlah Rp.
31.863.000 Tanggal 28-Mei-12.
251. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero)
Kode & No. Dok: BBK W 4418 kepada Muslim sejumlah Rp.
17.150.000 Tanggal 11-Nov-11.
252. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero)
Kode Kas/Bank: H 45 kepada Muslim sejumlah Rp. 40.002.240,00
Tanggal Jan-13.
253. 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen Surat Perjanjian Jual Beli
nomor : HK.DG/A.2047/SPP/235, tanggal 15 November 2011,
Pekerjaan Jual Beli Material Rangka Baja antara PT. HUTAMA KARYA
(Persero) dengan PT. SINARINDO MEGAH PERKASA untuk Proyek
Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di
Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011. -
254. 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen Addendum-I Surat
Perjanjian Jual Beli nomor : HK.DG/A.2047/SPP-ADD I/235, tanggal
15 Desember 2011, Pekerjaan Jual Beli Material Rangka Baja antara
PT. HUTAMA KARYA (Persero) dengan PT. SINARINDO MEGAH
PERKASA untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN
Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011. -
255. 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen Surat Perjanjian
Pemborongan nomor : HK-DG/A.2048/SPP/236, tanggal 16
November 2011, Pekerjaan Rangka Atap Baja antara PT. HUTAMA
KARYA (Persero) dengan PT. SINARINDO MEGAH PERKASA untuk
Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera
Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011. -
256. 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen Addendum-I Surat
Perjanjian Pemborongan nomor : HK-DG/A.2048/SPP-ADD I/236,
tanggal 15 Desember 2011, Pekerjaan Rangka Atap Baja antara PT.
HUTAMA KARYA (Persero) dengan PT. SINARINDO MEGAH
PERKASA untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN
Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011. -

Hal 242 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Perintah Mulai Kerja nomor : 004/HK-IPDN.BT/FES/SPMK/XI/2011 tanggal 15-Nov-11.
258. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Perintah Mulai Kerja nomor : 005/HK-IPDN.BT/FES/SPMK/XI/2011 tanggal 15-Nov-11.-
259. 2 (dua) lembar copy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan Rangka Atap Baja PT. Sinarindo Megah Perkasa Pada Proyek IPDN Provinsi Sumatera Barat tanggal 4 Mei 2012.
260. 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Rangka Baja Atap. -
261. 1 (satu) bundel Rekap Pembayaran Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Baja Sinarindo Megah Perkasa,PT.
262. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Rekening Koran Pinjaman BANK MANDIRI atas nama PT Sinarindo Megah Perkasa Nomor Rekening 60102003468 periode : -
- a. 1/11/11 s/d 30/11/11;
 - b. 1/12/11 s/d 30/12/11;
 - c. 1/01/12 s/d 31/01/12;
 - d. 1/02/12 s/d 29/02/12;
 - e. 1/10/12 s/d 31/10/12;
 - f. 1/02/13 s/d 28/02/13;
 - g. 1/05/13 s/d 31/05/13;
 - h. 1/06/13 s/d 30/06/13;
 - i. 1/08/13 s/d 31/08/13;
 - j. 1/03/14 s/d 31/03/14;
 - k. 1/04/14 s/d 30/04/14;
 - l. 1/07/14 s/d 31/07/14.
263. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK: B 2496 kepada PT. Sinarindo Megah Perkasa sejumlah 75.000.000 Tanggal Juli 2014.
264. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: W 1040 kepada PT. Sinarindo Megah Perkasa sejumlah Rp. 186.083.937 Tanggal 20-Feb-12.
265. 1 (satu) copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.151/SPP/013 Tanggal 17 Januari 2012 Pekerjaan GRC antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Gatrindo Jaya

Hal 243 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.

266. 1 (satu) copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.256/SPP/016 Tanggal 2 Pebruari 2012 Pekerjaan Rangka Baja Gerbang antara PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Gatrindo Jaya Abadi untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
267. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Kode & No. Dok: W 4240 kepada PT. Gatrindo Jaya Abadi sejumlah Rp. 99.012.509 Tanggal 26-Jul-12.
268. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 2624 kepada PT. Gatrindo Jaya Abadi sejumlah Rp. 50.000.000 Tanggal 25 April 2012.
269. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK: W 4540 kepada CV. Karya Jaya sejumlah 24.572.955 Tanggal 09-Agust-12.
270. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK 2842 kepada CV. Bimantara Utama sejumlah 9,151,509 Tanggal 21 Mei 2012.
271. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Kode & No. Dok: W 3776 kepada PT. Arungatra Cakrawala sejumlah Rp. 44.670.000,00 Tanggal ... Mei 2012.
272. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W (tidak jelas) kepada CV. Dua Putra Mandiri sejumlah 25,000,000 Tanggal 24 September 2012.
273. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Kode No. Dok: B 124 kepada CV. Duta Putra Mandiri sejumlah 36.218.287 Tanggal 03-Des-12.
274. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Kode No. Dok: B 126 kepada CV. Duta Putra Mandiri sejumlah 107.805.793 Tanggal 03-Des-12.
275. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 2463 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 25 – 05 – 2012, BNI 1116, Kredit Suplier JT PT Mandiri Unggul Pro Gd IPDN Sumbar DGD, Jumlah: Rp. 404,308,197.
276. 1 (satu) bundel asli dokumen Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor : HK-DG/St.1893/SPP/203 Tanggal 11 Oktober 2011 Pekerjaan

Hal 244 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektrikal Antara PT. Utama Karya Divisi Gedung dengan PT. Indah Yamamitra Persada Untuk Proyek IPDN Bukittinggi

277. 1 (satu) bundel copy Addendum – I Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor : HK-DG/St.2091/SPP-ADD-I/225 Tanggal : 14 Desember 2011 Pekerjaan Elektronik antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Indah Yamamitra Persada Untuk Proyek IPDN Bukit Tinggi.
278. 1 (satu) copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/St.2091/SPP/225 Tanggal 10 November 2011 Pekerjaan Elektronik antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Indah Yamamitra Persada untuk Proyek IPDN Bukit Tinggi.
279. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.2048/SPP/236 Tanggal 16 Oktober 2011, Pekerjaan Rangka Atap Baja antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Sinarindo Megah Perkasa untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011.
280. 1 (satu) bundel copy Addendum – I Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor : HK-DG/St.1893/SPP-ADD-I/203 Tanggal : 14 Desember 2011 Pekerjaan Elektrikal antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Indah Yamamitra Persada untuk Proyek IPDN Bukit Tinggi.
281. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 4287 kepada PT. Indah Yamamitra Persada sejumlah Rp. 866.700.000 Tanggal 08 November 2011.
282. 1 (satu) bundel copy Check List Pembayaran Suplier/Sub.Kont/Sewa Alat (*), Nama Karya: IPDN – Buting, Nama Rekanan: PT. Iyada, Jenis Pekerjaan: Elektrikal.
283. 1 (satu) bundel copy Routing Pencairan KMK Bank BTN Cabang Cawang, Patriapark kepada PT. Indah Yamamitra Persada sebesar 968,417,501.
284. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 1738 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 18 – 04 – 2012, Keterangan BTN 1116, PT. Yamamitra Persada, Pro Gedung IPDN Sumbang Kab Agam, DGD, Jumlah: Rp. 300,620,444.
285. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 3737 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 04 – 07 – 2012, BTN 1116,

Hal 245 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Indah Yamamitra Persada, JT.KS.Pro Gedung Kampus IPDN
Bukit Tinggi, Jumlah: Rp. 1,587,992,193.

286. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Serah terima – I Proyek Pembangunan IPDN Sumatera Barat, Pekerjaan: Elektrikal Sub-Kontraktor: PT. Indah Yamamitra Persada Tanggal 30 Desember 2011 beserta lampiran (Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/St.1893/SPP/203 Tanggal 11 Oktober 2011, Addendum – I Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/St.1893/SPP-ADD-I/203 Tanggal 14 Desember 2011 dan Addendum – II Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/St.1893/SPP-ADD-II/203 Tanggal 16 Desember 2011).
287. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Serah terima – I Proyek Pembangunan IPDN Sumatera Barat, Pekerjaan: Elektronik Sub-Kontraktor: PT. Indah Yamamitra Persada Tanggal 30 Desember 2011 beserta lampiran (Surat No.: 063/SP2K/JKC.I/III/2012 Tanggal 26 Maret 2012 Perihal: Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K), Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/St.2091/SPP/225 Tanggal 10 November 2011, Addendum – I Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/St.2091/SPP-ADD-I/225 Tanggal 14 Desember 2011).
288. 3 (tiga) lembar copy Surat No.: 056/SP2K/JKC.I/XII/2011 Tanggal 27 Desember 2011 Perihal: Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K).
289. 1 (satu) lembar copy Surat No.: 840/JKC.I/HCLU/IV/2012 Tanggal 11 April 2012 Perihal: Rincian Transaksi Pencairan KMK an. PT. Indah Yamamitra Persada.
290. 1 (satu) lembar copy Surat No.: 1179/JKC.I/HCLU/V/2012 Tanggal 14 Mei 2012 Perihal: Rincian Transaksi Pencairan KMK an. PT. Indah Yamamitra Persada.
291. 2 (dua) lembar copy Surat No.: 261/JKC.I/HCLU/II/2012 Tanggal 03 Februari 2012 Perihal: Rincian Transaksi Pencairan KMK an. PT. Indah Yamamitra Persada.
292. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Giro Bank BTN A/C. No: 00241-01-30-000187-7 a.n. PT. Indah Yamamitra Persada dengan rincian sebagai berikut:
- Periode: 01 Jan 12 – 31 Jan 12.
 - Periode: 01 Feb 12 – 29 Feb 12.
 - Periode: 01 Mar 12 – 31 Mar 12.

Hal 246 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode: 01 Apr 12 – 30 Apr 12.
- Periode: 01 May 12 – 31 May 12.
- Periode: 01 Jul 12 – 31 Jul 12.
- Periode: 01 Aug 12 – 31 Aug 12.
- Periode: 01 Sep 12 – 30 Sep 12.
- Periode: 1/10/12 – 1/10/12.
- Periode: 01 Nov 12 – 30 Nov 12.
- Periode: 01 Des 12 – 31 Des 12.

293. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Mandiri Syariah A/C. No: 7045020155 a.n. Indo Dayasurya Persada PT, Periode: 01 November s/d 30 November 2012 dan Periode: 01 Desember 2012.

294. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Giro Bank BTN A/C. No: 00241-01-30-000187-7 a.n. PT. Indah Yamamitra Persada dengan rincian sebagai berikut:

- Periode: 01 Jan 11 – 31 Jan 11.
- Periode: 01 Feb 11 – 28 Feb 11.
- Periode: 01 Mar 11 – 31 Mar 11.
- Periode: 01 Apr 11 – 30 Apr 11.
- Periode: 01 May 11 – 31 May 11.
- Periode: 01 Jun 11 – 31 Jun 11.
- Periode: 01 Jul 11 – 31 Jul 11.
- Periode: (tidak jelas).
- Periode: 01 Sep 11 – 30 Sep 11.
- Periode: 01 Okt 11 – 31 Okt 11.
- Periode: 01 Nov 11 – 30 Nov 11.
- Periode: 01 Des 11 – 31 Des 11.

295. 1 (satu) bundel copy Rekening Giro Bank BNI A/C. No: 0014143262 a.n. Indah Yamamitra Pers** dengan rincian sebagai berikut:

- Periode: 01/01/2011 s/d 31/01/2011.
- Periode: 01/02/2011 s/d 28/02/2011.
- Periode: 01/03/2011 s/d 31/03/2011.
- Periode: 01/04/2011 s/d 30/04/2011.
- Periode: 01/05/2011 s/d 31/05/2011.
- Periode: 01/06/2011 s/d 30/06/2011.
- Periode: 01/07/2011 s/d 31/07/2011.
- Periode: 01/08/2011 s/d 31/08/2011.
- Periode: 01/09/2011 s/d 30/09/2011.

Hal 247 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode: 01/10/2011 s/d 31/10/2011.
- Periode: 01/11/2011 s/d 30/11/2011.
- Periode: 01/12/2011 s/d 31/12/2011.

296. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 013-IYD/HK/03/12 tanggal 13 Maret 2012 Sebesar Rp. 723.265.884,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-3 Progress ke-2 sebesar 75,8461% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektronik Sesuai Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.2091/SPP/225 Tanggal 10 November 2011 dari nilai kontrak Rp. 2.805.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak) dan 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 003-IYD/HK/01/12 tanggal 11 Januari 2012 Sebesar Rp. 978.720.600,00.
297. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 052-IYD/HK/XI/11 tanggal 11 November 2011 Sebesar Rp. 420.750.000,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-1 Uang Muka sebesar 15% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektronik Sesuai Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.2091/SPP/225 Tanggal 10 November 2011 dari nilai kontrak Rp. 2.805.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).
298. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 017-IYD/HK/04/12 tanggal 11 April 2012 Sebesar Rp. 225.003.636,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-4 sebesar 85,8730% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektronik Sesuai Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.2091/SPP/225 Tanggal 10 November 2011 dari nilai kontrak Rp. 2.805.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).
299. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 059-IYD/HK/09/12 tanggal 24 September 2012 Sebesar Rp. 317.009.880,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-5 sebesar 100% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektronik Sesuai Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.2091/SPP/225 Tanggal 10 November 2011 dari nilai kontrak Rp. 2.805.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).
300. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 048-IYD/HK/XI/11 tanggal 03 November 2011 Sebesar Rp. 891.000.000,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-1 uang Muka sebesar 10% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektrikal Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: HKDG/St.1814/SPK/64 Tanggal 11 Oktober 2011 dan Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.1893/SPP/203 Tanggal 11

Hal 248 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2011 dari nilai kontrak Rp. 8.910.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).
301. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 058-IYD/HK/XII/11 tanggal 02 Desember 2011 Sebesar Rp. 816.809.549,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-2 progress ke-1 sebesar 10,7851% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektrikal Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: HKDG/St.1814/SPK/64 Tanggal 11 Oktober 2011 dan Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.1893/SPP/203 Tanggal 11 Oktober 2011 dari nilai kontrak Rp. 8.910.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).
302. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 002-IYD/HK/01/12 tanggal 11 Januari 2012 Sebesar Rp. 3.306.824.879,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-3 progress ke-2 sebesar 54,4482% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektrikal Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: HKDG/St.1814/SPK/64 Tanggal 11 Oktober 2011 dan Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.1893/SPP/203 Tanggal 11 Oktober 2011 dari nilai kontrak Rp. 8.910.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).
303. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 012-IYD/HK/03/12 tanggal 13 Maret 2012 Sebesar Rp. 1.007.550.007,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-4 progress ke-3 sebesar 68,6761% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektrikal Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: HKDG/St.1814/SPK/64 Tanggal 11 Oktober 2011 dan Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.1893/SPP/203 Tanggal 11 Oktober 2011 dari nilai kontrak Rp 8.910.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).
304. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 016-IYD/HK/04/12 tanggal 11 April 2012 Sebesar Rp. 770.565.758,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-5 progress ke-4 sebesar 78,8506% Proyek IPDN Bukit Tinggi pekerjaan Elektrikal Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: HKDG/St.1814/SPK/64 Tanggal 11 Oktober 2011 dan Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.1893/SPP/203 Tanggal 11 Oktober 2011 dari nilai kontrak Rp. 8.910.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).
305. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Nomor: 058-IYD/HK/09/12 tanggal 24 September 2012 Sebesar Rp. 870.250.045,00 Untuk Pembayaran: Tagihan Ke-6 progress ke-5 sebesar 100% Proyek IPDN Bukit Tinggi

Hal 249 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Elektrikal Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: HKDG/St.1814/SPK/64 Tanggal 11 Oktober 2011 dan Kontrak Perjanjian Pemborongan No. HK-DG/St.1893/SPP/203 Tanggal 11 Oktober 2011 beserta Addendumnya dari nilai kontrak Rp. 8.140.000,00 (termasuk PPN 10%) beserta lampiran (Invoice dan Faktur Pajak).

306. 1 (satu) bundel copy Akta: Perseroan terbatas PT. Indah Yamamitra Persada, Tanggal: 24 – 6 – 2002,- Nomor: 96.-.
307. 1 (satu) lembar copy Struktur PT. Indo Dayasurya Persada.
308. 1 (satu) lembar copy Perbandingan Hutang PT. Indo Daya Surya Per 26 Mei 2015.
309. 1 (satu) lembar copy Final Account, Nama Sub: PT. Indah Yamamitra Persada, Pekerjaan: Eletronik.
310. 1 (satu) lembar copy Final Account, Nama Sub: PT. Indah Yamamitra Persada, Pekerjaan: Elektrikal.
311. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor:HK.DG/Ln.1288/DIV.A/071/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Perihal Tanggapan Surat beserta lampiran.
312. 1 (satu) bundel copy Outstanding (tulisan tangan) Resume Tagihan PT. Indo Dayasurya Persada Terhadap PT. Utama Karya Proyek Pembangunan Gedung Kampus Sumatera Barat Pekerjaan Elektrikal & Elektronik.
313. 1 (satu) bundel copy Akta: Perseroan terbatas PT. Indah Yamamitra Persada, Tanggal: 24 – 6 – 2002,- Nomor: 96.-. (lengkap).
314. 1 (satu) bundel asli dokumen Adendum-II Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor : HK-DG/St.1893/SPP-ADD-II/203 Tanggal 16 Desember 2011 Pekerjaan Elektrikal Antara PT. Utama Karya Divisi Gedung dengan PT. Indah Yamamitra Persada Untuk Proyek IPDN Bukittinggi
315. 1 (satu) bundel print out FINAL ACCOUNT Nama Sub : PT. INDAH YAMAMITRA PERSADA pekerjaan elektrikal yang dibuat oleh bagian Keuangan PT. IYADA an. Hendry Filyandi dan Keuangan PT. HUTAMA KARYA an. Andri Setyawan.
316. 1 (satu) bundel copy dokumen SPMK Nomor HKDG/ St.1814/SPK/64 tanggal 11 Oktober 2011 antara PT. Utama Karya Ir. Budi Rachmat K. GM Divisi Gedung dengan Ir. Sugeng Hindaryo Dirut PT. Yamamitra Persada

Hal 250 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317. 1 (satu) bundel asli dokumen penentuan rekanan pekerjaan elektronik IPDN Bukittinggi atas nama PT. Indah Yamamitra Persada Tanggal 10 November 2011
318. 1 (satu) bundel copy dokumen gambar kontrak pekerjaan elektronik antara PT. Utama Karya dengan PT. Indah yamamitra persada untuk pembangunan Gedung Induk Kampus IPDN Baso Sumatera Barat
319. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.1857/SPP/200 Tanggal 19 Oktober 2011, Pekerjaan Jasa Pabrikasi, Transportasi & Install Baja antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Surya Baja Jaya untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
320. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 5124 kepada PT. Surya Baja Jaya sejumlah Rp. 749.187.289 Tanggal 19 Desember 2011.
321. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: W 4241 kepada PT. Surya Baja Jaya sejumlah Rp. 100.000.000 Tanggal 26-Jul-12.
322. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Pertanggung jawaban uang masuk dari PT. Utama Karya proyek pembangunan Kampus IPDN Sumatera Barat.
323. 1 (satu) bundel photo copy Rekening Tahapan BCA , cabang Pemohon : 6600-KCP BULEVARD TIMUR dengan Nomor Rekening : 06600284531-MATIAS SITORUS , Tanggal 20/10/2017, Periode 05/2011 – 12/2011 dan Periode 01/2011 – 12/2012.
324. 1 (satu) bundel photo copy Rekening BNI Taplus Periode tgl 01/05/2011 s/d 31/12/2012 dengan No. Rekening 0013499209, kepada Bpk Matias sitorus Jl. Perdana No. 4 Cakung Timur 13910.
325. 1 (satu) bundel photo copy Rekening Koran dengan Nomor Rekening 577010160811, Cabang 02577 Kantor Rawamangun Periode 1 Januari 2012 – 31 Januari 2012, OCBC NISP , kepada PT. Surya Baja Jaya , Jl. Pegangsaan II No. 25 D 1 Pulo Gadung Pegangsaan Dua , Jakarta Utara.
326. 1 (satu) bundel photo copy Rekening Koran dengan Nomor Rekening 577010160811, Cabang 02577 Kantor Rawamangun Periode 1 Mei 2011 – 31 Mei 2011 OCBC NISP kepada PT. Surya Baja Jaya , Jl. Pegangsaan II No. 25 D 1 Pulo Gadung Pegangsaan Dua , Jakarta Utara.

Hal 251 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. 1 (satu) bundel photo copy Pembayaran dengan RTGS dengan Jumlah 2.586.217.971 yang di tanda tangani oleh sdr. Ir. BUDI RACHMAT K.MM pada tanggal 27 Oktober 2011.-
328. 1 (satu) bundel photo copy Faktur Pajak dengan Nomor Seri 010.000-11.00020516 dengan Pembeli PT. SURYA BAJA JAYA alamat Jl. Pegangsaan II No. 25 D Jakarta Timur dengan NPWP 02.506.604.4-013.000.berikut kwitansi pembelian material baja.
329. 1 (satu) bundel photo copy Surat Bukti Pengiriman Barang Nomor : SJ/HJ/EXP/073/SBJ/XI, dengan Pengirim PT. Surya Baja Jaya Jl. Pegangsaan II Kav. 25 D Pulo Gadung Jakarta Timur melalui ekspedisi PT. HINALANG JAYA.
330. 1 (satu) bundel photo copy Kwitansi pengiriman PT. Surya Baja Jaya melalui PT. Hinalang Jaya untuk jasa pengiriman barang.
331. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK – DG / A.1620 / SPP / 162 Tanggal: 28 September 2011, Pekerjaan Pintu, Jendela Alumunium antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Jagat Interindo untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
332. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 4839 kepada PT. Jagat Interindo sejumlah Rp. 588.500.000 Tanggal 22 November 2011.
333. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 3017 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 05 – 06 – 2012, BTN 1116, Pem. Kredit SupplierJT PT. Jagat Interindo, Pry. Kampus IPDN, Jumlah: Rp. 95,823,745.
334. 1 (satu) lembar copy Buku Besar Jagat Interindo periode Januari s/d April 2017 beserta lampirannya berupa copy rekening koran Jagat Interindo di Bank Ekonomi (No Rek. 0000068456) dan copy Buku Harian Bank BTN (No Rek 00241-01-30-000143-7..
335. 1 (satu) lembar copy Daftar Tagihan Proyek-Proyek Pekerjaan Alumunium & Interior File Kwitansi No 24 (2011) Status Tanggal : 25 Februari 2015 beserta lampirannya berupa copy Kwitansi.
336. 1 (satu) lembar copy Surat PT. Jagat Interindo No. 161R2/AL/QP-JI/X/11 tanggal 12 Agustus 2011 hal Penawaran Harga Pekerjaan Pertisi Aluminium & Kaca, Proyek Kampus IPDN Baso Sumbar.

Hal 252 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



337. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi, Jenis Pekerjaan Pindu, Jendela Alumunium, PT. Jagat Interindo, Proyek IPDN Bukittinggi, tanggal 13 September 2011.
338. 1 (satu) bundel Surat PT. Jagat Interindo Nomor: 00017/Fin/Hutama Karya/JI-V/14 tanggal 07 Mei 2014 perihal Penyelesaian Outstanding Payment, beserta lampiran berupa Perincian Aging Hutang PT. Utama Karya.
339. 1 (satu) lembar print out Jurnal Umum PT. Jagat Interindo JM-1612007, Jurnal Penyesuaian TA 2016 dengan total 9.906.342.245,00.
340. 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian pengikatan Jual Beli The "H" Tower yang terdiri dari:
- | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|------|------|-----|
| a. | Perjanjian | Pengikatan | Jual | Beli | No. |
| | 962/HKR.DU/Ryn./Perj.118/IX/2013. | | | | |
| b. | Perjanjian | Pengikatan | Jual | Beli | No. |
| | 963/HKR.DU/Ryn./Perj.119/IX/2013. | | | | |
| c. | Perjanjian | Pengikatan | Jual | Beli | No. |
| | 964/HKR.DU/Ryn./Perj.120/IX/2013. | | | | |
341. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.2175/SPP/255 Tanggal 17 Nopember 2011, Pekerjaan Pemasangan Baja Gedung Auditorium antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan CV. Sakha Sinergy untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
342. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: HK-DG/A.2084/SPP/239 Tanggal 17 Nopember 2011, Jual Beli Material Baja Gedung Auditorium antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan CV. Sakha Sinergy untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011.
343. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 5126 kepada CV. Skha Sinergy sejumlah Rp. 713.411.006 Tanggal 19 Desember 2011.
344. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK: W S729 kepada CV. Sakha Sinergy sejumlah 58.152.745 Tanggal 24-Sep-12.
345. 1 (satu) bundel dokumen Permintaan Pembayaran Pekerjaan Jual Beli dan Pemasangan Material Baja Gedung Auditorium Kampus IPDN Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat dengan nomor:

Hal 253 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 44/SS.IPDN/XI/2011 tanggal 20 Nopember 2011.
 - b. 45/SS.IPDN/XI/2011 tanggal 20 Nopember 2011.
 - c. 01/SS.IPDN/II/2012 tanggal 20 Januari 2012.
 - d. 02/SS.IPDN/II/2012 tanggal 20 Januari 2012.
 - e. 05/SS.IPDN/III/2012 tanggal 09 Maret 2012.
 - f. 06/SS.IPDN/III/2012 tanggal 09 Maret 2012.
 - g. 42/SS.IPDN/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012.
 - h. 43/SS.IPDN/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012.
346. 1 (satu) lembar print out dokumen berjudul “Daftar Pembayaran Dalam Pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN, Propinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Anggaran Tahun 2011”.
347. 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor 108-00-0609390-1 a.n. MULIADI periode 01 Januari 2011 s.d. 19 September 2017.
348. 1 (satu) bundel Akta Pemasukan Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer “ CV. Sakha Sinergy”, tanggal 31 Oktober 2011, Nomor 61, Penghadap: Tn.P. PASU PATHI, S.Kom.Cs, Notaris Gordon E. Harianja, S.H.
349. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 5122 kepada PT. Dwijaya Selaras sejumlah Rp. 447.480.000 Tanggal 19 Desember 2011.
350. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Invoice PT. DWIJAYA SELARAS dengan nomor invoice INV1111.471 dengan nomor PO HK-DG/St.2159/SPP/2 beserta faktur pajaknya.
351. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Invoice PT. DWIJAYA SELARAS dengan nomor invoice INV1112.516 dengan nomor PO HK-DG/St.2159/SPP/2 beserta faktur pajaknya.
352. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. DWIJAYA SELARAS dengan nomor rekening 117-00-0216486-1 periode bulan 1/12/11 sd. 31/12/11.
353. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Invoice PT. DWIJAYA SELARAS dengan nomor invoice INV1205.226 dengan nomor PO HK-DG/St.2159/SPP/2 beserta faktur pajaknya, dengan catatan dalam tulisan tangan yang terbaca “BELUM DIBAYAR”.
354. 1 (satu) bundel asli dokumen Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor : HK-DG/St.1809/SPP/191 Tanggal 11 Oktober 2011 Pekerjaan Mekanikal Antara PT. Utama Karya Divisi Gedung dengan PT. Karya /duta Konsulindo Untuk Proyek IPDN Bukittinggi

Hal 254 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355. 1 (satu) bundel asli dokumen Adendum-I Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor : HK-DG/St.1809/SPP-ADD-I/2191 Tanggal 12 Desember 2011 Pekerjaan Mekanikal Antara PT. Utama Karya Divisi Gedung dengan PT.Karya Duta Konsolindo Untuk Proyek IPDN Bukittinggi
356. 1 (satu) bundel dokumen SPMK Nomor HKDG/ St.1804/SPK/63 tanggal 11 Oktober 2011 antara PT. Utama Karya Ir. Budi Rachmat K. GM Divisi Gedung dengan Dirut PT. Duta Konsulindo Ridwan Rasyid
357. 1 (satu) bundel dokumen asli Bill of Quantity tanggal 27 Oktober 2011 Proyek kampus IPDN Sumatera Barat Paket Pekerjaan Mekanikal
358. 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Breakdown VO (Tambah Kurang) project IPDN Lokasi Baso Sumatera Barat Pekerjaan Mekanikal dibuat oleh PT. Karya Duta Konsulindo tanggal 11 oktober 2011 Project manager Yudi Arief
359. 1 (satu) bundel copy Kwitansi Pembayaran Progress 65.4372% Pekerjaan Mekanikal Project IPDN Bukit Tinggi No. Invoice: 010/KDK-IPDN/III/12 Kepada PT. Karya Duta Konsulindo Sebesar Rp. 2,140,622,000.00.
360. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 3732 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 02 – 07 – 2012, BTN 1116, PT. Karya Duta Konsulindo, JT.KS, Pro.Kampus IPDN Sumbar Kab.Agam, Jumlah: Rp. 1,887,639,499.
361. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 4449 kepada PT. Karya Duta Konsulindo sejumlah Rp. 583.150.000 Tanggal 20....
362. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 1735 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 17 – 04 – 2012, Keterangan BTN 1116, PT. Karya Duta Konsulindo, Pro Kampus IPDN Sumbar Kab Agam, DGD, Jumlah: Rp. 18,535,636.
363. 1 (Satu) bundel copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Karya Duta Konsulindo, Nomor 02 (dua), tanggal 31 Januari 2008, Notaris Dian Trianawaty, SH
364. 1 (satu) bundel copy salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Karya Duta Konsulindo, Nomor : 58, tanggal 28 Mei 2014, Notaris Surjadi, SH, MKn., MM
365. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.2033/SPP/234 Tanggal 10 Nopember 2011, Pekerjaan Kusen

Hal 255 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dan Pintu Kayu antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Mondila Bersaudara untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.

366. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 4842 kepada Modila Bersaudara sejumlah Rp. 170.665.000 Tanggal 07-Dec-11.
367. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 3029 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 01 – 06 – 2012, Keterangan BTN 1116, Pemby. Kredit Suplier JT PT. Modila Bersaudara, Pry. IPDN Sumbar Kab Agam, DGD, Jumlah: Rp. 460,276,463 dan Nota Nomor: DN 3030 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 01 – 06 – 2012, Keterangan BTN 1116, FP Pemby. Kredit Suplier JT PT. Modila Bersaudara, Pry. IPDN Sumbar Kab Agam, DGD, Jumlah: Rp. 47,451,182.
368. 1 (satu) bundel copy Kwitansi No.: KW-055/05/2012 Pembayaran Progress 95,00% Pengadaan dan Pemasangan Kusen dan Pintu Kayu pada Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat SPP no. HK.DG/A.2033/SPP/234 Tanggal 10 November 2011 Kepada PT. Modulla Bersaudara Sebesar Rp. 292.299.000.
369. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 3013 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 01 – 06 – 2012, Keterangan BTN 1116, Pembayaran Kredit Suplier JT PT. Modila Bersaudara, Pry. Kampus IPDN, Jumlah: Rp. 328,769,155 dan 1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 3014 2012, Untuk: 60 – Divisi Gedung, Dari: 00 – Kantor Pusat, Tanggal: 01 – 06 – 2012, Keterangan BTN 1116, FP Pembayaran Kredit Suplier JT PT. Modila Bersaudara, Pry. Kampus IPDN, Jumlah: Rp. 33,893,727.
370. 1 (satu) bundel risalah penawaran harga Periode 11 Oct 2011 hingga 11/11/2011 dari PT. Mondilla Bersaudara ke PT. Utama Karya yang di cap perusahaan PT. Mondilla dan ditandatangani oleh Maridin Jamil beserta lampirannya berupa surat penawaran
371. 1 (satu) bundel SPK/SPP Periode 10 Nov 2011 hingga 01 Dec 2011 yang diterima PT. Mondilla Bersaudara dari PT. Utama Karya yang di cap perusahaan PT. Mondilla dan ditandatangani oleh Maridin Jamil beserta lampirannya.

Hal 256 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372. 1 (satu) bundel copy catatan pembayaran PT. Utama Karya kepada PT. Mondilla Bersaudara yang di cap dan ditandatangani Maridin Jamil beserta lampirannya
373. 1 (satu) bundel copy kwitansi penagihan biaya retensi dari PT. Mondilla Bersaudara dengan nomor KW-26/04/2013 tanggal 08 April 2013 yang ditujukan kepada PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung beserta lampirannya.
374. 1 (satu) bundel copy dokumen surat dengan nomor 085/SRT/MDL/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 dari PT. Mondilla Bersaudara yang ditujukan kepada PT. Utama Karya (Persero) perihal Permohonan tagihan retensi 5% untuk Proyek IPDN Bukit Tinggi beserta lampirannya berupa kwitansi.
375. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri Cabang KC Jkt Pulogadung an. Mondilla dengan nomor rekening 1250007932593 Periode Desember 2011 hingga Desember 2012
376. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank BTN Cabang Jakarta Cawang an. PT Mondilla Bersaudara dengan no rekening 0024101300003138 Periode Januari 2012 hingga Desember 2012.
377. 1 (satu) bundel rekapitulasi pengiriman barang dari PT. Mondilla Bersaudara kepada PT. Utama Karya (Persero) berupa kusen dan pintu kayu dari Jakarta ke Bukit Tinggi periode 20 Desember 2011 hingga 09 April 2012 yang dicap dan ditandatangani oleh Maridin Jami
378. 1 (satu) Rekapitulasi Penjualan PT. Mondilla Bersaudara Kpd PT. Utama Karya (Proyek IPDN Bukit Tinggi) yang sudah dibayar dan yang belum dibayar oleh Utama Karya yang di cap dan ditandatangani oleh Maridin Jamil.
379. 1 (satu) bundel copy Dokumen Legalitas a.n. PT. Modilla Bersaudara yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar copy NPWP an. PT. Mondilla Bersaudara Nomor : 01.917.637.9-432.000
 - 1 (satu) lembar copy TDP an. PT. Mondilla Bersaudara Nomor 102614605513 yang dikeluarkan tanggal 08 Oktober 2014
 - 1 (satu) lembar copy SKDU Nomor : 503/5/ -Ekbanf/Kel.Jts tanggal 18 Maret 2015
 - 1 (satu) lembar copy SIUP Nomor 510/161-BPPT/ PM/ II/ 2012 tanggal 2 Februari 2012

Hal 257 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar copy SPPKP Nomor : PEM-10164/WPJ.22/KP.1203/2008 tanggal 25 November 2008 an. PT Mondilla Bersaudara
 - f. 1 (satu) lembar copy SKT Nomor: PEM-10165/WPJ.22/KP.1203/2008 tanggal 25 November 2008 an. PT Mondilla Bersaudara.
 - g. 1 (satu) lembar copy SK Menkeh Nomor : c-15643 HT 01.01. TH 99 tanggal dikeluarkan 27 Agustus 1999
 - h. 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian PT Mondilla Bersaudara oleh Notaris & PPAT Evawani Alissa Chairil Anwar, SH. No : -2- tertanggal 11 Mei 1999
 - i. 1 (satu) bundle Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mondilla Bersaudara Nomor 15 tanggal 21 Maret 2009 oleh Notaris Halimah Sa'diyah, SH
 - j. 1 (satu) bundle Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mondilla Bersaudara Nomor 8 tanggal 25 Juni 2013 oleh Notaris Bedjo Sarwono, SH.Mkn
380. 1 (satu) lembar surat No. 321/PR/X/11 tanggal 03 Oktober 2011 yang ditujukan kepada PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung, u.p. Bp. Toga Tambunan, ditandatangani oleh Ir. James Karosekali, PT. Proteksindo Utama.
381. 1 (satu) lembar surat No. 166/PR/IV/12 tanggal 27 April 2012 yang ditujukan kepada PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung, u.p. Bp. Ir. Barry. ST, ditandatangani oleh Ir. Erwina Suray Setiawaty, PT. Proteksindo Utama.
382. 1 (satu) bundel copy surat No. 004/HK-IPDN-BS/Div.C/XII/11 tanggal 10 Desember 2011, hal Permohonan Addendum Perpanjangan Waktu dan Perubahan Nilai Kontrak Pekerjaan Pengecatan di Proyek Pembangunan Gedung IPDN Sum-Bar, ditujukan kepada PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung, u.p. Bpk. Ir. Tjahyo Purnomo, ditandatangani oleh Ir. Pedi Lestario, Kepala Proyek, beserta lampirannya.
383. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.2030/SPP/231 Tanggal 14 Nopember 2011, Pekerjaan Pengecatan antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Proteksindo Utama untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.

Hal 258 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



384. 1 (satu) bundel copy Addendum-I, Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK-DG/A.2030/SPP-ADD I/231, tanggal 12 Desember 2011, Pekerjaan Pengecatan antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Proteksindo Utama untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
385. 1 (satu) lembar copy Surat No. 093/PR/III/13 tanggal 5 Maret 2013, perihal Piutang PT. Proteksindo Utama, ditujukan kepada PT. Utama Karya, up. Bp. Aditya, ditandatangani oleh Ir. Erwina Suray Setiawaty, PT. Proteksindo Utama.
386. 1 (satu) bundel copy Surat No. HK.DG/TRIS.485/DIV.A/47 tanggal 20 Maret 2013, hal Kesepakatan pembayaran, ditujukan kepada PT. Proteksindo, ditandatangani oleh Narwatri Kurniasih, SE., beserta copy surat kesepakatan pembayaran.
387. 1 (satu) bundel dokumen Penerimaan Proyek, Nama Proyek: HK-IPDN, Bukit Tinggi, Cost Code: 156.CC.18.11.11, Nilai Kontrak: 987.951.622, tanggal cetak 16/09/2017, beserta lampirannya.
388. 1 (satu) lembar print out dokumen berjudul "Data Tagihan PT. Utama Karya Proyek IPDN Sumbar", diparaf oleh ERWINA SURYA S. (Direktur PT. Proteksindo Utama).
389. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 0060004946863, atas nama PROTEKSINDO UTAMA, periode 1 Des 2011 s.d. 23 Juni 2014, terkait penerimaan dari PT. Utama Karya.
390. 1 (satu) bundel copy Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Kode & No. Dok: BBK W 4840 kepada PT. Proteksindo Utama sejumlah Rp. 151.649.543 Tanggal 07-Dec-11.
391. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HK – DG / A.1327 / SPP / 100 Tanggal: 26 Juli 2012, Pekerjaan Plafond Metal Linier 84-C antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung dengan PT. Jof Metal Works untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.
392. 1 (satu) buah fotokopi Kwitansi PT. JOF METAL WORKS LTD No. 3016 tanggal (terbaca) 10-09-2012 yang ditandatangani oleh LEE BOK BIO dengan jumlah Rp. 60.164.200,- untuk pembayaran uang muka beserta Faktur Pajak Nomor seri 030.000-12.00000922 tanggal 10 September 2012 dan Surat Perjanjian Pemborongan Pemborongan Nomor: HK-DG/A.1327/SPP/100 tanggal 26 Juli 2012 untuk Pekerjaan Plafond Metal Linier 84-C antara PT. HUTAMA KARYA (Persero) Divisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung dengan PT. JOF METAL WORKS untuk Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.

393. 1 (satu) buah fotokopi Kwitansi PT. JOF METAL WORKS LTD No. 3431 tanggal (terbaca) 28-11-2012 yang ditandatangani oleh LEE BOK BIO dengan jumlah Rp. 130.355.940,- untuk pembayaran prestasi 100% beserta Faktur Pajak Nomor seri 030.000-12.00001195 tanggal 29 November 2012 dan Berita Acara Pembayaran No. 001/BAP/HK-IPDN/JOF/IX/2012 dan Berita Acara Serah Terima Pertama, yang ditandatangani oleh RAYMOND, ST selaku Project Manager PT. HUTAMA KARYA (Persero) dan SUBARKAH selaku Project Manager PT. JOF METAL WORKS serta Berita Acara Prestasi No. 002-14HH/BA-NC/XI/12.
394. 1 (satu) buah fotokopi Kwitansi PT. JOF METAL WORKS LTD No. 4863 tanggal (terbaca) 30-10-2013 yang ditandatangani oleh LEE BOK BIO dengan jumlah Rp. 10.027.385,- untuk pembayaran retensi beserta Faktur Pajak Nomor seri 030.902-13.44220887 tanggal 30 Oktober 2013 dan Berita Acara Serah Terima Kedua, yang ditandatangani oleh RAYMOND DEBAL, ST selaku Project Manager Proyek Kampus IPDN Sumatera Barat PT. HUTAMA KARYA (Persero) Divisi Gedung dan SUBARKAH selaku Project Manager PT. JOF METAL WORKS.
395. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri an. PT. JOF METAL WORKS Ltd. Dengan nomor rekening 119-00-9109216-1 periode 1/10/12 sd. 31/10/12.
396. 1 (satu) lembar kertas berjudul 5. IPDN Sumbar yang mana merupakan rincian pembayaran pekerjaan dan sisa tagihan PT. HUTAMA KARYA (Persero) pada PT. JOF METAL WORKS yang berjumlah Rp. 152.316.000,00.
397. 1 (satu) bundel print out email dengan Judul : Re : Fw : Bls : Kebutuhan sanitair; Dari : rozi rinjayadi (rinjayadi@gmail.com); Kepada : indokeramika@yahoo.co.id; Tanggal Kamis, 3 November 2011 8 : 39
398. 4 (empat) lembar copy dokumen PESANAN PEMBELIAN BARANG No. HK.DG/Ba.2074/ORD/188 tanggal 08 November 2011 kepada PT Indokeramikatama Perkasa; No. HK.DG/Ba.2017/ORD/191 tanggal 14 November 2011; No. HK.DG/Ba.2112/ORD/201 tanggal 23 November 2011 dan No. HK.DG/Ba.0414/ORD/039 tanggal 05 Maret 2012
399. 1 (satu) bundel copy dokumen Kontrak Perjanjian Jual Beli Nomor : HK-DG/Ba.2272/SPP/267 Tanggal 08 November 2011 Pengadaan

Hal 260 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanitair Merek TOTO Antara PT Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung Dengan PT Indokeramikatama Perkasa Untuk Proyek IPDN Baso-Bukit Tinggi.

400. 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari Faktur No. 1079/IP/XI/2011; Faktur No. 1098/IP/XI/2011; Faktur No. 1152/IP/XI/2011; Faktur No. 1225/IP/XII/2011; Faktur No. 214/IP/II/2012; Faktur No. 215/IP/II/2012 dan Faktur No. 318/IP/III/2012 beserta lampiran Surat Jalan, Memo Dinas Angkutan dan Tanda Terima Barang.
401. 4 (empat) lembar printout Daftar Kontrak Supplier Dominan.
402. 1 (satu) bundel copy catatan tangan bertuliskan "voucher Pembayaran Subkon P. Bukit Tinggi" disertai daftar subkon / supplier PT. Hutama Karya
403. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "SPP IPDN SUMBAR yang terdiri dari : Jagat Interindo, Yulian Berkah, Prima Karya, dst. OPS/DDO/P/001 SATUAN KERJA SUMBER DAYA Tahun 2011 KODE SUMBAR-01"
404. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "SPP IPDN SUMBAR yang terdiri dari : Jatrindo, Jof Metal, Dst. OPS/DDO/P/001 SATUAN KERJA SUMBER DAYA Tahun 2011 KODE SUMBAR-01"
405. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "BUKTI KERJA DATA TENDER IPDN BUKTITINGGI OPS/DDO/P/001 SATUAN KERJA TEKNIK 2011-2012 KODE BKT-1"
406. 1 (satu) bundel copy dokumen Pesanan Pembelian Barang No. HK.DG/hd.2050/ORD/186 tanggal 07 November 2011 beserta Faktur Pajak, Surat Pengantar dan draf Surat Direktur PT Dinamika pancar Kencana kepada PT Hutama Karya (Persero) tanggal 23 Desember 2011;
407. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) Masa Pajak Desember Tahun Pajak 2011, NPWP 01 554 714 4 211 000, Nama WP : PT Dinamika Panca Kencana tanggal 17 Januari 2012;
408. 1 (satu) lembar copy dokumen Rekening Giro Bank Mandiri Nomor : 108-00-339988-9 atas nama PT Dinamika Panca Kencana tanggal 01/04/12 hingga tanggal 30/04/12
409. 1 (satu) lembar copy dokumen Rekening Giro Bank Mandiri Nomor : 108-00-339988-9 atas nama PT Dinamika Panca Kencana tanggal 01/12/11 hingga tanggal 30/12/11 beserta Surat PT Bank Mandiri

Hal 261 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Dinamika Pancakencana Nomor : EX11772120614768
tanggal 28 Desember 2011 Perihal : Advis Kredit

410. 1 (satu) bundel copy dokumen Pesanan Pembelian Barang No. 132 /IPDN/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 beserta Faktur Pajak, Surat Pengantar dan draf Surat Direktur PT Dinamika Panca Kencana kepada PT Utama Karya (Persero) tanggal 23 Desember 2011;
411. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) Masa Pajak November Tahun Pajak 2011, NPWP 01 554 714 4 211 000, Nama WP : PT Dinamika Panca Kencana tanggal 20 Desember 2011;
412. 1 (satu) lembar dokumen berjudul "Dafar Surat Perjanjian dan Uang Masuk ke Rekening a.n. EKA SAPUTRA, S.Sos".
413. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Sewa Alat, Jenis Alat Exavator, Comatsu antara Ir. R. PEDI LESTARIO (Kapro Proyek) dan EKA SAPUTRA (Pemilik Alat).
414. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Sewa Alat, Jenis Kendaraan Truck (Dump Truck), Mitshubishi antara Ir. R. PEDI LESTARIO (Kapro Proyek) dan EKA SAPUTRA (Pemilik Kendaraan).
415. 1 (satu) asli buku tabungan rupiah mandiri a.n. EKA SAPUTRA, S. Sos, No. Rek: 111-00-0621480-9, KC Bukittinggi, tanggal cetak 19/10/2011.
416. 1 (satu) bundel fc dokumen kontrak/SPK subkontraktor untuk pekerjaan : Upah pemasangan atap, subkon baja ringan dan subkon pekerjaan koral sikat
417. 1 (satu) bundel fc dokumen pembelian bahan berupa batu bata, terpal dan plastik cor kepada UD Arnelin
418. 1 (satu) bundel fc dokumen realisasi penerimaan dari PT. Utama Karya/pembayaran bahan dan upah
419. 1 (satu) bundel fc dokumen rekening koran di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1110006176149 atas nama SUDISWAR
420. 1 (satu) lembar rekapitulasi material kayu CV. Jasa Keluarga untuk PT. Utama Karya tanggal 16 Januari 2012 s.d. 19 Januari 2012 senilai total Rp. 96.369.000,- yang harus dibayarkan ke rekening milik Sdri. Iyvone Anesia Bank Mandiri no rek 111.00.0402648.6
421. 1 (satu) lembar asli Rangkuman Piutang Pelanggan CV Trijaya Greshindo s.d. Tanggal 21/03/2016 dengan Grand Total Saldo Rp. 41.813.897,22 ter cap CV. Tri Jaya Greshindo;

Hal 262 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422. 1 (satu) bundel copy faktur pembayaran No. 058736 dengan jumlah Rp. 1.997124.000 dari CV Trijaya Greshindo untuk IPDN Baso tertanggal 24-10-2011 beserta lampirannya;
423. 1 (satu) bundel copy faktur pembayaran No. 005286 dengan jumlah Rp. 27.627.600 dari CV Trijaya Graeshindo untuk HK tertanggal 27-03-2012 beserta lampirannya
424. 1 (satu) bundel copy Dokumen Rincian Pembelian PT Utama Karya pada Toko Alam Indah Granit ditandatangani oleh CHE ICHSAN tanggal 21 Maret 2016.
425. 2 (dua) lembar copy Dokumen Rekening Tabungan Bank Mandiri Cbg Imam Bonjol Padang, Nomor 1110005868894 atas nama CHE ICHSAN, tanggal 29/02/12 s.d 26/03/12 dan tanggal 28/03/12 s.d 07/04/12
426. 1 (satu) bundel dokumen tindasan berwarna kuning yang terdiri dari Nota ALAM INDAH GRANITE No. 35195; 35196; 35301; dan 35374
427. 1 (satu) lembar print out dokumen Rekap Penjualan PT Citra Bhakti Semestajaya ke PT Utama Karya u/Proyek IPDN, total Rp. 2.034.630.400,-
428. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PT Citra Bhakti Semestajaya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 001/CBS-BANK/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 Hal : Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang dan Surat Pengantar;
429. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PT Citra Bhakti Semestajaya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 001/CBS-BANK/II/2012 tanggal Januari 2012 Hal : Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;
430. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PT Citra Bhakti Semestajaya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 003/CBS-BANK-H/II/2012 tanggal Januari 2012 Hal : Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan

Hal 263 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;

431. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PT Citra Bhakti Semestajaya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 004/CBS/DIS-HK/III/2012 tanggal Maret 2012 Hal : Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;

432. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PT Citra Bhakti Semestajaya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 005/CBS/DIS-HK/III/2012 tanggal Maret 2012 Hal : Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;

433. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PT Citra Bhakti Semestajaya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 006/CBS/DIS-HK/IV/2012 tanggal 17 April 2012 Hal : Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;

434. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PT Citra Bhakti Semestajaya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 007/CBS/DIS-HK/IV/2012 tanggal 11 April 2012 Hal : Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Barang, Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;

435. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PT Citra Bhakti Semestajaya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 008/CBS/DIS-HK/V/2012 tanggal Mei 2012 Hal : Permohonan Diskonto dan lampirannya, antara lain Surat Penyerahan Dokumen dan Permohonan Realisasi L/C / SKBDN *), Surat Pernyataan, Tanda Terima, Berita

Hal 264 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima Barang, Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, dan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang;

436. 1 (satu) buah buku tulis Merck Paperline berwarna hijau dengan tulisan tangan "Hutama Karya Baso";
437. 1 (satu) lembar print out dokumen Rekening BNI Taplus Nomor : 0213964963 atas nama WELMAN FERI, SH periode 01/01/2012 s/d 30/01/2012
438. 1 (satu) bundel dokumen asli Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 23 September 2011 dan copy dokumen Pesanan Pembelian Barang tanggal 14 September 2011, 16 September 2011 dan 19 September 2011;
439. 1 (satu) bundel dokumen asli Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 29 September 2011 dan copy dokumen Pesanan Pembelian Barang tanggal 23 September 2011;
440. 1 (satu) bundel dokumen asli yang terdiri dari :
- a. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 10 Oktober 2011;
 - b. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 17 Oktober 2011;
 - c. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 26 Oktober 2011;
 - d. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 01 November 2011;
 - e. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 14 November 2011;
 - f. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 29 November 2011;
 - g. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 27 Desember 2011;
 - h. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 12 Desember 2011;
 - i. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 17 Oktober 2011;
 - j. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 27 Januari 2012.
441. 1 (satu) bundel copy dokumen terdiri dari Pesanan Pembelian Barang tanggal 24 Nopember 2010, Kartu Piutang, Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan, Kwitansi, Faktur/Kontan, draf Tanda Terima Tagihan, dan Bukti Pengiriman Barang;
442. 1 (satu) bundel copy dokumen Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Faktur Pajak : 010.000-12.00000009; 010.000-12.00000010; 010.000-12.00000015; draf Tanda Terima dan NPWP PT Utama Karya;
443. 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari :
- a. Surat CV Karya Jaya No. : 052/KJ/V/2012 tanggal 28 April 2012 Hal : Konfirmasi Tagihan;
 - b. Surat CV Karya Jaya No. : 061/KJ/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 Hal : Tagihan;

Hal 265 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat CV Karya Jaya No. : 082/KJ/IX/2012 tanggal 7 September 2012 Hal : Konfirmasi Tagihan;
- d. Surat CV Karya Jaya No. : 087/KJ/IX/2012 tanggal 13 September 2012 Hal : Konfirmasi Tagihan;
- 444. 1 (satu) bundel copy dokumen Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening : 111.000.559.3427 atas nama : CV. KARYA JAYA tanggal 02/06/12 s.d 06/06/12; tanggal 06/08/12 s.d 13/08/12; tanggal 16-Oct-2012 s.d 23-Oct-2012; dan copy rekening giro Wadiah Institusi Bank Mandiri Syariah Nomor : 7899989998 tanggal 04 Dec 12 s.d 31 Dec 12;
- 445. 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari fc KTP, fc NPWP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan; Surat Izin Usaha Perdagangan dan Salinan Akta Perseroan Komanditer "CV KARYA JAYA" No. 46 tanggal 15 Januari 2004.
- 446. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening Bank Mandiri Cabang Padang Nomor rekening : 1110006231019 nama : KREDO KERAMINDO SEJA Periode : 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.
- 447. 1 (satu) bundel dokumen Copy Faktur PT Kredo Keramindo Sejahtera Faktur No : JL1201/ beserta copy dokumen Faktur Pajak Nomor Seri : 010.000-12.00000004 atas nama PT Kredo Keramindo Sejahtera tanggal 6 Januari 2012.
- 448. 1 (satu) bundel dokumen dokumen ASLI Faktur PT Kredo Keramindo Sejahtera Faktur No : JL02804 beserta fax dokumen Pesanan Pembelian Barang PT Utama Karya No. HK.DG/Ba.1889/ORD/170 tanggal 27 Oktober 2011.
- 449. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Nomor EX11771060614865 tanggal 13/01/2012 kepada Yth. Kredo Keramindo Sejahtera perihal Advis Kredit ditandatangani Surya Musfarita;
 - b. 1 (satu) lembar fax Surat Pengalihan Hak PT Kredo Keramindo Sejahtera tanggal 13 Januari 2012 ditandatangani oleh Wicky Leonardi;
 - c. 1 (satu) lembar fax Surat kepada Yth Kredo Keramindo Sejahtera Perihal : Advice of Refusal;

Hal 266 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar ASLI Surat Nomor EX11771060614865 tanggal 20/12/2011 kepada Yth. Kredo Keramindo Sejahtera perihal Advis Debit ditandatangani Surya Musfarita;
 - e. 1 (satu) lembar ASLI Aplikasi Wesel Dokumenter Bank Mandiri tanggal 16 Desember 2011 tanggal 24 November 2011 sebesar Rp 1.423.748.000,-
 - f. 1 (satu) lembar Wesel lembar kedua sejumlah satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh rupiah tanggal 24 November 2011.
450. 1 (satu) bundel surat PT Kredo Keramindo Sejahtera Nomor : 1010/KKS/1.1/12.11 Hal : Advising SKBDN ke PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Pusat – Jakarta tanggal 15 Desember 2011, beserta lampirannya.
451. 1 (satu) bundel Surat Jalan dan Tanda Terima Proyek IPDN Baso.
452. 1 (satu) bundel Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-11.00000061 atas nama PT Kredo Keramindo Sejahtera NPWP : 03.142.231.4-216.001 tanggal 12 Desember 2011 beserta lampirannya.
453. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening : 1110002265383 Nama : Kredo Bajataman Persa Periode : 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.
454. 1 (satu) bundel copy dokumen PT Kredo Bajatama Persada Daftar Piutang PT Utama Karya – Proyek IPDN Bukittinggi.
455. 1 (satu) bundel dokumen copy Rekening Koran Giro Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat No Rekening : 2103 . 0103.00049-8 atas nama EGYA PRATAMA CV Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 dan periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.
456. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001.SPK/140/CBKT/2012 Tanggal 06 Februari 2012 antara PT PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Bukittinggi dengan CV EGYA PRATAA Tentang Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan : PAL IPDN Kampus Sumbar dan Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi Lokasi : Baso PT PLN (Persero) Ranting Baso; Nilai Kontrak : Rp. 45.663.000,-.
457. 1 (satu) bundel copy dokumen bertandatangan M. IRFAN Buku Rekening Tabungan Bank Mandiri Cab. Bukittinggi Nomor

Hal 267 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111.000.5873-7 atas nama MUHAMMAD IRFAN tanggal 15 September 2011 s/d 31 Juli 2013.

458. 2 (dua) lembar dokumen tulisan tangan Catatan Faktur Tagihan Toko Muaro Bangunan - Proyek IPDN Bukittinggi

459. 1 (satu) bundel dokumen print out Rekening Bank Mandiri Cabang Bukittinggi Nomor Rekening : 1110005515222, Nama : CHAIRUNNAS Periode 1 September 2011 sampai dengan 04 April 2013.

460. 1 (satu) lembar Tulisan Tangan Sdr. MUSLIM yang berisi catatan pekerjaan pemasangan tiang pancang proyek IPDN di Kabupaten Agam sebagaimana tercantum dalam Buku Agenda milik Sdr. MUSLIM dengan tulisan The Infinity Design SM 0433.

461. 1 (satu) bundel dokumen copy Rekening Koran Giro Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi Nomor Rekening : 0200 .0103.00158-8 atas nama TAJAK ENGINEERING CV Periode : 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;

462. 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari :

- a. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 01/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, Harga Kontrak Rp. 77,000,000.00;
- b. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 02/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011, Harga kontrak 106,370,000.00;
- c. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 03/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011, Harga Kontrak Rp 91,630,000.00;
- d. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 04/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, Harga Kontrak Rp. 77,000,000.00;
- e. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 05/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011, Harga Kontrak Rp. 106,370,000.00;
- f. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 06/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011, Harga Kontrak Rp. 91,630,000.00;

463. 1 (satu) lembar dokumen copy Surat Direktur CV Tajak Engineering kepada PT Utama Karya Proyek IPDN Bukittinggi Sumatera Barat

Hal 268 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 037/TE/V-2012 tanggal 30 Mei 2012, Perihal : Rincian Pembayaran Deep Well;

464. 1 (satu) lembar dokumen copy Surat Wakil Kepala Proyek Kampus IPDN Baso Bukittinggi kepada General Manager PT Utama Karya (Persero) Divisi Gedung Nomor : 084/HK.IPDN/DIV.G.BT/UM/VII/12 tanggal 16 Juli 2012, Perihal : Permohonan Pembayaran Hutang Tajak Engineering & Mina Karya;
465. 2 (dua) lembar dokumen print out terdiri dari Berita Acara Pekerjaan tanggal 15 Maret 2012 sesuai kontrak No : 01/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dan Berita Acara Pekerjaan tanggal 15 Maret 2012 sesuai kontrak No : 02/HK-IPDN-BKT/BTPP/SPP/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011.
466. 1 (satu) bundel dokumen asli yang terdiri dari :
- Kwitansi No. 306/KWT-RU/HK-IPDN/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 399,572,250 dan Tanda Terima tanggal 4 Januari 2012;
 - Kwitansi No. 311/KWT-RU/HK-IPDN/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 19,800,000 dan Tanda Terima tanggal 4 Januari 2012;
 - Kwitansi No. 312/KWT-RU/HK-IPDN/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 164,318,000 dan Tanda Terima tanggal 4 Januari 2012;
 - Kwitansi No. 318/KWT-RU/HK-IPDN/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 915,524,597 dan Tanda Terima tanggal 18 Januari 2012;
 - Kwitansi No. 28/KWT-RU/HK-IPDN/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 10,980,420 dan Tanda Terima tanggal 25 Februari 2012;
 - Kwitansi No. 41/KWT-RU/HK-IPDN/III/2012 tanggal 08 Maret 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 39,640,425 dan Tanda Terima tanggal 21 Maret 2012;

Hal 269 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kwitansi No. 45/KWT-RU/HK-IPDN/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 27,488,175 dan Tanda Terima tanggal 31 Maret 2012;
- h. Kwitansi No. 47/KWT-RU/HK-IPDN/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 18,884,899 dan Tanda Terima tanggal 31 Maret 2012;
- i. Kwitansi No. 48/KWT-RU/HK-IPDN/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 4,675,000 dan Tanda Terima tanggal 31 Maret 2012;
- j. Kwitansi No. 55/KWT-RU/HK-IPDN/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 29,816,111 dan Tanda Terima tanggal 25 April 2012;
- k. Kwitansi No. 61/KWT-RU/HK-IPDN/IV/2012 tanggal 16 April 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 25,300,000 dan Tanda Terima tanggal 25 April 2012;
- l. Kwitansi No. 62/KWT-RU/HK-IPDN/IV/2012 tanggal 16 April 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 2,337,500 dan Tanda Terima tanggal 25 April 2012;
- m. Kwitansi No. 66/KWT-RU/HK-IPDN/IV/2012 tanggal 16 April 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 10,120,000 dan Tanda Terima tanggal 03 Mei 2012;
- n. Kwitansi No. 68/KWT-RU/HK-IPDN/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 10,672,200 dan Tanda Terima tanggal 23 Mei 2012;
- o. Kwitansi No. 69/KWT-RU/HK-IPDN/IV/2012 tanggal 25 April 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 25,300,000 dan Tanda Terima tanggal 23 Mei 2012;

Hal 270 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Kwitansi No. 73/KWT-RU/HK-IPDN/V/2012 tanggal 01 Mei 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 7,781,400 dan Tanda Terima tanggal 23 Mei 2012;
- q. Kwitansi No. 80/KWT-RU/HK-IPDN/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang diterima CV RADO UTAMA dari PT HUTAMA KARYA (Persero) senilai Rp. 1,402,500 dan Tanda Terima tanggal 30 Mei 2012;

467. 1 (satu) bundel dokumen asli yang terdiri dari :

- a. Surat Pengantar tanggal 17 Nopember 2011 dan tanggal 20 Nopember 2011;
- b. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 48/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 90 KV A/XI/2011 tanggal 21 November 2011 dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 21 November 2011;
- c. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 99/HK.IPDN.BT/DIV.G/SKR-ALAT GENSET 90 KV A/XII/2011 tanggal 21 November 2011 tentang Addendum II Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : : 48/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 90 KV A/XI/2011 tentang Sewa Alat (Genset) Antara PT Hutama Karya pada Proyek IPDN-Baso Bukittinggi dengan Edy Yusuf dan dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 16 Desember 2011;
- d. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 45/HK.IPDN.BT/DIV.G/SKR/XI/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Addendum I Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 47/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 140 KV A/XI/2011 dan Nomor : 48/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 90 KV A/XI/2011 tentang Sewa Alat (Genset) Antara PT Hutama Karya pada Proyek IPDN-Baso Bukittinggi dengan Edy Yusuf;
- e. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 170/HK/IPDN-SPK-ALAT GENSET 90 KV A/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 20 Januari 2012;
- f. Surat Perjanjian Sewa Alat tanggal 20 Februari 2012 tentang Addendum I Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 170/HK/IPDN-SPK-ALAT GENSET 90 KV A/I/2012 tentang Sewa Alat (Genset) Antara PT. HUTAMA KARYA (Persero) pada Proyek Kampus IPDN Bukittinggi dengan Rita Jusuf dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 20 Februari 2011;

Hal 271 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor :
91/HK.IPDN.BT/DIV.G/SKR/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011
tentang Addendum I Nomor : 47/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 140
KV A/XI/2011 dan Nomor : 48/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 90 KV
A/XI/2011 tentang Sewa Alat (Genset) Antara PT Utama Karya
pada Proyek IPDN-Baso Bukittinggi dengan Edy Yusuf ;

h. Bukti Kirim/Tanda Terima tanggal 3 Februari 2012.

468. 1 (satu) bundel dokumen asli yang terdiri dari :

- a. Surat Pengantar tanggal 21 Nopember 2011;
- b. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 47/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 140 KV A/XI/2011 tanggal 16 November 2011 dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 16 November 2011;
- c. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 91/HK.IPDN.BT/DIV.G/SKR-ALAT GENSET 140 KV A/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Addendum II Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 47/HK/IPDN-SPPK-Alat genset 140 KV A/XI/2011 tentang Sewa Alat (Genset) Antara PT Utama Karya pada Proyek IPDN-Baso Bukittinggi dengan Edy Yusuf dan dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 16 Desember 2011;
- d. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 172/HK/IPDN-SPK-ALAT GENSET 140 KV A/II/2012 tanggal 20 Januari 2012 dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 20 Januari 2012;
- e. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 178/HK/IPDN-SPPK-ALAT GENSET 140 KV A/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 20 Maret 2012;
- f. Kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 21 April 2012 sejumlah Rp. 4.250.000,-;
- g. Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan tanggal 26 April 2012.

469. 1 (satu) bundel dokumen asli yang terdiri dari :

- a. Surat Pengantar tanggal 21 Nopember 2011;
- b. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor :
96/HK.IPDN.BT/DIV.G/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 dan
kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 26
Desember 2011;
- c. Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 171/HK/IPDN-SPK-ALAT GENSET 100 KV A/II/2012 tanggal 26 Januari 2012 dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 26 Januari 2012;

Hal 272 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Perjanjian Sewa Alat tanggal 27 Februari 2012 tentang Addendum I Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 171/HK/IPDN-SPK-ALAT GENSET 100 KV A/I/2012 tentang Sewa Alat (Genset) Antara PT Utama Karya pada Proyek Kampus IPDN Bukittinggi dengan Rita Yusuf dan dan kwitansi telah terima dari PT HUTAMA KARYA tanggal 27 Februari 2012;
 - e. Kwitansi telah terima dari Rita Jusuf tanggal 21 Maret 2012 sejumlah Rp. 5.000.000,-;
 - f. Berita Acara Serah Terima Pengembalian Uang Sewa Alat Genset 100 KV A Merek Mercedes Benz tanggal 15 Maret 2012.
470. 1 (satu) lembar copy dokumen Rekening Bank BNI Cabang Bukittinggi Nomor 59225948 atas nama PT PLN Cab. Bukittinggi tanggal 23 Dec 2011 s/d 28 Dec 2011
471. 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari :
- a. Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT PLN (Persero) dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat tanggal 21 Desember 2011;
 - b. Surat Kepala Bagian Tata Usaha Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat kepada Kepala PLN Cabang Bukittinggi Nomor : 015/610/IPDN-SB/2011 tanggal 25 Oktober 2011, Perihal : Permohonan Penyambungan Daya PLN;
 - c. Surat Kepala Bagian Tata Usaha Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat kepada Kepala PLN Cabang Bukittinggi Nomor : 642/633/IPDN-SB/2011 tanggal 14 November 2011, Perihal : Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Tagihan Beban Bulanan Listrik;
 - d. Surat Manager PT PLN (Persero) Ranting Baso kepada PT PLN (Persero) Cab Bukittinggi Nomor : 084/160/RBSO/2011 tanggal 16 November 2011, Perihal : Usulan Calon Pelanggan TM;
 - e. Surat Manager PT PLN (Persero) Cabang Bukittinggi kepada Direktur IPDN Kampus Sumbar Nomor : 548/161/CBKT/2011 tanggal 5 Desember 2011, Perihal : Persetujuan PAL;
 - f. Berita Acara Penyegehan KWH Meter No. 210/PB/10/2012.
472. 1 (satu) bundel dokumen copy yang terdiri dari :
- a. Berita Acara Pemasangan/Penyambungan/Pembongkaran*) Sambungan Tenaga Listrik/Penggantian*) Nomor : 04/APP/CBKT/02/2012 tanggal 27 Februari 2012;

Hal 273 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai No. 023/BAST/613/CBKT/2012 tanggal 6 Maret 2012, Pekerjaan : PAL IPDN Kampus Sumbar dan Pusdiklat Kemendagri Reg. Bukittinggi;
- c. Kwitansi Uang sebesar Rp.45,981,000 yang diterima oleh CV EGYA PRATAMA dari PT PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Bukittinggi.
473. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam Nomor 05 s.d. 23/IMB/KPMPT-2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Kampus IPDN Sumatera Barat atas nama Drs. BAHARUDDIN PPABBA, M.Si, tanggal 10 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Fatimah S.Sos, M.Si, Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam.
474. 2 (dua) lembar copy Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012 pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam, SKPD Dinas Pekerjaan Umum (IMB), bulan Februari 2012.
475. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri KCP Cabang Padang Muara dengan no rekening 1110100004940 a.n. PT. Statika Mitrasarana berikut lampirannya.
476. 1 (satu) bundel copy rekapitulasi transaksi antara PT. Statika Mitrasarana dan PT. Utama Karya untuk proyek pembangunan IPDN Baso Sumbar Thn. 2011 dan 2012
477. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 001/XI/2011 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 90.750.000,- untuk pembayaran readymix K.300=100 M3 termasuk PPN 10% di cap dan ditandatangani pada tanggal 28 November 2011 berikut lampirannya
478. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 002/XI/2011 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 9.075.000,- untuk pembayaran readymix K.300=10 M3 di cap dan ditandatangani pada tanggal 28 November 2011 berikut lampirannya.
479. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 003/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 486.057.000 untuk

Hal 274 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran readymix K.300=535.6 M3 dicap dan ditandatangani pada tanggal 28 November 2011 berikut lampirannya

480. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 004/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 499.125.000 untuk pembayaran readymix K.300=550 M3 di cap dan ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2011 berikut lampirannya

481. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 006 CP A/I/2012 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 25.725.000,- dengan rincian:

- a. Concrete Pump < 40 M3 = 4X Rp. 1.800.000;
- b. Concrete Pump > 40M3 x Rp.35.000,- dan
- c. Mobilisasi Pompa = 3x Rp. 750.000,-

dicap dan ditandatangani pada tanggal 5 Desember 2011 berikut lampirannya.

482. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 005/I/2012 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 453.750.000,- untuk pembayaran readymix K.300=500 M3 di cap dan ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2012 berikut lampirannya

483. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 006/I/2012 yang dikeluarkan oleh PT. Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 453.750.000,- untuk pembayaran readymix K.300=500 M3 di cap dan ditandatangani pada tanggal 13 Januari 2012 berikut lampirannya

484. 1 (satu) bundel copy Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan yang dikeluarkan oleh PT. Utama Karya (Persero) terima dari PT. Statika M.S dengan uraian untuk pemb. C. Pump dan pemb. Beton ditandatangani oleh Manto dan tertanggal 25 Januari 2012 berikut lampirannya

485. 1 (satu) bundel copy Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan yang dikeluarkan oleh PT. Utama Karya (Persero) terima dari PT. Statika M.S dengan uraian untuk pemb readymix K 300, pemb Pemakaian C.P, Pemb. Readymix K.300, pemb. Pemakaian CP ditandatangani oleh Mando dan tertanggal 28 Februari 2012 dan bertuliskan *revisi* Faktur No : 010.000.12.00000013 tanggal 13/1-12 dan 010.000.12.00000018 tgl 20/1-12 berikut lampirannya

Hal 275 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



486. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 010/III/2012 yang dikeluarkan oleh diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 136.125.000 untuk pembayaran readymix K.300=150 M3 di cap dan ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2012 berikut lampirannya

487. 1 (satu) bundel copy Tanda Terima Kwitansi/Faktur Tagihan yang dikeluarkan oleh PT. Utama Karya (Persero) terima dari PT. Statika dengan uraian untuk pemb. Beton K.300 senilai Rp. 45.375.000 ditandatangani oleh Manto dan tertanggal 29 Maret 2012 berikut lampirannya

488. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 002 CP A/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PT.Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp.9.375.000,- dengan rincian :

- a. Concrete Pump Rp. 1.800.000,-
- b. Concrete Pump > 40 M3 =195 M3 x Rp. 35.000,- dan
- c. Mobilisasi Pompa Rp. 750.000

Di cap dan ditandatangani pada tanggal 05 Desember 2011 berikut lampirannya

489. 1 (Satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 004 CP A/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PT.Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 9.900.000,- dengan rincian :

- a. Concrete Pump Rp. 1.800.000,-
- b. Concrete Pump > 40 M3 =210 M3 x Rp. 35.000,- dan
- c. Mobilisasi Pompa Rp. 750.000

Di cap dan ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2011 berikut lampirannya

490. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 005 CP A/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PT.Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 5.700.000,- dengan rincian :

- a. Concrete Pump <40 M3 Rp. 1.800.000,-
- b. Concrete Pump > 40 M3 =90 M3 x Rp. 35.000,- dan
- c. Mobilisasi Pompa Rp. 750.000

Di cap dan ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2011 berikut lampirannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

491. 1 (satu) bundel copy kwitansi pembayaran dengan nomor 006 CP A/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PT.Statika Mitrasarana diterima dari PT. Utama Karya (Persero) senilai Rp. 9.075.000,- dengan rincian :
- a. Concrete Pump < 40 M3 = 2 X Rp. 1.800.000,-
 - b. Concrete Pump > 40 M3 = 135 M3 x Rp. 35.000,- dan
 - c. Mobilisasi Pompa Rp. 750.000
- Di cap dan ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2011, berikut lampirannya
492. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "BUTING => BUKTI2 UMUM (4)" berisikan dokumen pembayaran subkon/supplier PT. Utama Karya
493. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "BUTING (2)" berisikan dokumen pembayaran subkon/supplier PT. Utama Karya
494. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "BANK W DES-2011" berisikan dokumen pembayaran subkon/supplier PT. Utama Karya
495. 1 (satu) odner warna hitam bertuliskan "IPDN" yang berisikan dokumen Risalah Rapat , Gambar Metode Kerjaan Perkerasan Jalan, Review Laporan Konsultan Manajemen Konstruksi, Kontrak Perjanjian Jual Beli dan dokumen pendukung lainnya.
496. 1 (satu) odner berwarna biru bertuliskan "IPDN-BUKITTINGGI" yang berisikan Notulen Meeting dan lampirannya
497. 1 (satu) odner berwarna biru bertuliskan "Surat Masuk"
498. 1 (satu) bundel dokumen copy Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 158/Und/KK/KDN/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 perihal : Undangan Rapat penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Pembangunan Gedung IPDN di Propinsi Sumatera Barat, beserta Berita Acara dan Risalah Penjelasan Pekerjaan.
499. 4 (empat) halaman dokumen print out Risalah Rapat Minutes of Meeting Arkitek Team Empat.
500. 1 (satu) buah buku tulis Big Boss warna merah muda bermotif garis dengan tulisan "[build on:your hope]".
501. 1 (satu) bundel dokumen Rekaman Data Biaya Penawaran Pengadaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011.
502. 1 (satu) lembar copy Rincian Penerimaan Proyek PT. Arkitek Team Empat tahun 2011 tertanggal 31/12/2011.

Hal 277 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503. 1 (satu) lembar copy Surat dengan Kop Surat Arkitek Team Empat no. surat; 239/MZ/06.11 tanggal 27 Juni 2011, perihal Pergantian Personil Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam, TA 2011.
504. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri a/n MAHDIAR ZAMZAMI dengan no. rek: 1210004146480 periode 1 januari 2011 s/d 31 Desember 2012.
505. 1 (satu) bundel copy dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Penerimaan/Saldo Bank periode bulan Januari 2011 s.d. Desember 2011, PT. Arkitek Team Empat.
506. 1 (satu) bundel copy dokumen Penerimaan/Saldo Bank periode bulan Januari 2012 s.d. Desember 2012 PT. Arkitek Team Empat.
507. 1 (satu) bundel copy Rekening Giro Bank BNI Cabang Harmoni No. Rekening: 0018305425 a.n. Arkitek Team Empat Periode: 01/01/2011 s/d. 31/12/2011.
508. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Giro Bank Mandiri KC Jkt Kebon Sirih No. Rekening: 121-00-0207130-0 a.n. PT Arkitek Team Empat periode: 1/01/11 s.d. 31/12/11.
509. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Giro Bank Mandiri No. Rekening: 121-00-0207130-0 a.n. PT Arkitek Team Empat Periode: 1/01/12 s/d. 31/12/12.
510. 1 (satu) bundel copy Laporan Transaksi Bank BRI cabang Veteran No. Rekening: 03290100976306 a.n. Arkitek Team Empat periode 02 Desember 2011 s.d. 31 Mei 2012, 01 Juli 2012 s.d. 31 Agustus 2013, 01 Oktober 2013 s.d. 28 Februari 2014.
511. 1 (satu) bundel copy Laporan Transaksi Bank BRI cabang Tanah Abang No. Rekening: 001801000493301 a.n. Arkitek Team Empat PT. Periode Transaksi: 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012 dan 01 Januari 2014 s.d. 28 Februari 2014.
512. 1 (satu) bundel copy Gaji Karyawan PT. Arkitek Team Empat Bulan : Januari 2011 s.d. Desember 2011.
513. 1 (satu) bundel copy Gaji Karyawan PT. Arkitek Team Empat Bulan : Januari 2012 s.d. Desember 2012.
514. 1 (satu) bundel dokumen Pra-Kualifikasi Seleksi Umum Pengadaan Jasa Konsultasi Nomor 001/PRA/KK/KDN/III/2011 tanggal 16 Maret 2011, Paket Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat.

Hal 278 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



515. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1210002071300, atas nama PT. Arkitek Team Empat periode 1 November 2010 s.d. 31 Desember 2012.
516. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0018305425 atas nama PT. Arkitek Team Empat periode 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2011 beserta lampirannya.
517. 1 (satu) bundel print out rincian penerimaan proyek PT Arkitek Team Empat tahun 2011 beserta lampirannya.
518. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Arkitek Team Empat Per Tanggal 31 Desember 2012 Tahun 2012
519. 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat Surat Nomor: 239/MZ/06.11 perihal Pergantian Personil Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011 tanggal 27 Juni 2011
520. 1 (satu) lembar Reakpitulasi Prestasi Mingguan Kemajuan Pekerjaan periode 11 tanggal 2 Desember s.d. 8 Desember 2011 Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam.
521. 1 (satu) bundel Reakpitulasi Prestasi Mingguan Kemajuan Pekerjaan periode minggu 1 s.d. minggu ke 7, Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam.
522. 2 (dua) lembar surat Undangan Nomor: 005/1157/PAKPA/VIII/2011 Tanggal 19 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Ir. Dudy Jocom4
523. 4 (empat) lembar Surat Sanggahan Nomor : 522/NK.WI/TEKMAS/06/2011 tanggal 28 Juni 2011 yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan jasa Konsultasi di Lingkungan Setjen Kemendagri dan ditandatangani oleh Rachman, ST, MM General manager Wilayah I PT. Nindya Karya
524. 1 (satu) lembar surat Nomor: 418/NZ/11.11 tanggal 11 November 2011 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Arkitek Team Empat, Ir. Mahdiar Zamzami.
525. 1 (satu) lembar surat Nomor: 025/AT-4/XI/IPDN/2011 perihal evaluasi pelaksanaan tanggal 8 November 2011 yang ditandatangani oleh team leader PT. Arkitek Team Empat, Ir. Dadang Pratisto.
526. 1 (satu) lembar surat Nomor:005/1628/PAKPA/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Pengelolaan Aset Kepala Bidang Pengelolaan Barang
Milik Negara Arya Sumbayak, SH, MM

527. 1 (satu) bundel copy cek BRI No. Cek CEW 085999 s/d 086000, cek Bank mandiri NO. Cek FI 379639 s.d. 379642 beserta lampirannya
528. 1 (satu) bundel dokumen gambar "KEYPLAN" kampus IPDN Baso Sumatera Barat, Konsultan Managemen Konstruksi PT. Artefak Arkindo.
529. 1 (satu) bundel surat nomor 418/IPDN/DIV.1.BK/X/2011 perihal konversi tiang pancang 300x300 menjadi 250x250 tanggal 13 Oktober 2011, konsultan perencanaan PT. Bina Karya beserta lampirannya.
530. 1 (satu) bundel dokumen pelelangan nomor 96/PU/KK/KDN/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat TA 2011.
531. 1 (satu) bundel dokumen pemilihan Manajemen Konstruksi Nomor 026/SU/KK/KDN/IV/2011 tanggal 18 April 2011, Paket Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat.
532. 1 (satu) bundel map berwarna biru bertuliskan "IPDN" yang berisi dokumen diantaranya "rencana pengajuan penagihan".
533. 1 (Satu) bundel dokumen berisikan slip Bukti Pembayaran/Penerimaan terkait IPDN Baso B. Tinggi Padang, PT. Arkitek Team Empat
534. 1 (satu) bundel dokumen Rapat Kordinasi Proyek IPDN Sumatera Barat Pekerjaan Perencanaan Hari Selasa Tanggal 15-11-2011 Jam 11.30 s.d. 18.45 tempat R. Rapat Manajemen Konstruksi
535. 1 (satu) bundel print out yang bertuliskan IPDN Baso, Agam, manajemen Konstruksi Cost Plan dst. Dimana didalamnya berisikan juga copy Cek Bank Rakyat Indonesia Nomor Cek : CEW 085987 s/d CEW 085990 serta copy cek BNI Nomor : CR 691622 s/d 691623
536. 1 (satu) lembar print out rekapitulasi pengeluaran rapat IPDN.
537. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pemilihan Manajemen Konstruksi Nomor : 026/SU/KK/KDN/IV/2011 Tanggal 18 April 2011 Paket Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011
538. 1 (satu) buku berwarna coklat merk "Spiral Note" yang pada sampul depan terdapat tulisan tangan.

Hal 280 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

539. 1 (satu) bundel Map merah yang bertuliskan Masjid IPDN Baso didalamnya terdapat gambar Denah bangunan Masjid dan catatan Masjid IPDN 840 m² = 672 OR, dst.
540. 1 (satu) bundel asli rekening Koran Bank Mandiri KCP Jkt D.I. Panjaitan PT. Bina Karya (Persero) nomor rekening 006-00-0040525-2 periode Januari sampai dengan Desember 2011
541. 1 (satu) bundel asli Tabel Monitoring Proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Propinsi Sumatera Barat Kode Proyek 1431 Divisi I PT. Bina Karya (Persero) Tahun 2010 beserta dokumen pendukung
542. 1 (satu) bundel asli Tabel Monitoring Proyek Perencanaan Pembangunan Gedung IPDN Propinsi Sumatera Barat Di Kabupaten Agam. Kode Proyek 1486 Divisi I PT. Bina Karya (Persero) Tahun 2011 beserta dokumen pendukung
543. 1 (satu) bundel copy Laporan Semester I Divisi I (Bangunan dan Lingkungan) PT. Bina Karya (Persero) Tahun 2011 beserta Laporan Bulanan Divisi I (Bangunan dan Lingkungan) PT. Bina Karya (Persero) Periode Bulan Agustus sampai dengan Desember 2011
544. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 16/01/2014 senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan nama penerima MOHAMMAD NOVAL no. Rekening Bank Mandiri 123.00.0460956.8
545. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 21/04/2015 senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nama penerima YUDHI MUHAMMAD FAUZI no. Rekening Bank mandiri 900-00-2716865-8
546. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 19/09/2014 senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan nama penerima MOHAMMAD NOVAL no. Rekening Bank Mandiri 123.00.0460956.8
547. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI tanggal 24/06/2014 senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan nama penerima MOHAMMAD NOVAL SL no. Rekening Bank BNI 0666888963
548. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI tanggal 13/02/2014 senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan nama penerima MOHAMMAD NOVAL SL no. Rekening Bank BNI 0666888963
549. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BCA tanggal 6/2/2014 dengan catatan 1062261972 dengan nama penerima dan no rekening tidak terbaca

Hal 281 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tanggal 06 Feb 2014 dengan nama penerima MOHAMMAD NOVAL no. Rekening Bank BCA 1062261972
551. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Desember 2011 senilai lima ratus ribu rupiah diterima dari Tn. Ir. MOHAMMAD NOVAL SLABADJO untuk pembayaran Biaya Legislasi No : 382/L/2011 Tanggal 21 Desember 2011 (surat persetujuan dan kuasa) dan Fotocopy sesuai asli dengan tanda tangan Notaris REFIZAL, S.H., M.Hum
552. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI tanggal 10/11/2014 senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan nama penerima YAYASAN CIPTAVISI KARYA KREASI dengan no. Rekening Bank BCA 505.501.8020 dengan pengirim MOHAMMAD NOVAL no. Rekening BNI 0666888963
553. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cab. Pecenongan No. Rekening: 0324050704 atas nama Bpk. MOHAMMAD NOVAL SL
554. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cab. Pecenongan No. Rekening: 0666888963 atas nama Bpk. MOHAMMAD NOVAL SL
555. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI tanpa identitas dan tanpa nomor rekening, periode awal tanggal 08/05/12 no buku C.6714011
556. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI tanpa identitas dan tanpa nomor rekening, periode awal tanggal 22/11/13 no buku C9632330
557. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Cabang Pintu Air No. Rekening 1062261972 atas nama MOHAMMAD NOVAL SL IR
558. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega Cabang Cikini NO. Rekening 01-035-00-20-31614-8 no. Seri AA 015655 atas nama Ir. MOHAMMAD NOVAL S L
559. 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Nomer rekening 115-00-0409735 -0 Kc Jakarta Mangga Besar 14/10/2003 1150321 atas nama Muhammad Noval S.L, IR QQ Nurul Jihan Khairunnissa Perum Jati Negara Baru Jl. Taman Sari V No. 22 Rt. 003 Rw. 016 Penggilingan.
560. 1 (satu) buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri Nomer rekening 123-00-0460956 -8 Kcp Kramat Raya 12303 tgl Cetak 05/09/2013 atas nama Ir. Muhammad Noval S.L Jl. Kramat IV No. 14 Rt 005 Rw 009 Senen Kwitang Jakarta 10420.
561. 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri tanpa identitas dan tanpa Nomer rekening, periode awal tanggal 12/09/06 saldo 500,000.00.

Hal 282 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

562. 1(satu) buku Tabungan Bank Mandiri tanpa identitas dan tanpa Nomer rekening, periode awal tanggal 24/08/11 saldo 25,619,851.36.00.
563. 1(satu) buku Tabungan BRI Britama Nomer rekening 0329-01-025513-50-1 Cabang 0329 Jakarta Veteran tgl 21 April 2015 atas nama Muhammad Noval Jl. Kramat IV Kel Kwitang Kec Senen Jakarta Pusat tanda pengenalan KTP 3175060702720005 Nomer buku 17855802.
564. 1(satu) buku Tabungan BRI Britama tanpa Identitas dan tanpa Nomer rekening Cabang 0329 Kanca BRI JKT Nomer Buku 1934580.
565. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama RAHADI WIYANTO Nomor Rekening : 1270005673213 periode 01/01/2011 s.d. 31 Juli 2013
566. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama HUSAIN REDWIN NURLETTE Nomor Rekening : 1170004152047 periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2014
567. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama HUSAIN REDWIN NURLETTE Nomor Rekening : 1650000067133 periode 01/01/2011 s.d. 31/07/2013
568. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama CV PRIMA KARYA SENTOSA Nomor Rekening : 1640000405334 periode 17/11/2011 s.d. 31/01/2013
569. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama MUSLIM Nomor Rekening : 1080002392612 periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2013
570. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama MUSLIM qq BIN SYUKUR Nomor Rekening : 1110005234501 periode 02/02/2011 s.d. 25/10/2011
571. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama MUSLIM Nomor Rekening : 1110005802430 periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2013
572. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama JOKO TRIMANTO Nomor Rekening : 1110004566085 periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2013
573. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama SUDISWAR Nomor Rekening : 1110006176149 periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2013

Hal 283 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



574. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama EKA SAPUTRA Nomor Rekening : 1110006214809 periode 19/10/2011 s.d. 31/01/2013
575. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama DASRIL KATIK MUDO Nomor Rekening : 1110006182337 periode 14/09/2011 s.d. 31/12/2015
576. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama Eko Santoso, nomor rekening 32901018786503, periode 3 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2014
577. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama Mohammad Noval, nomor rekening : 32901008903501, periode 3 Januari 2011 s.d. 28 Desember 2014
578. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama Sugeng Gunawan, nomor rekening 3290100890303505, periode 3 Januari 2011 s.d. 30 Desember 2014
579. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama Kasdan, nomor rekening 32901027350501, periode 2 Januari 2011 s.d. 20 Desember 2014
580. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama PT. Arkitek Team Empat, nomor rekening 1801000493301, periode 25 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2014
581. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama PT. Arkitek Team Empat, nomor rekening 32901002976306, periode 14 Desember 2011 s.d. 25 Februari 2014
582. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama Mohammad Noval S.L Nomor Rekening : 1230004609568 periode 01/01/2011 s.d. 31 Desember 2014
583. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama SUGENG GUNAWAN nomor rekening 1190006326464 periode 14/08/2012 s.d. 31/12/2014
584. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama ARKITEK TEAM EMPAT Nomor Rekening : 121000207300 periode 01/01/2011 s.d 31/12/2014
585. 1 (satu) bundel copy dokumen Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Pengadaan Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung kampus IPDN Regional di Kab. Agam, Sumatera Barat tahun Anggaran 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

586. 3 (tiga) lembar Surat Nomor 011/273.A/PAKPA/V/2010 tanggal 5 Mei 2010, perihal Persetujuan Penetapan Pemenang Pelelangan yang ditandatangani oleh DR. Rizari, MBA, Msi, selaku PPK Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelola Asset Kemendagri, beserta lampirannya.
587. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian pekerjaan manajemen konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat Nomor 011/317/PKPA/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan PT. Artefak Arkindo
588. 1 (satu) bundel dokumen Pembangunan Kampus IPDN – Kabupaten Agam Bukit Tinggi – Sumatera Barat, Tahun Anggaran 2010
589. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan – Laporan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Tahap Perencanaan – Pembangunan Gedung Kampus IPDN Propinsi Sumatera Barat, Tahun Anggaran 2010.
590. 1 (satu) bundel copy Penelitian tanah dengan alat bor mesin Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Regional Kabupaten Agam-Sumbar Tahun Anggaran 2010 bulan September 2010
591. 1 (satu) bundel copy Laporan bulanan divisi I Bulan Desember 2010 PT. Bina Karya (Persero)
592. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pekerjaan Struktur dan Infrastruktur Proyek Pembangunan Kampus IPDN Baso – Sumatera Barat Tahap 1 Tahun Anggaran 2010
593. 1 (satu) lembar asli Rencana Anggaran Pelaksanaan Proyek (RAPP) Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Regional Bukit Tinggi Jangka Waktu Mei 2010 sampai dengan Desember 2010 tertanggal 16 Agustus 2010 beserta 1 (satu) lembar asli perincian RAPP-nya
594. 2 (dua) lembar asli Rencana Anggaran Pelaksanaan Proyek (RAPP) Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Regional Bukit Tinggi Jangka Waktu Mei 2010 sampai dengan Desember 2010 tertanggal 25 Juni 2010 beserta 2 (dua) lembar asli perincian RAPP-nya
595. 1 (satu) odner warna hitam berisikan dokumen Bukti Kasbon Proyek Kampus IPDN Sumatera Barat
596. 1 (satu) odner warna hitam berisikan dokumen Buku Harian Gudang Penerimaan P4 B/P4 Logistik Proyek IPDN Baso

Hal 285 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

597. 1 (satu) odner warna hitam berisikan dokumen Buku Harian Gudang
Penerimaan Nomor odner GB-8401 F
598. 1 (satu) odner warna hitam berisikan dokumen Persediaan Bahan,
Alat, SPK Satuan Kerja Adm. Keuangan Kampus IPDN Bukittinggi
599. 1 (satu) odner warna hitam berisikan dokumen Bukti Pembayaran
Subkon (Bank) Proyek Kampus IPDN Sumatera Barat
600. 1 (satu) odner warna hitam berisikan dokumen Catatan KAS IPDN
Baso - (01) GB401F
601. 1 (satu) odner warna hitam berisikan dokumen Bukti Kerja Daftar
Rekanan Terseleksi/Terpilih Satuan Kerja Logistik Proyek IPDN Baso
602. 1 (satu) odner warna hitam berisikan dokumen Catatan Kas Proyek
IPDN Baso - (02) GB401F
603. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Bukti Kasbon
Pertanggungjawaban Peti Kas
604. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Tanda Terima Barang
Logistik
605. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Catatan Peti Kas
Proyek IPDN (01)
606. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen SPK Mandor/Opname
Proyek IPDN
607. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Bukti Kerja Kas Proyek
IPDN Baso Padang Sumatera Barat- BKK 01-53
608. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Bukti Kerja Kas Proyek
Kampus IPDN Baso Padang Sumatera Barat - BKK 692 - 759
609. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Catatan Peti Kas
Proyek IPDN (02)
610. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Catatan Peti Kas
Proyek IPDN (03)
611. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Catatan Peti Kas
Proyek IPDN (04)
612. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Bukti Kerja KAS,
Proyek Kampus IPDN - Baso Padang Sumatera Barat BKK 192 - BKK
238
613. 1 (satu) odner warna Hitam berisikan dokumen Bukti Kerja KAS,
Proyek Kampus IPDN - Baso Padang Sumatera Barat BKK 365 - BKK
435

Hal 286 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



614. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "BUTING (3) " berisikan dokumen pembayaran subkon/supplier PT. Utama Karya.
615. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "Bukti Nop-Des 2011" berisikan dokumen pembayaran subkon/supplier PT. Utama Karya.
616. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "IPDN BUTING 3" berisikan dokumen pembayaran subkon/supplier PT. Utama Karya
617. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "SPJB IPDN BUKIT TINGGI" yang terdiri dari : CV. Trijaya, PT. Kredo, PT. Aneka Cipta, PT. Baskara, PT. Dwi Prima, PT. Cijete, PT. Sinarindo, PT. Dwijaya Selaras, PT. Petro, PT. Indokeramikatana Tahun 2011-2012 dengan Kode : BT-1
618. 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan "SPB & PO IPDN BUTING SD/LOG/P/001 TEKNIK 2011-2012 KODE BT-1"
619. Satu bundel dokumen terdiri dari:
- 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Direksi PT Utama Karya (Persero) Nomor:2312/KPTS/78/2008 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat-Pejabat PT Utama Karya (Persero) tanggal 13 Oktober 2008 yang di antaranya berisikan keterangan mengangkat Ir. BUDI RACHMAT KURNIAWAN dari Wakil General Manager Divisi Gedung pada Direktorat I menjadi Pj. General Manager Divisi Gedung pada Direktorat I PT Utama Karya (Persero) di Jakarta.
 - 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Direksi PT Utama Karya (Persero) Nomor: 942/KPTS/29/2009 tentang Pengangkatan Status Jabatan Pejabat PT Utama Karya (Persero) tanggal 12 Juni 2009 yang di antaranya berisikan keterangan mengangkat Ir. BUDI RACHMAT KURNIAWAN dari Pj. General Manager Divisi Gedung PT Utama Karya (Persero) di Jakarta menjadi General Manager Divisi Gedung PT Utama Karya (Persero) di Jakarta" beserta 2 (dua) lembar lampiran "Job Description" Jabatan General Manager Divisi
620. 1 (satu) bundel copy Prosedur Prakualifikasi Tender PT. Utama Karya diterbitkan tanggal 29/03/2010.
621. 1 (satu) bundel copy Prosedur Rapat Eksekutif Marketing (REM) PT. Utama Karya diterbitkan tanggal 29/03/2010.
622. 1 (satu) bundel copy Prosedur Perintisan Proyek PT. Utama Karya diterbitkan tanggal 29/03/2010.

Hal 287 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

623. 1 (satu) bundel copy Prosedur Manajemen Kegiatan Pemasaran PT. Utama Karya diterbitkan tanggal 29/03/2010.
624. 1 (satu) bundel copy Prosedur Pelaksanaan PT. Utama Karya diterbitkan tanggal 29/03/2010.
625. 1 (satu) bundel copy Prosedur Karya Rampung PT. Utama Karya diterbitkan tanggal 29/03/2010.
626. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank BNI a.n. PT. YULIAN BERKAH ABADI No. Rek. 0096249910 periode 1 Oktober 2011 s.d. 31 Desember 2011.
627. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2006 s/d Desember 2006.
628. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2007 s/d Agustus 2007 dan Oktober 2007 s/d Desember 2007.
629. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2008 s/d Desember 2008.
630. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2009 s/d Desember 2009.
631. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2010 s/d Desember 2010.
632. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2011 dan Maret 2011 s/d Desember 2011.
633. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2012 s/d Desember 2012.
634. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2013 s/d Desember 2013.
635. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI atas nama PT Yulian Berkah Abadi, No. Rek.0096249910 periode Januari 2014 s/d Oktober 2014.
636. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan No (kosong) PT Utama Karya Divisi Gedung U/ Proyek Apartemen Sentra Timur, tertanggal 27 Oktober 2014 beserta 2 (dua) lembar tindasannya.
637. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Emmy Marlina Simanjuntak, SH tentang Pendirian PT Yulian Berkah Abadi tanggal 28 Oktober 2005.
638. 1 (satu) lembar rekening koran BNI dengan nomor account 0096249910 atas nama PT Yulian Berkah Abadi periode transaksi bulan September 2007.

Hal 288 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



639. 1 (satu) lembar rekening koran BNI dengan nomor account 0096249910 atas nama PT Yulian Berkah Abadi periode transaksi bulan 03 November 2014 sampai dengan 8 Desember 2014.
640. 1 (satu) lembar rekening koran BNI dengan nomor account 0096249910 atas nama PT Yulian Berkah Abadi periode transaksi bulan Februari 2011.
641. 1 (satu) bundel fotokopi cek BNI beserta tanda terimanya dengan nomor cek sebagai berikut:
- CX836259, tanggal 29 Februari 2012.
 - CX836252, tanggal 22 Februari 2012.
 - CX836254, tanggal 20 Februari 2012.
 - CX836253, tanggal 21 Februari 2012.
 - CX836256, tanggal 15 Februari 2012.
 - CX836255, tanggal 18 Februari 2012.
 - CX836251, tanggal 12 Februari 2012.
 - CX836247, tanggal 04 Februari 2012.
 - CX836245, tanggal 06 Februari 2012.
 - CX836246, tanggal 05 Februari 2012.
 - CX054852, tanggal 30 November 2011.
 - CX054870, tanggal 27 Januari 2012.
 - CX054505, tanggal 31 Oktober 2011.
642. 1 (satu) lembar copy kertas yang terdiri 2 atas dua buah copy dokumen yakni : 1 (satu) lembar kwitansi dari PT Yulian Berkah Abadi senilai Rp.77.046.000,00 tertanggal 25 Januari 2012 dan 1 (satu) lembar copy cek BNI dengan nomor CX 054870 tertanggal 27 Januari 2012 senilai Rp.42.881.600,00.
643. 3 (tiga) lembar copy Cek Bank BNI terdiri atas Cek BNI nomor CX 836247 tertanggal 4 Februari 2012 senilai Rp. 300.013.754,00, Cek BNI nomor CX 836245 tertanggal 6 Februari 2012 senilai Rp.380.000.000,00, dan Cek BNI nomor CX 836246 tertanggal 5 Februari 2012 senilai Rp.335.000.000,00.
644. 1(satu) lembar copy Cek Bank Mandiri dengan nomor FG 952078 senilai enam ratus dua puluh lima juta rupiah (Rp.625.000.000,00) tertanggal 18 Januari 2012.
645. 1(satu) lembar copy Cek Bank Mandiri dengan nomor FG 952079 senilai lima ratus juta rupiah (Rp.500.000.000,00) tertanggal 20 Januari 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

646. 2 (dua) lembar copy Cek Bank Mandiri dengan nomor FG 952080 dan FG 952081 senilai masing masing tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah (Rp.742.810.500,00) tertanggal 18 Januari 2012.
647. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX054505 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 28.000.000,- tanggal pencarian 31 Oktober 2011.
648. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX836256 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 360.000.000,- tanggal pencarian 24 Februari 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa copy identitas pencair.
649. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX836255 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 340.000.000,- tanggal pencarian 24 Februari 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair.
650. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX836245 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 380.000.000,- tanggal pencarian 6 Februari 2012.
651. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX836246 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 335.000.000,- tanggal pencarian 6 Februari 2012.
652. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX054501 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 300.000.000,- tanggal pencarian 28 Oktober 2011, beserta 1 lembar lampiran berupa copy identitas pencair.
653. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX054504 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 472.000.000,- tanggal pencarian 28 Oktober 2011, beserta 1 lembar lampiran berupa copy identitas pencair.
654. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CV116480 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 600.000.000,- tanggal pencarian 27 Oktober 2011, beserta 1 lembar lampiran berupa copy identitas pencair.
655. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX836247 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 300.013.754,- tanggal pencarian 07 Februari 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa copy identitas pencair.
656. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX836252 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 300.000.000,- tanggal pencarian 23 Februari 2012.

Hal 290 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

657. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX836253 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 475.000.000,- tanggal pencarian 23 Februari 2012.
658. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX836254 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 300.000.000,- tanggal pencarian 23 Februari 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair.
659. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CA915402 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 191.805.000,- tanggal pencarian 06 Maret 2012.
660. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX054870 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 42.881.600,- tanggal pencarian 06 Maret 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair.
661. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CA915421 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 640.610.000,- tanggal pencarian 09 Mei 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair.
662. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CA915420 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 197.198.400,- tanggal pencarian 10 Mei 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair.
663. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CA915424 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 25.000.000,- tanggal pencarian 29 Mei 2012, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair.
664. 1 (satu) lembar asli cek BNI Nomor CX054852 atas nama PT. Yulian Berkah Abadi, nominal Rp 330.000.000,- tanggal pencarian 30 November 2011, beserta 1 lembar lampiran berupa identitas pencair.
665. 1 (Satu) Buah buku berukuran folio berwarna biru bertuliskan Register Bank Bukopin Operasional A/C 101.9467.011 Tahun 2012.
666. 1 (Satu) Buah Buku berukuran folio berwarna biru bertuliskan Bukopin
667. 1 (Satu) Buah Buku berukuran folio berwarna hijau tua bertuliskan Bank Mandiri Iskandarsyah A/C 126.000.44.79.324
668. 1 (satu) file odner berwarna biru yang berisi dokumen sebagai berikut:
- a) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Bukopin PT Utama Karya, Div Gedung dengan nomor rekening 1019467011 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
 - b) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Bukopin PT Utama Karya, Div Gedung dengan nomor rekening 1019469014 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.

Hal 291 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Bukopin PT Utama Karya, Div Gedung dengan nomor rekening 1019370018 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
 - d) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Bukopin PT Utama Karya, Div Gedung dengan nomor rekening 1019468018 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
 - e) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jkt Iskandarsyah PT Utama Karya, jl. Iskandarsyah 1/6 Kebayoran Baru Melawai Jakarta 12160 dengan nomor rekening 1260004479324 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
 - f) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jkt Jatinegara Timur PT Utama Karya, jl. Iskandarsyah 1/6 Kebayoran Baru Melawai Jakarta 12160 dengan nomor rekening 0060092009087 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
 - g) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI KCP Jkt Cikajang PT Utama Karya, Wilayah II jl. Iskandarsyah 1/6 Melawai Kebayoran Baru dengan nomor rekening 065101000034303 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
 - h) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BTN Cabang Bekasi PT Utama Karya jl. Iskandarsyah 1 no. 6 Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 dengan nomor rekening 0001601300018227 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
 - i) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Cabang 63 Senayan PT Utama Karya jl. Iskandarsyah 1 no. 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 dengan nomor rekening 0004453322 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
 - j) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Cabang 63 Senayan PT Utama Karya jl. Iskandarsyah 1 no. 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 dengan nomor rekening 0004453286 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
 - k) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank DBS Cabang Thamrin Jakarta PT Utama Karya Divisi Gedung jl. Iskandarsyah 1 no. 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 dengan nomor rekening 3020000356 Periode Bulan Januari s/d Desember 2011.
669. 1 (satu) file odner berwarna biru yang berisi dokumen sebagai berikut:
- a) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran

Hal 292 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1019467011
Periode Bulan Januari s/d Desember 2012.

- b) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT
Hutama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran
Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1019469014 Periode
Bulan Januari s/d Desember 2012.
- c) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT
Hutama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran
Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1019468018 Periode
Bulan Januari s/d Desember 2012.
- d) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT
Hutama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran
Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1019370018
Periode Bulan Januari s/d Desember 2012.
- e) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BTN Cabang Bekasi
milik PT Utama Karya Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru
Jakarta selatan 12160, dengan nomor rekening
0001601300018227 Periode Bulan Januari s/d Desember 2012.
- f) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BRI milik PT Utama
Karya Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan,
dengan nomor rekening 032901002977302 Periode Bulan Januari
s/d Desember 2012.
- g) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BRI milik PT Utama
Karya Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan,
dengan nomor rekening 032901003002304 Periode Bulan Januari
s/d Desember 2012.
- h) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BRI milik PT Utama
Karya Wilayah II KCP Cikajang Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran
Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 065101000034303
Periode Bulan Januari s/d Desember 2012.
- i) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank BNI milik PT Utama
Karya Cabang: 63 Senayan Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran
Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 0271533722
Periode Bulan Oktober s/d Desember 2012.
- j) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Mandiri milik PT Utama
Karya KCP Jkt Iskandarsyah Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran

Hal 293 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 126.00.0447932.4
Periode Bulan Januari s/d Desember 2012.

- k) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Mandiri milik PT Utama Karya KCP Jkt Jatinegara Timur Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 0060092009087 Periode Bulan Januari s/d Desember 2012.

670. 1 (satu) file odner berwarna biru yang berisi dokumen sebagai berikut:

- a) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1019467011 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
- b) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1019469014 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
- c) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1019468018 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
- d) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Bukopin Pusat milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1019370018 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
- e) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 0271533722 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
- f) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Mandiri milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 1260004479324 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
- g) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BRI milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 032901002977302 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
- h) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BRI milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta

Hal 294 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selatan, dengan nomor rekening 032901003002304 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.

- i) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BNI milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 2715337224 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
- j) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BRI milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 065101000034303 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
- k) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Mandiri milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 0060092009087 Periode Bulan Januari s/d Desember 2013.
- l) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro BTN milik PT Utama Karya Divisi Gedung Jl. Iskandarsyah I No 6 Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening 0001601300018227 Periode tanggal 1 Januari s/d 31 Januari 2013.

671.1 (satu) bundel copy Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat, Nomor: 011/837/PAKPA/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010. Ditandatangani oleh Ir. DUDY JOCOM (Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset, Kementerian Dalam Negeri) dan RACHMAN ST, MM. (General Manager Wilayah I PT. Nindya Karya (Persero))

672. 2 (dua) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 910-739 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-2A Tahun 2010 Tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Serta Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010, ditandatangani oleh DIAH ANGGRAENI a.n. Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal tanggal 27 September 2010, beserta 1 (satu) lembar copy lampirannya

673. 2 (dua) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 910-940 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-16 Tahun 2010 tentang Penunjukkan Kuasa

Hal 295 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Tahun Anggaran 2010 di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI, Menteri Dalam Negeri tanggal 15 November 2010 beserta 4 (empat) lembar copy lampirannya

Barang Bukti Elektronik yaitu :

1. 1 (satu) keping CD-RW kapasitas 700 MB, Merk SONY dengan tulisan tangan “ Data SPM BMN Komputer Alm Prihartawan” yang ditandatangani Arya tanggal 1/3-2016, S/N : AK05D131W0419 80B1
2. 1 (satu) keping DVD+R 8X Double Layer kapasitas 240Min/8.5 GB, Merk RITEK, S/N : TEg405144614E09, dengan tulisan “Data IPDN Ibu Yurike” yang ditandatangani Arya tanggal 1/3-2016
3. 1 (satu) Harddisk, Merk: Hitachi, kapasitas: 250 GB, S/N : JP0272J20KV8TM yang diambil dari komputer Tri Adji Bawono di Ruangan Bidang Pengelolaan BMN Lt. 4 Kementerian Dalam Negeri
4. 1 (satu) buah flashdisk berwarna hijau muda, Merk TDK, S/N : 070753ED991F3887 (dilihat dengan USB Deview).
5. (satu) keping DVD dengan merk: Verbatim, S/N: MAPA18RC281219103, kapasitas: 4.7 GB, yang di dapat dari Ruang keuangan dan penguasa barang Sugeng
6. 1 (satu) hard disk dengan merk: Seagate, S/N: 9RXN2YKY, tipe: ST3160215A, kapasitas: 160 GB yang didapat dari ruang keuangan
7. 1 (satu) keping DVD dengan merk: Ritek, S/N: TEg405144036D10, kapasitas: 8.5 GB, yang di dapat dari Ruang Logistik dan penguasa barang Budi Ardianto.
8. 1 (satu) keping DVD dengan merk: Ritek, S/N: TEg405144039A10, kapasitas: 8.5 GB, yang di dapat dari Ruang Logistik dan penguasa barang Kurniati Evilia
9. 1 (satu) keping CD-R dengan merk: Verbatim, S/N: B3131RE04131629LH, kapasitas: 700 MB, yang di dapat dari Ruang Teknik dan penguasa barang Isfiyanto
10. 1 (satu) keping DVD dengan merk: Verbatim, S/N: MAPA18RC281218005, kapasitas: 8.5 GB, yang di dapat dari Ruang pemasaran

Hal 296 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) keping DVD dengan merk: Ritek, S/N: TEg405140246A11, kapasitas: 8.5 GB, yang di dapat dari Ruang Pemasaran dan penguasa barang Anton
12. 1 (satu) buah hardisk 3,5" Merek SEAGATE BARRACUDA, Type ST3250318AS, S/n: 6VMDZTL6, Kapasitas 250GB, yang digunakan oleh BAMBANG SUDIBYO.
13. 1 (satu) buah hardisk 3,5" Merek SEAGATE BARRACUDA, Type ST3250318AS, S/n: 6VMAM19Z, Kapasitas 250GB, yang digunakan oleh YUSNITA VERA WATI.
14. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan S/n: A3131RE04112693LH, kapasitas 700MB yang berisi data Keuangan Catatan Kas dan Bank tahun 2010 s/d 2012 PT.BINA KARYA, yang diperoleh dari komputer kasir yang digunakan dan ditandatangani oleh Ibu RIKA ROLA
15. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan S/n: A3131RE04131508LH, kapasitas 700MB yang berisi data Keuangan Buku Besar (GL) tahun 2010 s/d 2014 PT.BINA KARYA, yang diperoleh dari komputer Akuntansi yang digunakan dan ditandatangani oleh FIRLI RANSYAH
16. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan S/n: A3131RE04131500LH, kapasitas 700MB yang berisi File-File dari hasil pencarian dengan kata kunci "IPDN" yang diperoleh dari komputer yang digunakan oleh IWAN.
17. 1 (satu) keping CD dengan merk: Verbatim, S/N: A3131RE04063229LH, kapasitas: 700 MB, penguasa barang Ratna Juwita bagian administrasi.
18. 1 (satu) keping CD dengan merk: Verbatim, S/N: N129RD26D8100092C1, kapasitas: 700 MB, bertuliskan CCO GEDUNG KAMPUS IPDN PROVINSI SUMATERA BARAT KABUPATEN AGAM 22052015 – YOSI.
19. 1 (satu) keping CD dengan merk: Verbatim, S/N: N129RD26D8100093E2, kapasitas: 700 MB, bertuliskan ASBUILT + CCO IPDN BASO.
20. 1 (satu) keping DVD dengan merk: Verbatim, S/N: MAPA07RC26191913, kapasitas: 4.7 GB, yang didapat dari ruang administrasi akunting.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) keping DVD dengan merk: Verbatim, S/N: MAPA18RC281221536, kapasitas: 4.7 GB, yang didapat dari ruang administrasi akunting.
22. 1 (satu) keping DVD dengan merk: RITEK, S/N: 1Eg405143633S10, kapasitas: 8.5 GB, yang didapat dari ruang studio designer.
23. 1 (satu) buah Ipad warna silver hitam dengan casing BELK warna hitam kapasitas 64 GB model A1430 IMEI 013314001854108 Serial DMPJP00YDVGJ
24. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia MODEL 225 warna kuning TYPE RM-1011 IMEI 1 353672060388286 IMEI 2 353672060388294 tanpa SIM CARD dan tanpa MEMORY CARD
25. 1 (satu) buah Harddisk Eksternal merk SMART DRIVE, model no: HD3-SU2, S/N: 0836851, yang di dalamnya terdapat Harddisk 2.5 inchi merk FUJITSU, model: MHZ2160BH G2, S/N: K60HT872ANWG, kapasitas: 160 GB, beserta dengan kabel data dan cover harddisk warna hitam bertuliskan DPR.
26. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Bold 9790 warna hitam, model: REC71UW, IMEI: 359201040965247, PIN: 28CB3A52, tanpa SIM Card dan tanpa Memory Card
27. 1 (satu) keping DVD-R Merk Verbatim, S/N : MAPA07RC270440392 berisi data dari laptop milik DADANG PRASTITO yang ditandatangani ENNY DEWI ANGGRAINI tanggal 02-03-2016.
28. 1 (satu) buah CD yang bertuliskan "File Kontrak" yang berisikan:
 - 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Gatrindo Baja Gerbang".
 - 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Gatrindo GRC".
 - 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Excel nama "ipdn sumbar".
 - 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Jagat Aluminium".
 - 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Job Metal Plafond".
 - 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Mandiri Plafond".
 - 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Pengadaan Baja".

Hal 298 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Prima Karya area asrama".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Prima Karya Infra".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Prima Karya InfrastrukturAdm".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Proteksindo Cat".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "RESTU InfrastrukturAdm".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Sakha Baja".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Sinarindo baja".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Sinarindo JB Baja".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "sumarto-Patung".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "Surya Baja Angkutan".
- 1 (satu) buah softcopy dokumen dalam bentuk file Microsoft Word nama "YULIAN AREA PERPUS".

29. 1 (satu) buah DVD-R merk Verbatim, SN : MAPA24TC27011199, bertuliskan "History Cash Flow Bukit Tinggi" yang didalamnya terdapat file "History Cash Flow Bukit Tinggi 2011 s.d. 2014_Pie Chart.xlsx"

30. 1 (satu) buah Bluray Disc merk Maxell S/N : BRF663RL 8 RB L3 yang didalamnya terdapat file dengan nama "Outlook Data File - ate.pst", dengan kapasitas : 8.745.737 KB. (nilai MD5 Hash dari file tersebut adalah b310826bc959e8a341e320d012b3f2fc & SHA1 HASH: 896f48eca3ccf9f45214cac85cd80c61972727a6e4

31. 1 (satu) keping CD-R plus dengan tulisan IPDN Sumbar I RAB

32. 1 (satu) keping CD-R plus dengan tulisan IPDN Sumbar II GAMBAR

33. 1 (satu) buah DVD-R merk Verbatim, SN : MAPA24TC27011101, dengan tulisan "Petty Kas IPDN Bukit Tinggi," yang di dalamnya berisi file excel dengan nama "Rekap 2011 dan 2012."

Hal 299 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) buah Hard Disk Merk Seagate Model ST9500420AS Nomor Seri : 5VJ99LLB Kapasitas 500 GB diambil dari Laptop Andri Budi Setyawan.
35. 1 (satu) buah Hard Disk Merk Seagate Model ST1000DM003 Nomor Seri : Z1D4LJNL Kapasitas 1000 GB diambil dari PC Server Akuntansi
36. 1 (satu) buah Hard Disk Merk Seagate Model ST3160021A Nomor Seri : 4JS26FSM Kapasitas 160 GB diambil dari Komputer Kasir
37. 1 (satu) buah Hard Disk Merk Seagate Model ST340014A Nomor Seri : 5MQ0EBAJ Kapasitas 40 GB diambil dari komputer PC Ruang Logistik lantai 2.
38. 1 (satu) buah Hard Disk Merk Hitachi model HDT721016SLA380 Nomor Seri : MB2SRB6B Kapasitas 160 GB diambil dari ruangan Administrasi dan Akutansi.
39. 1 (satu) buah Hard Disk WD 640GB, S/N : WX41A21H3299 yang digunakan oleh R. Soetanto
40. 1 (satu) buah Hard Disk WD 1.0 TB, S/N : WX41E44LND88 yang digunakan oleh NGATIJO.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara BUDI RACHMAT KURNIAWAN ;

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, oleh kami : DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH selaku Ketua Majelis, I. NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH Hakim Tinggi dan ACHMAD YUSAK, S.H.MH, Hakim-Hakim Tinggi, dan HENING TYASTIYANTO, S.H., CN, dan Drs.H. RUSYDI, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Januari 2019 Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Hal 300 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta RISTIARI CAHYANINGTYAS S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Pensehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

I.NYOMAN ADI JULIASA, SH.M.H

DANIEL DALLE PAIRUNAN,S.H.M.H

ACHMAD YUSAK, SH.MH,

HENING TYASTIYANTO,S.H.,CN

Drs. H.RUSYDI,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RISTIARI CAHYANINGTYAS S.H., M.H

Hal 301 Putusan. No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)